

**STUDI KOMPARATIF
PEMIKIRAN SIYĀSAH SYAR'IYYAH
BADI' UZZAMĀN SA'ĪD NURSI DENGAN
PEMIKIRAN POLITIK PRESIDEN SOEKARNO**



Oleh:

Umarulfaruq Abubakar
NIM: 15923004

DISERTASI

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA

2021

**STUDI KOMPARATIF
PEMIKIRAN SIYĀSAH SYAR'IYYAH
BADI' UZZAMĀN SA'ĪD NURSI DENGAN
PEMIKIRAN POLITIK PRESIDEN SOEKARNO**



Oleh:
Umarulfaruq Abubakar
NIM: 15923004

Promotor :
Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A.

Co-Promotor:
Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

DISERTASI

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umarulfaruq Abubakar
NIM : 15923004
Program Doktor : Hukum Islam
Judul Disertasi : STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN SIYĀSAH
SYAR'IIYAH BADI' UZZAMĀN SA'ĪD NURSI
DENGAN PEMIKIRAN POLITIK PRESIDEN
SOEKARNO

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Oktober 2021
Yang menyatakan,



Umarulfaruq Abubakar

PENGESAHAN REKTOR



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : doctorate.islamic.uui.ac.id
Email: dhi@uui.ac.id

NOTA DINAS

No. : 154/Kaprodi.HI-S3/20/Prodi.HI-S3/X/2021

Disertasi berjudul : **STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN SIYĀSAH SYAR'IYYAH BADI'UZZAMĀN SA'ĪD NURSI DENGAN PEMIKIRAN POLITIK PRESIDEN SOEKARNO**

Ditulis Oleh : Umarulfaruq Abubakar

NIM : 15923004

Prodi : Hukum Islam Program Doktor

Berdasarkan surat dari Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi dan setelah diperiksa dengan cermat hasil revisi pada ujian Tertutup Disertasi, maka dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Oktober 2021
Ketua,

Dr. Drs. YUSDANI, M.A.G.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM



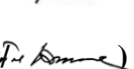

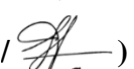


Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR

Website : doctorate.islamic.uui.ac.id
Email: dhi@uui.ac.id

DEWAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI DOKTOR

Nama : Umarulfaruq Abubakar
Tempat/tgl.lahir : Tilamuta, 30 Juni 1985
N. I. M. : 15923004
Konsentrasi : Doktor Hukum Islam
Judul Disertasi : **STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN SIYĀSAH SYAR'IIYAH BADI'UZZAMĀN SA'ĪD NURSI DENGAN PEMIKIRAN POLITIK PRESIDEN SOEKARNO**

Ketua	: Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.	(tgl, 25/10 )
Sekretaris	: Dzulkifli H. Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D	(tgl 25/10 )
Promotor	: Prof. Dr. Faisal Ismail, MA..	(tgl. 25/10 )
Co Promotor	: Prof. Dr. Kamsi, MA.	(tgl 25/10 )
Penguji	: Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag..	(tgl, 25/10 )
Penguji	: Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.	(tgl, 25/10 )
Penguji	: Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.	(tgl. 25/10 )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2021

Pukul : 13.00–15.00 WIB

Hasil / Nilai : Lulus

Mengetahui
Ketua Program Studi DHI FIAI UII



Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag

PENGESAHAN PROMOTOR

Judul : STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN SIYĀSAH
SYAR'IIYAH BADI'UZZAMĀN SA'ĪD NURSI
DENGAN PEMIKIRAN POLITIK PRESIDEN
SOEKARNO
Nama : Umarulfaruq Abubakar
NIM : 15923004
Program : Doktor Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 25 Oktober 2021

Mengetahui,
Ketua Prodi DHI, FIAI, UII



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

Promotor,



Prof. Dr. Faisal Ismail, MA

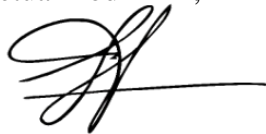
PENGESAHAN CO-PROMOTOR

Judul : STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN SIYĀSAH
SYAR'IYYAH BADI'UZZAMĀN SA'ĪD NURSI
DENGAN PEMIKIRAN POLITIK PRESIDEN
SOEKARNO
Nama : Umarulfaruq Abubakar
NIM : 15923004
Program : Doktor Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 25 Oktober 2021

Mengetahui,
Ketua Prodi DHI, FIAI, UII



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

Co-Promotor,



Prof. Dr. H. Kamsi, MA

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kupersembahkan kepada Allah, Rabb semesta alam, atas banyak karunia berlimpah yang tak pernah henti mengalir. Segala puja dan puji hanya milikNya semata, selalu dan selamanya.

Kepada Umi tercinta, Ustzh. Saadiyah Abdullah, dan Aba, Ust. Muhammad Abubakar (almarhum), di Tilamuta, Gorontalo, terimakasih atas curahan kasih sayangNya dan segala jasa yang tak akan terbalas sampai kapan pun jua. Semoga Allah menyayangi Umi dan Aba sebagaimana dulu telah menyayangi kami sejak kecil hingga dewasa.

Kepada Abah, H. Burhanuddin, dan Mama, Hj. Siti Fatimah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang tinggi dalam proses penyelesaian pendidikan ini.

Kepada Istri tercinta, Safarina Hayati, dan 4 anak-anakku yang tersayang: Umaimah Hanina, Ubaidillah Haniyya, Umair Hikmatyar, dan Uwaimir Hasanain, terima kasih sudah setia menemani perjalanan hidup ini, dan tak pernah jenuh mengingatkan untuk terus membaca dan menyelesaikan menulis disertasi.

Terima kasih selanjutnya untuk adik-adikku yang luar biasa; Kim, Man, Ito, dan Yaya, dalam memberi dukungan dan doa yang tanpa henti. Juga kepada para guru di Pondok Pesantren Alkhairaat Tilamuta, para sahabat di PPTQ Ibnu Abbas Klaten, dan segenap rekan rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Kepada Prof. Dr. Ihsan Qasim Ash Shalihi (Turki), Prof. Dr. Ammar Jidel (Aljazair), Prof. Dr. Abdul Karim Akyawi (Maroko), Prof. Dr. Ma'mun Jarrar (Yordania), Ustadz Hasbi Sen, dan seluruh asatidzah dan rekan komunitas Thullabunnur, jazakumullahukhairan atas segala bantuannya.

Untuk Anda semua saya persembahkan karya sederhana ini

MOTTO

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ

فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ

وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿سورة الأحزاب: ٢٣﴾

Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya),

ABSTRAK
STUDI KOMPARATIF
PEMIKIRAN SIYĀSAH SYAR'IIYAH BADI'UZZAMĀN SA'ĪD NURSI
DENGAN PEMIKIRAN POLITIK PRESIDEN SOEKARNO
Umarulfaruq Abubakar
NIM: 15923004

Studi ini dilatarbelakangi oleh pemikiran tentang pentingnya menggali pemikiran Siyāсах Syar'iiyah Badi'uzzamān Sa'īd Nursi dan pentingnya menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Hal ini mengingat bahwa perubahan kehidupan politik, sosial, dan budaya di dunia Islam, memberi banyak pengaruh dari segi pemikiran Siyāсах Syar'iiyah, khususnya dalam pandangan Badi'uzzamān Sa'īd Nursi (1877-1960) dan Presiden Soekarno (1901-1970) yang terhitung masih hidup sezaman. Penulis berusaha menggali lebih dalam pemikiran hukum ulama terkemuka asal Turki ini di bidang Siyāсах Syar'iiyah, kemudian melakukan komparasi dengan pemikiran Presiden Soekarno yang terkait dengan prinsip nilai Pancasila.

Permasalahan pokok yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang kehidupan intelektual, sosial, dan politik Badi'uzzamān Sa'īd Nursi, bagaimana kondisi perpolitikan di Turki pada masa Nursi, dan sejauh mana pengaruh Nursi dalam kehidupan masyarakat Turki, serta bagaimana komparasi pemikiran Sa'id Nursi dengan pemikiran Presiden Soekarno

Penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk mendeskripsikan pemikiran politik Badi'uzzaman Sa'id Nursi, memetakan, dan menganalisis latar belakang keilmuan, sosiokultural, dan sosial politik yang melingkari perjalanan kehidupan tokoh ini. Dilihat dari kandungannya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sejarah. Penulis lebih menekankan pada aspek biografis dan bibliografis, dengan analisa dari sudut pandang Siyāсах Syar'iiyah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Siyāсах Syar'iiyah yang disampaikan oleh Badi'uzzamān Sa'īd Nursi memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar utama dari praktik politik bangsa Indonesia, yaitu dalam pada Prinsip Ketuhanan, Prinsip Kemanusiaan, Prinsip Persatuan, Prinsip Permusyawaratan, dan Prinsip Keadilan. Pemikiran Badi'uzzamān Sa'īd Nursi ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya perbaikan perpolitikan di tanah pertiwi, terutama pada usaha memahami dan menerapkan substansi nilai nilai politik Islam dalam kehidupan demokrasi.

Kata Kunci: *siyasah syar'iiyah, Pancasila, Said Nursi, Soekarno.*

ABSTRACT
COMPARATIVE STUDY OF
BADI'UZZAMAN SAID NURSI'S THOUGHTS ON THE SIYĀSAH
SYAR'IYYAH WITH THE SOEKARNO'S POLITICAL THOUGHTS

Umarulfaruq Abubakar
 NIM: 15923004

This study is by thoughts about the importance of exploring the thoughts of Siyāsah Syar'iyyah Badi'uzzamān Sa'id Nursi and the importance of strengthening Pancasila values in the life of Indonesian society which consists of various kinds of people. This is considering that the changes in political, social and cultural life in the Islamic world has brought many influences in terms of Siyāsah Syar'iyyah thoughts, especially in the views of Badi'uzzamān Sa'id Nursi (1877-1960) and President Soekarno (1901-1970). The author attempted to more deeply dig the legal thinking of this leading cleric from Turkey in the field of Siyāsah Syar'iyyah, and then compared it with President Soekarno's thoughts related to the principles of Pancasila values.

The main problems used as the focus of this research are what is the background of Badi'uzzamān Sa'id Nursi's intellectual, social and political life, what is the political condition in Turkey during Nursi's time, and how far is Nursi's influence in Turkish society's life, and how is the comparison of thinking Sa'id Nursi with the thoughts of President Soekarno.

This research used a comparative method to describe Badi'uzzaman Sa'id Nursi's political ideas, map and analyze sociocultural and sociopolitical background surrounding the life journey of this figure. When viewed from its content, this research goes to the category of historical research. The writer emphasized on the aspects of biography and bibliography; at this point, the analysis was from the point of view of Siyāsah Syar'iyyah.

The research findings showed that Siyāsah Syar'iyyah ideas explained by Badi'uzzaman Sa'id Nursi had a strong relevance with the values of Pancasila where it is the main fundamental of Indonesian political practice in the principles of divinity, humanity, unity, deliberation, and justice. The ideas of Badi'uzzaman Sa'id Nursi are expected to be the contribution of the ideas to improve Indonesian politics, especially to understand and implement the substance of Islamic political principles in the democracy life.

Keywords: Siyāsah Syar'iyyah, Pancasila, Sa'id Nursi, Soekarno.

September 20, 2020

PROOFREADER STATEMENT

The information appearing herein has been read & evaluated in grammar & punctuation without changing the meaning & information from the original document by Center for International language & Cultural Studies of Islamic University of Indonesia CILACS UII
 Jl. DEMANGAN BARU NO 24
 YOGYAKARTA, INDONESIA.
 Phone/Fax: 0274 540 255

مستخلص البحث
دراسة مقارنة بين فكرة بديع الزمان سعيد النورسي في السياسة الشرعية
وفكرة الرئيس سوكارنو السياسية

عمرالفاروق أبو بكر
رقم القيد: 15923004

كان من الدوافع وراء الدراسة هي أهمية استكشاف فكرة بديع الزمان سعيد النورسي في السياسة الشرعية المتعدد وأهمية تعزيز قيم بانتجاسيلا في الحياة الاجتماعية بواقع المجتمع الإندونيسي ، وذلك باعتبار أن التغيرات في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في العالم الإسلامي ، كان لها تأثير كبير في فكرة السياسة الشرعية خاصة في آراء بديع الزمان سعيد نورسي (1877-1960) مقارنة بفكرة الرئيس سوكارنو (1901-1970) الذين عاشا في عصر واحد. فيحاول الباحث التعمق في الأفكار القانونية لهذا العالم التركي البارز ، وخاصة في مجال السياسة الشرعية ، ثم المقارنة بأفكار الرئيس سوكارنو المتعلقة بقيم بانتجاسيلا أو المبادئ الخمسة

فالقضايا الرئيسية التي يركز عليها هذا البحث هي خلفية الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية لبديع الزمان سعيد النورسي ، وما هو الوضع السياسي في تركيا وقتئذ، ومدى تأثير النورسي في حياة مجتمع تركي، وكيف تتم مقارنة تفكير سعيد نورسي بأفكار الرئيس سوكارنو يستخدم الباحث المنهج المقارن لوصف أفكار بديع الزمان سعيد النورسي السياسية بتحليل الخلفيات العلمية والاجتماعية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تحيط برحلة حياة هذا الشخص ثم التركيز بشكل أكبر على جوانب السيرة الذاتية والبيولوجرافية ، مع تحليل من وجهة نظر السياسة الشرعية.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن فكرة السياسة الشرعية التي نقلها بديع الزمان سعيد النورسي لها علاقة قوية بالمبادئ الخمسة كأسس رئيسية للممارسة السياسية الإندونيسية ، وبالتحديد في الأسس الإلهية ، والإنسانية ، والوحدة ، والاستشارة ، والعدالة . ولعل هذا البحث أعطى مساهمة فكرية لتحسين السياسة في هذا الوطن المحبوب، خاصة في فهم وتطبيق جوهر القيم السياسية الإسلامية في الحياة الديمقراطية.

الكلمات المفتاحية: السياسة الشرعية، بانتجاسيلا/المبادئ الخمسة ، سعيد النورسي ، سوكارنو

September 20, 2020

PROOFREADER STATEMENT

The information appearing herein has been read & evaluated in grammar & punctuation without changing the meaning & information from the original document by Center for International Language & Cultural Studies of Islamic University of Indonesia CILACS UII
Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>Ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā’	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā’	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā’	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ-	<i>fathah</i>	Ditulis	a
-ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
-----ُ-	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تنسى	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>

4.	ḥammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	ū furūd
----	----------------------------	--------------------	------------

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
--------	---------	----------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i> □
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي لا يُؤدّي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدّي ماضي نعمه بأدائها :
 نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
 عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ . اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ
 وَالَاه. أما بعد

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN SIYĀSAH SYAR’IYYAH BADI’UZZAMĀN SA’ĪD NURSI DENGAN PEMIKIRAN POLITIK PRESIDEN SOEKARNO” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar doktor bidang Hukum Islam pada Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan disertasi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dr. Tamyiz Mukharrom, MA
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag
4. Ketua Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dr. Drs. Yusdani, M.Ag
5. Promotor Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A. dan Co-Promotor Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. atas kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Tim Penguji yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga disertasi ini dinyatakan sah sebagai sebuah karya ilmiah.
7. Orang tua, mertua, isteri dan anak-anak tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang melimpah dan terus mendorong penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga sekecil apapun, diharapkan disertasi ini dapat berguna bagi kejayaan agama, bangsa, dan negara ke depan.

Kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan, karena penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan. Atas tegur sapa, sumbangan pemikiran, koreksi dan perbaikan, penulis sampaikan banyak terimakasih dan semoga mendapat balasan dari Allah SWT dengan ganjaran yang berlipat ganda. *Jazakumullah khairal Jaza. Amiin.*

Yogyakarta, 25 Oktober 2021
Penulis



Umarulfaruq Abubakar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN DEWAN PENGUJI KELAYAKAN DISERTASI.....	iv
PENGESAHAN PROMOTOR.....	v
PENGESAHAN CO PROMOTOR.....	vi
NOTA DINAS.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTO.....	viii
ABSTRAK.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	16
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kerangka Teori.....	34
1. Teori Maslahat.....	34
2. Teori Sejarah Sosial.....	40
3. Teori Relasi Agama dan Negara.....	44

BAB III.	METODE PENELITIAN.....	51
	A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	51
	B. Sumber Data.....	55
	C. Seleksi Data.....	56
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
	E. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV .	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
	A. Hasil Penelitian.....	60
	1. Sketsa Biografi Said Nursi.....	62
	a. Latar Belakang Keluarga.....	62
	b. Pendidikan dan Keilmuan.....	63
	c. Kondisi Sosial Politik Turki Pada Masanya.....	71
	d. Ide dan Aktifitas Politik.....	101
	2. Sketsa Biografi Soekarno.....	139
	a. Latar Belakang Keluarga.....	139
	b. Pendidikan dan Keilmuan.....	140
	c. Kondisi Sosial Politik Indonesia Pada Masanya.....	143
	d. Ide dan Aktifitas Politik.....	149
	B. Pembahasan.....	170
	1. Asas-asas Pemikiran <i>Siyāsah Syar’iyyah</i> Badi`uzzamān Sa`id Nursi.....	171
	a. Tauhid.....	174
	b. Musyawarah.....	179
	c. Kebebasan.....	179
	d. Keadilan.....	183
	e. Persamaan.....	185
	f. Persatuan dan Nasionalisme.....	
	g. Jihad.....	186
	2. Studi Komparatif Pemikiran <i>Siyāsah Syar’iyyah</i> Badi`uzzamān Sa`id Nursi Dengan Pemikiran Politik Presiden Soekarno.....	188
	a. Prinsip Ketuhanan.....	188
	b. Prinsip Kemanusiaan.....	207
	c. Prinsip Persatuan.....	222
	d. Prinsip Permasyarakatan.....	233
	e. Prinsip Keadilan.....	248
BAB V.	PENUTUP.....	262
	DAFTAR PUSTAKA.....	265

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	270
----------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kajian Penelitian Terdahulu	
Tabel 2 Tabel 1 Turkish Intellectuals Movement.....	85
Tabel 3 Komparasi Pemikiran Said Nursi Dengan Pemikiran Soekarno.....	260

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Siyāsah syar'iyah, seperti didefenisikan oleh mantan mufti Mesir, Abdurrahman Tāj, adalah hukum-hukum yang mengatur negara dan umat dengan memperhatikan ruh syari'at Islam dan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dasarnya, untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosial, walaupun hukum tersebut tidak disebutkan secara langsung secara terperinci oleh teks-teks al-Qur'an dan sunnah.¹ Senada dengan hal tersebut, Abdul Wahhab Khallaf juga mendefenisikan *siyāsah syar'iyah* sebagai kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan publik dalam sebuah negara yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak bahaya, selama tidak melanggar aturan syariat dan prinsip-prinsip utamanya.² Dari defenisi ini kita dapat memahami bahwa kajian *siyāsah syar'iyah* atau politik hukum sesuai perspektif Islam memiliki sifat yang sangat fleksibel dibanding kajian di bidang hukum Islam lainnya, mengikuti maslahat dan mudharat yang terkandung di dalamnya. Ruang pembahasan *siyāsah syar'iyah*, seperti kata Yusuf Al Qaradhawi, akan terus mengalami perkembangan dan inovasi dalam

¹ Abdurrahman Tāj, *As Siyāsah Asy Syar'iyah wa Al Fiqh Al Islāmī*; (Kairo: Al Azhar, 1415), hlm. 12

² Abdul Wahhāb Khallāf, *As Siyāsah Asy Syar'iyah*; (Kairo: Al Mathba'ah As Salafiyyah, 1350), hlm. 14

berbagai bidang kehidupan mengikuti pemikiran manusia yang tak henti berkembang.³

Salah satu perubahan pemikiran terbesar itu dalam sistem pemerintahan dan pola kehidupan sosial di dunia Islam adalah perubahan bentuk pemerintahan dari sistem kekhalifahan menjadi sistem republik tahun 1924 di Turki. Dalam struktur masyarakat modern yang diatur oleh sistem demokrasi seperti ini, yang tentunya berbeda dengan sistem kekhalifahan, perlu kehadiran ide dan gagasan dengan landasan pemikiran yang kuat dan pemahaman yang luas dan mendalam tentang penerapan hukum Islam, serta mampu menghadirkan nilai dan prinsip hukum Islam dalam kehidupan sosial. Ijtihad para ulama dalam memahami prinsip hukum Islam, memahami realitas masyarakat, dan menerapkan hukum Islam sesuai realita yang ada menjadi sesuatu yang sangat penting. Waktu, tempat, dan kondisi masyarakat yang berubah menuntut adanya perubahan fatwa dan kebijaksanaan dalam penerapan hukum, sesuai dengan prinsip maqashid syariah, untuk mewujudkan maslahat, menghindari mudharat, dan mengambil jalan tengah saat terjadi perimbangan antara maslahat dan mudharat.

Terobosan pemikiran Badiuzzamān Sa'id Nūrsi Nursi (1293 – 1379 H/1877 – 1960 M) yang ia tuangkan dalam *Kulliyāt Rasāil Nūr* memberikan kontribusi yang besar dalam menjamin tegaknya nilai mulia dan keberlangsungan hidup yang damai di kalangan masyarakat. Walaupun tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis secara langsung, Nursi mampu menjelaskan tentang

³ Yusuf Al Qaradhawi, *As Siyāsah Asy Syar'iyah fī Dhau Nushūsh As Syari'ah Wa Maqashidiha*; (Kairo: Maktabah Wahbah, 2011), hlm. 10

kerangka kerja ideologi politik Islam yang berpusat pada interpretasinya tentang prinsip-prinsip fundamental dalam politik Islam. Ia menganalisa dengan detail tentang penyakit-penyakit yang menyebabkan umat ini jatuh, sekaligus menyampaikan solusi agar umat ini dapat kembali bangkit. Salah satunya adalah dengan menguatkan perasaan beragama. Sebab Nursi berpendapat bahwa perasaan keberagamanlah yang akan menjadi pendorong yang kuat dalam mewujudkan kesadaran politik umat.⁴

Hal ini dapat terjadi karena substansi politik, seperti kata Al Ghazali, adalah usaha untuk memperbaiki kehidupan manusia dan mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Maka dalam hal ini ada empat kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh besar, yaitu: *Pertama*, para nabi yang mampu menguasai jiwa dan raga masyarakat, baik para elit maupun orang awam. *Kedua*, para khalifah, raja, dan sultan yang mampu menguasai para elit maupun orang awam, namun hanya mampu mengendalikan raga mereka saja, tetapi tidak dengan jiwanya. *Ketiga*, para ulama pewaris nabi yang mampu mengendalikan jiwa dan pikiran orang-orang elit dan pandai tetapi tidak dapat memaksa mereka dengan perintah, larangan, atau ketentuan hukum tertentu. *Keempat*, para da'i dan penceramah yang mampu menguasai jiwa orang-orang awam. Empat kelompok ini mengarahkan masyarakat ke arah lebih baik dengan menguatkan loyalitas keberagaman mereka.⁵

⁴ Khadijah An Nabrawi, *Daur Rasaail An Nur fi Yaqzhatil Ummah*, (Kairo: Sözler Publications, 1998), hlm. 7

⁵ Abu Hamid Al Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, (Beirut: t.p, t.t), hlm 14.

Badi'uzzaman Sa'id adalah salah satu di antara ulama muslim kontemporer pendidik umat yang memiliki pengaruh besar bagi Turki dan negara-negara Islam lainnya melalui Kitab Rasāil An-Nūr⁶ dan dakwah yang dibawa oleh para *Thullabunnūr*⁷. Ia seorang ulama pejuang yang terpandang dalam sejarah modern Turki dan dunia Islam, yang konsisten memperjuangkan gagasan-gagasannya dengan tetap menjadikan Islam sebagai agama yang dinamis di dunia modern.⁸

Di tengah perubahan besar di bidang sosial kemasyarakatan, Sa'id Nursi hadir di tengah masyarakat. Bersama para ulama lainnya, ia gigih berjuang melawan gelombang sekulerisasi ini dan berusaha mempertahankan nilai-nilai agama di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, ia pun banyak berbicara tentang prinsip-prinsip *siyāṣah syar'iyah* yang kontekstual dan sesuai dengan kehidupan masyarakat di alam kehidupan demokrasi. Bagi masyarakat muslim—khususnya yang ada di Turki—pemikiran *siyāṣah syar'iyah* Sa'id Nursi memiliki pengaruh yang sangat besar. Sa'id Nursi mampu menghadirkan konsep dan pemikiran para ulama dalam kitab-kitab turats dengan bentuk yang nyata dan relevan sesuai

⁶*Kullīyyāt Rasāil Nur* adalah buah pikiran dari Badiuzzaman Said Nursi yang bersandar atas Al Qur'an dalam jihadnya untuk menyikapi beragam permasalahan yang melanda Turki pasca runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani. Inti sari dari Rasail Nur yang jadi perjuangan dakwah Said Nursi yang tidak lepas dari manhaj Al Qur'an Al Karim dirangkum dalam enam prinsip utama; pertama, Berkhidmat untuk iman dan Al Qur'an; kedua, keikhlasan; ketiga, persaudaraan; keempat, ketidakberdayaan, belas kasihan, kefakiran, dan tafakkur; kelima, keteguhan dan kesetiaan; keenam, semangat dan kesyukuran mutlak. Faridah binti Mohd Sairi, "Metode Dakwah Badi'uzzamān Sa'id Nursi" hlm. 291

⁷ Gerakan dakwah *Thullābunnūr* adalah komunitas nur gerakan dakwah yang spirit dan pedomannya mengambaril dari pemikiran Said Nursi yang terangkum dalam karyanya *Rasāil Nur*. Peran utama gerakan dakwah Komunitas Nur—*Thullab Nur*— adalah dakwah dalam memperbaiki kondisi umat dengan penguatan aspek tauhid iman dan moral. Lihat Edi Amin, *Dakwah Komunitarian Ummatic: Studi Konsepsi Dakwah Said Nursi dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: Transwacana Press, 2017), hlm. 64

⁸ Şükran Vahide, *Islam in Modern Turkey; An Intellectual Biography of Bediuzzaman Said Nursi*, (Albany: State University of New York Press, 2005), hlm. xiii

kondisi yang ada. Terlebih lagi sepanjang hidupnya (1877-1960), Sa'id Nursi hidup dalam 3 bentuk pemerintahan yang berbeda, yaitu: khilafah, republik dengan sistem satu partai, dan republik dengan sistem multi partai. Gagasan yang ia lontarkan kepada publik melalui tulisan-tulisannya mampu memberikan pencerahan dalam menghadapi berbagai kondisi yang ada.

Pemikirannya dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang *siyāsah syar'iyah* ini, tertuang dengan jelas dalam Rasā'il an-Nūr. Pemikiran tentang *siyāsah syar'iyah* lahir dari kapasitas keilmuannya yang diakui oleh para ulama sebagai “Badi'uzzaman” (keajaiban zaman) karena kedalaman ilmunya yang sangat menakjubkan, pergulatan beragam pemikiran pada zamannya, dan juga dari hasil perenungan mendalam dari ayat-ayat suci al-Qur'an yang telah menjadi bagian hidupnya sejak bertahun-tahun.

Gagasan *siyāsah syar'iyah*nya seperti tertuang dalam khutbah Damaskus yang disampaikan oleh Nursi pada tahun 1911 di Masjid Bani Umayyah, di hadapan sekitar 10.000 hadirin. Nursi mampu menjelaskan tentang kerangka kerja untuk ideologi politik Islam yang berpusat pada interpretasinya tentang prinsip-prinsip fundamental Islam yang termasyhur. Prinsip-prinsip mendasar ini, merangkum tema kebebasan, konstitusionalisme, nasionalisme, kepatuhan pada Tuhan sebagai pencipta, keadilan, persaudaraan secara keseluruhan dalam Islam

dan antara Islam dengan agama-agama lain, persatuan komunal, penolakan terhadap keserakahan dan adopsi kebenaran dengan sepenuh hati.⁹

Dalam gagasan *siyāsah syar'iyah*nya, Sa'id Nursi berulang kali menekankan tentang pentingnya prinsip Ketuhanan yang Maha Esa, menolak ateisme, dan memperhatikan ajaran-ajaran Islam, terutama shalat. Nursi melihat bahwa dalam menegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat, penting untuk bercermin dari nama-nama Allah yang mulia; *al-Malik* (Yang Maha Merajai), *al-Hakam* (Yang Maha Menghukum), *al-'Adl* (Yang Maha Adil), *as-Salām* (Yang Maha Damai), *al-Muhaimin* (Yang Maha Berkuasa), *al-Qawiy* (Yang Maha Kuat), *al-Hakīm* (Yang Maha Bijaksana), dan lainnya. Keyakinan ini menjadi pilar dalam membangun hubungan umat Islam dengan umat umat lainnya di dunia.¹⁰

Nursi menekankan pentingnya rasa nasionalisme dalam tatanan negara. Perasaan kebangsaan dan memiliki tanah air seperti ini sangat penting untuk menjaga keutuhan sebuah bangsa sesuai batasan teritorial yang telah ditentukan. Nasionalisme adalah benteng dan perisai serta menjadi salah satu faktor dinamis untuk memperkuat persaudaraan Islam.¹¹

Nursi juga sangat mendukung prinsip kerakyatan dan permusyawaratan, dan menolak segala bentuk perbudakan dan kediktatoran. Menurut Nursi kunci kebahagiaan kaum muslimin dalam kehidupan sosial mereka adalah musyawarah.

⁹ Kamil Fadil dan Eren Tatari, *A Political Analysis Of Bediuzzaman Said Nusi's Damascu Sermon*, (Philippine: Humanities and Social Science Review, 2016), hlm. 303.

¹⁰ Khadijah An Nabrawi, *Daur Rasaail An Nur fi Yaqzhatil Ummah*, hlm. 257

¹¹ Badi'uzzamān Sa'īd Nūrsi, *Al Maktūbāt*, (Kairo: Sözleryayınları, 2013), hlm. 334

Sejarah telah membuktikan bahwa persambungan pemikiran antara satu individu-individu lainnya akan terjadi melalui musyawarah. Ia menjadi tonggak kehidupan bermasyarakat yang kuat. Sementara kelemahan sebuah peradaban terjadi ketika masyarakatnya tidak mampu bermusyawarah.¹² Nursi juga memperjuangkan prinsip persamaan dan keadilan. Tidak boleh ada diskriminasi dan penindasan. Di hadapan hukum, semua manusia itu sama. Termasuk pemerintah, hakim, dan pelaku hukum itu sendiri. Penerapan hukum yang tegas kepada orang lain, tajam ke bawah tumpul ke atas, bertentangan dengan prinsip hukum dan tidak sesuai dengan prinsip persamaan di antara manusia.¹³

Benar bahwa pada akhir hidupnya Nursi menjauhi kehidupan politik dan berlindung dari setan dan politik. Tetapi ia menjauhi politik dalam artinya menjauhi politik praktis dan kursi-kursi kepemimpinan. Namun politik yang tinggi, bersih, dan tegak di atas pilar-pilar kebenaran maka Sa'id Nursi telah terlibat ke dalamnya melalui pemikiran, tulisan, jihad, dan dakwahnya dalam berbagai bentuknya. Ia bahkan menegaskan bahwa politik bebas nilai hanya akan menghancurkan kehidupan manusia.¹⁴

Pemikiran dan gagasan Sa'id Nursi ini lebih banyak ditulis dalam lembaran surat yang kemudian disalin oleh muridnya dan menyebar sampai ke seluruh penjuru Turki. Apa yang dilakukan Nursi ternyata mampu membendung topan sekularisme di akhir masa pemerintahan khilafah Turki Utsmani dan awal

¹² Badi'uzzamān Sa'id Nūrsi, *Shaiqahul Islām*, (Kairo: Sözlcr Publications, 2013), hlm. 483

¹³ Said Nursi, *Al Lama'at*, (Kairo: Sözlcr Publications, 2013), hlm. 360

¹⁴ Khadijah An Nabrawi, *Daur Rasaail An Nur fi Yaqzhatil Ummah*, hlm. 257

pemerintahan republik. Meskipun tidak sama persis, dalam kajian ini penulis menemukan banyak kesamaan antara permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Turki dan apa yang pernah dihadapi oleh Indonesia. Di antaranya: pernah mengalami penjajahan dan menerima warisan hukum-hukum negara yang diatur oleh peninggalan penjajah, terpengaruh oleh paham sekularisme yang memisahkan antara agama dan negara, dan penerapan sistem demokrasi .

Di titik inilah pandangan politik Nursi menemukan relevansinya dengan pemikiran Soekarno dalam perpolitikan di Indonesia. Nursi telah mengemukakan pandangan-pandangannya tentang apa yang dihadapi oleh negerinya dan masih relevan dengan apa yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tentu saja di setiap negara ada keunikan-keunikan masing-masing. Namun pandangan politik ini akan menjadi sumbangan yang sangat besar dalam upaya perbaikan perpolitikan di tanah pertiwi, terutama bagaimana Sa'id Nursi memahami substansi nilai-nilai politik Islam dalam kehidupan demokrasi .

Menurut penulis tema ini sangat penting dan sangat sejalan dengan konsentrasi bidang kajian program Doktor Hukum Islam UII yang fokus pada kajian Hukum Islam dalam konteks keindonesiaan, tetapi belum ada pun yang mengkajinya dalam bentuk disertasi. Dalam disertasi ini, penulis ingin mensistematisasi gagasan Nursi tentang *Siyāṣah syar'iyah* yang masih tersebar dalam banyak bab di kitab *Rasa'ilun Nur*, melakukan studi komparatif antara pemikiran Badiuzzaman Sa'id Nursi dengan Presiden Soekarno dalam kerangka nilai-nilai Pancasila, sekaligus berusaha menemukan intisari nilai-nilai politik Islam di alam demokrasi.

Dalam konteks keindonesiaan, prinsip-prinsip Pancasila yang digagas oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945,¹⁵ kemudian dibahas oleh Panitia Sembilan menjadi Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan akhirnya disempurnakan oleh Tim BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945¹⁶, memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan gagasan *Siyāṣah Syar'iyah* yang disampaikan oleh Badiuzzaman Sa'id Nursi dalam karyanya, *Rasā'il An Nūr*. Dalam kajian ini, penulis lebih menekankan pada sistematisasi gagasan, analisa dan studi komparatif pemikiran Nursi dan Soekarno, dengan menggunakan teori masalahat yang banyak menekankan pada sisi maqashid syari'ah.

Dalam mengkaji latar belakang kehidupan intelektual, sosial, dan politik Said Nursi, penulis menggunakan teori sejarah dengan pendekatan tematis analitis untuk dapat membedakan pemikiran sang Nursi dari pemikiran tokoh lain dalam suatu bidang keilmuan tertentu. Penulis juga berusaha melakukan pendekatan otobiografi untuk memahami sang tokoh berdasarkan pendapat tokoh lain yang mempunyai disiplin keilmuan yang sama atau berbeda, juga pendekatan *contruction of days*, yaitu melihat hari-hari tertentu yang bersejarah dalam kehidupan Nursi, yang mempunyai sisi historis dan mengandung pesan nilai yang kuat. Sementara dalam pembahasan tentang hubungan agama dan negara, penulis berusaha melihat dari kacamata teori agama dan negara yang mencakup paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik.

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Risalah Sidang-sidang dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Tanggal 29 Mei 1945 - 16 Juli 1945 dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945*, tt., hal. 57-77

¹⁶ *Ibid.* hal. 340

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menggali pemikiran *Siyāṣah syar'īyyah* Badi'uzzamān Sa'īd Nūrsi. Adanya pertanyaan penelitian dalam disertasi yang merupakan satu kesatuan yang saling terkait ini tujuannya adalah untuk mengungkapkan pemikiran *Siyāṣah Syar'īyyah* Badi'uzzamān Sa'īd Nūrsi. Pertanyaan Penelitian yang dimaksud adalah sebagaimana berikut:

1. Siapa Badi'uzzamān Sa'īd Nūrsi dan bagaimana latar belakang keluarga, kehidupan intelektual, dan sosialnya?
2. Bagaimana kondisi perpolitikan di Turki pada zaman Badi'uzzamān Sa'īd Nursi dan bagaimana ide dan aktifitas politik Nursi dalam menyikapinya?
3. Apa asas utama gagasan *siyāṣah syar'īyyah* Nursi, dan bagaimana komparasinya dengan pandangan politik Presiden Soekarno?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian dalam disertasi ini dibedakan menjadi dua bagian, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Kedua ini merupakan satu kesatuan tujuan penelitian. Dijelaskan sebagai berikut

- a) Tujuan umum

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan hukum yang terkait dengan *siyāṣah syar'iyah* dengan memperhatikan prinsip syariat Islam yang permanen dan juga yang fleksibel, melihat sinergitas yang kuat antara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku dalam tata hukum Indonesia, dan menjadi salah satu referensi atau sumber bacaan dan literatur bagi penelitian berikutnya.

b) Tujuan khusus

1) Mengenal Badi`uzzamān Sa`īd Nursi dan menjelaskan perjalanan keilmuan dan perjuangannya dalam menegakkan nilai-nilai keislaman di tengah badai sekularisasi di Turki. Penelitian ini juga untuk mengkaji sejauh mana pandangan-pandangan *siyāṣah syar'iyah* yang tertuang dalam buku *Kulliyāt Rasā'il An-Nūr* dan memberikan pengaruh dan peran bagi masyarakat Turki dewasa ini.

2) Memahami kondisi perpolitikan pada zaman Badi`uzzamān Sa`īd Nursi, perubahan bentuk pemerintahan dan kebijakan hukum, komposisi politik dan sosial masyarakat, serta peran Badi`uzzamān Sa`īd Nursi dalam mengarahkan masyarakat sesuai tuntunan Islam.

3) Mengkaji asas-asas gagasan *siyāṣah syar'iyah* dalam pandangan Badi`uzzamān Sa`īd Nursi, dasar-dasar filosofisnya, dan bagaimana hubungannya dengan pemikiran politik Soekarno.

2. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ilmiah diharapkan ada suatu manfaat yang dihasilkan. Manfaat penelitian disertasi ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, yang dapat dijelaskan di bawah ini.

a) Manfaat Teoritis

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan teori-teori yang telah ada mengenai penerimaan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia, khusus dalam bidang *siyāṣah syar'iyah*

2) Kajian yang mengedepankan konsep hukum Islam ini, diharapkan dapat melahirkan sebuah pandangan dan teori baru dalam *siyāṣah syar'iyah* yang selaras dengan nilai-nilai budaya di masyarakat Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi rujukan dalam pemberdayaan sistem *siyāṣah syar'iyah*

b) Manfaat Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkokoh pemahaman tentang sistem *siyāṣah syar'iyah* dan bagaimana penerapannya di Indonesia, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memahami sistem

siyāsah syar'iyah dan menerapkannya dalam pembentukan perundang-undangan yang terkait dengan politik dan sosial

2) Melalui penelitian hukum ini diharapkan dapat membentuk kebijakan nasional yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman sebagai keyakinan dan pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat dengan sempurna.

D. Sistematika Pembahasan

Dengan merujuk kepada buku *Pedoman Penulisan Disertasi Prodi DHI FIAI UII*, penulis menyusun penelitian ini menjadi lima bab yang masing-masing mempunyai bobot yang berbeda, namun satu dengan yang lain saling mendukung dan melengkapi.

BAB I: Pendahuluan : Bab ini menerangkan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi penelitian diawali dengan latar belakang yang terangkum di dalamnya tentang alasan memilih judul dan bagaimana pokok permasalahannya. Untuk lebih memperjelas maksud penelitian, maka penulis mengemukakan tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini mengungkap beberapa manfaat dalam penelitian ini. Demikian pula dalam bab pertama ini penulis menyampaikan sistematika penelitian secara keseluruhan dalam satu kesatuan guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

BAB II: Kajian Penelitian Terdahulu Dan Kerangka Teori : Dalam bab ini penulis mengemukakan kajian penelitian terdahulu yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis atau yang erat hubungannya yang telah dilakukan sebelumnya dan memuat permasalahan, prosedur penelitian dan hasil-hasil yang telah dicapai. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari penjiplakan. Telaah pustaka lainnya berupa kajian terdahulu yang erat hubungannya dengan pembahasan tentang pandangan Sa'id Nursi dalam permasalahan politik dan sosial. Dalam kerangka teori dikemukakan teori-teori yang erat kaitannya dengan penelitian ini, Teori *siyāsah syar'iyah* sebagai *grand theory*. Sementara *suplemen theory* lainnya adalah teori sejarah, relasi agama dan negara, demokrasi, dan kesejahteraan.

BAB III: Metode Penelitian : Dalam bab ini, penulis berusaha mengungkapkan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis juga memaparkan tentang jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, seleksi data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan : Dalam bab ini penulis berusaha menjawab fokus dari pertanyaan penelitian, dengan menguraikan latar belakang keluarga, perjalanan kehidupan intelektual, sosial, dan politik Badi'uzzamān Sa'id Nursi. Penulis juga menjelaskan tentang perubahan kondisi sosial di Turki dengan runtuhnya Khilafah Ustmaniah, berdirinya Republik Turki, terbitnya banyak peraturan baru yang mengatur kehidupan masyarakat, serta bagaimana peran Nursi dalam menyikapi perubahan-perubahan tersebut.

Selanjutnya penulis membahas latar belakang kehidupan Presiden Soekarno yang notebene masih hidup sezaman dengan Said Nursi, melihat perjalanan politik pada masa Soekarno, serta terobosan-terobosan pemikiran dan aktifitas politiknya dalam menetapkan prinsip-prinsip politik dan *falsafah* dasar berbangsa dan bernegara.

Dalam bab ini juga, penulis mengkaji asas-asas gagasan *siyāsah syar'iyah* Badi'uzzamān Sa'id Nursi dan bagaimana relevansi gagasan tersebut dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi dasar sistem politik di Indonesia.

Bab V: Kesimpulan : Dalam bab ini, penulis membuat kesimpulan hasil penelitian dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Bab ini juga dilengkapi dengan saran saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian dan Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri jurnal dan kajian yang membahas tentang Badi'uzzaman Sa'id An-Nursi, belum penulis temukan tulisan yang secara khusus membahas tema ini. Bahkan ketika penulis menanyakan hal ini kepada para guru besar dan peneliti di The Istanbul Foundation for Science and Culture¹⁷ Turki, penulis mendapatkan informasi bahwa belum ada kajian tesis dan disertasi yang mengangkat secara khusus tentang studi komparatif gagasan *siyāṣah syar'īyyah* Sa'id Nursi.

Penulis mendapatkan kajian tentang pemikiran dalam beberapa jurnal ilmiah nasional dan internasional yang menyorot pemikiran Sa'id Nursi dari berbagai isi. Beberapa tesis, dan disertasi sempat mengangkat beberapa kajian tentang pemikiran politik ini secara sekilas dalam pemaparannya, tapi belum membahasnya secara mendalam.

¹⁷ Sebuah lembaga internasional yang konsen bergerak di bidang kajian pemikiran Said Nursi, dengan mengadakan konferensi dan simposium internasional secara rutin dan menerbitkan jurnal kajian tentang pemikiran Said Nursi dari berbagai disiplin ilmu. Penulis pernah menjadi presentator dalam Seminar Internasional Akademisi Muda dan peserta Simposium Internasional Badiuzzaman Said Nursi yang diadakan di Istanbul tahun 2017 dan kembali mendapat undangan untuk hadir dalam kedua acara tersebut pada tahun 2018 dan 2021.

Berikut ini beberapa kajian dalam bentuk tesis magister, disertasi doktoral, dan jurnal ilmiah yang sempat penulis telusuri.

1. Hasan Horkuc “*Sa’id Nursi’s Ideal for Human Society: Moral and Social Reform In The Risale-i Nur*”.¹⁸ Penelitian ini menyajikan analisis kritis terkait pandangan Sa’id Nursi tentang masyarakat ideal. Peneliti berusaha mengeksplorasi pengaruh faktor agama, sains, dan sosial dalam membentuk masyarakat ideal di era modern ini. Begitu pula pengaruh faktor politik Islam dalam mewujudkan reformasi dan perubahan sosial. Dalam disertasi ini, selain memberikan pandangan umum gabungan ide-ide Nursi tentang masyarakat ideal di bagian yang terperinci, Hasan juga membahas pandangannya tentang politik dan peradaban barat. Namun dalam hal ini, kajian yang diangkat mengambil sudut pandang analisa sosial, bukan dalam konteks hukum Islam.
2. Rajab Thayyib Erdogan, “*Sa’id An-Nursi Khizānatun Tantazhirul Iktisyāf*”¹⁹ Erdogan – yang saat itu menjabat sebagai walikota Istanbul – menyampaikan pentingnya melanjutkan usaha keilmuan yang dibawa oleh para ulama. Ia juga menyatakan bahwa Rasāil Nur adalah bahan kajian yang sangat kaya dengan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat untuk saat ini dan datang, dengan menggali prinsip dan nilai-nilai utama dalam perbaikan umat.

¹⁸ Hasan Horkuc, “*Said Nursi’s Ideal for Human Society: Moral and Social Reform In The Risale-i Nur*”. Disertasi Doktor. (Inggris: Durham University 2004.)

¹⁹ Rajab Thayyib Erdogan, “*Sa’id An Nursi Khizānatun Tantazhirul Iktisyāf*” *Jurnal Al Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. IV, Bulan Juli 2011, hlm. 9-12.

3. Ahmad Daud Oglo, "*Siyāsah Al-Alam Al-Islami fi Al-Qarn Al-Isyryn fi Nazhar An Nursi*" (Bediuzzaman and The Politic of The Twentieth Century Islamic World).²⁰ Dalam kajiannya Ahmad Daud Oglo memaparkan tentang perodesasi perkembangan politik di dunia Islam di Abad 20, lengkap dengan berbagai permasalahan yang dihadapi. Menurutnya, Sa'id Nursi adalah ulama yang sangat paham dengan kondisi yang terjadi sehingga mampu memberikan statemen dan pandangan pandangan yang cemerlang. Walaupun krisis politik, ekonomi, dan pendidikan begitu keras menerpa umat Islam, sesungguhnya dunia Islam saat ini sedang berada di pintu gerbang sebuah peradaban baru, dan Badi`uzzamān Sa`īd Nursi sudah memprediksi bahwa Islam adalah suara teragung yang akan bergaung dalam peradaban baru itu.
4. Mehmed Halil Cicek, "*Malāmih Tajaddud Khithāb An Nursi fi Muwājahati Tahaddiyatil Ashri*" (The Main Features of Nursi's New Approach to the Challenges of The Age).²¹ Dalam kaji ini, Mehmed Halil Cicek, guru besar Fakultas Ilahiyat Universitas Ben Kol, Turki, menerangkan tentang secara ilmiah karakter ide pembaharuan Sa'id Nursi dalam menghadapi problematika modern yang rasional dan mengusung nilai nilai yang tinggi, menggerakkan jiwa untuk mencintai hukum-hukum

²⁰ Ahmad Daud Oglo, "Siyasah Al Alam Al Islami fi Al Qarn Al Isyryn fi Nazhar An Nursi" *Jurnal Al Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. III, Bulan Januari, 2011, hlm. 15-48.

²¹ Mehmed Halil Cicek, "Malāmih Tajaddud Khithāb An Nursi fi Muwājahati Tahaddiyatil Ashri" *Jurnal Al Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. IV, Bulan Juli 2011, hlm. 9-12.

dan praktek ibadah dalam Islam, dengan bahasa yang modern dalam penyampaian.

5. Muhammad Sa'ad, *"Ilāj Ahammil Musykilāt Asy Siyāsiyyah wa Al-Iqtishādiyyah fī Al-'Alam Al-Islāmi min Khilal Fikr Al-Imām An Nursi wa Atsaruhu fī Wahdatil Ummah"* (Solusi permasalahan politik dan ekonomi di dunia Islam dalam pandangan Imam An Nursi dan pengaruhnya dalam persatuan umat).²² Dalam makalah ini Muhammad Sa'ad, dosen fakultas Ushuluddin dan Da'wah Islam Universitas Al-Azhar Manufia, menjelaskan solusi yang ditawarkan oleh Sa'id Nursi dalam Rasā'il an-Nūr tentang tiga permasalahan utama yang dihadapi umat yaitu: politik, ekonomi, dan persatuan. Sa'ad mengungkapkan solusi yang diberikan oleh Sa'id Nursi dengan mengangkat dan menganalisa teks-teks Rasā'il an-Nūr yang berbicara tentang hal ini.
6. Muhammad Asy Sarbaini, *"Al-Imām Badi'uzaman Sa'id Nursi Ats Tsā'ir wa As Siyāsi"* (Badi'uzzamān Sa'id Nursi Pejuang dan Politisi).²³ Dalam makalah ini Asy Syarbaini menjelaskan tentang jihad pemikiran dan politik Sa'id Nursi selama hidupnya, dalam bentuk terjun langsung ke medan pertempuran, usaha untuk melobi pemerintah pemegang kebijakan, usaha mendirikan Madrasah Az Zahra', bergabung dalam organisasi

²² Muhammad Sa'ad Abdul Majid Qasim, *"Ilāj Ahammil Musykilāt Asy Siyāsiyyah wa Al-Iqtishādiyyah fī Al-'Alam Al-Islāmi min Khilal Fikr Al-Imām An Nursi wa Atsaruhu fī Wahdatil Ummah"*, makalah disampaikan dalam Simposium Internasional Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi dan Pengaruhnya Dalam Persatuan Umat Islam, diselenggarakan oleh Universitas Al Azhar Mesir dan The Istanbul Foundation for Science and Culture tanggal 26-27 Februari 2013 di Kairo, Mesir.

²³ Muhammad Asy Sarbaini, *"Al-Imām Badi'uzaman Sa'id Nursi Ats Tsā'ir wa As Siyāsi"*, makalah disampaikan dalam Simposium Internasional Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi dan Pengaruhnya Dalam Persatuan Umat Islam, diselenggarakan oleh Universitas Al Azhar Mesir dan The Istanbul Foundation for Science and Culture tanggal 26-27 Februari 2013 di Kairo, Mesir.

massa, memberikan pencerahan tentang politik kepada masyarakat dan berbagai perjuangan lainnya untuk kemajuan negerinya pada saat itu

7. Amar Djidel, “*Ghiyāb Al-‘Amal Al-Ijābi au Taghyiibuhu fi Hayāti Al-Muslimīna Al-Mu’ashirah – Al-Asbāb wa Al-‘Ilāj; Dirasah di Rasāil An Nūr li Badi’izzaman Sa’id An Nursi*” (The Absence of Positive Action in Contemporary Muslim Life – Causes and Solution – A Studi of Bediuzzaman Sa’id Nursi’s Risala-e Nur).²⁴ Dalam tulisannya, Amar Djidel (guru besar Universitas Al Jazair) memaparkan tentang penyebab hilangnya aksi positif dalam kehidupan seorang muslim, yaitu tidak paham tentang aksi positif, atau paham tapi tidak menyadari tentang urgensinya. Tidak ada yang bisa menjadi solusi atas dua hal ini lebih baik dari Iman yang menjadi sebab lahirnya berbagai aksi positif. Pada gilirannya, hal yang paling tinggi di zaman ini adalah menumbuhkan keimanan yang hakiki, dari teoritik kepada praktek, dari sekedar konseptual menjadi refleksi kehidupan.
8. Amar Djidel, “*Tahrirul Hurriyyah fi Rasāil An Nur*” (Freeing Freedom in The Light of The Risale-i Nur).²⁵ Dalam tulisannya, Amar Djidel memaparkan tentang hakekat kebebasan dan kemerdekaan dalam pandangan Rasāil An Nur. Bagi para politisi dan para aktifis di seluruh dunia, kata kebebasan dan kemerdekaan menjadi isu yang selalu menarik

²⁴ Amar Djidel. “Ghiyāb Al ‘Amal Al Ijābi au Taghyiibuhu fi Hayāti Al Muslimīna Al Mu’ashirah – Al Asbāb wa Al ‘Ilāj; Dirasah di Rasāil An Nūr li Badi’izzaman Sa’id An Nursi” *Jurnal Al Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. VIII, No. XVI, Juli 2017, hlm. 143-166

²⁵ Amar Djidel, “Tahrirul Hurriyyah fi Rasāil An Nur” *Jurnal Al Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. VIII, No. XII, Bulan Juli 2015, hlm. 71-98.

untuk diangkat demi mendapatkan dukungan massa. Kebebasan yang diangkat tersandera oleh makna-makna yang dipahami oleh para politisi dan aktifis tersebut dan terikat oleh kepentingan-kepentingannya. Sa'id Nursi mencoba mengembalikan makna kebebasan ini kepada makna yang sejati dengan memperhatikan banyak faktor terkait dengan individu dan sosial.

9. Abdul Azhim Ahmad Abdul Azhim, "*Daur Al-Akhlaq fi Taghyir Al-Waqi Al-Mu'ashir min Khilal Fikr Al-Imam An Nursi*" (Peran Akhlak Dalam Perubahan Realita Kontemporer Perspektif Iman An Nursi).²⁶ Abdul Azhim Ahmad Abdul Azhim, dosen Universitas Alexandria Mesir, mempresentasikan makalah ini pada Simposium Internasional Pemikiran Badi'uzzaman Sa'id Nurs VII di Istanbul Turki, 26-28 September 2004. Dalam kajiannya, Abdul Azhim memaparkan tentang fenomena dan sebab-sebab penyimpangan akhlak dalam masyarakat dan bagaimana solusi manhaj Imam An Nursi dalam memperbaikinya. Perbaikan ini dimulai dari perbaikan individu kemudian pemerintahan, dengan memperhatikan poin poin yang paling mendasar dalam proses perbaikan tersebut.
10. Mubarak Lamin, "*Al-Wahdatu wa Tadbîrul Khilāf 'Inda Badi'izzaman Sa'id An Nursi*" (Unity and Dispute Management In the Thought of

²⁶ Abdul Azhim Ahmad Abdul Azhim, "*Daur Al Akhlaq fi Taghyir Al Waqi Al Mu'ashir min Khilal Fikr Al Imam An Nursi*", makalah disampaikan dalam Simposium Internasional Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi dan Pengaruhnya Dalam Persatuan Umat Islam, diselenggarakan oleh The Istanbul Foundation for Science and Culture tanggal 26-28 September 2004 di Istanbul, Turki.

Bediuzzaman Sa'id Nursi).²⁷ Kajian dari Mubarak Lamin, guru besar Sejarah dan Peradaban Islam Universitas Ibnu Zuhr, Akadir, Maroko Dalam tulisannya, Mubarak Lamin memaparkan bahwa tema persatuan dan solusi konflik adalah salah satu tema utama dalam Rasā'il an-Nūr. Sa'id Nursi berusaha menganalisa akar perpecahan yang dihadapi oleh umat ini dan berusaha untuk memberikan solusi yang tepat sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hal ini Nursi menekankan dua hal yang utama untuk menyelesaikan perpecahan yaitu mulai dengan usaha untuk mujahadah dan membersihkan diri, kemudian menegakkan perangkat-perangkat solusi dalam menjaga persatuan.

11. Muhsin Abdul Hamid, "*Min Ma'alim At Tajdid 'Inda An Nursi*"²⁸ Dalam kajiannya, Muhsin Abdul Hamid, Guru Besar Pemikiran Islam dan Tafsir Al-Quran di Institut Ilmu Pendidikan, Baghdad, Iraq, menyatakan bahwa Badi'uzzamān Sa'id Nursi adalah salah seorang Mujaddid terbesar, bukan hanya pada zaman kita saja, tetapi juga sepanjang sejarah kaum muslimin. Imam An Nursi sangat memahami kondisi umat di abad ini, mengetahui usaha-usaha perusakan dan penyebab keretakan di antara kaum muslimin, mengenal usaha jahat yang ingin menggeser aturan Islam kepada aturan-aturan barat yang ateis, menyadari beragam konspirasi dan perkembangan kejadian di Turki dan dunia Islam. Ia adalah seorang pembaharu, mulai dari kualitas pribadi yang menakjubkan, sampai kepada solusi yang integral

²⁷ Mubarak Lamin, "Min Ma'alim At Tajdid 'Inda An Nursi" *Jurnal Al Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. XII, Bulan Juli 2015. Hlm. 149-163.

²⁸ Muhsin Abdul Hamid, "Min Ma'alim At Tajdid 'Inda An Nursi" *Jurnal Al Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. III, No. V, Januari 2012, hlm. 29-40.

dan cerdas yang tertuang dalam ceramah dan Kulliyat Rasā'il an-Nūrnya. Muhsin Abdul Hamid juga menerangkan tentang prinsip-prinsip Tajdid yang terdapat dalam rangkaian kajian Rasā'il an-Nūr Sa'id Nursi

12. Al-Arabi Buselham, "*Min Al-Usus Al-Fikriyyah wa Al-Hadhariyyah fi Kitabah An Nursi*" (The Intellectual and Civilization Foundations on the Risale-i Nur).²⁹ Dalam kajian ini, Al-Arabi Buselham, guru besar Institut Adab wal Al-Ulum Al-Asasiyah, Ribath, menjelaskan keadaan Imam An Nursi yang hidup pada masa paling genting dalam kehidupan kaum muslimin yaitu akhir abad 13 dan permulaan abad 14, menyadari kondisi masyarakat muslim yang terpuruk dengan cepat dan adanya serbuan perang pemikiran yang sangat dahsyat. Terutama saat Goldstone, salah seorang Menteri Kerajaan Inggris mengumumkan dalam Majelis Parlemen tentang tekadnya untuk menghilangkan Al-Quran dari kehidupan kaum muslimin. Sa'id Nursi berusaha melakukan perlawanan melalui tulisan-tulisan dalam Rasā'il an-Nūr untuk memerangi berbagai syubhat dan menanamkan keimanan dalam hati kaum muslimin. Penulis memaparkan tentang pondasi dasar Rasā'il an-Nūr dan pengaruhnya yang besar dalam realita kehidupan masyarakat Turki dan yang lainnya, dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fokus kajian Sa'id Nursi untuk memperbaiki pemikiran dan peradaban.

²⁹ Al-Arabi Buselham, "Min Al Usus Al Fikriyyah wa Al Hadhariyyah fi Kitabah An Nursi" *Jurnal Al Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. III, No. V, Januari 2012, hlm. 69-87.

13. Shabahuddin Za'im, "*Ar Ru'yah Al-Hadhariyyah min Khilal Risalah Al-Iqtishad*" (The Vision of Civilization in The Treatise on Frugality).³⁰

Dalam kajiannya, Shabahuddin, dosen Universitas Islamabad Pakistan, menerangkan tentang visi peradaban Sa'id Nursi yang tertuang dalam *Rasail Al-Iqtishad*. Dalam bab ini, Sa'id Nursi telah menerangkan tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam yang menjadi tulang punggung peradaban. Salah satunya tentang gaya hidup masyarakat modern yang boros. Kebiasaan ini pada gilirannya akan mengakibatkan pola konsumsi yang berlebihan yang pada akhirnya memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian dan kehidupan sosial. Perilaku ini menciptakan jurang yang sangat dalam antara orang kaya dan miskin, memancing tumbuhnya riba, sedikitnya zakat, dan berbagai dampak buruk lainnya, seperti munculnya ideologi sosialisme dan marxisme. Setelah menganalisa akar dan akibat masalah, penulis juga menyampaikan solusi atas berbagai permasalahan ini yang sudah dituangkan dengan jelas oleh Sa'id An Nursi dalam *Risalah Al-Iqtishadnya*.

14. Mustafa Adardawr, "*Mahathaat Baarizah min At Tarikh Al-Mu'ashir wa Atsaruha fi Hayat An Nursi wa Madrasatuhu Al-Fikriyyah*" (Notable Events in Contemporary History and Their Influence on Nursi's Life and His School of Thought).³¹ Dalam kajiannya, Mustafa Adardawr

³⁰ Shabahuddin Za'im, "*Ar Ru'yah Al Hadhariyyah min Khilal Risalah Al Iqtishad*" *Jurnal Al Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Tahun ke tiga Edisi V, Bulan Januari 2012, hlm. 127-142.

³¹ Mustafa Adardawr. "*Mahathaat Baarizah min At Tarikh Al Mu'ashir wa Atsaruha fi Hayat An Nursi wa Madrasatuhu Al Fikriyyah*" *Jurnal Al Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. VIII, No. XI, Januari 2017, hlm. 10-28.

menerangkan bahwa dalam perjalanan panjang kehidupan negara Turki dari agama, sosial, politik, dan lainnya, Madrasah An Nur yang mengusung pemikiran Sa'id Nursi adalah salah satu komponen yang sangat penting dan paling banyak hadir dalam masyarakat Turki. Perjalanan kehidupan Badi'uzzamān Sa'id Nursi yang panjang, sejak masa keruntuhan Turki Utsmani, sampai era Kemalisme, hingga ia wafat tahun 1960, banyak terminal kehidupan yang dilalui dalam perjalanan manhajnya, sampai menjadi salah satu aliran pemikiran keagamaan yang berpengaruh dalam sejarah Turki modern, baik dari sisi sosial maupun politik. Alur dan peta pemikiran Sa'id Nursi inilah yang ingin dikaji oleh Mustafa Adardawr.

15. Mohammad Ajmal, "*Globalization and The Thought of Unity In Diversity of Badi'uzzamān Sa'id Nursi In The Light of His Magnum Opus Risala-i Nur.*"³² Dalam kajiannya, Mohammad Ajmal menerangkan pandangan Sa'id Nursi tentang globalisasi. Menurutnya, efek globalisasi lebih berbahaya dari kolonialisme sebab masyarakat dari negara-negara miskin menjadikan diri mereka sendiri sebagai agen dari globalisasi di negara mereka sendiri. Namun dalam hal ini, Badi'uzzamān Sa'id Nursi selalu memandang dunia sebagai salah satu komponen untuk memuliakan Sang Pencipta dan menyaksikan kebesarannya. Universalitas yang dipercayainya berlawanan dengan universalitas yang dihasilkan dari globalisasi seperti yang umum dipahami dan digambarkan.

³² Mohammad Ajmal, "Globalization and The Thought of Unity In Diversity of Badiuzzaman Said Nursi In The Light of His Magnum Opus Risala-i Nur." *Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. IV, No. 1, Juni 2014, hlm. 134-153.

16. Kamil Fadel dan Eren Tatari, "*Political Anlysis Of Bediuzzaman Sa'id Nursi's Damascus Sermon*".³³ Dalam makalah ini Kamil Fadel dan Eren Tatari dari Rollins College, United States of America menjelaskan tentang analisa-analisa politik Badi'uzzamān Sa'id Nursi yang ia sampaikan dalam Khutbah di Damaskus tahun 1911 di hadapan 10.000 audiens. Khutbah ini dikenal dengan nama Khutbah Syamiyah. Nursi menjelaskan bahwa Islam adalah kekuatan sosial yang membawa manusia kepada kemerdekaan yang hakiki. Nursi berbicara tentang prinsip konstitusi, nasionalisme dan kepemimpinan yang dapat membawa umat ke arah keadilan dan kemakmuran.
17. Zubair Hamid, "*Muslim Response to The West; A Comparative Study of Muhammad Abduh and Sa'id Nursi*".³⁴ Dalam jurnal ini, Zubair Hamid, peneliti di Aligarh Muslim University, India, memaparkan perbandingan sikap Muhammad Abduh dan Sa'id Nursi dalam menyikapi isu-isu tentang barat. Nursi mengakui kemajuan peradaban barat tapi bukan berarti anti kritik. Semua yang datang dari barat harus difilter berdasarkan nilai-nilai dalam al-Quran. Konsep kemerdekaan, kebebasan berpendapat, demokrasi, keadilan, persamaan, teknologi, dan industri tentu boleh diambil sebab semua itu sesuai dengan nilai-nilai kebenaran Islam. Nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam peradaban ini tidak dapat ditolak.

³³ Kamil Fadel dan Eren Tatari, "Political Anlysis Of Bediuzzaman Said Nursi's Damascus Sermon" *Jurnal Humanities And Social Sciences Review*, Desember 2016, hlm. 303

³⁴ Zubair Hamid, "Muslim Response to The West; A Comparative Study of Muhammad Abduh and Said Nursi." *Journal of Islamic Thought and Civilization*, Spring 2014, Vol. II, Issue II.

Namun ada beberapa filsafat naturalisme dan positivisme yang tidak terarah dan bertentangan dengan agama tentu tidak dapat diterima.

18. Murtala Bala Umar dkk, "*Sustainable Economic Development Through View Of Sa'id Nursi: The Challenge of The West*"³⁵ Ditulis oleh Murtala Bala Umar, Suraya Ismail, dan Mohammad Sani Abdullahi, Faculty of Economic and Management Science University Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia, yang dimuat dalam Proceedings of International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century. 6-7 September 2015. Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia. Dalam kajiannya, para penulis menyampaikan tentang pandangan Sa'id Nursi dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi umat. Dalam al-Qur'an dan Sunnah prinsip-prinsip pertumbuhan dan pengembangan ekonomi ini sesungguhnya sudah ada. Itulah yang berusaha dieksplorasi oleh Sa'id Nursi dengan memperhatikan realitas kehidupan saat ini.
19. Ichwansyah Tampubolon, "Dakwah dan Modernisme Studi Terhadap Pemikiran dan Aktifitas Dakwah Bediuzzaman Sa'id Nursi."³⁶ Dosen fakultas dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan ini menjelaskan tentang modernisasi Turki yang bercorak westernisasi dan sekularisasi yang berlangsung sejak era *Tanzhimat* (1839-1876) yang menyebabkan simbol-simbol keislaman tradisional di bidang politik,

³⁵ Murtala Bala Umar, dkk., "Risalah Nur dan Gerakan Tarekat di Turki; Peran Said Nursi Pada Awal Pemerintahan Republik." Disampaikan dalam International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century di Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia. Tanggal 6-7 September 2015..

³⁶ Ichwansyah Tampubolon. "Dakwah dan Modernisme Studi Terhadap Pemikiran dan Aktifitas Dakwah Bediuzzaman Said Nursi." *Jurnal Hikmah*, Vol. II, No. 01, Januari – Juni 2015, hlm. 1-22.

hukum, sistem pendidikan, dan kultur keberagaman masyarakat muslim Turki mengalami marjinalisasi dan degradasi secara sistemik dan intensif. Menghadapi kondisi ini, Sa'id Nursi memiliki pandangan-pandangan progressif yang menarik untuk dikaji, antara lain: Reaktualisasi Dasar-Dasar Keimanan yang Benar, Revitalisasi Moralitas Keagamaan dan Reformulasi Metodologi Interpretasi Ajaran Wahyu. Pandangan ini dituangkan dalam Risalah An Nur dan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat muslim Turki, antara lain dengan terbentuknya Komunitas Thullābunnūryang secara intensif mengkaji pemikirannya.

20. Muhammad Faiz, “Risalah Nur dan Gerakan Tarekat di Turki; Peran Sa’id Nursi Pada Awal Pemerintahan Republik.”³⁷ Ditulis oleh Muhammad Faiz, Mahasiswa University Kebangsaan Malaysia (UKM, menulis tentang. Dimuat dalam Jurnal Al-A’raf; Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat IAIN Surakarta, Volume XIV, No. 1, Januari – Juni 2017. Dalam kajiannya, Muhammad Faiz mengangkat tentang peran gerakan Risalah Nur dan hubungannya dengan gerakan tarekat di Turki, khususnya setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah dan awal konsep negara Turki Modern. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Risalah Nur memainkan peran penting pada saat itu dengan mengedepankan konsep pendidikan Islam yang sejalan dengan nilai kehidupan universal, seperti perdamaian dan cinta kasih.

³⁷ Muhammad Faiz. “Risalah Nur dan Gerakan Tarekat di Turki; Peran Said Nursi Pada Awal Pemerintahan Republik.” *Jurnal Al-A’raf; Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat IAIN Surakarta*, Vol. XIV, No.I, Januari – Juni 2017.

Tabel 1 : Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Fokus dan Pertanyaan Penelitian	Metode Dan Pendekatan	Hasil Penelitian
	Hasan Horkuc. <i>“Sa’id Nursi’s Ideal for Human Society: Moral and Social Reform In The Risale-i Nur”</i> . Disertasi Doktor. (Inggris: Durham University 2004. http://etheses.dur.ac.uk/1754/)	Bagaimana pandangan Sa’id Nursi mewujudkan masyarakat ideal?	Disertasi ini menggunakan analisis data Deskriptif – Kualitatif. Pendekatan yang dipakai menggunakan sosiologis, teologis normatif, dan historis.	Agama, sains, dan sosial adalah faktor penentu utama masyarakat ideal di era modern.
	Rajab Thayyib Erdogan. <i>“Sa’id An Nursi Khizānatun Tantazhirul Iktisyāf”</i> Jurnal Al-Nur Academic Studies on Thought and Civilization. Vol. IV, Bulan Juli 2011, hlm. 9-12	Bagaimana peran penting pemikiran Sa’id Nursi bagi keilmuan?	Kajian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan sosiologis-normatif.	Rasāil Nur adalah bahan kajian yang sangat kaya dengan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat dan penting tentang prinsip dan nilai-nilai utama dalam perbaikan umat
	Ahmad Daud Oglo <i>“Siyāsah Al-‘Alam Al-Islami fi Al-Qarn Al-Isyirin fi Nazhar An Nursi”</i> Jurnal Al-Nur Academic Studies on Thought and Civilization. Vol. III, Bulan Januari, 2011, hlm. 15-48.	Bagaimana Sa’id Nursi menjawab tantangan perkembangan politik di dunia Islam abad 20?	Penulis membuat analisa kajian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan sosiologis, teologis, dan historis	Di pintu gerbang sebuah peradaban baru, dan Sa’id Nursi memprediksi bahwa Islam adalah suara teragung yang akan bergaung dalam peradaban baru itu
	Mehmed Halil Cicek <i>“Malāmih Tajaddud Khithāb An Nursi fi Muwājahati Tahaddiyatil Ashri”</i> Jurnal Al-Nur Academic Studies on Thought and Civilization. Vol. IV, Bulan Juli 2011, hlm. 9-12.	Bagaimana keistimewaan ide pembaharuan Nursi menghadapi problematika modern?	Penullis menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan sosiologis, historis, dan normatif	Menghadapi problematika modern, Sa’id Nursi menawarkan ide yang rasional dan mengusung nilai nilai yang tinggi, menggerakkan jiwa untuk mencintai hukum dan praktek ibadah dalam Islam, dengan bahasa yang modern dalam penyampaian
	Muhammad Sa’ad Abdul Majid Qasim, <i>“Ilāj Ahammil Musykilāt Asy Siyāsiyyah wa Al-Iqtishādiyyah fi Al-‘Alam Al-Islāmi min Khilal Fikr Al-Imām An Nursi wa</i>	Apa solusi Sa’id Nursi menghadapi permasalahan politik, ekonomi, dan persatuan?	Kajian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisa sosial	Nursi sudah menulis tentang hal ini dalam Rasail Nur. Saad mengangkat dan menganalisa teks-teks yang berbicara tentang hal ini

<p><i>Atsaruhu fi Wahdatil Ummah</i>”, makalah disampaikan dalam Simposium Internasional Pemikiran Badi’uzzamān Sa’id Nursi dan Pengaruhnya Dalam Persatuan Umat Islam, diselenggarakan oleh Universitas Al-Azhar Mesir dan The Istanbul Foundation for Science and Culture tanggal 26-27 Februari 2013 di Kairo, Mesir.</p>			
<p>Muhammad Asy Sarbaini, <i>“Al Imām Badi’uzaman Sa’id Nursi Ats Tsā’ir wa As Siyāsi”</i>, makalah disampaikan dalam Simposium Internasional Pemikiran Badi’uzzamān Sa’id Nursi dan Pengaruhnya Dalam Persatuan Umat Islam, diselenggarakan oleh Universitas Al-Azhar Mesir dan The Istanbul Foundation for Science and Culture tanggal 26-27 Februari 2013 di Kairo, Mesir.</p>	<p>Bagaimana perjuangan dan jihad Sa’id Nursi dalam politik?</p>	<p>Kajian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan historis dan sosiologis.</p>	<p>Nursi terbukti terjun langsung ke medang pertempuran, berusaha mendirikan Madrasah Az Zahra’, bergabung dalam organisasi massa, memberikan pencerahan tentang politik kepada masyarakat untuk kemajuan negerinya.</p>
<p>Amar Djidel. <i>“Ghiyāb Al-‘Amal Al-Ijābi au Taghyībuhu fi Hayāti Al-Muslimīna Al-Mu’ashirah – Al-Asbāb wa Al-‘Ilāj; Dirasah di Rasāil An Nūr li Badi’izzaman Sa’id An Nursi”</i> Jurnal Al-Nur Academic Studies on Thought and Civilization. Vol. VIII, No. XVI, Juli 2017, hlm. 143-166</p>	<p>Mengapa aksi positif hilang dari masyarakat dan bagaimana Sa’id Nursi kembali menumbuhkannya?</p>	<p>Dalam kajian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan sosiologis-teologis..</p>	<p>Aksi positif hilang karena tidak ada ilmu dan iman. Iman yang menjadi sebab lahirnya berbagai aksi positif. Dari teoritik kepada praktek, dari sekedar konseptual menjadi refleksi kehidupan.</p>
<p>Amar Djidel. <i>“Tahrirul Hurriyyah fi Rasāil An Nur”</i> Jurnal Al-Nur Academic Studies on Thought and Civilization. Vol. VIII, No. XII, Bulan Juli 2015, hlm. 71-98.</p>	<p>Bagaimana Nursi memandang tentang hakikat kebebasan dan kemerdekaan bagi umat manusia?</p>	<p>Kajian ini menggunakan analisis data deksriptif-kualitatif, dengan pendekatan sosiologis-normatif.</p>	<p>Sa’id Nursi berusaha mengembalikan makna kebebasan ini kepada makna yang sejati dengan memperhatikan banyak faktor terkait dengan individu dan sosial.</p>
<p>Abdul Azhim Ahmad Abdul Azhim, <i>“Daur Al Akhlaq fi Taghyir Al Waqi Al Mu’ashir min Khilal Fikr</i></p>	<p>Bagaimana Sa’id Nursi melihat fenomena penyimpangan akhlak dalam</p>	<p>Kajian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan sosiologis-normatif.</p>	<p>Perbaikan penyimpangan akhlak dimulai dari perbaikan individu kemudian pemerintahan, dengan</p>

	<i>Al Imam An Nursi</i> makalah disampaikan dalam Simposium Internasional Pemikiran Badi'uzzamān Sa'id Nursi dan Pengaruhnya Dalam Persatuan Umat Islam, diselenggarakan oleh The Istanbul Foundation for Science and Culture tanggal 26-28 September 2004 di Istanbul, Turki.	masyarakat dan bagaimana solusi manhaj Imam An Nursi dalam memperbaikinya?		memperhatikan poin poin yang paling mendasar dalam proses perbaikan tersebut.
	Mubarak Lamin <i>"Min Ma'alim At Tajdid 'Inda An Nursi"</i> Jurnal Al-Nur Academic Studies on Thought and Civilization. Vol. XII, Bulan Juli 2015. Hlm. 149-163.	Bagaimana Nursi melihat akar perpecahan dan apa yang menjadi solusi konflik?	Penulis memaparkan kajiannya menggunakan analisis data deksiptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis, teologis, normatif.	Nursi menekankan dua hal yang utama untuk menyelesaikan perpecahan yaitu mujahadah dan membersihkan diri, kemudian menegakkan perangkat-perangkat persatuan
	Muhsin Abdul Hamid, <i>"Min Ma'alim At Tajdid 'Inda An Nursi"</i> Jurnal Al-Nur Academic Studies on Thought and Civilization. Vol. III, No. V, Januari 2012, hlm. 29-40.	Apakah ancaman bagi dunia islam dan apa prinsip-prinsip Tajdid dalam pemikiran Nursi?	Penulis mengemukakan kajian dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan fenomenologis-sosiologis dan normatif.	Menghadapi beragam konspirasi Nursi memulai perubahan dengan penguatan kualitas pribadi dan prinsip prinsip tajdid
	Al-Arabi Buselham. <i>"Min Al Usus Al Fikriyyah wa Al Hadhariyyah fi Kitabah An Nursi"</i> Jurnal Al-Nur Academic Studies on Thought and Civilization. Vol. III, No. V, Januari 2012, hlm. 69-87.	Bagaimana pengaruh Rasail Nur dalam masyarakat dan apa saja prinsip dasar yang menjadi fokus kajian Sa'id Nursi?	Penulis mengangkat fenomena yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan sosiologis-teologis.	Sa'id Nursi berusaha memerangi berbagai syubhat dan menanamkan keimanan dalam hati kaum muslimin, dan memperhatikan prinsip-prinsip dasar untuk memperbaiki pemikiran dan peradaban.
	Shabahuddin Za'im, <i>"Ar Ru'yah Al Hadhariyyah min Khilal Risalah Al Iqtishad"</i> Jurnal Al-Nur Academic Studies on Thought and Civilization. Tahun ke tiga Edisi V, Bulan Januari 2012, hlm. 127-142.	Bagaimana visi peradaban Sa'id Nursi dalam ekonomi?	Dalam menganalisa kehidupan ekonomi masyarakat dalam pandangan Sa'id Nursi, menulis menggunakan metode deskriptif-kuliatatif, dengan pendekatan sosiologis normatif	Dalam Rasail Iqtishad, Sa'id Nursi menerangkan tentang gaya hidup masyarakat modern yang boros dan pola konsumsi yang berlebihan, yang memancing lahirnya banyak keburukan. Dalam hal ini Nursi menerangkan tentang pentingnya hemat dan mengontrol pola hidup.
	Mustafa Adardawr.	Bagaimana	Untuk memotret peta	Dalam perjalanan

	<p>"Mahathaat Baarizah min At Tarikh Al Mu'ashir wa Atsaruha fi Hayat An Nursi wa Madrasatuhu Al Fikriyyah"</p> <p>Jurnal Al-Nur Academic Studies on Thought and Civilization. Vol. VIII, No. XI, Januari 2017, hlm. 10-28.</p>	<p>pengaruh kejadian di Turki dalam peta pemikiran Sa'id Nursi dalam perjalanan hidupnya?</p>	<p>pemikiran dan perjuangan Sa'id Nurs, penulis melakukan pendekatan kualitatif, dengan pendekatan sejarah sosial, normatif dan teologis.</p>	<p>panjang kehidupan negara Turki dari sisi agama, sosial, politik, dan lainnya, Madrasah An Nur yang mengusung pemikiran Sa'id Nursi menjadi satu komponen yang sangat penting dan paling banyak hadir dalam masyarakat Turki, khususnya dalam menghadirkan solusi keimanan.</p>
	<p>Mohammad Ajmal,</p> <p>"Globalization and The Thought of Unity In Diversity of Badi'uzzamān Sa'id Nursi In The Light of His Magnum Opus Risala-i Nur."</p> <p>Journal of Islam and Muslim Societies, Vol. IV, No. 1, Juni 2014, hlm. 134-153.</p>	<p>Bagaimanakah pandangan Sa'id Nursi tentang globalisasi?</p>	<p>Mengkaji gagasan Sa'id Nursi tentang globalisasi, penulis mengangkat kajian kualitatif dengan pendekatan teologis-normatif.</p>	<p>Badi'uzzamān Sa'id Nursi selalu memandang dunia sebagai salah satu komponen untuk memuliakan Sang Pencipta dan menyaksikan kebesarannya. Universalitas yang dipercayainya berlawanan dengan universalitas yang dihasilkan dari globalisasi seperti yang umum dipahami dan digambarkan.</p>
	<p>Kamil Fadel dan Eren Tatari.</p> <p>"Political Anlysis Of Bediuzzaman Sa'id Nursi's Damascus Sermon"</p> <p>Jurnal Humanities And Social Sciences Review, Desember 2016. CD-ROM. ISSN: 2165-6258. https://www.researchgate.net/publication/312016279</p>	<p>Bagaimanakah prinsip-prinsip politik dalam pandangan Sa'id Nursi?</p>	<p>Penulis mengkaji gagasan politik Sa'id Nursi dalam Khutbah Syamiyah dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan sosiologis normatif</p>	<p>Dalam khutbah syamiyah Nursi menjelaskan bahwa Islam adalah kekuatan sosial yang membawa manusia kepada kemerdekaan yang hakiki. Nursi berbicara tentang prinsip konstitusi, nasionalisme dan kepemimpinan yang dapat membawa umat ke arah keadilan dan kemakmuran</p>
	<p>Zubair Hamid.</p> <p>"Muslim Response to The West; A Comparative Study of Muhammad Abduh and Sa'id Nursi."</p> <p>Journal of Islamic Thought and Civilization, Spring 2014, Vol. II, Issue II.</p>	<p>Bagaimanakah perbandingan sikap Muhammad Abduh dan Sa'id Nursi dalam menyikapi isu-isu tentang barat?</p>	<p>Penulis mengangkat kajian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan sosiologis-normatif.</p>	<p>Nursi mengakui kemajuan peradaban barat tapi bukan berarti anti kritik. Semua yang datang dari barat harus difilter berdasarkan nilai-nilai dalam Al Quran.</p>

<p>Murtala Bala Umar dkk</p> <p>Murtala Bala Umar, dkk. <i>“Risalah Nur dan Gerakan Tarekat di Turki; Peran Sa’id Nursi Pada Awal Pemerintahan Republik.”</i></p> <p>Disampaikan dalam International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century di Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia. Tanggal 6-7 September 2015..</p>	<p>Bagaimana pandangan Sa’id Nursi dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi umat?</p>	<p>Untuk menganalisa pengelolaan ekonomi dalam pandangan Nursi, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis</p>	<p>Dalam Al Qur'an dan Sunnah prinsip-prinsip pertumbuhan dan pengembangan ekonomi ini sesungguhnya sudah ada. Itulah yang berusaha dieksplorasi oleh Sa’id Nursi dengan memperhatikan realitas kehidupan saat ini.</p>
<p>Ichwansyah Tampubolon.</p> <p><i>“Dakwah dan Modernisme Studi Terhadap Pemikiran dan Aktifitas Dakwah Bediuzzaman Sa’id Nursi.”</i></p> <p>Jurnal Hikmah, Vol. II, No. 01, Januari – Juni 2015, hlm. 1-22.</p>	<p>Bagaimana Nursi menghadapi modernisasi Turki?</p>	<p>Dalam kajian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan sosiologis, teologis, normatif.</p>	<p>Sa’id Nursi memiliki pandangan-pandangan progressif yang menarik untuk dikaji, antara lain: Reaktualisasi Dasar-Dasar Keimanan yang Benar, Revitalisasi Moralitas Keagamaan dan Reformulasi Metodologi Interpretasi Ajaran Wahyu. Pandangan ini dituangkan dalam Risalah An Nur</p>
<p>Muhammad Faiz.</p> <p><i>“Risalah Nur dan Gerakan Tarekat di Turki; Peran Sa’id Nursi Pada Awal Pemerintahan Republik”</i> Jurnal Al-A’raf; Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat IAIN Surakarta, Vol. XIV, No.I, Januari – Juni 2017.</p>	<p>Bagaimana peran Sa’id Nursi di awal pemerintahan republik dan hubungannya dengan gerakan tarekat di Turki?</p>	<p>Mengkaji peran Sa’id Nursi di awal pemerintahan republik, penulis menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan historis-teologis.</p>	<p>Risalah Nur memainkan peran penting pada saat itu dengan mengedepankan konsep pendidikan Islam yang sejalan dengan nilai kehidupan universal, seperti perdamaian dan cinta kasih.</p>

Tabel 1: Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian jurnal, tesis dan disertasi ini pada umumnya menggunakan kajian pustaka dekriptif analitik dengan pendekatan sosiologis, teologis, normatif, dan historis, untuk meneliti konsep siyāsah syar’iyyah. Namun penelitian ini

belum ada yang secara khusus mengkaji pemikiran Sa'id Nursi keislaman dan keindonesiaan; dengan pendekatan historis, sosial, dan filosofis dalam kerangka hukum Islam dan studi komparatif dengan pemikiran presiden pertama Indonesia, Bung Karno.

Penelitian ini secara khusus mengkaji tentang asas-asas gagasan *siyāṣah syar'iyah* Badi'uzzamān Sa'id Nūrsi dan melakukan studi komparatif dengan pemikiran politik Presiden Soekarno. Inilah yang membedakan penelitian ini dengan dalam penelitian yang sudah ada sebelumnya

B. Kerangka Teori

Berikut ini adalah kerangka teori yang penulis gunakan dalam mengkaji pemikiran Badi'uzzaman Sa'id An Nursi dalam *siyāṣah syar'iyah*.

1. Teori Maslahat

Ibnu Qayyim Al Jauziyyah menyatakan bahwa pondasi dan dasar hukum syariat adalah maslahat di dunia dan akhirat. Syariat itu seluruhnya adalah keadilan, kasih sayang, hikmah, dan maslahat bagi manusia. Semua perkara yang keluar dari keadilan kepada kecurangan, dari kasih sayang kepada kebalikannya, dari maslahat kepada mafsadat, dari hikmah kepada kesia-siaan, maka semua perkara itu sudah keluar dari syariat.³⁸

Secara bahasa, maslahat berarti manfa'at, yang mencakup segala hal yang mendatangkan guna dan menolak bahaya. Sementara secara

³⁸ Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, (Beirut; Darul Jil, 1973), jilid 3, hlm. 14

istilah maslahat berarti manfaat yang dimaksudkan oleh Allah Swt. bagi para hambaNya untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka sesuai urutan prioritas yang terdapat padanya.³⁹ Dalam hal ini, tidak setiap hal yang membawa manfaat dalam kehidupan manusia menjadi maslahat yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan hukum. Ada beberapa aturan dan kriteria (*dhāwābith*) yang perlu dilihat untuk menilai apakah hal tersebut menjadi bagian dari maslahat atau tidak. Dalam disertasinya di Universitas Al Azhar tentang *Dhāwābith Al Maslahah*, Dr. Muhammad Ramadhan Al Buthi menjelaskan dengan detail tentang 5 hal yang menjadi kriteria maslahat ini, yaitu tidak bertentangan dengan *Maqāshid Syarī'ah*, tidak bertentangan dengan Al Qur'an, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan qiyas yang benar, dan tidak menghilangkan maslahat yang lebih besar atau minimal sama.⁴⁰

Hal yang sama ditekankan pula oleh Al Qaradawi. Ia menyatakan bahwa di balik semua hukum syariat ada maslahat yang ingin diwujudkan, baik itu sifatnya *Dharūriyyāt* (kebutuhan primer), *Hājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsīniyyāt* (kebutuhan tersier). Adanya pertimbangan maslahat dan maqashid syariah inilah yang melahirkan perbedaan ijihad dan fatwa antara satu ulama dengan ulama lainnya, pada suatu waktu dan waktu lainnya.

Ketika seorang mujtahid dihadapkan pada pilihan di antara dua maslahat yang harus dipilih, atau pada dua bahaya yang harus dihindari,

³⁹ Muhammad Ramadhan Al Būthi, *Dhāwābith Al Maslahah*, (Beirut; Mu'assasah Ar Risālah, 1973), hlm. 23

⁴⁰ Ibid. hlm. 18

atau di antara maslahat dan mafsadat mana yang harus didahulukan, dan apa yang menjadi alasan yang satu diutamakan dibandingkan dengan yang lain, apakah yang harus ia lakukan? Hal ini sudah dikaji oleh para ulama secara mendalam pada bab *Fiqh Al Muwāzanāt*.

Di saat ada dua maslahat yang bertabrakan, maka diutamakan maslahat umum daripada maslahat khusus, maslahat jangka panjang daripada maslahat jangka pendek, maslahat yang substansial daripada maslahat yang formalitas.

Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah saat perjanjian Hudaibiyah. Beliau lebih mendahulukan maslahat masa depan dan yang mendasar dibandingkan maslahat yang terbatas. Beliau mengizinkan untuk menghapus lafaz *bismillāh* dari lembar perjanjian atas permintaan perwakilan quraisy yang tidak setuju, menghapus kata Rasulullah, dan menyepakati poin-poin yang seakan merugikan kaum muslimin. Tetapi akhirnya kaum muslimin bisa melihat bahwa poin perjanjian hudaibiyah memberikan keuntungan kepada kaum muslimin dan menjadi pintu gerbang terjadinya Fathu Makkah.

Ketika terjadi perimbangan antara banyak maslahat, maka perlu diperhatikan ukuran dan luas maslahat, kedalaman dan pengaruhnya, kepastian dan keakuratannya, jangka waktu dan masanya, sehingga bisa diketahui mana yang harus segera didahulukan, mana yang bisa ditunda, dan mana yang bahkan tidak perlu dilakukan sama sekali. Ketika terjadi

perimbangan mafsadat dan bahaya, maka sisi yang perlu dipertimbangkan seperti perimbangan dalam masalahat.

Sementara ketika terjadi perimbangan antara masalahat dan mafsadat, yang perlu diperhatikan adalah kapasitas masalahat dan mafsadat, besar kecil pengaruhnya, sehingga bisa mengambil keputusan apakah mendahulukan mendapatkan manfaat ataukah mementingkan menghindari bahaya. Pemahaman yang baik dan mendalam tentang teori fikih perimbangan ini menjadi sebuah kewajiban bagi akademisi muslim, sehingga bisa memberikan keputusan yang tepat terhadap permasalahan umat.⁴¹

Adapun tentang perubahan yang terjadi dengan sangat dinamis di tengah masyarakat, terutama yang menyentuh sektor publik dan melibatkan banyak orang, Yusuf Al Qaradawi menyatakan bahwa ada tiga prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam usaha melakukan perubahan yaitu prinsip darurat, prinsip penyikapan atas kemungkaran, dan prinsip kebertahanan.⁴²

Hal ini dengan pertimbangan bahwa kondisi darurat memiliki hukum khusus dibandingkan dengan kondisi normal. Ada 3 kaedah fikih yang paling terkenal dalam hal ini, yaitu: *Ad-Dharūrāt Tubīh Al-Mahzūrāt* (keadaan darurat membolehkan apa yang terlarang), *Mā ubīha li Ad-dharūrah yuqaddaru biqadarihā* (apa yang diperbolehkan karena darurat

⁴¹ Yusuf Al Qardhawi, *As Siyāsah Asy Syar'īyyah fi dhau'i nushūsh asy ayari'ah wa maqāshidihā*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2011), hlm. 345

⁴² Ibid., hlm. 378

diambil sesuai kadarnya saja), *Al-Hājatu qad tanzilu manziladharūrah* (hajat hidup kadang mencapai tingkatan darurat).

Kaedah-kaedah ini memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan al-Quran dan sunnah dan diterima oleh para ulama. Kondisi darurat yang dimaksud tidak hanya menyangkut kehidupan individu dan personal, tapi kadang juga terkait dengan masalahat dan kepentingan sosial masyarakat di bidang sosial, politik, militer, dan ekonomi, sehingga menuntut adanya sebuah kebijakan yang tepat untuk mewujudkan masalahat-maslahat ini.

Dalam menyikapi kemungkaran, ada kaidah fikih yang terkenal, yaitu: "*As-Sukūtu 'alal munkari idza tarattaba 'alā taghyirihī munkarun akbaru minhu*" (Boleh diam atas sebuah kemungkaran apabila usaha perbaikannya menyebabkan kemungkaran yang jauh lebih besar). Hal ini dilakukan untuk menolak mafsadat yang lebih besar dengan mengambil resiko yang lebih kecil. Inilah yang menjadi dasar pandangan para ulama tentang perlunya melakukan perubahan secara konstitusional dan berdasarkan hukum yang berlaku, dan wajibnya taat kepada pemimpin fasik yang tidak bisa diganti apabila menyebabkan fitnah dan bahaya yang lebih besar dalam usaha melengserkannya.

Selain itu juga, ada prinsip kebertahanan. Inilah prinsip yang dijalankan oleh Rasulullah dalam menjalankan dakwah beliau, dan prinsip yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang diutus ke berbagai negeri. Contohnya, selama tiga belas tahun berada di Makkah,

Rasulullah fokus pada perbaikan keyakinan masyarakat. Setelah itu ketika beliau berada di Madinah, barulah ada penetapan aturan dan perundang-undangan dalam kehidupan bermasyarakat. Itupun tidak dilakukan sekaligus. Mula-mula diperintahkan shalat, kemudian puasa, lalu zakat, seterusnya haji, dan hukum-hukum syariat yang lainnya.

Menurut Al Qaradawi, landasan teoritis kajian *siyāsah syar’iyyah* terpusat pada dua hal: yaitu fikih nash dalam kerangka *maqashid kulliyah* dan pada fiqh realitas.⁴³ Kajian tentang realitas kehidupan hukumnya wajib bagi setiap ulama fikih ketika membahas suatu hukum, terutama dalam bab *siyāsah syar’iyyah*. Sebab hal ini berkaitan langsung dengan kehidupan manusia, keputusan, organisasi, dan hajat hidup orang banyak. Fiqih Realitas ini dibangun berdasarkan studi ilmiah yang mengungkap segala aspek dan unturnya baik positif maupun negatif dari realitas yang ada, kemudian dari situ para ulama mengambil keputusan hukum. Demikianlah proses pengambilan keputusan khulafa rasyidin, para ulama, dan para pemimpin muslim terdahulu.

Dalam kaitannya dengan latar belakang kehidupan Badi`uzzamān Sa`id Nūrsi, realita perubahan sistem dan model pemerintahan yang ada di Turki pada awal pemerintahan republik, menuntut banyak perubahan dalam pola kehidupan masyarakat Turki saat itu. Untuk memelihara kemaslahatan yang jauh lebih penting, yaitu *Al Maqāshid Al-Kulliyah*, penting bagi Sa`id Nursi menyikapi realitas yang ada di hadapan mata.

⁴³Ibid., hlm. 328

Bukan hanya untuk menjaga keberlangsungan hidup umat yang ada di belakangnya dan menjadi pengikutnya, tapi juga untuk menegakkan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Salah satu contoh dalam hal ini adalah penolakan Sa'id Nursi dalam aksi pemberontakan Syekh Said pada tahun tahun 1925, saat keresahan menyebar luas di kalangan masyarakat Turki akibat serangkaian undang-undang yang menghapuskan beberapa aturan keagamaan yang sudah bertahan lama dan mengakar di Turki, seperti pelarangan berjilbab, menggunakan bahasa Arab, mengganti azan dengan bahasa Turki, dan lainnya. Realita ini memicu pemberontakan yang dipimpin oleh Syekh Said Bairan, salah seorang ulama dari Thariqat Naqsyabandiyah dengan alasan untuk menegakkan syariat. Nursi diajak oleh pendukung Syekh Said dan mendapat surat dari Syekh Said langsung yang berisi ajakan untuk ikut dalam aksi tersebut. Pemberontakan pun pecah pada tanggal 13 Februari 1925, namun dapat dipadamkan hanya dalam waktu dua bulan. Syekh Said sendiri dijatuhi hukuman mati bersama 47 pengikutnya, menyul penutupan semua tempat ibadah sufi di Timur Anatolia

Alasan Nursi menolak ajakan ini disampaikan kepada utusan Syekh Said,

“Prajurit-prajurit itu adalah anak-anak negeri ini. Mereka adalah handai tolanku dan handai tolanmu. Siapa yang akan kamu bunuh? Dan siapa yang akan mereka bunuh? Berfikirlah! Pakailah otakmu! Apakah kamu

hendak menyuruh Ahmet membunuh Mehmet, dan Hasan membunuh Husain?”⁴⁴

Dalam hal ini, Nursi memandang bahwa pemberontakan tersebut akan membawa bahaya yang jauh lebih besar dari manfaat yang didapatkan. Sebagai seorang ‘alim, Nursi memandang realitas yang ada berdasarkan ilmu. Pandangan inilah yang banyak banyak ia tuangkan dalam Risālah An-Nurnya menyampaikan analisa dan solusi permasalahan atas apa yang tengah mengemuka.

⁴⁴ Şükran Vahide, *Islam in Modern Turkey; An Intellectual Biography of Bediuzzaman Said Nursi*, hlm. 180

2. Teori Sejarah Sosial⁴⁵

Sejarah sosial yang penulis maksudkan di sini adalah kajian tematik Siyasah Syar'iyah dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi lahir dan berkembangnya satu pemikiran dalam hukum Islam. Penggunaan sejarah sebagai analisis, seperti kata Prof. Minhaji, adalah sebuah usaha sekuat tenaga memahami sejumlah peristiwa yang terjadi pada masa lalu, apa yang terjadi saat ini, hubungan antara keduanya, dan menjawab persoalan yang dihadapi umat Islam pada masa sekarang dan akan datang. Dengan demikian, studi Islam dalam perspektif sejarah dapat membantu masyarakat muslim untuk konsisten dengan norma agama, sekaligus mampu mengantisipasi berbagai persoalan hidup untuk kepentingan masa kini dan juga masa depan.⁴⁶

Kajian sejarah sosial kehidupan tokoh ini menjadi penting didasarkan pada asumsi bahwa sebagian besar pemikiran Islam merupakan hasil refleksi dari interaksi seorang pemikir (*'alim, faqih*) dengan kondisi

⁴⁵ Prof. Akh Minhaji menyatakan bahwa perkembangan teori sejarah yang berkembang dalam perspektif Barat dapat dibagi kepada empat teori, yaitu teori lingkaran (*cylical theory*) yang menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat fenomena-fenomena dasar antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya dan perbedaannya hanya pada dataran permukaan saja, teori takdir (*providential theory*) yang menyatakan bahwa sejarah kehidupan manusia sepenuhnya ditentukan oleh kekuasaan di luar dirinya (Tuhan), teori progres (*progress theory*) yang menyatakan bahwa manusia bisa maju dan berkembang melalui penelitian secara alamiah dan ilmiah, dan teori gabungan dan kombinasi (*miscellaneous philosophies of history*) yang menawarkan kombinasi dan kerjasama antara teori bahwa merupakan satu keniscayaan, sebab tidak ada satupun teori yang bisa melihat satu peristiwa sejarah secara purna dan komprehensif. (Lihat Prof. Drs. Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013) hlm. 128-132. Kajian ini lebih cenderung menggunakan teori kombinasi

⁴⁶ Prof. Drs. Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013), hlm. 26-27

politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang mengitarinya.⁴⁷ Dalam kajian ini, penulis sangat berusaha menggali hal hal tersebut dalam kehidupan Badi`uzzamān Sa`id Nūrsi.

Studi tokoh yang ada selama ini dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, sebagai bagian dari pendekatan sejarah (*historical approach*), yang bersangkutan. Kedua, studi ini sering kali dikelompokkan pada bidang yang dibicarakan oleh tokoh yang bersangkutan. Misalnya, jika seorang tokoh membicarakan tasawuf, maka studi ini dimasukkan pada pendekatan tasawuf⁴⁸

Menurut Syahin Harahap, ketokohan seseorang paling tidak dapat dilihat dari tiga indikator. *Pertama*, integritas tokoh tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kedalaman ilmunya, kepemimpinannya, keberhasilan dalam bidang yang digeluti hingga mempunyai kekhasan atau kelebihan dibanding orang-orang segenerasinya, dan juga dapat dilihat dari integritas moralnya. *Kedua*, karya monumentalnya, baik karya tulis, karya nyata dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang bermanfaat bagi masyarakat atau pemberdayaan manusia, baik sezaman maupun sesudahnya. *Ketiga*, kontribusinya dalam masyarakat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk pemikiran maupun aksinya⁴⁹ Ketiga indikator ini terpenuhi dalam pribadi Sa'id Nursi.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 59

⁴⁸ Syahin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 4

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 8

Dalam melakukan penelitian terhadap pemikiran Nursi, penulis melakukan empat pendekatan yang dikenal dalam studi tokoh, yaitu:

1. Pendekatan tematis (*Tipical Approach*)

Yaitu mendeskripsikan aktifitas tokoh berdasarkan sejumlah tema/topik yang menggunakan konsep-konsep yang biasanya dipakai untuk mempelajari suatu bidang keilmuan tertentu, misalnya studi tokoh mengenai pemikiran hukum Islam di Indonesia dan sebagainya. Pendekatan ini bersifat analitis, sehingga dapat membedakan antara pemikiran sang tokoh dari pemikiran tokoh lain dalam suatu bidang keilmuan tertentu.⁵⁰ Untuk mendalami pemikiran Nursi, penulis langsung merujuk ke referensi utama yang ditulis oleh Badi`uzzamān Sa`īd Nursi sendiri, yaitu *Kulliyāt Rasāil An-Nūr*.

2. Pendekatan otobiografi

Pendekatan ini sangat luas dan intensif dari masing-masing tokoh. Teknik ini digunakan untuk memahami sang tokoh berdasarkan pendapat tokoh lain yang mempunyai disiplin keilmuan yang sama atau berbeda. Prinsipnya adalah baik yang dinilai maupun yang menilai adalah sama-sama tokoh. Pandangan bebas dari masing-masing tokoh terhadap sang tokoh yang menjadi

⁵⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 115

fokus studi dapat membantu kesahihan dan keandalan data yang diperoleh dari teknik ini.⁵¹

Pendekatan ini penulis gunakan ketika mengkaji latar belakang kehidupan Badi`uzzamān Sa`īd Nursi yang ditulis oleh banyak tokoh, terutama Şükran Vahide dalam bukunya *Islam in Modern Turkey; An Intellectual Biography of Bediuzzaman Said Nursi*, dan Ihsan Qāsim Ash Shālihi dalam bukunya *Nazhrah 'Ammah 'An Hayāt Badi`uzzamān Sa`īd Nursi*.

3. Pendekatan masalah khusus

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif suatu masalah khusus atau kejadian luar biasa atau kejadian gawat yang menyangkut tokoh. Bagaimana sang tokoh menghadapi masalah persoalan baru yang sangat khusus dan bahkan luar biasa itu?⁵²

Pendekatan ini misalnya penulis gunakan ketika mengkaji sikap Nursi dalam menyikapi perubahan hukum dan tatanan sosial masyarakat pada masa keruntuhan khilafah dan masa awal pembentukan negara, terutama sepanjang tahun 1922-1940.

Dalam rentang masa ini beberapa kejadian besar terjadi, di antaranya penghapusan Khilafah Utsmaniyah, peresmian Republik

⁵¹ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Study Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 35

⁵²*Ibid.*, hlm. 35

Turki, pemilihan Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden pertama, dan pemindahan ibukota ke Ankara, penghapusan pelajaran agama dan penutupan seluruh sekolah quran dan agama, penghapusan kekhilafahan dan seluruh keluarga utmaniyah dikeluarkan dari Istana, penghapusan kementrian wakaf dan urusan agama serta pengadilan-pengadilan agama, terbit peraturan azan harus dikumandangkan dalam Bahasa Turki dan tidak boleh dalam Bahasa Arab, al-Quran ditulis dalam Bahasa Turki dan berusaha untuk diwajibkan dibaca dalam shalat. Masjid Aya Shofia dialihfungsikan menjadi Museum, mengubah Masjid Jam' Al Fatih sebagai gudang penyimpanan, dan melengkapi masjid dengan kursi-kursi dan alat music, pelajaran atheisme diajarkan secara resmi di sekolah-sekolah.⁵³

4. Pendekatan *contruction of days*

Pendekatan ini tidak terbatas pada cerita mengenai apa yang dialami sang tokoh pada hari kemarin, tetapi dapat juga dipilah hari-hari tertentu secara acak, misalnya hari-hari biasa saja tanpa kejadian luar biasa. Namun, dapat pula dipilih hari-hari yang luar biasa bagi tokoh, seperti har-hari saat menghadapi masa sulit dalam hidup sang tokoh, saat masa keemasan dalam karir dan hidup sang tokoh dan seterusnya. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih memfokuskan

⁵³Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi, *Sīrah Dzātiyah, Asyu'aat*, (Kairo: Sözlcr Publications, 2019), hlm. 250-254

pada hari-hari tertentu yang mempunyai nilai historis bagi tokoh selama karir atau hidupnya.⁵⁴

Pendekatan ini penulis gunakan untuk mengkaji pemikiran dan sikap Badi'uzzaman Said Nursi dalam menyikapi berbagai hal. Misalnya ketika menyikapi pemberontakan Syekh Said, pelarangan hijab, pelarangan azan dalam Bahasa Arab, pemberontakan 31 Maret, keterlibatan Turki dalam Perang Dunia I, dan beberapa hal lainnya.

3. Teori Relasi Agama dan Negara

Dalam hubungan antara agama dan negara, kajian Munawir Sjadzali, dalam bukunya *Islam dan Tata negara* menjadi sesuatu yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Para sosiolog teoretisi politik Islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan agama dan negara. Teori-teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigma pemikiran yaitu paradigma integralistik (*unified paradigm*), paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*), dan paradigma sekularistik (*secularistic paradigm*).⁵⁵

Paradigma pertama menyatakan bahwa hubungan antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Asumsinya ditegakkan di atas pemahaman bahwa Islam adalah satu agama sempurna yang

⁵⁴*Ibid.*, hlm: 36-37

⁵⁵Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 2013), hlm. 10

mempunyai kelengkapan ajaran di semua segmen kehidupan manusia, termasuk di bidang praktik kenegaraan. Karenanya, umat Islam berkewajiban untuk melaksanakan sistem politik Islami sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan empat *al-Khulafa' al-Rasyidin*. Pandangan ini menghendaki agar negara menjalankan fungsi ganda secara bersamaan, yaitu fungsi lembaga politik dan keagamaan. Menurut paradigma ini, penyelenggaraan suatu pemerintahan tidak berdasarkan kedaulatan rakyat melainkan merujuk kepada kedaulatan ilahi (*divine sovereignty*), sebab penyandang kedaulatan paling hakiki adalah Tuhan. Pandangan ini mengilhami gerakan fundamentalisme. Tokohnya: Syekh Hasan al-Bana, Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb, Abu al-A'la al-Mawdudi dan 'Ali al-Nadwy.

Paradigma kedua berpendirian bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, antara keduanya terjalin hubungan timbal-balik atau saling memerlukan. Dalam kerangka ini, agama memerlukan negara, karena dengan dukungan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya negara membutuhkan agama, karena agama menyediakan seperangkat nilai dan etika untuk menuntun perjalanan kehidupan bernegara. Paradigma ini berusaha keluar dari belenggu dua sisi pandangan yang berseberangan: integralistik dan sekularistik. Selanjutnya, paradigma ini melahirkan gerakan modernisme dan neo-modernisme. Tokohnya: Husayn Haykal, Fazlur Rahman, Qamaruddin Khan, Al-Mawardi.

Paradigma ketiga merefleksikan pandangan sekularistik. Menurut paradigma ini, agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, sehingga tidak dapat dikaitkan secara timbal-balik. Islam dimaknai menurut pengertian Barat yang berpendapat bahwa wilayah agama sebatas mengatur hubungan individu dan Tuhan. Sehingga mendasarkan agama kepada Islam atau upaya untuk melakukan determinasi Islam terhadap bentuk tertentu dari negara akan senantiasa disangkal. Tokohnya: Ali 'Abd. ar-Raziq

Dari sudut pandang tiga paradigma ini, penulis ingin menggali pemikiran Sa'id Nursi lebih dalam sehingga dapat mengetahui intisari pemikirannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berusaha menguraikan, memetakan pemikiran politik, dan menganalisis latar belakang keilmuan, sosiokultural, dan sosial politik yang melingkari perjalanan kehidupan Badi`uzzamān Sa`id Nursi, kemudian melakukan komparasi pemikiran dengan Presiden Soekarno.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan lebih menekankan pada aspek biografis dan bibliografis tokoh yang dikaji,⁵⁶ yaitu dengan meneliti latar belakang kehidupan Sa`id Nursi dan kondisi masyarakat Turki pada saat itu yang kemudian memberikan pengaruh pada pemikiran dan ide-ide *siyāsah syar`iyyah* selama hidupnya. Penulis juga

⁵⁶ Penelitian biografis sebagai bagian penelitian sejarah adalah penelitian terhadap kehidupan seorang tokoh dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, watak pengaruh pemikiran dan idenya, dan pembentukan watak tokoh tersebut selama hayatnya. Sedangkan penelitian bibliografis yang sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, penelitian dokumen atau penelitian literatur merupakan penelitian yang menjadikan bahan pustaka, dokumen dan literatur sebagai objek kajian dan menjadikan

Dokumen sebagai sumber utama data penelitian. Lihat: Abdul Rozak, 2015. *Pemikiran Politik dan Gerakan Sosiokultural Kewarganegaan Kaum Intelektuan Muslim Neo Modernis Dalam Penguatan Demokrasi Dan Civil Society di Indonesia; Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (Civic Virtue)* Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu. Hal 270-271.

melakukan pendekatan sosiologis dan filosofis dalam memahami penjelasan tentang pemikiran-pemikiran Nursi yang tertuang dalam Risalah Nur.

Penulis berusaha menghimpun data kepustakaan dari berbagai literatur berupa bahan atau sumber primer yang terdiri dari buku-buku, kertas kerja konferensi, seminar, simposium, laporan-laporan penelitian, jurnal, tesis, disertai sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan keperluan penelitian. Sumber data paling utama adalah Rasā'il an-Nūr yang merupakan karya monumental dari Badi'uzzamān Sa'id Nursi yang ia tulis semasa hidupnya baik dalam penjara maupun saat dalam pengasingan, kemudian buku-buku *siyāṣah syar'iyah* yang ditulis oleh para ulama yang pemikirannya ikut dikaji.

Selanjutnya, karena yang dikaji adalah sejarah pemikiran intelektual tokoh, penulis sangat memperhatikan konteks sejarah saat pemikiran itu muncul, tumbuh, dan berkembang. Maka pendekatan analisis yang penulis lakukan adalah dengan melakukan kajian teks, kajian konteks sejarah, dan kajian hubungan antara teks dan konteks.⁵⁷ Kajian teks digunakan untuk melihat akar geneologis, konsistensi, evolusi, sistematika, varian, sosialisasi, dan internal *dialectics* pemikiran Sa'id Nursi. Kajian konteks digunakan untuk melihat sejarah, politik, hukum, budaya, dan sosial di Turki pada saat hidupnya. Kajian hubungan antara teks dan konteks digunakan untuk melakukan komparasi pemikiran *siyāṣah syar'iyah* Sa'id Nursi dengan Presiden Soekarno.

Sebagai bagian dari penelitian Islamic studies, maka dalam mengkaji perbandingan pemikiran antara kedua tokoh ini, penulis berusaha menggunakan

⁵⁷ Kontowijoyo, *Metodologi Sejarah*, II, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2003, hlm. 191

beberapa pendekatan studi agama yang disebutkan oleh Prof. Mukti Ali tentang Metode Perbandingan Agama, yaitu pendekatan historis, sosiologis dan fenomenologis,⁵⁸ juga pendekatan yuridis, dan filosofis.

Dengan pendekatan historis, penulis berusaha menelusuri asal-usul dan pertumbuhan ide Badi`uzzamān Sa`id Nursi, perkembangannya di tengah masyarakat, kejadian penting yang berpengaruh, dan siapa saja aktor yang terkait dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran tokoh. Hal ini mengingat bahwa hukum tidak pernah terlepas dari realitas sosial yang terikat oleh ruang dan waktu yang melahirkan ijtihad-ijtihad baru, dan pada gilirannya dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan hukum pada waktu-waktu selanjutnya. Pendekatan ini penulis gunakan juga dalam memotret relevansi kehidupan sosial di Turki pada masa Badi`uzzamān Sa`id Nūrsi dan juga kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Presiden Soekarno.

Pendekatan ini memiliki keterkaitan erat dengan pendekatan sosiologis yang penulis gunakan untuk mengkaji latar belakang keluarga dan corak kehidupan masyarakat saat yang dihadapi oleh Badi`uzzamān Sa`id Nūrsi, perubahan sistem dan kebijakan politik, serta respon kelompok intelektual Turki dalam menyikapi perubahan-perubahan tersebut. Aneka macam perubahan ini memberikan pengaruh dalam kehidupan Badi`uzzamān Sa`id Nūrsi sehingga dalam sejarah dikenal dengan 3 fase dalam kehidupannya, yaitu Said Qadim (Old Said), tahun 1877-1922, Said Jadid (New Said), tahun 1922-1950, dan Said Ats-Tsalits (Third Said) tahun 1950-1960. Kajian sosial tentang latar belakang dan

⁵⁸ H.A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia*, Cet. VI, Penerbit Mizan, Bandung, 1995, hlm. 76-78

corak kehidupan masyarakat ini menjadi sangat penting mengingat kehidupan masyarakat yang terus berubah, baik dari segi pemikiran, pola, norma, maupun sistem sosial. Sementara hukum dan pemikiran ijtihad dituntut berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat sehingga penyikapan hukum yang ditetapkan sesuai dengan perubahan sosial dan masyarakat.

Melalui pendekatan fenomenologi, penulis berusaha memahami, menganalisis, dan mendeskripsikan pengalaman hidup Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi yang terangkai dalam sejarah hidupnya sebagai sebuah fenomena menyiratkan pesan tertentu sesuai kajian yang dibahas.

Melalui pendekatan yuridis, penulis berusaha melakukan kajian *siyāsah syar'iyah* dengan menitikberatkan asas pemikiran dan komparasi gagasan politik hukum islam antara kedua tokoh yang dikaji. Pendekatan yuridis ini penulis gunakan untuk menyoroti eksistensi pandangan *siyāsah syar'iyah* Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi yang mungkin berbeda dari para pendahulunya, baik dari sisi metodologi hukum, materi hukum, dan dampak hukum yang dihasilkan.

Pendekatan filosofis penulis gunakan terutama ketika mengkaji perbandingan pemikiran *siyāsah syar'iyah* Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi dan pemikiran politik Presiden Soekarno. Pendekatan ini filosofis ini merupakan bagian utama dari telaah dari terhadap pemikiran Said Nursi dan Soekarno dengan melakukan empat pendekatan di atas, ditambah pendekatan konsep *siyāsah syar'iyah* sebagai basis dari aktifitas studi komparatif.

B. Sumber Data

Sumber data paling utama adalah Kitab *Kulliyāt Rasā'il an-Nūr* yang merupakan karya monumental dari Badi'uzzamān Sa'īd Nursi yang ia tulis semasa hidupnya baik dalam penjara maupun saat dalam pengasingan. Di setiap penjara dan tempat pengasingan ada risalah-risalah khusus yang mampu ia selesaikan. Misalnya ketika di penjara Denizli, ia menulis *Risalah Ats Tsamarah* (buah-buah keimanan), di penjara Afyon ia menyelesaikan *Risalah Al Hujjah Az Zahra'*, demikian pula cahaya ke tiga puluh dalam Kitab *Al lama'at* yang berisi persoalan seputar enam nama Tuhan yang disebut Al Ismu Al A'zham (nama-namanya yang paling agung) yang merupakan pelajaran agung di penjara Eskisyekhir, atau sering disebutnya dengan Madrasah Yusufiyah.⁵⁹ Tulisan-tulisan yang terpisah ini dikumpulkan menjadi satu kesatuan dan diberi judul *Kulliyāt Rasā'il An Nūr*.

Terkait dengan catatan-catatan harian ini, Gordon Allport mengemukakan, catatan harian yang spontan dan intim merupakan dokumen yang spesial dan istimewa sebab penulis hanya mengungkapkan catatan kejadian, lintasan pikiran dan perasaan yang dianggapnya penting. Menurut Allport, catatan harian adalah sumber data yang unggul dan ideal sebagai sebuah rekaman gambaran sisi subjektif perkembangan mental. Kelebihan lainnya adalah bahwa catatan harian bebas dari interpretasi penulisnya yang terkontaminasi oleh perjalanan waktu. Penggambaran perasaan dan pikiran saat kejadian itu baru saja menghantam hati, ego, dan logika menjadi jauh lebih cermat dan menjadi sarana efektif melukiskan

⁵⁹ Badi'uzzamān Sa'īd Nūrsi, *Al Lamā'at*, terjemah Fauzi Faisal Bahreisy dan Joko Prayitno (Banten: Risalah Nur Press, 2018), hlm. 625

suasana hati yang bersifat sangat pribadi. Semua itu terekam dengan teliti dalam catatan-catatan harian dengan orisinil, seiring dengan perkembangan pemikiran dan penafsiran atas peristiwa tersebut yang mungkin berubah dari waktu ke waktu.⁶⁰

Demikian pula data-data tentang pemikiran Presiden Soekarno, penulis berusaha mengambil dari sumber referensi yang ditulis oleh Bung Karno, seperti buku *Di Bawah Bendera Revolusi*, dan buku-buku yang memuat transkrip pidato Bung Karno dalam berbagai acara dan peringatan. Adapun data sekunder, penulis mengambil referensi dari berbagai literatur yang terdiri dari buku-buku, kertas kerja konferensi, seminar, simposium, laporan-laporan penelitian, jurnal, tesis, disertai sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan ini.

C. Seleksi Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dengan penelitian, penulis berusaha mengumpulkan referensi yang terkait dengan pemikiran *siyāṣah syar'iyah* Badi'uzzamān Sa'īd Nūrsi dan pemikiran politik Presiden Soekarno. Untuk memperkuat data kepustakaan, penulis berusaha bertemu langsung dan melakukan diskusi dengan para *Thullabunnur* di Mekah, Madinah dan Indonesia, dan berkorespondensi melalui email, whatsapp dan juga zoom meeting dengan murid Sa'īd Nūrsi dan para senior yang intens mengkaji kitab *Rasāil Nur* ini di Aljazair, Yordania, Mesir dan Turki.

⁶⁰Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 242-243

Dengan beberapa usaha seleksi sumber ini, penulis berharap mendapatkan gambaran utuh tentang pemikiran *siyāṣah syar'iyah* Badi'uzzamān Sa'id Nūrsi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum, metode pengumpulan data dalam penelitian disertasi ini menggunakan dua metode, yaitu :

1. Metode Dokumentasi Literatur.

Metode dokumentasi ini adalah penelusuran hasil pemikiran karya Badi'uzzamān Sa'id Nūrsi dalam *Rasāil An Nur* yang ditulis sendiri oleh beliau atau kajian-kajian tentang pemikiran beliau, juga hasil memoar elemen masyarakat umum yang mengenal beliau dan aktif dalam kegiatan pengajian yang diselenggarakan oleh Badi'uzzamān Sa'id Nūrsi dan telah dibukukan.

2. Metode Wawancara.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi lebih dalam lagi tentang Badi'uzzamān Sa'id Nūrsi dari para murid beliau dan peneliti senior yang pernah belajar dari murid-murid beliau. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang sosok dan pemikiran beliau dalam *siyāṣah syar'iyah*.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu :

1. Data tentang pemikiran *siyāsah syar’iyyah* Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi diklasifikasi sesuai dengan materi yang ditulis oleh beliau dalam berbagai karya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembacaan dan sekaligus upaya sistematisasi materi pemikiran *siyāsah syar’iyyah* Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi berdasarkan materi dan metodenya. Selain itu, hal ini juga ditujukan untuk sistematisasi pemikiran *siyāsah syar’iyyah* Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi.

2. Data yang diklasifikasi dan dikategorisasi ini kemudian diolah dan diuraikan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh sesuai dengan tujuan dan arah penelitian.

3. Data yang sudah diolah dan diuraikan itu kemudian dianalisis dengan metodologi hukum yang ada, khususnya dengan menggunakan teori *siyāsah syar’iyyah*

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul melalui proses penelaahan dan pemilahan berdasarkan pada kepentingan penelitian. Jika berpijak pada teori Miles dan Huberman dalam analisis data, maka tahapan analisis data di atas mengikuti pola Miles dan Huberman sebagai berikut⁶¹

:

a. Reduksi Data.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabastrakkan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, dan reduksi data

⁶¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm.16-20

berlangsung secara terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian Data.

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif

c. Kesimpulan Data

Di saat telah memadainya rekaman cadangan diskripsi yang akurat tentang fenomena sosial yang relevan, barulah peneliti dapat menghipotesiskan jalinan hubungan di antara fenomena-fenomena yang ada, dan kemudian mengujinya dengan menggunakan versi data yang lain. Verifikasi data dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selama proses penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam kajian ini, penulis ini berusaha menggali ikatan, hubungan, dan komparasi pemikiran antara pandangan *sīyasah syar'yyah* Badi'uzzamān Sa'īd Nūrsi dengan pandangan politik Presiden Soekarno terkait prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badiuzzaman Sa'id Nursi (1877-1960) hampir hidup sezaman dengan presiden Indonesia pertama, Soekarno (1901-1970). Beberapa kesamaan kondisi antara keduanya memiliki benang merah dalam pemikiran politik Islam. Kesamaan ini antara lain terdapat pada kondisi internasional masyarakat muslim dengan jatuhnya Kesultanan Utsmani dan awal pembentukan Republik Turki, pembentukan dan perumusan ideologi negara, penataan persatuan dalam negeri, dan perumusan sistem musyawarah untuk mencapai keadilan sosial. Kedua negara ini pernah mengalami penjajahan dan menerima warisan hukum-hukum negara yang diatur oleh peninggalan penjajah, penerapan sistem demokrasi, dan kuatnya pengaruh paham sekularisme yang memisahkan antara agama dan negara.

Lebih dari itu, Badi'uzzamān Sa'īd Nūrsi dan Ir. Soekarno adalah dua tokoh yang sangat berpengaruh pada zamannya. Kedua sosok ini memiliki latar

belakang kapasitas ilmu pengetahuan yang dalam, peka dengan kondisi sosial masyarakat, dan memiliki peran yang besar bagi negaranya masing-masing. Untuk memahami latar belakang relevansi pemikiran keduanya, penulis akan menyampaikan secara singkat sketsa biografi Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi dan Ir. Soekarno, khususnya dalam hal latar belakang keluarga, pendidikan dan keilmuan, kondisi sosial politik, serta ide dan aktifitas politik kedua tokoh tersebut.

1. Sketsa Biografi Said Nursi

a. Latar Belakang Keluarga

Said Nursi lahir di desa Nurs yang berada di kawasan Haizan, bagian dari distrik Bitlis, Anatolia Timur pada tahun 1877 M/1293 H. Orang tuanya berasal dari suku Kurdi. Bapakanya bernama Mirza, seorang sufi yang wara' dan menjadi teladan keshalehan pada masanya dalam memelihara diri dari makanan yang haram. Begitu pula ibunya bernama Nuriye yang terkenal alim dan religius⁶² Nursi adalah anak keempat dari tujuh bersaudara yaitu Duriyye, Hanim, Abdullah, Said (Nursi), Mehmed, Abdulmecid, dan Mercan.⁶³

Dari hasil penelitiannya tentang nasab Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi, Prof. Dr. Ahmet Akgündüz menegaskan bahwa Said Nursi masih termasuk keturunan Nabi Muhammad Saw. Dari jalur ayah, nasabnya

⁶² Ihsan Qasim As Shalihi, *Nazhrah 'Ammah 'An Hayāti Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi*, (Kairo: Sozler Publications, 2010), hlm. 14

⁶³ Ustadi Hamzah, "Paradigma Hubungan Antara Agama Dalam Islam; Studi Pluralitas Agama dalam Risale-i Nur Karya Badiuzzaman Said Nursi" *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011, hlm. 39

sampai kepada Hasan bin Ali bin Abi Thālib. Sementara dari jalur ibu, nasabnya sampai kepada Husain bin Ali bin Abi Thālib.⁶⁴ Maka Nursi adalah seorang *syarīf* sekaligus *sayyid*. Hal ini karena dalam tradisi Kesultanan Utsmaniyah, sebutan *syarīf* digunakan untuk keturunan Hasan, sementara keturunan Husain disebut Sayyid. Kesultanan Utsmaniyah sampai membentuk kementerian yang disebut *Nakib'ül-Eşraflık* untuk menghormati dan menjaga agar para *sayyid* dan *syarīf* agar tetap tercatat.⁶⁵

Sejak kecil Nursi sudah sering menghadiri majelis para ulama yang menyaksikan perdebatan ilmiah yang terjadi di antara mereka, terutama dalam majlis desa yang sering diadakan di rumah bapaknya, Sufi Mirza. Guru pertama dan utama adalah ibunya sendiri. Tentang ibunya, Said Nursi pernah berkata, “Aku bersumpah atas nama Allah, sungguh pelajaran yang paling mendalam yang aku dapatkan, dan ia selalu hadir di pikiranku, adalah pelajaran yang diberikan oleh ibuku dulu, yang masuk ke dalam fitrahku, menjadi seperti benih dalam tubuhku dalam pohon usia yang kini hampir mencapai 80 tahun”⁶⁶

b. Pendidikan dan Keilmuan

⁶⁴ Ahmet Akgündüz, *Bedüzzaman Said Nursi ve İlmi Şahsiyeti* (Istanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 2013), hlm. 128 (rincian nasab Nursi dari jalur ayah) dan hlm 176 (rincian nasab Nursi dari jalur ibunya)

⁶⁵ Dikutip dari <https://sorularlarisale.com/makale/bediuzzamanin-seyyid-ve-serif-oldugunun-delilleri> pada hari Senin, 26 Juli 2021 jam 20.40

⁶⁶ Said Nursi, *Al Lama'at*, hlm. 281

Said Nursi memulai studinya tahun 1882 dengan berguru kepada Molla Mechmed Affandi di Tag. Ia tidak menyelesaikan studi di madrasah tersebut karena sering diganggu oleh murid-murid lain. Ia kembali ke kampung dan belajar dari kakaknya Molla Abdullah selama hampir satu tahun. Selanjutnya ia berangkat ke Bitlis dan masuk ke Madrasah Syekh Amin Affandi. Kemudian ia melanjutkan belajar di Madrasah Mir Hasan Veli di Mukus. Kemudian ia menimba ilmu di Madrasah *Wasthan* di Kawasy. Hanya berselang sebulan, ia berangkat bersama sahabatnya, Mulla Muhammad, belajar di bawah bimbingan Seyh Mehmed Celali di Madrasah Beyazid. Di sinilah Nursi mempelajari ilmu agama dengan serius sementara sebelumnya ia hanya mempelajari nahwu dan sharaf saja.⁶⁷

Saat itu usianya baru sekitar 14 atau 15 tahun. Namun dibanding anak-anak seusianya, ia memiliki kekuatan hafalan dan ingatan yang mengagumkan. Kecerdasan dan pemahaman yang ia miliki sangat luar biasa, jauh melampaui rata-rata anak seusianya. Dalam keadaan normal, seorang murid pada umumnya menyelesaikan pelajaran yang ada di madrasah tersebut dalam kurun waktu 15 tahun atau 10 tahun. Metode yang dipakai adalah menguasai sepenuhnya satu buku kemudian beralih ke buku selanjutnya. Sementara Said memusatkan perhatiannya kepada topik-topik utama dan inti dalam setiap buku, dan mengabaikan paparan dan komentar tambahan yang ada.

⁶⁷ Ihsan Qasim, *Nazhrah Ammah*, hlm. 14

Selama tiga bulan berada di Madrasah Seyh Mehmed Celali, Said Nursi mampu menyelesaikan kitab-kitab Induk seperti *Jam 'ul Jawâmi'* karya Tâj Ad-Dîn Abdul Wahhâb ibn 'Ali As-Subkî, *Sarh Al-Mawâkib fi 'Ilm al Kalâm* karya 'Adh Adh-Dîn Al-Îji, dan kitab *Tuhfat Al-Muhtâj fi Syarh Al-Minhâj* karya Ibnu Hajar Al-Haythâmi. Masa-masa di Beyazid ini menjadi masa yang paling penting dalam masa belajar Said Nursi. Inilah masa-masa pembentukan pemikiran karena penguasaannya terhadap kitab-kitab tersebut secara tuntas.⁶⁸

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Said Nursi menerima gelar kehormatan “Molla Said” dari gurunya Seyh Mehmed Celali. Kemampuan intelektualnya terus ia asah dengan menguasai berbagai kitab. Pergaulannya dengan para ulama dan cerdik pandai membuat kemampuannya intelektual dan spiritualnya semakin meningkat.

Kemampuan intelektual menjadi lebih terasah ketika Said Nursi berhadapan dengan para ulama dalam diskusi dan debat ilmiah. Setelah selesai menimba ilmu di Beyazid, Said Nursi menemui kakaknya di Sirvan. Dalam obrolannya, Molla Abdullah menyampaikan bahwa sejak berpisah 8 bulan yang silam, ia telah menyelesaikan kitab *Syarah asy-Syamsiyah*.⁶⁹ Said menjawab, “Aku telah membaca 80 buku dan membaca banyak karya yang tidak termasuk silabus dan salah satunya

⁶⁸ Sukran Vahide, *Islam in Modern Turkey..* hlm. 10

⁶⁹ Sebuah buku mengenai dalam Ilmu Mantiq karya Najm Ad Din Umar bin Ali Al Qazwiini (w. 675 h.) Kitab ini telah banyak disyarah oleh para ulama, yang paling masyhur adalah Syarah At Taftazani (w. 792)

adalah syarah syamsiah.” Maka saat itu pula, Molla Abdullah menguji kemampuan adiknya dan ia mendapati kemampuan intelektual yang luar biasa sehingga ia mengangkat Said sebagai gurunya.⁷⁰

Setelah tinggal beberapa lama di Sirvan, Said Nursi bertolak menuju Siirt.⁷¹ Di sana ia bertemu dengan ulama terkemuka, Molla Fathullah Affandi. Ia bertanya kepada Nursi tentang kitab-kitab yang ia baca sejak mereka berpisah. Setiap kali ditanya, Said Nursi menjawab bahwa ia telah mempelajarinya. Tidak sampai di situ, Molla Fathullah mengujinya dengan menanyakan topik dan kajian yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Dan setiap kali ditanya, Said Nursi mampu menjawabnya dengan baik.

Untuk mengetes kemampuan hafalannya, Molla Fathullah pernah mengambil kitab “*Maqâmât Al Hariri*” yang belum pernah dipelajari sebelumnya oleh Said Nursi. Hanya dengan sekali baca Said Nursi mampu menghafalkan satu halaman kitab yang dipilih secara acak itu dengan lancar. Kemampuan ini membuat Molla Fathullah menjadi takjub. Bahkan salah seorang guru Said Nursi yang sebelumnya mengajarnya, yaitu Molla Ali Soraan, meminta untuk belajar kepada Said Nursi setelah menyaksikan diskusi ini.⁷²

⁷⁰Badi`uzzamân Sa`îd Nûrsî, *Sirah Dzatiyah* (Kairo: Sözlür Publications, 2019), hlm. 70

⁷¹Sebuah kota di kawasan timur Turki yang lebih dikenal dengan nama “*As`ird*” dalam kitab-kitab arab klasik

⁷²Sukran Vahide, *Islam in Modern Turkey..* hlm. 14

Kabar ini sangat menyebar kepada penduduk di kota Siirt, terutama di kalangan para ulama dan pelajar. Terlebih lagi Molla Fathullah menyebut-nyebut nama Said Nursi di hadapan para ulama dan memuji kekuatan hafalan serta keluasan pemahaman yang ia miliki. Para ulama yang ada mengundang Said Nursi dalam forum kajian yang dihadiri oleh seluruh ulama Siirt. Setiap kali mereka melontarkan pertanyaan, Said Nursi mampu menjawabnya dengan yakin tanpa ragu sama sekali, seakan-akan ia membaca jawaban itu dari kitab langsung. Para ulama pun memuji dan mengakui keutamannya, dan menganggapnya sebagai sebagai bocah ajaib yang luar biasa.⁷³

Said Nursi pun pernah terlibat dalam diskusi dengan para ulama terkemuka di Cizre, sebuah lahan penggembalaan dataran tinggi di bantaran Sungai Tigris. Kepada para ulama yang ada, Nursi pernah menyampaikan bahwa dia telah bersumpah untuk tidak bertanya kepada seorang pun, tetapi dia siap menerima pertanyaan mereka. Para ulama yang hadir memberikan 40 pertanyaan yang semuanya dia jawab dengan memuaskan, kecuali satu pertanyaan, yang tidak mereka sadari itu salah dan mereka terima. Saat pertemuan itu akan bubar, Molla Said baru teringat tentang hal ini dan buru-buru kembali untuk memberitahu mereka jawaban yang benar. Dari sini mereka mengakui bahwa mereka

⁷³*Ibid.*

benar-benar kalah, dan beberapa di antaranya mulai belajar di bawah bimbingannya.⁷⁴

Saat ke Istanbul di akhir tahun 1907, Said Nursi pernah menarik perhatian para ulama, cendekiawan, dan para intelektual yang ada, saat ia menulis di pintu kamarnya, “Di sini semua pertanyaan dijawab, semua masalah dipecahkan, tetapi tidak ada pertanyaan diajukan” Tulisan ini ditujukan untuk menarik perhatian para ulama agar Nursi dapat mempublikasikan gagasan dan pikirannya tentang reformasi pendidikan.⁷⁵

Maka berbondong-bondong datanglah ulama-ulama dan cendekiawan yang masyhur untuk berdiskusi. Mereka mengajukan pertanyaan dan Nursi menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik dan benar. Mereka mendapati Nursi sebagai seorang ‘alim yang berilmu tinggi, indah penuturannya, dan kuat pilihan-pilihan katanya. Semua memandangnya dengan takjub dan pantas membawa nama “Badiuzzaman” atau keajaiban/keindahan zaman.⁷⁶

Dalam masa itu, bertepatan hadir di Istanbul seorang ulama terkemuka asal Mesir, yaitu Syekh Bakhit Al Muthi’i, mufti Mesir dan ulama kenamaan dari Universitas Al Azhar. Banyak orang yang meminta beliau dapat berdiskusi dengan seorang pemuda dari

⁷⁴ Husain Utsman dkk, *Sīrah Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi* (Makkah: Dār Lawāmi’ Al Anwār, 2017) hlm. 57

⁷⁵ Sukran Vahide, *Islam in Modern Turkey*, hlm. 56

⁷⁶ Husain Utsman dkk, *Sīrah Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi*, hlm. 58

pegunungan Kurdistan yang telah mampu mengalahkan banyak ulama di Istanbul. Maka di suatu ketika selepas shalat di Masjid Aya Shofia, bertemulah Nursi dengan Syekh Bakhit di salah satu kedai teh dekat masjid, dan dihadiri oleh banyak ulama.

Syekh Bakhit mengajukan satu pertanyaan, “Apa pendapatmu tentang Eropa dan Daulah Utsmaniyah?”. Beliau sesungguhnya tidak ingin menguji pemahaman dan kecerdasan Said Nursi. Beliau hanya ingin mengetahui seberapa luas pengetahuannya tentang kondisi alam islami dan kesiapannya menghadapi masa depan. Nursi menjawab dengan lugas, “Sesungguhnya Eropa sedang mengandung Islam, dan suatu ketika akan melahirkannya. Dan sesungguhnya Daulah Utsmaniyah sedang mengandung Eropa, dan suatu ketika akan melahirkannya.” Jawaban membuat Syekh Bakhit takjub seraya berkata, “Aku pun berpendapat sama, namun hanya Badi’uzzaman yang mampu mengucapkannya dengan kalimat yang ringkas dan tepat”⁷⁷

Kehadiran Nursi selalu dinanti oleh para ulama. Para musim semi tahun 1911 M, sebelum terjadinya perang dunia pertama, Said Nursi berkunjung ke Damaskus, Suriah. Para ulama Syam menyambut Nursi dengan penuh kehangatan dan meminta untuk menyampaikan pidato di Masjid Jami Al Umawi di Damaskus. Sekitar 10.000 orang ikut hadir mendengarkan pidato tersebut, 100 orang di antaranya adalah ulama terkemuka wilayah Syam. Dalam pidatonya, Said Nursi menyampaikan

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 69

tentang pokok permasalahan umat dan solusinya. Khutbah ini dicetak dan laku dengan cepat di pasaran, sampai harus dua kali naik cetak dalam sepekan.⁷⁸ Melalui khutbah ini juga, Said Nursi menyampaikan pokok pikiran tentang *Siyāsah syar'iyah* yang akan kita kaji pada pembahasan selanjutnya.

Tidak hanya dalam tataran konsep, Said Nursi berusaha memberikan solusi atas permasalahan umat ini melalui penguatan di bidang pendidikan. Sekitar Bulan Mei atau Juni 1908, Said Nursi menyerahkan sebuah proposal yang berisi gagasan reformasi pendidikan ke Istana. Inti dari usulan dari Said Nursi mendirikan Universitas Az-Zahra, rekonstruksi pendidikan di Turki, dan mendirikan sekolah khatib.

Rencana Nursi, Universitas ini akan menggabungkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu modern yang akan diajarkan secara berdampingan, dengan penyatuan tiga cabang utama sistem pendidikan yaitu: *madrrasah* atau sekolah agama tradisional, *mekteb* atau sekolah modern, dan *tekke* atau lembaga sufi.

Nursi berpandangan bahwa agama mewakili hati dan nurani, sedangkan ilmu pengetahuan mewakili akal budi, keduanya penting demi tercapainya kemajuan sejati. Nursi bercita-cita menjadikan *Medrese Az Zahra* ini menjadi *mekteb* yang paling unggul sebagai akal

⁷⁸ *Shaiqalul Islam, hlm. 448*

budi, madrasah yang paling baik sebagai hati, dan *zawiye* yang paling suci sebagai nurani.⁷⁹ Nursi juga menyatakan, “Ilmu-ilmu keagamaan adalah cahaya nurani dan ilmu-ilmu modern adalah cahaya akal budi; kebenaran menjadi terlihat jelas dengan menggabungkan keduanya.”⁸⁰ Sekolah-sekolah tersebut ke depannya harus menggunakan tiga bahasa, yaitu Bahasa Arab (wajib), bahasa Kurdi (boleh), dan bahasa Turki (perlu).⁸¹

Nursi memiliki gagasan untuk melakukan restrukturisasi pendidikan secara menyeluruh dengan adanya demokratisasi sistem madrasah. Nursi juga ingin mendirikan sekolah khatib mengingat bahwa khatib memegang peran penting dalam membimbing publik, maka para khatib tentunya harus mendapat pembimbingan yang baik.

c. Kondisi Sosial Politik Turki di Masa Said Nursi

Badiuzzaman Said Nursi lahir tahun 1877, setahun setelah Sultan Abdul Hamid II naik tahta sebagai Khalifah Daulah Utmaniyah. Imperium yang berdiri hampir 6 abad ini ini hampir berada di ujung tanduk kejatuhannya. Kekhilafahan ini, yang pada puncak kekuasannya terbentang mencapai Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hijaz, Yaman di Asia; Mesir, Libia, Tunis, Aljazair di Afrika; Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania di Eropa, sedikit demi

⁷⁹ Sukran Vahide, Biografi Intelektual Badiuzzaman Said Nursi, Anatolia Prenada Media hlm. 65

⁸⁰*Ibid*

⁸¹*Ibid* hlm. 64

sedikit semakin tergerus. Dinasti Turki Utsmani semakin melemah dan tua, karena sebab-sebab internal dan eksternal. Hingga akhirnya benar-benar tutup usia pada tanggal 3 Maret 1924, setelah sebelumnya didirikan oleh Usman bin Ertughrul Ghazi, sekitar 625 tahun yang silam, di bawah pimpinan 37 sultan dan khalifah.⁸²

Erik J. Zürcher menulis dalam Sejarah Modern Turki, menjelang tahun 1800, posisi kesultanan Utsmani dalam politik internasional mulai melemah secara perlahan-lahan selama dua abad. Dari akhir abad ke 16 dan seterusnya, negara-negara Eropa, khususnya negara-bangsa yang baru muncul di Eropa Barat, telah mengungguli kesultanan Utsmani dari sisi ekonomi, teknologi, dan militer.⁸³

Ini terbukti, kata Zürcher, dalam serangkaian pertempuran, hampir semuanya berakhir dengan kekalahan Utsmani dan hilangnya wilayahnya. Perang yang meletus tahun 1768-1774 banyak berakhir dengan kekalahan pasukan Turki Utsmani dan dengan perjanjian

⁸² Tim Riset dan Studi Islam Mesir, *Ensiklopedi Sejarah Islam Jilid 2*, (Jakarta; Pustaka Al Kautsar, 2013), hlm. 257-259

⁸³ Erik J. Zürcher, *Turkey, A Modern History*, Alih Bahasa: Karsidi Daningrat, R., (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 16

damai⁸⁴ yang dalam banyak hal merupakan titik yang menentukan dalam sejarah Ustmani.⁸⁵

Keterpurukan Imperium Utsmani dalam menghadapi kekuatan Eropa di abad ini mendorong para sultan yang memerintah ketika itu dan para reformis dari masyarakat Turki Utsmani berusaha berfikir tentang sebab-sebab keterpurukan ini dan mencari solusi untuk bangkit kembali. Mereka pun berkesimpulan bahwa sebab keterpurukan ada pada keterbelakangan teknik dan intelektual dalam bidang militer, dan ketidakmampuan mengikuti perkembangan zaman yang merambah hampir semua lembaga Utsmani yang ada. Pemikiran ini membawa kepada kebijakan untuk ikut dalam model kehidupan barat, mulai dari bidang militer, kemudian masuk ke dalam bidang sosial dan politik⁸⁶

Di sinilah dimulai usaha westernisasi⁸⁷ dan sekulerisasi⁸⁸ di Turki. Penguasa pertama yang memprakarsai perubahan-perubahan ini

⁸⁴ Salah satunya adalah perjanjian Küçük Kaynarca (21 Juli 1774) yang mengakui kemerdekaan Crimea, memberi Rusia kedudukan yang aman di pantai Laut Hitam dan memberi Rusia hak navigasi di Laut Hitam. Akibat perjanjian ini, Turki Utsmani kehilangan wilayah Muslim untuk pertama kali dalam sejarahnya yang berakibat merusak kredibilitas dan legitimasi kekuasaan sultan. Ada juga perjanjian.... Dan ... Lihat *Sejarah Turki Modern* hlm. 17 dan *Ensiklopedi Sejarah Islam Jilid 2* hlm 237.

⁸⁵ Erik J. Zürcher, *Turkey, A Modern History*, Alih Bahasa: Karsidi Daningrat, R., (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 17

⁸⁶ Ridha Hilal, *As-Saif wal Al Hilal; Turkiya Min Ataturk Ila Erbakan* (Kairo; Dar Asy Syuruq, 1999), hlm. 41

⁸⁷ Westernisasi berasal dari kata *westernization* yang berarti proses pem-Baratan; suatu proses yang di dalamnya cara hidup dan nilai-nilai budaya Barat ditumbuhkan, diterapkan, dan dikembangkan dalam kehidupan suatu masyarakat/bangsa. Sistem nilai barat ini bersendi pada individualisme dalam kehidupan sosial, kapitalisme dan pragmatism dalam ekonomi, machiavellisme dan imprealisme dalam politik, hedonism dan *l'art pour l'art* dalam seni, agnotisme dan triniteisme (kadang-kadang ateisme) dalam agama, sekularisme dan materialism dalam pandangan dan sikap hidup. Lihat buku Prof. Faisal Ismail, *Studi Islam Kontemporer; Pendekatan dan Kajian Interdisipliner*, (Yogyakarta; IRCiSoD, 2018), hlm. 90-91.

adalah Sultan Salim III (1789-1807).⁸⁹ Kebijakan *Nizam-i Cedid* (Orde Baru) yang diambil oleh Sultan Salim III meliputi bidang militer, pendidikan, sosial, dan politik. Akibat kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh pasukan Utsmani dalam melawan rusia, maka Sultan Salim III mengambil kebijakan yang radikal yaitu membentuk angkatan bersenjata baru di luar struktur yang ada. Pembentukan angkatan bersenjata ini dimulai tahun 1794 dan menjelang akhir pemerintahannya tahun 1807, jumlah pasukan baru ini mencapai 30.000 orang. Sebagai pelatih dan instruktur, sultan mengangkat para perwira asing yang kebanyakan dari mereka adalah orang Prancis dan direkrut melalui pemerintah. Seragam dan penampilan pasukan baru ini seperti pasukan barat, dilatih dengan model pelatihan pasukan barat, dilengkapi dengan senjata-senjata modern ala barat.⁹⁰

Tidak hanya dari sisi penampilan, anggota pasukan ini diajari pendidikan khusus ala Prancis. Mereka mulai mempelajari Bahasa Prancis dan mendiskusikan berbagai macam ide baru dengan pelatih mereka yang ada berada dari luar negeri itu. Mereka mendapatkan

⁸⁸ Setelah menganalisa akar kata *secular* (sekuler), *secularism* (sekulerisme), *secularity* (sekuleritas), dan *secularization* (sekulerisasi), Prof. Faisal Ismail, menyimpulkan bahwa sekulerisasi adalah semua hal, urusan, kebijakan, dan tindakan yang diambil dan dilaksanakan tanpa mengaitkannya dengan elemen-elemen keagamaan. Westernisasi dan sekulerisasi seperti kembar siam yang sulit dipisahkan. Ketika terjadi proses westernisasi dalam kehidupan masyarakat, praktis di situ terjadi pula proses sekulerisasi. Begitu pula sebaliknya, ketika terjadi gelombang sekulerisasi, maka otomatis terjadi pula proses westernisasi. Lihat buku Prof. Faisal Ismail, *Studi Islam Kontemporer; Pendekatan dan Kajian Interdisipliner*, (Yogyakarta; IRCiSoD, 2018), hlm. 92-93

⁸⁹ Erik J. Zürcher, *Turkey, A Modern History*, Alih Bahasa: Karsidi Daningrat, R., (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 18

⁹⁰ Erik J. Zürcher, *Turkey, A Modern History...* hlm. 20-21 dan Ridha Hilal, *As-Saif wal Al Hilal...* hlm. 33

wawasan tentang budaya Prancis, Austria, dan negara Eropa. Para tentara ini harus mempelajari materi khusus meliputi matematika, geometri spasial, dan taktik militer, juga filsafat positivisme August Comte yang hanya membahas tentang fenomena dan fakta kepastian saja, dan mengabaikan semua pemikiran abstrak dengan alasan absolut,⁹¹ termasuk di antara iman kepada hal-hal yang ghaib.

Sultan Salim III juga mengirimkan duta ke Eropa dan membuka kedutaan Utsmani di London (1793), Wina (1794), Berlin (1795), dan Paris. Para duta ini kembali ke Turki dengan membaca banyak cerita tentang ide Revolusi Prancis: *liberte* (kebebasan), *egalite* (persamaan), dan *fraternite* (persaudaraan). Ide kebebasan menjadi gagasan paling memikat bagi komunitas ini, bukan berarti jaminan hak warga negara, tapi lebih kepada kemerdekaan nasional. Nasionalisme merasuk kuat ke hati masyarakat Turki Utsmani yang mendorong untuk melakukan perlawanan di beberapa kawasan. Tumbuhnya semangat nasionalisme di wilayah Balkan kemudian di provinsi-provinsi belahan Asia terbukti sebagai faktor terpenting runtuhnya pemerintahan Utsmani.⁹²

Sepeninggal Salim III, Sultan Mahmud II (1807-1839), melanjutkan kebijakan Sultan Salim III tentang pelatihan militer pasukan Utsmani menjadi tentara *Nizam-i Cedid*, dengan nama angkatan perang *Muallem Asakir-i Mansure-i Muhammadiye* (Tentara

⁹¹ Ridha Hilal, *As-Saif wal Al Hilal...* hlm. 33

⁹² Erik J. Zürcher, *Turkey, A Modern History....* hlm. 20-25

Muhammad yang terlatih dan Berjaya). Tahun 1826 Mahmud II membubarkan pasukan khusus Jenissari dan membakar hangus barak-barak mereka akibat menentang dan memberontak terhadap kebijakan Sultan Mahmud II seperti yang mereka lakukan terhadap Salim III. Ia juga mengeluarkan maklumat *Hatti Humayun* (Dekrit Kesultanan) yang berisi reformasi di bidang militer, sosial, politik dan pendidikan.⁹³

Inovasi pendidikan dimulai dengan membangun sekolah kedokteran (tahun 1827) dan akademi militer (tahun 1834). Di sekolah ini anak-anak muda Turki Utsmani dididik dengan pendidikan Eropa dengan guru-guru Eropa, lengkap dengan cara berfikir dan mentalitas rasional dan positif di kalangan para siswa. Sekolah ini memainkan peran penting dalam pembentukan kader-kader kesultanan pada tahun-tahun berikutnya. Reformasi juga dilakukan di bidang pemerintahan dengan membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa. Peraturan hukum berdasarkan undang-undang Eropa abad-19 secara bertahap menggantikan *kanuni* Utsmani.

Dari segi perekonomian, para pedagang Inggris menikmati proses kapitulasi yang membatasi kewajiban-kewajiban impor dan ekspor sampai 3 persen saja. Lebih dari itu, dalam Perjanjian Edirne tahun 1829 Rusia memperoleh sejumlah konsesi komersial dari Utsmani, yang juga diklaim oleh negara-negara lainnya. Kebijakan-kebijakan

⁹³ Erik J. Zürcher, *Turkey, A Modern History...* hlm. 49 dan Ridha Hilal, *As-Saif wal Al Hilal...* hlm. 34

Sultan Mahmud II ini melahirkan angkatan perang baru dan aparatur birokrat bergaya eropa, yang ditopang dengan fasilitas-fasilitas pendidikan modern, sebuah langkah besar berupa kontrol terpusat yang efektif atas kerajaan tersebut terbentuk dan menentukan arah reformasi Utsmani untuk 80 tahun berikutnya⁹⁴

Sepeninggal Sultan Mahmud II tahun 1839, ia digantikan oleh putra sulungnya, Abdul Majid. Westernisasi dan modernisasi dilanjutkan dalam alur yang sama seperti era sebelumnya. Periode 1839-1876 dalam sejarah Turki dikenal dengan periode *Tanzimat* (reformasi). Era Tanzimat ini dimulai dengan keluarnya *Gülhane Hatt-ı Şerifi* (Dekrit Mulia Taman Bunga Mawar) yang ditulis oleh Menteri Luar Negeri, *Reşit Pasha*, atas nama Sultan Abdul Majid diumumkan di hadapan para petinggi Turki Utsmani dan para diplomat luar. Maklumat ini berisi empat reformasi utama:

Pertama, menegakkan jaminan bagi kehidupan, kehormatan, dan kekayaan warga sultan. *Kedua*, menyelenggarakan perpajakan yang tertib untuk menggantikan sistem pajak tanah. *Ketiga*, sistem wajib militer bagi angkatan perang. *Keempat*, persamaan derajat semua warga negara di hadapan hukum, apa pun agama mereka.⁹⁵

Dalam periode ini, pengaruh asing, terutama Inggris, terhadap pembuatan kebijakan di Istanbul semakin meningkat. Para negarawan

⁹⁴ Erik J. Zürcher, *Turkey, A Modern History*.... hlm. 42-52

⁹⁵ *Ibid.* hlm. 58

Tanzimat melahirkan undang-undang dan institusi sekuler baru untuk menggantikan sistem *kanuni* tradisional. Undang-undang hukum Islam, *syariat*, tidak pernah dicabut tetapi ruang lingkungannya terbatas pada hukum keluarga dan dikodifikasi menurut pola Eropa⁹⁶

Sekularisasi menjadi tren pendidikan era *Tanzimat*. Tahun 1869, sebuah regulasi baru bagi pendidikan umum dikeluarkan oleh pemerintah, dengan berdasar rekomendasi Kementerian Pendidikan Prancis. Regulasi ini mencanangkan sistem pendidikan tiga tingkat, yaitu sekolah *Rüşdiye*, *Idadiye*, dan *Sultaniye*, yang mengikuti model sekolah *lycee* di Prancis. Sekolah-sekolah sekuler ini banyak didirikan di masa *Tanzimat* dan semakin diperluas lagi di masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II (1876-1908).⁹⁷

Para masa ini, permasalahan-permasalahan negara, baik eksternal maupun internal, semakin bertumpuk pada masa Sultan Abdul Hamid II. Dalam perang-perang yang dilakukan, militer Turki Utsmani berkali-kali kalah di medan pertempuran dan tidak mampu menghalau penjajahan yang dilakukan di atas negerinya, yang menyebabkan kerugian negara yang besar, runtuhnya moral tentara, dan terlepasnya banyak daerah kekuasaan. Akibat kekalahan demi kekalahan itu sultan harus untuk menandatangani berbagai perjanjian yang sebetulnya banyak merugikan negara.

⁹⁶*Ibid.* hlm. 72

⁹⁷*Ibid.* hlm. 75

Di antaranya kekalahan saat perang melawan Rusia, sehingga pasukan musuh dapat menduduki kota Edirne yang hanya berjarak 50 km dari Istanbul. Kekalahan ini melahirkan Perjanjian San Stefano (3 Maret 1878), dilanjutkan dengan Kongres Berlin (Juni-Juli 1878), yang mengakibatkan lepasnya wilayah Rumania, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Wallachia, Moldavia, Bulgaria, dan beberapa bagian dari

Anatolia dan Sirprus dari kekuasaan Turki Utsmani, yang secara keseluruhan luasnya sekitar sepertiga dari wilayah kesultanan dan lebih dari 20% dari pendudukannya⁹⁸.

Berbagai serangan terhadap wilayah kekuasaan Turki Utsmani berlangsung dengan gencar sementara pemerintah tidak dapat berbuat apa apa. Contohnya penjajahan Prancis terhadap Tunisia yang masih menjadi bagian dari wilayah Utsmani tahun 1299 H, penjajahan Inggris terhadap Mesir dan Sudan pada tahun itu juga. Saat wilayah Timur Afrika dibagi-bagi antara Prancis, Italia, dan Abyssinia, juga negara Utsmani tidak mampu berbuat apa-apa. Pasukan Turki juga mengalami kekalahan dalam Perang Balkan (tahun 1330 H dan tahun 1332 H) dan kekalahan pada Perang Dunia I.⁹⁹

⁹⁸ Tim Riset dan Studi Islam Mesir, *Ensiklopedi Sejarah Islam Jilid 2*, (Jakarta; Pustaka Al Kautsar, 2013), hlm. 248

⁹⁹*Ibid*, hlm. 247 dan 252

Situasi finansial juga dalam keadaan tidak stabil. Negara tercekik hutang warisan pemerintah sebelumnya dan menderita kerugian besar akibat perang Rusia. Nama baik dan kredibilitas kesultanan Utsmani telah jatuh di pasar-pasar Eropa. Industri kerajinan tradisional dalam tersisih dan kalah saing dengan dengan barang-barang impor hasil industri mesin yang harganya murah. Pertumbuhan industri-industri baru dan keterlibatan langsung perusahaan-perusahaan Eropa modern menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Loyalitas kepada sultan semakin menurun, terutama di kalangan birokrat, perwira, dan kaum cendekiawan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang ada. Generasi muda yang dididik di Akademi Pegawai Sipil (*Mülkiye*) dan Akademi Perang (*Harbiye*) malah semakin tertarik pada ide-ide liberal dan konstitusional dari orang-orang Turki Muda.¹⁰⁰

Respon dari kondisi pemerintah yang bermasalah ini, salah satunya adalah berdirinya gerakan Uthamni Muda (*Young Ottoman*) sejak tahun 1865 yang dipelopori oleh Mehmed Bey bersama dengan Namik Kemal, Nuri Bey, Resad Bey, dan Refik Bey. Tujuan utama dari gerakan ini adalah melakukan pengawasan dan control terhadap kekuasaan sultan dengan mendirikan pemerintahan konstitusional dengan sistem perwakilan rakyat.¹⁰¹

¹⁰⁰ Erik J. Zürcher, *Turkey, A Modern History*.... hlm. 105-106

¹⁰¹ Ustadi Hamsah, *Paradigma Hubungan Antar Agama Dalam Islam; Studi Pluralitas Agama dalam Risale-I Nur Karya Bediuzzaman Said Nursi, Disertasi* (Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 52

Perjalanan berikutnya, di Salonica generasi Uthmani Muda yang dididik di *Mulkiye* (Akademi Sipil) dan Harbiye (Akademi Militer) yang dikenal dengan Turki Muda (*The Young Turk* atau *Jeunes Turcs*), dengan bantuan Eropa, merancang oposisi terhadap sultan dengan mendirikan organisasi bernama Komite Persatuan Uthmaniyah (*Ittihat-i Osmani Cemiyeti*) tahun 1889. Badan ini kemudian berubah menjadi *Ittihat ve Terraki Cemiyeti* atau *Commite of Union and Progress* (CUP). Anggotanya terdiri dari berbagai golongan dan agama serta etnis. Tetapi yang paling penting adalah dukungan anggota-anggota yang berasal dari militer. Ide utama yang diusung oleh CUP adalah persamaan, keadilan, dan kebebasan yang selalu disosialisasikan melalui korannya *Meşveret* (konsultasi. Musyawarah),¹⁰²

Menghadapi berbagai pemikiran yang berkembang, Niyazi Berkesh menyatakan bahwa corak gagasan pemikiran yang berkembang saat itu dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Westernis, Islamis, dan Turkis.¹⁰³ Erik Zürcher menambahkan satu lagi, yaitu Utsmanis.¹⁰⁴ Kelompok Westernis berpandangan bahwa untuk menuju kemajuan Turki harus mentransformasi nilai-nilai moral dan budaya Barat. Bagi mereka modernisasi adalah westernisasi. Yaitu gerakan mengadopsi pola hidup dan ide-ide Eropa walaupun bertentangan dengan

¹⁰²*Ibid.* hlm. 55

¹⁰³ Penjelasan tentang polarisasi pemikiran ini dijelaskan oleh Niyazi Berkes dalam *The Development The Development of Secularism in Turkey*. (Montreal: McGill University Press, 1953), hlm. 337-346 dengan judul *Three Schools of Thought*

¹⁰⁴ Erik J. Zürcher, *Turkey, A Modern History*.... hlm. 160

tradisionalisme Islam. Gagasan ini disebarkan melalui media publikasinya: *Ictihat*. Tokoh penggerak utamanya adalah Tevfik Fikret (1867-1915) dan Abdullah Cevdet (1869-1932).

Kelompok Islamis menggaungkan gagasan tentang kembali kepada *shari'ah* sebagai dasar dari konstitusi negara. Mereka ingin meregenerasi kesultanan atas dasar-dasar praktek Islam dan solidaritas dalam *Ümmah* (Komunitas Islam). Interpretasi gagasan ini melahirkan tiga kelompok, yaitu *Cemiyet-i Ilmiye-i Islamiye*, *Ittihad Muhammadi*, dan *Sirat-i Mustakim*.

Organisasi *Cemiyet-i Ilmiye-i Islamiye* atau Organisasi Ilmiah Islamiyah dipelopori oleh Mustafa Sabri Effendi (1869-1954), dengan motto *amr bi ma'ruf wa nahy an al munkar*, mengkritik kebijakan konstitusi Turki Muda sebagai pemegang kekuasaan karena tidak secara konstitusional menjalankan pemerintahan. Dalam menyampaikan gagasan ini mereka menggunakan media publikasi *Beyan Al Haqq*.

Organisasi *Ittihad Muhammadi* atau Persatuan Umat Muhammad yang dipimpin oleh Dervis Wihdati (1869-1909) mengkritik rezim yang dianggap menyimpang dari prinsip *shari'ah*. Bagi *Ittihad Muhammadi*, *Shariah* mempunyai dua konsekwensi yakni kewajiban bagi individu bagi setiap muslim seperti puasa dan shalat, dan kewajiban sosial dengan memberikan pelayanan sosial (*muamalat*) dan penegakan hukum (*uqubat*).

Adapun organisasi *Sirat-i Mustakim* atau jalan yang lurus, adalah kelompok intelektual yang menghendaki konstitusi dengan gaya pemerintahan yang dipraktikkan oleh *Al-Khulafa Ar-Rasyidin* seperti Abu Bakar dan Umar. Tokoh utamanya adalah Mehmed 'Akif (1870-1936). Ia menekankan pada penegakan tradisi yang telah ditegakkan pondasinya oleh para pendahulu islam dengan tetap mengakomodasi kemajuan modern. Ia mencontohkan Bangsa Jepang yang teguh memegang tradisi *Buddhism* dengan mengembangkan kemajuan modern. Media publikasinya adalah *Sebilur Resad*.

Adapun Utsmanis, mereka mengedepankan gagasan bahwa semua warga negara, tak peduli apa pun agama dan bahasanya akan menjadi warga negara yang baik dengan hak-hak yang sama dalam negara konstitusional yang baru. Tokoh utamanya adalah Pangeran Sabahattin (1879-1948). Gagasan ini, kata Zürcher, merupakan idealisme resmi revolusi 1908 dan tetap demikian sampai akhirnya porak poranda di tahun 1913, karena adanya sebab fundamental yaitu rasa nasionalisme yang mengakar di berbagai kawasan. Orang-orang yang berada di Yunani, Bulgaria, Armenia, dan Albania, lebih menyukai menggunakan identitas negara mereka ketimbang memakai identitas Utsmani.¹⁰⁵

Sementara kelompok berikutnya dalam pergulatan pemikiran politik Turki adalah kaum Turkis. Kelompok ini menggulirkan ide

¹⁰⁵ *Idem*. Hlm. 162

nasionalisme Turki yang terinspirasi oleh gerakan Pan Turkism Rusia yang dipelopori Yusuf Akcura, Ahmed Ağaouğlu, dan Hakim Sabit. Gerakan ini memperjuangkan kebangkitan Bangsa Turki. Nasionalisme yang diperjuangkan adalah Pan Turkisme, untuk membangkitkan semangat kesatuan nasional bangsa-bangsa Turki di luar Turki, seperti di Rusia dan Hongaria.

Tokoh yang paling berpengaruh dalam gerakan ini adalah Ziya Gokalp (1876-1924). Nasionalisme yang dikumandangkan Gokalp adalah kesatuan kultus bangsa-bangsa Turki yang tidak terikat oleh sekat-sekat ras sebagaimana yang diintrodusir oleh Pan Turkis. Gerakan ini kemudian melebur dengan gerakan pan-Turkism dalam organisasi *Türk Ocagi* tahun 1912 dengan menggunakan media *Türk Yurdu* (Tanah Air Turki) sebagai saluran ide dan gagasannya.¹⁰⁶

Corak gerakan pemikiran intelektual di Turki dapat digambarkan dalam tabel berikut:

¹⁰⁶ Niyaz Berkes, *The Development...*, hlm. 346

Tabel 1 Turkish Intellectuals Movement

No	Corak Pemikiran	Keterangan
1.	Westernis Gagasan: Untuk menuju kemajuan Turki harus mentransformasi nilai-nilai moral dan budaya Barat	Pemimpin: Tevfik Fikret dan Abdullah Cevdet Media Publikasi: <i>Ictihat</i>
2.	Islamis Gagasan: Kembali kepada <i>shari'ah</i> sebagai dasar dari konstitusi negara.	<i>Cemiyet-i Ilmiye-i Islamiye</i> Pemimpin: Mustafa Sabri Media Publikasi: <i>Beyan Al Haqq.</i>
		<i>Sirat-i Mustakim</i> Pemimpin: Muhammad Akif Media Publikasi: <i>Sebilur Resad</i>
		<i>Ittihad Muhammadi</i> Pemimpin: Derviş Vahdeti Media Publikasi : <i>Volkan</i>
3.	Usmanis Gagasan: Semua warga negara, tak peduli apa pun agama dan bahasanya akan menjadi warga negara yang baik dengan hak-hak yang sama dalam negara konstitusional yang baru.	Pemimpin: Pangeran Sabahattin.
3.	Turkis	Pemimpin: Ziya Gokalp. Media Publikasi: <i>Türk</i>

	Gagasan: Membangkitkan semangat kesatuan nasional bangsa tanpa terikat oleh sekat-sekat ras	<i>Yurdu</i>
--	---	--------------

Pada tahap berikutnya, ide nasionalisme Turki atau Pan Turkisme ini menjadi inspirasi dari Mustafa Kemal (1881-1938), presiden Turki yang pertama. Secara resmi Turki berdiri sebagai negara republik pada tanggal 23 Oktober 1923, bersamaan dengan berdirinya Partai Rakyat Republik (*Republican People's Party*) pimpinan Kemal sendiri. Dengan sistem satu partai, RPP ini menguasai seluruh kebijakan negara dengan Mustafa Kemal sebagai presiden Turki yang pertama.

Ide negara yang diusung adalah Turki Sekuler. Akar sekulerisasi yang digelokkan oleh Mustafa Kemal berasal dari ide negara modern Ziya Gokalp.¹⁰⁷ Proses sekulerisasi ini oleh Binaz Toprak diklasifikasi ke dalam empat kategori besar, yaitu: *Symbolic Secularization* (sekularisasi simbol-simbol keagamaan dengan menghilangkan simbol-simbol islam), *Institutional Secularization* sekularisasi (sekulerisasi susunan organisasi dengan menghilangkan kekuasaan institusi Islam), *Functional Secularization* (sekulerisasi fungsi spesifik agama dalam institusi negara), dan *Legal Secularization* (sekulerisasi dalam aspek hukum dan perundang-undangan).¹⁰⁸

¹⁰⁷ Ustadi Hamsah, *Paradigma Hubungan...*, hlm. 81

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm. 82

Setelah mengambil kekuasaan tahun 1923, Mustafa Kemal Atatürk (1880-1938) mentransformasi Turki menjadi republik berbasis sekularisme dan Atatürk menjadi presiden pertama (1923-1938) setelah diangkat oleh Dewan Agung Nasional di Ankara. Sebagai pengagum barat, visi Atatürk dalam membangun negara Turki adalah dengan sepenuhnya mencontoh model pembangunan barat, yaitu usaha westernisasi yang bercampur dengan sekularisasi. Secara sistematis, Kemal Atatürk menghapus institusi keagamaan dalam pemerintahan. Dalam rentang masa pemerintahannya, tercatat beberapa kejadian besar terjadi, di antaranya penghapusan Khilafah Utsmaniyah (1/11/1922), penandatanganan Perjanjian Lausanne (24/8/1923), peresmian Republik Turki, pemilihan Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden pertama dan pemindahan ibukota ke Ankara (29/10/1923), penghapusan pelajaran agama dan penutupan seluruh sekolah quran dan agama (16/3/1924), penghapusan kekhilafahan dan seluruh keluarga utsmaniyah dikeluarkan dari Istana (3/3/1924), penghapusan kementerian wakaf dan urusan agama serta pengadilan-pengadilan agama (24/4/1924), terbit peraturan azan harus dikumandangkan dalam Bahasa Turki dan tidak boleh dalam Bahasa Arab (18/7/1932), Masjid Aya Shofia dialihfungsikan menjadi Museum, mengubah Masjid Jam' Al Fatih sebagai gudang penyimpanan, dan melengkapi masjid dengan kursi-

kursi dan alat musik (1/2/1935), pelajaran atheisme diajarkan secara resmi di sekolah-sekolah (7/3/1940).¹⁰⁹

Sepanjang periode 1924-1950, rezim kemalis berhasil menginternalisasi pengaruhnya di tubuh pemerintahan. Semua sektor strategis telah mampu dikuasai dan dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan ideologi kemalisme yang terdiri dari tujuh prinsip: *cumhuriyetcilik* (republik), *milyetcilik* (nasionalisme), *halkcilik* (kedaulatan rakyat), *devletcilik* (kenegaraan), *laiklik* (sekularisme), dan *inkilapcilik* (revolusionisme).¹¹⁰

Ketika melihat kondisi negara Turki pada masanya, Badi'uzzamān Sa'id Nürsi memberikan analisa tentang problem yang sedang dihadapi oleh bangsanya, sekaligus menyampaikan langkah-langkah solutif yang mungkin untuk diambil. Dalam pidato Badiuzzaman Nursi di Masjid Jami' Damaskus tahun 1911, Nursi menyampaikan tentang problematika masyarakat muslim pada masanya. Di hadapan 10.000 jamaah yang hadir dan di antaranya adalah 100 ulama terkemuka di Kota Syam, Nursi menyampaikan analisisnya tentang sebab keterpurukan kaum muslimin serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk keluar dari problematika tersebut. Khutbah ini ditulis, dicetak, dan disebarluaskan secara luas setelah dibaca dan disunting

¹⁰⁹Badi'uzzamān Sa'id Nürsi, *Sīrah Dzātiyah, Asyu'aat*, (Mesir; Sözlür Publications, 2019), hlm. 250-254

¹¹⁰M. Sya'roni Rafii, *Islam di Langit Turki*, (Yogyakarta; Ircisod, Yogyakarta, 2019), hlm. 14

kembali oleh Sa'id Nursi, kemudian dituliskan dengan lengkap dalam kitab *Shaiqal Al Islām*..

Nursi menyatakan dalam pidato tersebut bahwa ada enam penyakit yang menimpa umat, yaitu: Tumbuh suburnya pesimisme dalam kehidupan sosial (*disheartenment and hopelessness in social life*), hilangnya kejujuran dalam kehidupan sosial dan politik (*loss of truthfulness in social and political life*), senang bermusuhan (*love of enmity*), tidak memahami tali pengikat yang dapat mengikat sesama orang beriman satu sama lain (*nor knowing the strengthening chains that binds believers to one another*), berkembangnya perbudakan seperti berbagai macam penyakit berbahaya (*various forms of despotism, which were becoming widespread as though they various contagious diseases*), dan terbatasnya perhatian hanya pada kepentingan pribadi (*restricting zeal to what is personally beneficial*)¹¹¹

a. Putus Asa dan Pesimis

Nursi menegaskan, rasa pesimisme adalah penyakit yang membunuh dan telah menyebar di jantung masyarakat muslim. Adanya perasaan tidak berdaya ini yang membuat kaum muslimin tidak dapat berlutik dan mampu dikuasai oleh barat yang jumlah

¹¹¹Said Nursi, *Shaiqalul Islām*, (Mesir: Sozler Publications, 2013), hlm. 461-462

penduduknya tidak lebih dari 2 juta orang, padahal jumlah kaum muslimin di negara ini mencapai 20 juta orang.¹¹²

Rasa *inferior* ini yang membunuh perangai baik di kalangan masyarakat dan teralihkan pada kepentingan pribadi, juga mampu mengikis kekuatan spiritual yang menjadi sumber kekuatan utama umat muslim. Penyakit pesimis dan inferior ini adalah penyakit akut di tengah umat dan masyarakat layaknya kanker. Inilah penyakit orang-orang yang pengecut, rendah, dan lemah, dan sama sekali bukan sifat mulia yang diajarkan Islam.¹¹³

Padahal, kata Nursi, masa depan adalah milik Islam, dan hanya milik Islam. hukum yang berlaku adalah hakikat al-Quran dan keimanan. Maka hendaklah kita puas terhadap apa yang telah Allah berikan. Selama kaum muslimin berpegang teguh kepada hakikat ini, maka mereka akan maju dan terdepan. Sejarah telah membuktikan itu. Namun bila mereka berlepas diri dari nilai-nilai itu, maka mereka pasti akan tertinggal dan terkalahkan.

"انه بنسبة قوة الحقائق الاسلامية وبنسبة التزام المسلمين تلك الحقائق، يزدادون رقياً وتقدماً، هكذا يرينا التاريخ. ويرينا أيضاً انه بقدر ضعف تمسكهم بتلك الحقائق يصابون بالتوحش والتخلف والاضمحلال والوقوع في ألوان من الهرج والمرج والاضطرابات. ويُغلبون على أمرهم".¹¹⁴

¹¹²*Ibid.*, hlm. 474

¹¹³*Ibid.*, hlm. 475

¹¹⁴*Ibid.*, hlm. 463

Hal itu disebabkan ajaran Islam tegak pada akal, ilmu, dan nilai yang menjadi perangkat peradaban umat manusia. Ketiga hal ini sangat kuat dalam ajaran-ajaran al-Quran. Umat manusia di dunia akan sangat memerlukan ilmu pengetahuan, sebagaimana mereka juga rindu dengan nilai-nilai mulia di tengah masyarakat. Ketiga hal ini hanya ada pada ajaran al-Quran.

Nursi menegaskan bahwa sebagai umat pilihan tidak pantas kita merasa berputus asa, sebab Islam memiliki 5 kekuatan yang mampu menjawab kebutuhan umat manusia dan menjadikan sebagai rujukan masa depan. Kekuatan itu adalah *Al Haqîqah Al Islâmiyah*, *Al Hâjah Al Mulihhah*, *Al Hurriyyah Asy Syar'iyah*, *Asy Syahâmah Al Imaniyyah*, dan *Al Izzah Islamiyyah*. Lima kekuatan pokok dalam Islam tersebut, menurut Said Nursi, menjadi sebuah penegasan bahwa Islam memiliki potensi yang sangat kuat untuk menggapai kemajuan spritual dan materil.

Pertama, “hakikat Islam” yang merupakan guru bagi seluruh kesempurnaan dan kemuliaan di mana itu menjadikan setiap muslim di dunia laksana satu jiwa, serta menyiapkan sebuah peradaban hakiki dan pengetahuan yang benar -memiliki kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan manapun. Sebagai agama wahyu, kebenaran dan kesejatian yang terkandung dalam ajaran Islam menjadi kekuatan yang tidak tertandingi dan mampu menyatukan 350 juta Islam menjadi seperti satu jiwa. Kebenaran dan kesejatian ini tidak bisa

dibandingkan dengan apa yang ada pada agama lainnya. Sebab kesejatian dan kebenaran dari Allah itu semata-mata hanya terdapat pada Islam.

Kedua, “kebutuhan mendesak” yang merupakan guru hakiki bagi peradaban dan industri yang dilengkapi oleh berbagai sarana dan prinsip sempurna. Begitu pula "kemiskinan" yang membinasakan kita. Nah kebutuhan dan kemiskinan merupakan dua kekuatan yang tidak bisa dibungkam dan dikalahkan. Masyarakat sangat perlu kepada prinsip keadilan dan konsep kesejahteraan yang ada dalam prinsip-prinsip Islam. Masyarakat dalam kebutuhan yang sangat mendesak pada prinsip dan konsep-konsep itu sebagai dasar strategis untuk menjalankan teknis pelaksanaan lapangan.

Ketiga, “kebebasan *syar'it*” yang mengarahkan umat manusia kepada jalan persaingan yang sehat menuju berbagai keluhuran dan tujuan mulia di mana ia menghancurkan segala bentuk tirani sekaligus menumbuhkan kesadaran mulia dalam diri manusia; kesadaran yang berhias sejumlah perasaan untuk bersaing, iri, bangkit secara utuh, cenderung pada pembaruan dan kemajuan. Dalam Islam ada kemerdekaan yang dapat membimbing kepada perlombaan yang benar menuju ketinggian dan tujuan yang mulia, yang mampu menghancurkan berbagai kerusakan, menumbuhkan sifat mulia di hati manusia, sebab setiap orang diberikan kemerdekaan mengembangkan

potensi dan membawa dirinya menjadi lebih baik, bahkan mengarahkan mereka untuk berlomba menuju kemuliaan itu.

Keempat, “*heroisme* Islam” yang disertai kasih sayang. Maksudnya, sikap tidak rela diri ini hina di hadapan kaum dzalim dan tidak menghina pihak yang terdzalimi. Dengan kata lain, tidak menyanjung para tirani serta tidak bersikap sombong terhadap kalangan miskin. Ini merupakan salah satu prinsip kebebasan *syar'i* yang sangat penting. Kewibawaan iman artinya merasa mulia dan tidak menerima direndahkan di hadapan orang-orang zalim. Tidak mau merendahkan orang lain dan tidak mau juga direndahkan oleh orang lain. Ini salah satu asas penting dalam asar kemerdekaan bersyariat.

Kelima, “kemuliaan Islam” yang menyuarakan penegakan kalimat Allah bergantung pada kemajual materiil dan masuk ke dalam arena peradaban hakiki. Tentu saja, sosok maknawi dunia Islam di masa mendatang akan memahami dan mewujudkan tuntutan iman untuk menjaga kemuliaan Islam. Sebagaimana kemajuan Islam di masa lalu adalah dengan melenyapkan sikap fanatik musuh, menghancurkan keangkuhannya, serta menangkal permusuhannya. Semua itu terwujud dengan kekuatan senjata dan pedang. Maka sekarang sebagai ganti dari senjata dan pedang, musuh akan

dikalahkan dan dilumpuhkan pedang maknawi dari peradaban hakiki, kemajuan materiil, kebenaran, dan hakikat.¹¹⁵

Demikianlah di antara sekian dalil dan bukti yang sebetulnya membangkitkan harapan dan semangat umat Islam. Semua hal ini perlu disadari dan perlu disosialisasikan, agar mereka tidak putus asa dan pesimis dalam menghadapi berbagai hal apapun yang menimpa¹¹⁶

b. Hilangnya Kejujuran Dalam Hidup

Dalam banyak penjelasan, Said Nursi berulang kali menegaskan bahwa kejujuran adalah pondasi dasar Islam dan pilar akhlakunya yang mulia. Sudah seharusnya kita menghidupkan sifat mulia dalam jiwa dan kehidupan sosial kita. Lawannya adalah dusta dalam berbagai bentuknya, seperti *riya*, pura-pura dan munafik.¹¹⁷

Kalau dulu Rasulullah dan para sahabat sangat menghindari kedustakan, menjadikan kejujuran sebagai modal utama kehidupan, sehingga dengan modal itu mereka mampu menyingkap hakikat iman dan rahasia-rahasia alam semesta hingga sampailah ke tingkat kemuliaan paling tinggi, namun sekarang, seiring berjalannya waktu jarak antara kejujuran dan kedustaan semakin dekat dan batas pemisah semakin buram. Propaganda politik bahkan lebih banyak

¹¹⁵Edi Amin, *Dakwah Komunitarian Ummatic: Studi Konsepsi Dakwah Said Nursi dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: Transwacana Press, 2017) hlm. 108-109

¹¹⁶Said Nursi, *Khutbah Syamiyah dalam Shaiqalul Islam*, hlm. 499-500

¹¹⁷ Badiuzzaman Said Nursi, *Shaiqalul Islām*, Kalimat Ketiga dari Al-Khutbah Asy Syāmiyah, (Mesir, Sozler Publications 2003), hlm. 605. Disebutkan juga dalam kitab *Al Kalimāt*, Kalimat ke 27, hlm. 574

berisi kebohongan. Hasilnya, kebohongan dan kerusakan semakin mengemuka di lapangan dan memiliki pengaruh besar sampai batas-batas tertentu.¹¹⁸

Kejujuran ini harus bisa kembali dihadirkan sebab tidak ada keselamatan tanpa kejujuran. Hanya ada dua pilihan; bersikap jujur atau diam. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak boleh ada kebohongan dan kepalsuan walaupun dengan alasan kemaslahatan. Banyak kekacauan yang terjadi saat ini disebabkan oleh kebohongan dan yang dilakukan oleh manusia. Tragedi abad di pertengahan abad ini berupa perang dunia, revolusi yang mencekam, dan kehancuran yang luar biasa akibat banyak terjadi dari kebohongan kebohongan itu.

c. Suka Bermusuhan

Ini kondisi sosial yang menimpa umat dan menjadi penyakit sosial yang membahayakan. Rasa bermusuhan yang terus dipelihara di dalam hati membuat kaum muslimin lupa dengan musuh yang tak terhitung jumlahnya dan siap menyerang mereka setiap saat. Tentu saja sikap seperti ini menjadi *realita* yang menakutkan, kejatuhan yang menyakitkan, juga menjadi sebuah pengkhianatan kepada Islam dan kaum muslimin.¹¹⁹

Sebab musuh-musuh yang siap menyerang itu—dimulai dari pelaku kesesatan dan tidak percaya tuhan, sampai kepada orang-

¹¹⁸ *Ibid.* hlm. 477

¹¹⁹ Badi'uzzamān Sa'īd Nūrsi, *Al Maktūbāt*, (Mesir: Sozler Publications 2013), hlm. 18

orang yang kafir—yang semuanya berambisi menghabisi kaum muslimn dan menghancurkan mereka dengan penuh rasa kemarahan, dengki, dan iri hati. Maka tidak ada pilihan lain kecuali melawan ancaman yang berat dengan pedang yang tajam di bawah perlindungan benteng yang kokoh, yaitu *Ukhuwwah Islamiyyah*.¹²⁰

Maka Said Nursi, dengan fitrah keimanannya yang tulus dan semangatnya yang menyala-nyala, tidak pernah berhenti berjuang mengajak kaum muslimin secara umum, dan para muridnya secara khusus, untuk bersatu, berkasih sayang dan saling mencintai. Di antara pesannya dalam hal ini adalah:

أيها المؤمنون!

إن كنتم تريدون حقًا الحياة العزيزة، وترفضون الرضوخ لأغلال الذل والهوان، فأفيقوا من رقدنكم، وعودوا إلى رشدكم، وادخلوا القلعة الحصينة المقدسة: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات: ١٠) وحصنوا أنفسكم بها من أيدي أولئك الظلمة الذين يستغلون خلافاتكم

الداخلية.. وإلا تعجزون عن الدفاع عن حقوقكم بل حتى عن الحفاظ على حياتكم، إذ لا يخفى أن طفلًا صغيرًا يستطيع أن يضرب بطلين يتصارعان، وأن حصاة صغيرة تلعب دورًا في رفع كفة ميزان وخفض الأخرى ولو كان فيهما جبلان متوازنان.¹²¹

Nursi juga mengingatkan bahwa kekuatan kaum muslimin akan hilang ditiup angin karena kepentingan pribadi, egoisme, dan fanitisme kelompok. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan remeh

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Badi'uzzamān Sa'īd Nūrsi, *Al Maktubāt*, hlm. 334

temeh sekalipun dapat menggiring kaum muslimin kepada kehinaan dan kebinasan. Maka, wahai kaum muslimin, kalau kalian benar-benar berpegang teguh kepada ajaran islam, maka pegang teguh petunjuk Rasulullah bahwa “Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain” Hanya dengan itu kalian akan selamat dari kehinaan dunia dan kecelakaan akhirat.¹²²

d. Tidak Paham Simpul Persatuan Keimanan

Sesungguhnya simpul-simpul itu, kata Said Nursi, adalah nikmat terbesar dari Allah Swt. kepada orang-orang beriman. Mereka tetap menjadi saudara walaupun jarak mereka berjauhan. Ikatan itu membuat mereka kuat tanpa perlu mengeluarkan banyak uang dalam melakukan muktamar dan aneka rekayasa propaganda. Sebab yang mengikat mereka lebih daripada itu semuanya. Allah mengikat hati mereka dengan ikatan cahayaNya. Allah menyatakan:

وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“dan Dia (Allah) yang mempersatukan hati mereka (orang yang beriman). Walaupun kamu menginfakkan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Mahaperkasa, Mahabijaksana”¹²³

¹²² *Ibid.* hlm. 335

¹²³ QS. Al Anfal ayat 63

Rasa cinta, kata Nursi, adalah jaminan kehidupan sosial manusia yang mendorong untuk mewujudkan kebahagiaan. Sementara permusuhan dan kebencian adalah faktor yang menghancurkan kehidupan. Sikap *ghūrūr* (terpedaya) dan berlebihan mencintai diri sendiri akan menjadikan seseorang memusuhi saudara-saudaranya sendiri tanpa sadar.

Dari mana rasa cinta dan benci itu lahir? Cinta itu lahir dari keimanan, keislaman, kemanusiaan, dan rangkaian sifat lainnya yang menjadi cahaya yang kuat dan benteng yang kokoh bagi persatuan. Sementara permusuhan dan kebencian sesungguhnya lahir dari hal-hal yang remeh temeh. Maka merawat permusuhan kepada sesama muslim di dalam hati adalah sebuah kesalahan yang besar, sebab ia berlawanan dengan akhlak islami dan menghilangkan sifat obyektif dan *husnuzhann*. Sebagaimana kegelapan dan cahaya tidak akan bertemu, maka rasa cinta dan permusuhan juga tidak akan pernah bertemu di hati orang yang beriman.¹²⁴

Ketika rasa permusuhan dan kebencian itu muncul, jelas Nursi, maka ingatlah bahwa Pencipta kalian adalah satu, Raja kalian adalah satu, Pemberi rezeki kepada kalian adalah satu, yaitu Allah ta'ala. Nabi kalian satu, agama kalian satu, kiblat kalian satu, dan banyak lagi kesatuan di antara kalian. Kalian tinggal di desa yang

¹²⁴ Badi'uzzamān Sa'īd Nūrī, *Al Matsnawi Al Arabi An Nūri* (Kairo: Sozler Publications, 2013), hlm. 158

sama, di bawah naungan negara yang sama, di kota yang sama, dan sama.

Ikatan-ikatan seperti ini akan melahirkan persatuan, kesepakatan, kecintaan, dan persaudaraan, dan memiliki kekuatan maknawi yang mengikat setiap bagian dari alam semesta ini. Maka alangkah zalim orang yang cuek dan menutup mata dari semua simpul-simpul ini, dan malah memberi perhatian kepada hal-hal yang remeh dan tidak berarti. Cara pandangan seperti inilah yang akhirnya melahirkan kemunafikan, kedengkian, dan permusuhan.¹²⁵

e. Tersebarnya Penindasan

Penindasan yang dimaksud secara khusus di sini adalah sikap diktator, fanatik dengan pandangan pribadi walaupun salah. Lawannya adalah sikap musyawarah dan demokrasi. Karena pentingnya hal ini, Islam telah menetapkan prinsip demokrasi ini dalam posisi yang sangat tinggi dan menjadikannya sebagai pilar kehidupan politik dan sosial.¹²⁶

Menurut Nursi kunci kebahagiaan kaum muslimin dalam kehidupan sosial mereka adalah musyawarah. Kita dapat melihat sepanjang sejarah bahwa persambungan pemikiran antara satu individu-individu lainnya akan terjadi melalui musyawarah. Ia

¹²⁵ Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi, *Al Maktūbāt*, hlm. 326

¹²⁶ Khadijah An Nabrawi, *Daur Rasāil An Nūr fī Yaqzhatil Ummah*, (Kairo: Sozler Publications, 1998), hlm. 25

menjadi tonggak kehidupan bermasyarakat yang kuat. Sementara kelemahan sebuah peradaban terjadi ketika masyarakatnya tidak mampu bermusyawarah ini.¹²⁷

f. Egoisme dan Fokus Pada Kepentingan Pribadi

Penyakit keenam yang menyebabkan ketertinggalan umat islam saat ini adalah egoisme kelompok dan fokus pada kepentingan pribadi dibanding mendahulukan kepentingan umum. Dalam sebuah kelompok masyarakat, kesalahan satu orang tidak hanya terhitung satu, tetapi bisa berlipat ganda timbangannya setara dengan ratusan kesalahan. Begitu pula satu kebaikan bisa bernilai ribuan kebaikan.

Sebuah keluarga besar misalnya, ketika ada satu orang melakukan kesalahan di tengah masyarakat, maka seluruh anggota ikut terkena getahnya dan menanggung tanggungjawab di hadapan masyarakat. Seakan-akan setiap anggota keluarga itu telah melakukan pelanggaran itu. Demikian pula ketika satu anggota keluarga besar mencetak prestasi dan berbuat kebaikan, maka seluruh anggota keluarga akan ikut merasa bangga dan berbahagia.

Maka melihat kenyataan ini, seorang yang melakukan pelanggaran tidak hanya dia saja yang menanggung akibatnya, tetapi bisa memberi akibat buruk kepada berjuta-juta umat Islam.¹²⁸

483 ¹²⁷ Badi'uzzamān Sa'īd Nūrsi, *Shaiqalul Islām*, (Kairo: Sozler Publications, 2013), hlm.

Orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tutur Nursi di bagian lain di kitab *Rasāil Nur*, dia bukan manusia. Sebab sifat dasar manusia adalah makhluk sosial. Ia harus memperhatikan kehidupan orang lainnya. Sebab kehidupan pribadinya hanya akan berlanjut tergantung dengan kehidupan sosialnya. Saat ia makan sepotong roti, misalnya, seharusnya ia berfikir betapa banyak tangan yang berjasa dalam menghadirkan sepotong roti itu. Begitu pula baju yang ia pakai, betapa banyak tangan dan peralatan yang digunakan sampai menghasilkan baju itu. Setiap manusia akan selalu memiliki ikatan dengan orang lain. Seharusnya ia bisa memberikan harga maknawi kepada mereka yang berjasa menghadirkan kebutuhannya itu. Ketika ia hanya berfikir untuk diri sendiri, maka ia telah kehilangan rasa kemanusiaan dan berubah menjadi hewan buas.¹²⁹

Demikianlah Said Nursi memandang bawah penyebab utama tertinggalnya kaum muslimin adalah sebab maknawi, bukan soal material. Betapa banyak negara yang lebih miskin dari negara-negara Islam dalam materi dan bahan baku, tetapi dengan dorongan kuat masyarakat dan keinginan bersama untuk maju dan berubah, mereka mampu mewujudkan kemajuan yang diharapkan. Sudah saatnya kita

¹²⁸ Badi`uzzamān Sa`īd Nūrī, *Shaiqalul Islām*, hlm. 480

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 483

berubah agar kita kembali sehat dari penyakit-penyakit itu yang sudah cukup menghempasan kehidupan kita menjadi sia-sia.¹³⁰

d. Ide dan Aktifitas Politik

Pemikiran Nursi dapat dipetakan ke dalam tiga periode yaitu: Said Qadim (Old Said, tahun 1877-1913), Said Jadid (New Said, tahun 1926-1950), dan Said Ats-Tsalits (Third Said, tahun 1950-1960). Pemetaan ini dilakukan oleh Said Nursi yang sendiri yang ia jelaskan dalam berbagai bagian dalam *Rasāil An-Nūr*. Pemetaan pemikiran ini dilihat dari metode pendekatan yang digunakan dalam menyikapi permasalahan umat sesuai dengan kondisi sosial politik yang ada, bukan dalam hal ide dan gagasan pemikiran¹³¹

Periode Said Qadim ini terhitung sejak tahun kelahirannya sampai tahun 1913. Karakter yang paling menonjol pada masa ini adalah semangat yang tinggi untuk terlibat langsung dalam urusan publik untuk menemukan solusi. Pola pendidikan yang paling menonjol pada masa ini adalah pendidikan tasawuf dan keimanan. Tulisan-tulisan yang dihasilkan pada situasi dan kondisi masyarakat muslim yang sedang sakit ini pada umumnya berusaha memahami problem dan menekankan pada solusi.

Penyelesaian masalah sosial dan peradaban pada masa ini, Nursi lebih bersikap praktis daripada teoritis. Ia lebih berusaha menyelesaikan

¹³⁰ Khadijah An Nabrawi, *Daur Rasāil An Nūr fi Yaqzhatil Ummah*, (Kairo: Sozler Publications, 1998), hlm. 33

¹³¹ Mikail Tasdemir, *Political Thought of Bediuzzaman Said Nursi*, (Kuala Lumpur: The International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1999), hlm. 6

masalah yang ada tidak hanya dengan menulis tapi juga dengan terlibat aktif, seperti dukungannya ke organisasi massa bahkan ikut masuk ke dalamnya. Secara umum, Nursi terlibat aktif dalam memecahkan masalah umat Islam dunia pada umumnya dan Daulah Utsmaniyah pada khususnya.

Bulan November 1907, Said Nursi berangkat ke Istanbul untuk mendapatkan dukungan resmi atas idenya untuk mendirikan universitas Islam yang ia beri nama *Medresetü'z Zehrâ*. Usianya saat itu baru sekitar 30 tahun. Setelah sebelumnya ia menjalani hidup yang serba prihatin di Desa Nurs, kini Said Nursi mendapatkan tempat yang istimewa di mata ulama Kurdistan. Namanya masyhur dimana-mana. Bukan hanya karena kemampuannya mengalahkan para ulama dalam debat-debat ilmiah, ilmunya yang dalam dan luas, tetapi juga karena tekadnya yang kuat untuk mewujudkan keadilan dan membela kebenaran tanpa mengenal takut kepada siapapun, selain kepada Allah Swt. Obsesi dan idealismenya ini tumbuh sesuai dengan potensi yang kemampuan yang ia miliki.¹³²

Sejak masa reformasi tanzimat (1839-1976), pengaruh Eropa pada perubahan di Turki semakin menguat, berakibat pada pemisahan antara urusan agama dan urusan negara pada berbagai kebijakan. Aturan pendidikan yang sekuler ini menyebar luar di sekolah dan universitas, khususnya di fakultas kedokteran dan militer. Gerakan konfrontasi pada kebijakan Sultan Abdul Hamid yang dianggap mengekang kebebasan

¹³²Şükran Vahide, *Islam In Modern Turkey; An Intellectual Biography of Bediuzzaman Said Nursi*, Albany; State University of New York Press, 2020, hlm. 33

datang dari kedua fakultas ini. Secara perlahan, terbentuklah organisasi Turki Muda yang terdiri dari tentara, pejabat pemerintah, dan para pemikiran yang berada di dalam dan luar negeri yang memiliki tujuan yang sama; yaitu perlawanan pada penindasan yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II di dalam dan luar negeri dan keinginan melakukan perbaikan mendasar dalam bidang sosial dan politik. Organisasi yang dipimpin oleh Ahmed Rıza di Paris ini memiliki hubungan dengan gerakan revolusi rahasia yang berada di kalangan pemerintah dan berpusat di Makedonia. Untuk selanjutnya organisasi ini dikenal dengan nama Committee of Union and Progress (CUP) yang pernah memimpin revolusi konstitusi tahun 1908, dan Nursi pernah menjadi salah satu anggotanya.¹³³

Soal keanggotaan ini Nursi ini, kata Şükran Vahide, walaupun Nursi jelas pernah bekerja sama dengan CUP pada awal revolusi dalam memperjuangkan konstitusi, dan bahwa Nursi memiliki hubungan khusus dengan beberapa anggotanya, tetapi ia akhirnya melepaskan diri dari apa yang dilakukan oleh banyak anggota organisasi ini dan tidak pernah ragu untuk menentanginya. Saat ditanyakan tentang sebabnya meninggalkan CUP, Nursi menjawab bahwa ia tidak meninggalkan CUP, tetap justru sebagai anggota organisasi meninggalkannya. Mereka telah salah jalan dan menuju rawa-rawa.¹³⁴

¹³³*Ibid.* hlm. 36

¹³⁴*Ibid.*

Nursi juga sempat bergabung menjadi anggota organisasi Ittihad Muhammadi yang dipimpin oleh Derviş Vahdeti, bahkan menjadi salah satu pengurus utama organisasi. Sebelum bergabung ke organisasi ini, Nursi pernah masuk ke 7 organisasi lainnya yang menurutnya punya tujuan yang sama. Di Surat Kabar milik Ittihad Muhammadi, *Volkan*, nomor 75, Nursi menulis bahwa keberadaan organisasi dan partai yang berbagai macam pada saat ini sangat penting, baik itu organisasi agama maupun politik, sebab organisasi-organisasi ini sebab tujuan yang diharapkan tidak mungkin tercapai dengan kepercayaan kepada hukum negara saja, tanpa adanya partai dan organisasi. Dan undang-undang menjamin hak setiap warga untuk terlibat dalam organisasi tersebut”¹³⁵

Pemberontakan yang terjadi di Masjid Aya Sophia pada 31 Maret¹³⁶ menyeret Nursi ke penjara bersama ratusan orang lainnya. Peristiwa itu terjadi setelah peringatan Maulid Nabi dimana Said Nursi menjadi pembicara pada malam itu. Nursi tidak terlibat sama sekali dalam pemberontakan ini, bahkan ia berusaha meyakinkan tentara yang melakukan pemberontakan untuk taat perintah pimpinan dan kembali ke

¹³⁵*Ibid. hlm. 68*

¹³⁶ Pencantuman tanggal 31 Maret 1325 sesuai perhitungan tanggal romawi. Adapun sesuai penanggalan masehi maka perayaan itu jatuh pada tanggal 13 April 1909. Pemberontakan oleh sekelompok tentara ini berlangsung selama 12 hari. Ratusan orang ditangkap dan 12 lainnya dihukum mati tanggal 19 Juli 1909, termasuk ketua Ittihad Muhammadi, Derviş Vahdeti. Menurut Nursi, pemberontakan itu dirancang oleh golongan-golongan yang ingin mempercepat sekularisasi dan westernisasi, dan berusaha menyingkirkan kekuatan-kekuatan yang tidak sejalan dengannya. Dan salah satu yang tidak sejalan itu adalah CUP. Adapun pelakunya ada yang menyatakan adalah kaum liberal yang bekerja sama dengan Inggris dan dipimpin oleh Vahdeti, ada pula yang menyatakan Badan Intelijen Inggris, dan ada pula yang menyebut pelakunya adalah CUP sendiri. Şükran Vahide, *Islam In Modern Turkey*, hlm. 65-71

barak. Nursi pun dibebaskan setelah ia menyatakan pembelaan dan terbukti tidak bersalah dalam pengadilan militer¹³⁷

Perhatian Nursi kepada negerinya sangat mendalam. Ia bahkan turun ke gelanggang perang untuk meredam pemberontakan bersama murid-muridnya. Seiring dengan meningkatnya tindakan terorisme dan kondisi dalam negeri yang memburuk, Nursi melatih murid-muridnya melakukan perang gerilya. Dengan pribadinya yang kharismatik dan kemampuannya menggelorakan cinta dan pengabdian yang besar kepada murid dan pengikutnya, Nursi mampu menumbuhkan keberanian dan daya tahan tanpa tanding. Nursi dan murid-muridnya mampu menahan gerakan revolusioner Tasnak Armenia di sekitar Van dan Bitlis, tempat mereka sangat aktif bergerak, dan bahkan menghentikan mereka sampai batas-batas tertentu. Uniknya, dalam setiap perang yang ia ikuti, segenap ilmu ikut bersamanya. Maka buku dan senjata selalu berdampingan. Satu ketika tempatnya menjadi barak pasukan, di waktu yang lain majlis ilmu.¹³⁸ Saat perang dunia meletus tahun 1914, dan kesultanan Utsmani harus terlibat perang dan bergabung dengan kekuatan poros (Austria-Hungaria, dan Jerman), melawan *Triple Entente* (Inggris, Prancis, dan Rusia), Nursi dan muridnya bergabung ke dalam militer Turki sebagai relawan. Mereka ditempatkan di divisi Van dan dikirim ke garis depan di Erzurum. Nursi

¹³⁷Şükran Vahide, *Islam In Modern Turkey*, hlm. 65

¹³⁸*Ibid*, hlm. 109

bahkan sempat tertangkap oleh tentara Rusia, setelah akhirnya ia bisa menyelamatkan diri.¹³⁹

Dua tahun setelah Nursi berhasil membebaskan diri dan kembali ke Istanbul, terjadilah revolusi ruhiyah yang menakjubkan. Nursi tenggelam dalam ibadah dan meninggalkan kehidupan politik. Sebab utama ia menarik diri dari kehidupan politik dan menjalani kehidupan yang berbeda sebelumnya, kata Prof. Dr. Yunus Cengel, karena tiga hal, yaitu; karena melihat tujuan dan praktik politik yang kotor, kondisi pemerintahan yang buruk, dan memilih fokus untuk menyelamatkan keimanan. Inilah masa-masa peralihan bentuk penyikapannya terhadap politik yang dikenal dengan masa Said Jadid (New Said) dan terjadi sepanjang tahun 1926-1950.

Tentang praktik politik saat itu, Nursi menyatakan bahwa orang yang lalai dan sesat di zaman ini menjual agama mereka untuk kepentingan dunia dan mengganti agama yang berharga dan mulia itu dengan pecahan-pecahan kaca, lalu berusaha menuduh orang yang melakukan kegiatan keagamaan sebagai alat dari kekuatan politik luar negeri dan semata-mata digunakan untuk komoditas politik. Tuduhan semacam ini tentu merendahkan fungsi agama yang tinggi.

Ketika politik digunakan untuk melayani agama, kata Yunus Cengel, maka agama akan menguat dan tersebar ke penjuru dunia. Tetapi,

¹³⁹*Ibid.* 111

pada abad belakangan ini, ketika perhiasan dunia dan fitnah telah menguasai kehidupan individu dan masyarakat, maka terjadilah ketimpangan dan hilanglah agama. Tujuan dari organisasi politik lebih fokus pada akal, ilmu, dan kebebasan dibanding kepada nilai agama. Perbedaan cara pandang ini, tentang apa tujuan politik dan bagaimana cara mencapai tujuan itu, menyebabkan terjadinya pada kelompok politik. Maka bidang politik menjadi arena pertikaian kepentingan sesuai pandangannya pada nilai-nilai modern.¹⁴⁰ Adapun orang-orang yang terjun kepada politik, dengan keberadaan banyak aliran politik yang kuat, menjadikan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu bertahan menjaga kemerdekaan dan keikhlasannya. Sebab salah satu dari aliran politik ini akan menarik mereka dan membuatnya bekerja untuk kepentingan duniawinya. Hal ini menyebabkan penyimpangan dan berkurangnya kemuliaan usaha dan pelayanan kepada Iman.¹⁴¹

Pada masa ini, Said Nursi memilih untuk fokus menjaga keimanan di hati umat daripada terjun berkecimpung dalam politik. Ia menyatakan bahwa hakikat keimanan akan mengungguli segala sesuatu di jagat raya ini. Masuk ke dalam politik dan bersibuk-sibuk dengan beragam aktifitasnya mengurangi kemuliaan hakikat itu. Namun bagi mereka yang terlanjur masuk dan berkecimpung ke dalam dunia itu, hendaklah dapat berjuang untuk melayani demi mewujudkan keamanan dan kedamaian sosial. Hal ini disebabkan, kata Nursi, *khidmat iman* dan hakikat keimanan

¹⁴⁰ Yunus Cengel, *Hukm Az Zamân*, (Kairo: Sözlür Publications, 2019), hlm. 111

¹⁴¹ Said Nursi, *Asyu'aat*, (Kairo: Sözlür Publications, 2019), hlm. 400

adalah sesuatu yang paling mulia di dunia ini. Maka jangan sampai ia menjadi alat untuk apapun. Usaha untuk khidmat iman ini telah menghalangi kami secara totalitas dari terjun ke dunia politik. Sebab orang-orang yang lalai dan sesat pada zaman ini menjual agama mereka untuk mendapatkan tali kekang dunia dan menggantinya dengan pecahan kaca yang retak berusaha menuduh bahwa kegiatan melayani dan menyebarkan keimanan itu sebagai alat aliran politik untuk mencapai kepentingan tertentu.¹⁴² Dalam hubungan antara agama dan politik, Nursi melihat bahwa politik digunakan untuk *khidmatuddin*, dan bukan sebaliknya, agama untuk melayani kepentingan politik. Ia melihat bahwa tidak pantas menjadikan agama untuk kepentingan duniawi, dan bahwasanya usaha melayani agama lebih mulia dari apapun juga, termasuk dari kepentingan politik apapun.

Kepada pemerintah dan para pelaku politik Nursi meminta untuk tidak banyak berprasangka kepada para ulama yang berusaha menghidupkan nilai keimanan, namun hendaklah berusaha untuk menundukkan kesulitan dan memudahkan jalan di hadapan para ulama. Sebab usaha yang kami lakukan, kata Nursi, adalah pondasi keamanan, kehormatan, dan kasih sayang, untuk menyelamatkan aturan hokum dan kehidupan sosial dari kekacauan dan terorisme. Khidmat yang kami lakukan sesungguhnya untuk mengokohkan, menguatkan, dan mendukung tugas asasi yang kalian lakukan. Dalam hal Nursi menyatakan:

¹⁴² Said Nursi, *Al Malahiq; Mulhaq Qasthamuni*, (Kairo: Sözler Publications, 2019), hlm.

فأنتم يا أهل السياسة والحكومة! لا تتشغلوا بنا بناءً على الظنون والأوهام، بل عليكم أن
تذللوا المصاعب لنا وتسهلوا الطريق أمامنا، لأن خدمتنا تؤسس الأمن والاحترام والرحمة،
وتسعى لإنقاذ النظام والأمن والحياة الاجتماعية من الفوضى والإرهاب. فخدمتنا ترسي ركائز
وظيفتكم الحقيقية وتقويها وتؤيدها¹⁴³

Usaha yang totalitas, kejujuran, dan keikhlasan, adalah modal utama dalam menancapkan pesan-pesan dakwah ke hati dan pikiran umat. Ini tidak akan bisa terjadi kecuali dengan menjauhkan diri dari berbagai kepentingan duniawi, termasuk di antaranya kepentingan politik. Inilah yang dilakukan oleh Imam Badiuzzaman. Ia berlari menjauh dari politik seperti ia lari dan menjauh dari setan. Ia tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan sedikitpun. Namun walaupun demikian, negara tidak membiarkannya dan tetap berusaha melemahkan semangatnya berkhidmat kepada iman. Tetapi ternyata Badiuzzaman tidak pernah berhenti dalam berjuang berkhidmat kepada iman dengan menulis *Rasâil An Nûr*¹⁴⁴

Berbagai jabatan pernah ditawarkan dengan gaji yang tinggi dan berlipat ketika ia mau berkompromi. Namun memilih berlari dan menjauh agar untuk menjaga kemuliaan agama, agar jangan sampai agama ini menjadi permainan politik atau target serangan. Sebab pada akhirnya agama yang dipolitisasi, pengadilan, militer, dan ilmu pengetahuan yang dipolitisasi akan menimbulkan bahaya yang besar bagi negara dan

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Yunus Cengel, *Hukm Az Zamân*, hlm. 115

penduduknya.¹⁴⁵ Sikap totalitasnya untuk fokus berkhidmat melalui pikiran dan gagasannya yang ia tuangkan dalam Kitab *Rasāil An-Nūr* pada akhirnya memberikan pengaruh besar dalam penerimaan Said Nursi dalam menyentuh hati dan akal pikiran masyarakat Turki dan umat manusia, bahkan hingga sampai saat ini.¹⁴⁶

Berikut ini beberapa penjelasan yang menunjukkan pengaruh tersebut:

1) Pengaruh Nursi di Tengah Masyarakat

Sejak muda, Said Nursi telah menduduki tempat terhormat di kalangan ulama dan masyarakat Turki. Dalam usia yang masih sangat muda, ia telah mendapatkan gelar *Badi`uzzamān* (keajaiban zaman) dari gurunya Molla Fathullah Efendi di Siirt atas kecerdasannya dan prestasi-prestasinya dalam belajar. Kabar ini menyebar dengan cepat, dan Said Nursi mendapat banyak undangan untuk melakukan diskusi dan debat ilmiah. Kemampuan Nursi yang dapat mengalahkan setiap perdebatan membuat pengaruh Nursi segera menyebar dengan luas.¹⁴⁷

Pada bulan Mei atau Juni tahun 1908, Badi`uzzamān Sa`id Nursi menyerahkan proposal yang berisi gagasan-gagasan reformasi pendidikan ke Istana. Inti dari gagasan ini adalah keinginan

¹⁴⁵*Ibid.* hlm. 116

¹⁴⁶*Ibid.* hlm 115

¹⁴⁷ Şükran Vahide, *Islam in Modern Turkey; An Intellectual Biography of Bediuzzaman Said Nursi*, hlm. 13

mendirikan universitas di Anatolia Timur yang setara dengan Universitas Al Azhar Mesir, yang dinamakan dengan Madrasah Az Zahra. Model pendidikannya adalah dengan menyatukan tiga bentuk pendidikan, yaitu; madrasah atau sekolah agama tradisional, mekteb atau sekolah umum baru, dan *tekke* atau lembaga sufi. Visi ke depannya, Madrasah Az Zahra ini menjadi mekteb yang paling unggul sebagai akal budi, madrasah yang paling baik sebagai hati, dan zawiye yang paling suci sebagai nurani. Proposal ini sudah diterima oleh Sultan Abdul Hamid tapi akhirnya terhenti karena keterlibatan Turki dalam perang dunia¹⁴⁸

Pengaruh Nursi yang besar juga terlihat saat perayaan Maulid Nabi yang diadakan oleh *Ittihad Muhammadi* di Masjid Aya Shofia pada tanggal 13 April 1909, atau 31 Maret 1325 tahun Romawi. Kejadian malam itu dimanfaatkan oleh sebagian tentara melakukan pemberontakan. Sebelas hari kemudian pemberontakan ini dapat dipadamkan. Nursi, meskipun tidak terlibat sama sekali bahkan ia berusaha menenangkan masyarakat pada saat itu, ikut ditangkap namun akhirnya dibebaskan.¹⁴⁹

Musim dingin tahun 1911, Nursi berkunjung kepada saudari perempuannya di Syam. Ternyata ia diminta menyampaikan pidato dalam Bahasa Arab di Masjid Jami Umawiyah di Damaskus. Acara

¹⁴⁸ *Ibid.* hlm. 42-46

¹⁴⁹ Ihsan Qasim Ash Shalihi, *Nazhrah 'Ammah*, hlm. 24

dihadiri oleh puluhan ribu orang, termasuk oleh para ulama terkemuka di kota Syam. Pidato yang disampaikan tentang problematika umat dan solusinya ini dikenal dengan nama “Khutbah Syāmiyah” yang kemudian ditulis dan disebarluaskan.

Pada perang dunia pertama, Nursi ikut serta dalam perang melawan Rusia dan menjadi komandan pasukan relawan. Nursi sempat menjadi tawanan di kamp penjara Rusia selama 2 tahun 4 bulan dan beberapa hari, dan berhasil melarikan diri setelah adanya kekacauan akibat revolusi Bolisefik.¹⁵⁰

Badi`uzzamān Sa`īd Nursi juga sempat ditunjuk menjadi salah satu anggota dari *Darul Hikmah Al Islāmyyah* (salah satu lembaga majlis ulama di bawah *syaikhul islam*) pada tanggal 13 Agustus 1918. Anggota dari lembaga ini adalah para ulama dan tokoh pilihan, di antaranya seperti Muhammad Akif (budayawan dan sastrawan), Ismail Haqqi (ahli tafsir) dan Mustafa Shabri (*syaikhul islam*). Setelah revolusi Syekh Said tahun 1925, Nursi ditangkap padahal ia tidak terlibat. Sejak saat itu kehidupan Said Nursi berlau dari satu penjara ke penjara lainnya, dari satu pengasingan ke pengasin yang lain. Namun hal itu tidak melemahkan semangatnya untuk berdakwah. Nursi menyampaikan dakwahnya dalam bentuk tulisan sejak ia diasingkan di Barla tahun 1926.

¹⁵⁰ *Ibid.* hlm. 26-32

Pada masa-masa yang berat bagi kaum muslimin di Turki itu, Nursi terus berusaha menyelamatkan iman masyarakat. Menurutnya, perjuangan *Inqādzul Imān* (menyelamatkan keimanan) jauh lebih penting daripada perjuangan mengangkat senjata. Tulisan pertama yang dari rangkaian tulisan dalam *Kulliyāt Rasāil an Nur* ini adalah *Risalah Al Hasyr*, yang membahas tentang hari kiamat dan kebangkitan umat manusia dengan dalil rasional, untuk melawan gelombang ateisme besar-besaran yang menimpa masyarakat.¹⁵¹

Saat adanya upaya sekularisasi yang gencar di tengah masyarakat ini, kehadiran Badiuzzaman Said Nursi, membawa angin segar buat masyarakat Turki yang merindukan nuansa keislaman seperti yang pernah terjadi semasa Khilafah Turki Utsmani. Dengan keilmuan yang dia kuasai, baik itu ilmu-ilmu yang berorientasi terhadap wahyu (ilmu agama) atau ilmu-ilmu saintifik modern, Nursi mampu mengelaborasi dua ilmu pengetahuan ini untuk mereformasi dunia pendidikan. Karena menurutnya, ilmu agama harus berjalan seiring seirama dengan saintifik modern sebab, ilmu agama sebagai landasan cahaya hati, sedangkan saintifik modern merupakan cahaya buat akal. Kombinasi dua keilmuan ini menjadi

¹⁵¹ *Ibid.* 42-50

salah satu dari terjadinya sebuah perubahan yang lebih baik untuk masa depan Turki yang lebih baik.¹⁵²

Keberhasilan Said Nursi dalam mengolaborasikan ilmu pengetahuan sains dan ilmu-ilmu agama yang diletakkan dan dipopulerkan dalam struktur Islam menjadi sebuah ide yang membuat gerakan dan pemikiran Nursi sangat diminati oleh masyarakat muslim Turki. Meskipun demikian, saintifikasi Islam dalam ide-ide dan gerakan yang dilakukan oleh Nursi, bukan berarti menjadi abai atas masalah-masalah tradisional. Malah sebaliknya, dengan pengelaborasi ilmu pengetahuan, Nursi dapat menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi saat itu dengan diterima oleh banyak kalangan. Sebab, Nursi menemukan universalitas Islam tanpa harus kembali ke Islam masa silam.¹⁵³

Ditambah lagi dengan strategi Said Nursi dalam menjaga komunikasi dengan masyarakat Turki, Nursi mengejawantahkan ide-ide dakwah dan politiknya ke dalam tulisan-tulisannya dengan jelas dan mudah dipahami. Kaidah seperti ini ternyata –selain mendapatkan ancaman serius dari pihak penguasa saat itu— membawa dampak yang signifikan dengan tertariknya banyak kalangan dari kalangan muslim atau non muslim. Ide-ide yang

¹⁵²Ichwansyah Tambupolon, *Dakwah dan Modernisme, Studi Terhadap Pemikiran dan Aktivitas Dakwah Badi`uzzamān Sa`id Nūrsi (1877-1960)*, *Hikmah Vol II*, No. 01, (Januari-Juni 2015), hlm. 4

¹⁵³Faridah binti Mohd Sairi, “Metode Dakwah Badi`uzzamān Sa`id Nūrsi..”, hlm. 291

dituliskan Nursi dalam *Rasāil Nur* ini yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri baik itu orang-orang Turki sendiri atau pun orang-orang yang datang dari luar Turki.

Metode dakwah politik Nursi ini tentunya dibarengi dengan strategi dakwah dan gerakan politik secara sembunyi-sembunyi atau dakwah dengan cara bergerilya karena, mengingat situasi dan kondisi Turki saat itu sangat tidak memungkinkan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Namun, setelah terjadinya perubahan kondisi dan situasi politik Turki, dakwah yang awalnya sembunyi-sembunyi dan bergerilya, berubah menjadi dakwah yang bersifat terang-terangan. Hal ini terlihat dari bagaimana dukungan Said Nursi dan murid-muridnya yang tergabung dalam komunitas Nur memberikan dukungan suara kepada Partai Demokrat pada pemilihan di tahun 1950. Dukungan suara itu pula yang akhirnya membawa Partai Demokrat menjadi penguasa Turki. Kemenangan Partai Demokrat pada pemilu tersebut akhirnya membawa angin segar buat gerakan komunitas Nur di mana gerakan dakwah komunitas Nur mendapatkan kebebasan tanpa ada lagi tekanan dari pemerintah. Pada masa ini pula Nursi secara terang-terangan menyampaikan kepada pemerintah agar menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan pembatasan kekuasaan. Artinya, Said Nursi tidak menolak sistem pemerintahan demokratis asalkan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan,

konsultasi, dan hukum. Hal ini berlangsung hingga akhir hayat Said Nursi, di mana dia terus memperjuangkan untuk menjadikan politik sebagai pelayan agama. Terutama dalam hal menyuarakan aspirasi umat muslim konservatif yang ada saat itu.¹⁵⁴

Jelas sekali bahwa Said Nursi –dalam berbagai karyanya— dengan tegas menyatakan tidak sepakat dengan sistem pemerintahan yang absolut. Makanya dalam gerakan politiknya, sangat terlihat bagaimana Nursi memberikan dukungan terhadap pemerintah yang konstitusional dengan kebebasan yang berlandaskan atas nilai-nilai Islam. Bagi Nursi, para pejabat yang berada di pemerintahan harusnya bekerja untuk melayani masyarakat, bukan melayani tirani atau bahkan berubah menjadi tirani. Di sisi lain, penerimaan Nursi atas nasionalisme Islam yaitu yang meliputi semua umat Islam. Pemikiran Nursi yang demikian bisa dikatakan senada dengan pemikiran *pan-Islamisme* nya Jamaluddin al Afghani sebagaimana yang dikatakan oleh Nursi bahwa dia sepakat dengan pemikiran al Afghani. Sebab, pada dasarnya menurut Nursi, musabab dari keterbelakangan umat Islam tidak lari dari tiga hal yaitu: kebodohan, kemiskinan, dan perselisihan. Maka, peningkatan pendidikan, kerja keras dan kemajuan, serta persatuan umat Islam, menjadi tiga cara dalam mengatasi problem umat Islam.¹⁵⁵

¹⁵⁴*Ibid.*, hlm. 18

¹⁵⁵Hasbi, *Prinsip-Prinsip Politik Islam menurut Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi.*, hlm. 4

Di sisi lain, Nursi juga turun langsung dalam gerakan politik –meskipun dalam sebagian catatan dikatakan bahwa Nursi pernah mengatakan “aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan dan politik”. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Nursi ikut terlibat mendorong agar berdirinya sebuah pemerintahan secara konstitusional dan mengampanyekan kebebasan dalam beragama (berislam). Namun, yang berbeda dari Nursi, dia lebih cenderung ‘mengampanyekan’ kebebasan dalam Islam lewat tulisan-tulisan yang tersebar di berbagai media massa. Dia juga lebih banyak menjawab dan membantah tuduhan-tuduhan dan ide-ide kaum liberalis dan sekularis tentang konstitusialisme, penentangan atas nilai-nilai keislaman, dan sebagainya, juga lewat tulisan. Ini juga yang kemudian menjadi ihwal alasan pemerintah untuk menangkap Nursi dan membubarkan segala kegiatan yang di mana dia terlibat di dalamnya.

Keinginan Nursi adalah mengembalikan kejayaan Turki dengan menjadikan Turki sebagai pusat peradaban Islam, tidak seperti kebijakan Kemal Attaturk yang saat itu menjadi pemimpin Turki. Karena menurut Nursi, Attaturk lebih cenderung memodernisasi Turki dengan cara-cara sekuler. Namun, hal tersebut bukan berarti Nursi melakukan perlawanan dan menentang

pemerintah dalam bentuk pemberontakan.¹⁵⁶ Karena menurutnya, menentang pemerintah yang sah sangat tidak produktif dalam mewujudkan cita-citanya untuk *izzul Islam wal muslimin*.¹⁵⁷

Hal ini terlihat bagaimana di akhir-akhir dari kehidupannya, Nursi yang saat itu sudah sepuh, mengarahkan para murid-muridnya untuk ikut mendukung Partai Demokrat yang berada di bawah pimpinan Adnan Menderes. Karena menurutnya, Partai Demokrat lebih cenderung mendukung masyarakat di pedesaan dan kaum muslimin yang masih konservatif. Hal ini tentunya dengan pertimbangan matang bahwa memilih Partai Demokrat lebih cenderung memiliki mudharat yang lebih sedikit sekaligus upaya untuk menghempaskan Partai Republik sebagai partai penguasa. Selain itu, Nursi bersama murid-muridnya terus mengampanyekan

¹⁵⁶Perihal perlawanan atas pemerintahan ini, kita bisa melihat dari bagaimana pada tahun 1909 M –meskipun tidak terlibat— Nursi sempat ditahan oleh pasukan yang berada di bawah pimpinan Mahmud Shawkat yang meredam pemberontakan saat itu dengan tuduhan ikut memberontak. Padahal dalam pandangan Nursi, pemberontakan atas pemerintahan tidak dibenarkan. Ditambah lagi menurutnya, banyak dari para pengunjung rasa melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar. Namun, di lain sisi, ketika tentara Inggris telah menguasai Istanbul, Syaikhul Islam Abdullah Affandi yang berada di bawah tekanan kolonialisme Inggris mengeluarkan fatwa yang menentang gerakan para aksi yang melakukan perlawanan atas Inggris. Fatwa ini segera dibantah dan ditolak oleh tujuh puluhan ulama dan termasuk di dalamnya Said Nursi. Menurut Nursi, perlawanan atas penjajahan yang dilakukan oleh kolonialisme Inggris bukan merupakan sebuah kesalahan. Sedangkan fatwa yang dikeluarkan oleh Abdullah Affandi yang menjabat sebagai mufti itu batal dan tidak boleh diikuti. Sebab, keluarnya fatwa tersebut atas tekanan dari tentara dan kaki tangan kolonial. Lagi pula aksi-aksi perlawanan atas tentara musuh tidak mungkin dianggap sebagai orang-orang durhaka. (Lihat: Hasbi, *Prinsip-Prinsip Politik Islam menurut Badi'uzzamān Sa'īd Nūrsi*, hlm. 40). Gerakan perlawanan atas penjajahan ini sama persis dengan resolusi jihad yang pernah terjadi pasca kemerdekaan Indonesia, di mana Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari menyerukan jihad dengan dalil bahwa 'hubbul wathan minal iman' cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Dan perlawanan atas penjajahan adalah kemuliaan yang berganjar pahala.

¹⁵⁷*Ichwansyah Tambupolon, Dakwah dan Modernisme.*, hlm. 5

penolakan terhadap ideologi komunis dan menyatakan komunis sebagai musuh yang paling berbahaya.

Pergerakan-pergerakan yang dilakukan Said Nursi di akhir hayatnya ini pula terbentuklah Komunitas Nur sebagai gerakan yang lahir dan tumbuh subur dalam perpolitikan Turki serta memiliki pengaruh yang cukup kuat. Pada masa-masa ini pula Nursi kembali menerbitkan karya-karyanya –terutama *Rasāil Nur*— juga karyanya yang berkaitan dengan pemerintahan yang kontitusional atau republik. Pemerintahan yang dijalankan di atas prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan pembatasan kekuasaan.

Fase ini juga, menjadi fase dimana Nursi melakukan ‘*manuver*’ politik dengan mendorong pemerintah untuk mengembalikan nama baiknya yang selama ini telah dicoreng oleh pemerintahan sebelumnya. Meskipun masih dalam pengawasan pihak kepolisian, tetapi kekuatan gerakan Komunitas Nur yang lahir dari gerakan para pengikut setia Nursi dengan menjadikan Partai Demokrat sebagai partai pemerintah yang berkuasa selain mengembalikan nama baik Nursi juga memberikan penghargaan kepada Nursi atas perjuangannya selama tiga puluh tahun lamanya. Hal yang terpenting dari semua itu, gerakan Komunitas Nur berhasil mendapatkan kebebasan dengan melebarkan sayapnya di seantero penjuru Turki lewat pusat-pusat studi yang didirikan –bahkan sebagian rumah dari pengikut Komunitas Nur diubah menjadi

madrasah agar tetap menjaga aktivitas sentral gerakan ini, yang di mana salah satu lokus gerakan ini diperuntukkan buat kaum perempuan.¹⁵⁸

Perubahan situasi politik saat itu menjadikan hubungan *Rasāil Nur* terjalin baik dengan pemerintah Turki sekaligus menjadi loncatan bagi Nursi untuk melakukan dialog antar agama yang dimulai dengan dialog bersama pemuka agama Kristen pada tahun 1950 M dengan mengirimkan salah satu karyanya ke Paus Roma, sekaligus mengunjungi pusat keagamaan Kristen Ortodoks Yunani yang berada di Istanbul. Seiring berjalannya waktu, dialog antar agama ini kemudian dilanjutkan dengan sikap dan cara pandang Nursi terhadap Barat yang lebih cenderung positif. Hal ini didasarkan untuk penguatan atas ajaran nilai-nilai Kristen sekaligus prinsip wahyu dalam Islam. Pandangan dan sikap seperti ini hadir tidak lain sebagai bentuk kerjasama antar Islam dan Kristen untuk menolak agresivitas kalangan Atheisme.

Pada fase ini pula terlihat jelas bagaimana Nursi menyikapi dan ikut terjun dalam gerakan politik tidak lain sebagai cara untuk memajukan dan mengembangkan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat muslim konservatif. Sikap ini tentunya berbeda dengan sikap Nursi sebelum-sebelumnya. Di mana kekutan pengaruh Nursi dalam politik saat itu digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan

¹⁵⁸*Ibid.*, hlm. 7

Rasāil Nur sekaligus memperkuat “persaudaraan orang-orang mukmin.”¹⁵⁹

Said Nursi bukanlah seorang yang menentang atau anti terhadap demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan modern. Dalam kritikan-kritikannya terhadap pemerintah, tidak ditemukan kritiknya terhadap demokrasi. Sebaliknya, kritik Nursi lebih diarahkan kepada para penguasa tiran yang berlaku semena-mena terhadap masyarakat dan sistem sosial yang telah terbentuk dalam masyarakat. Nursi juga mengkritik saat di mana nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi nafas demokrasi dijauhkan atas nama pembabangunan bangsa Turki oleh rezim sekuler Mustafa Kemal Attaturk.¹⁶⁰

Tidak hanya mendukung demokrasi, tapi juga Nursi ikut memainkan peran yang signifikan dalam kemajuan bangsanya. Salah satu pengaruh Said Nursi dalam politik yang sangat terlihat adalah pada saat pemilihan umum bulan Oktober 1957 yang sekali lagi dimenangkan Partai Demokrat. Saat itu Nursi memberikan dukungan dan menghimbau kepada seluruh murid-murid dalam komunitas Nur agar memilih Partai Demokrat. Sebab menurut Nursi, Partai Demokrat telah memberikan ruang bagi agama, khususnya perjuangan Risalah Nur. Hal ini pula pernah disampaikan Nursi

¹⁵⁹*Ibid.*, hlm. 8

¹⁶⁰Edi Amin, *Dakwah Komunitarian Ummatic*, hlm. 146

ketika pemilihan umum sebelumnya di tahun 1950. Nursi berpandangan bahwa ia mendukung sepenuhnya pemerintah manakala dapat menyerap aspirasi umat. Olehnya, kemenangan tipis Partai Demokrat di tahun 1957 tersebut memancing reaksi yang keras dari lawan politiknya Partai Republik yang didirikan Kemal Attaturk pada gerakan dakwah Nur. Bahkan, dalam beberapa laporan yang mengalahkan Republik adalah Nurcu (murid-murid Nur).¹⁶¹

2) Kandungan dan Pengaruh *Rasāil Nur*

Rasāil Nur adalah buah pikiran dari Badiuzzaman Said Nursi yang bersandar atas al-Qur'an dalam jihadnya untuk menyikapi beragam permasalahan yang melanda Turki pasca runtuhnya Kekhilafahan Turki Utsmani. Lebih-lebih ketika otoritarianisme kepemimpinan Attaturk membawa Turki –dan kaum muslimin di dalamnya— dengan corak budaya westernisasi dan pemerintahan yang sekuler. Situasi ini kemudian menjadikan Nursi memilih jalan jihadnya lewat tulisan dengan langsung menyentuh setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Turki dengan menjadikan al-Qur'an sebagai jawaban.

Rasāil Nur memuat lebih dari 130 risalah yang terbagi ke dalam beberapa jilid. Di antaranya adalah kitab *Suzlar* (Al Kalimat, kata-kata) yang mencakup 33 risalah, *Maktubat* (Al Maktubat,

¹⁶¹ *Ibid*, hlm. 147

tulisan-tulisan) yang mencakup 33 risalah, *Lam'alar* (*Al-Lama'at*, pancaran cahaya) yang mencakup 33 risalah, dan *Sya'a'alar* (*Asyu'aat*, pelita) yang mencakup 15 risalah.

Rasāil Nur secara keseluruhan merupakan kajian di bidang keimanan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan rukun iman, tauhid, akhirat, dan kehidupan sosial. Kandungan ini mengingatkan kaum muslimin agar teguh memelihara iman saat berhadapan dengan berbagai tantangan, kekufuran, dan kesesatan, disertai sejumlah dalil ayat al-Quran hadits, juga pendapat para ulama dan wali. Inti sari dari *Rasāil Nur* yang jadi perjuangan dakwah Said Nursi yang tidak lepas dari manhaj al-Qur'an al Karim dirangkum dalam enam prinsip utama; *pertama*, Berkhidmat untuk iman dan al-Qur'an; *kedua*, keikhlasan; *ketiga*, persaudaraan; *keempat*, ketidakberdayaan, belas kasihan, kefakiran, dan tafakkur; *kelima*, keteguhan dan kesetiaan; keenam, semangat dan kesyukuran mutlak.¹⁶²

Enam prinsip utama ini jika kita lihat dari penjelasan Nursi dalam *Rasāil Nur* sangat berkaitan erat dengan “ide politik” Nursi bila disandingkan dengan sikap dan gerakan politik kebangsaan seseorang atau kelompok. Dalam konteks keindonesiaan misalnya, di mana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kita bisa melihat

¹⁶²Faridah binti Mohd Sairi, “Metode Dakwah Badi'uzzamān Sa'īd Nūrsi dan Pengaruhnya di Turki”,

bagaimana sila pertama tidak bisa lepas dari keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (tauhid)¹⁶³ dan al-Qur'an sebagai *magnum opus* atau rujukan dari nilai-nilai keimanan tersebut. Dengan mengamini hal ini dalam konteks politik, mendahulukan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sendirinya akan membawa kita untuk setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Said Nursi sepanjang hidupnya memang tidak terlibat langsung dengan politik praktis. Akan tetapi gerakan-gerakannya – baik itu Nursi *qadim* atau Nursi *jadid*— tidak pernah terlepas dari konsistensinya memperjuangkan keadilan dan kebebasan serta musyawarah. Hal ini kemudian yang menjadi bagian dari kontribusi “gerakan politik” Said Nursi atas perkembangan pemikiran keislaman di Turki.¹⁶⁴ Tingkat urgensi penulisan *Rasāil An Nūr* ini dapat tergambar dengan jelas ketika memahami kondisi masyarakat saat itu. Dengan adanya penutupan madrasah dan *tekke* sufi dan pelarangan huruf arab, semua aktifitas keagamaan terhenti. Mereka yang tertangkap mengajar atau membaca buku-buku arab akan diperlakukan sebagai pelanggar hukum, seperti penjahat, dan bahkan dijebloskan ke penjara. Konsekuensinya adalah mati atau diasingkan. Pengajaran al-Quran dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Banyak

¹⁶³Menurut Nursi –dan beberapa tokoh besar Islam lainnya, seperti al Ghazali dan al Maududi—berpendapat bahwa tauhid adalah fondasi dalam politik, bahwa tauhid adalah prinsip politik dalam Islam. Karena jika berlaku demikian maka dengan otomatis sektor ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat akan maju dan berkembang tanpa harus meninggalkan nilai-nilai Islam dan tradisi masyarakat. (Lihat: Hasbi, *Prinsip-Prinsip Politik Islam menurut Badi'uzzamān Sa'īd Nūrsi*, hlm. 68-69)

¹⁶⁴*Ibid.*, hlm. 65

para *hoca* yang akhirnya disiksa dan dipenjara saat tertangkap mengajarkannya. Teror dan penindasan ini semakin meningkat selama tahun 1930-an sampai 1940-an.

Kehadiran *Rasāil An Nūr* ini memberikan keteguhan iman. Mereka merasa memiliki kekuatan, keberanian, dan harapan yang besar dalam melawan suasana kekalahan dan keputusasaan yang meluas diakibatkan oleh tekanan dan propaganda. Keberanian dan harapan ini menghasilkan gerakan positif yang akhirnya menyebar ke seluruh negeri. Para *Thullāb An-Nūr* ini tidak jera dengan intimidasi dari pejabat yang menghalangi, meskipun mereka mengalami penderitaan karena segala macam penindasan. Rumah mereka digeledah untuk mencari salinan salinan *Rasāil An Nūr*. Banyak yang akhirnya dicituk dan dibawa ke kantor polisi setempat, disiksa, dipenjara, dan dipukuli dengan tongkat. Namun ribuan *Thullabunnūr* di berbagai penjuru Turki tidak gentar. Mereka mempersembahkan diri untuk menyalin risalah-rialah yang nur yang dibawa oleh murid-murid Said Nursi yang lain. Mereka tunggu setiap risalah baru datang dari gurunya, untuk segera disalin dan disebarkan dengan cepat. Bahkan ada yang tidak keluar rumah sampai 7 atau 8 tahun karena fokus menulis salinan *Rasāil An Nur* tersebut.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Şükran Vahide, *Islam in Modern Turkey; An Intellectual Biography of Bediuzzaman Said Nursi*, hlm. 202-204

3) Perkembangan Komunitas *Thullāb An-Nūr*

Sukran Vahide mencatat bahwa hubungan Nursi dengan murid-muridnya sangat dekat, tidak seperti guru dan murid yang biasanya formal dan dingin. Ia menganggap dirinya adalah murid dari *Rasāil Nur* seperti mereka. Di samping hubungan yang dekat ini, Nursi suka bertukar pendapat dan berdiskusi berkenaan penulisan dan penyebaran *Rasāil An Nur* ini.¹⁶⁶ Pasca kejatuhan Peradaban Islam dibawah pemerintahan Daulah Turki Utsmani, Turki mengalami masa transisi baik itu dalam hal politik, ekonomi, atau pun sosial-budaya. Pada masa ini, para intelektual Turki merasakan trauma. Beragam problematika intelektual kenegaraan menjadi pembahasan yang sering berulang tanpa sedikit pun menemukan solusi konkret. Selain itu, masalah keagamaan juga menjadi sangat memprihatinkan. Kehidupan sosial-keberagamaan yang awalnya tumbuh subur –pasca keruntuhan— seakan terkubur bersama jatuhnya peradaban Islam. Demokrasi baru Turki masih berjalan di atas puing-puing yang rapuh. Pilihan sistem partai tunggal atau multi partai, konflik sektarian, konflik keagamaan, krisis ekonomi, dan persoalan kemiskinan, bertumpuk menjadi satu yang memperburuk kondisi sosial saat itu. Pada masa-masa itu, Said Nursi mencoba untuk hadir dengan mengusulkan proyek pendidikannya –yang dikemudian hari menjadi sebuah perkumpulan berbagai kalangan yang dinamakan

¹⁶⁶ Şükran Vahide, *Islam in Modern Turkey; An Intellectual Biography of Bediuzzaman Said Nursi*, hlm. 200

Komunitas Nur—kepada Sultan yang berkuasa. Karena menurut Nursi bahwa pendidikan merupakan titik tolak kebangkitan umat Islam dari kemerosotan moral, kebodohan, dan ketertinggalan zaman.

Proyek pendidikan yang diusulkan oleh Nursi ini, kemudian menjadi sebuah gerakan dakwah yang fokusnya menentang budaya-budaya westernisasi Barat yang telah mempengaruhi kondisi sosial masyarakat Turki. Yang di mana inti dari gerakan ini tidak lain pengejawantahan dari pemikiran Nursi –yang kesemuanya tertuang dalam *Rasāil Nur*— yang mengusung dan mempromosikan nilai-nilai ajaran Islam yang bersifat universal. Sehingga tidak heran, gerakan yang menyasar kalangan intelektual, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum ini dapat diterima oleh semua kalangan. Karena selain nilai-nilai universal Islam yang didakwahkan, juga tidak adanya dikotomi perbedaan suku, budaya, dan agama dalam gerakan komunitas Nur ini.¹⁶⁷

Gerakan dakwah Said Nursi menawarkan etika komunitarian dengan berdasar atas ajaran Islam sebagai jawaban atas problematika masyarakat Turki yang mulai didominasi oleh budaya westernisasi. Hal ini dikarenakan pemerintahan Turki di bawah rezim Mustafa Kemal Attaturk –yang membawa semangat westernisasi— terkesan

¹⁶⁷Edi Amin, *Dakwah Komunitarian Ummatic: Studi Konsepsi Dakwah Said Nursi dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: Transwacana Press, 2017), hlm. 4-6

terjebak pada masalah sekularisasi yang kebablasan. Etika komunitarian *ummatic* –ala Said Nursi— mengacu pada proses sosial masyarakat dengan landasan nilai-nilai ajaran Islam yang kuat.¹⁶⁸

Gerakan dakwah komunitas Nur memiliki pola-pola persamaan dan perbedaan dengan gerakan keagamaan lainnya. Pola-pola dakwah yang dimaksud adalah sebuah gerakan yang memiliki konsep Islam dengan penekanan terhadap aspek kemanusiaan dan spritualitas. Dan yang menjadi titik tekan dari pemikiran Nursi bersandar kepada aspek Tauhid. Hal ini dikarenakan kondisi Turki saat itu –menurut Nursi— relevan dengan jalan juang dakwah yang pernah ditempuh oleh Nabi Muhammad Saw ketika berada di Makkah. Di mana Nabi Muhammad Saw mendakwahkan ajaran tauhid dengan penuh suka duka dan derita. Sebagaimana Nabi menghadapi masyarakat jahiliah, begitu pun Nursi dengan jalan dakwahnya yang melawan dominasi sekuler yang telah menguasai Turki.¹⁶⁹

Spirit dan pedoman gerakan dakwah komunitas nur berawal dari pemikiran Said Nursi yang terangkum dalam karyanya *Rasāil Nur*. Dakwah *komunitas ummatic* ini merupakan sebuah cara pembinaan ummah yang disebutkan dalam Al Qur'an yaitu 'ummatan wasatan' ummat yang menjadi penengah atas

¹⁶⁸*Ibid.*, hlm. 2

¹⁶⁹*Ibid*, hlm. 11

problematika yang muncul di tengah-tengah masyarakat.¹⁷⁰ Konsep *ummah* yang dimaksud ialah sebuah upaya yang diajarkan Islam dengan menekankan terhadap keterbukaan (inklusif), universal dalam ajarannya, dan melihat manusia sebagai komunitas yang tunggal. Dengan kata lain, *Ummah* sebisa mungkin menghindari konflik dan menekankan kehidupan yang harmonis.¹⁷¹ Dengan demikian, untuk membangun tatanan masyarakat dunia, M. Yunan menyatakan bahwa Islam berlandaskan nilai etika dan moral di antaranya, menjunjung tinggi keadilan, menghormati persamaan, hak memperoleh kesempatan yang sama, menghargai kemitraan, dan mendukung perdamaian abadi.¹⁷²

Gerakan sosio-kultural komunitas Nur paling tidak terbentuk dengan memiliki empat karakteristik utama tersebut dalam gerakan dakwah mereka. *Pertama*, adanya jaringan dan komunikasi yang kuat antara anggota kelompok dengan menjaga kontinuitas, bentuk informal dan interaksi yang tidak terstruktur. *Kedua*, adanya bentuk kepercayaan dan solidaritas antar anggota kelompok. *Ketiga*, membentuk aksi kolektif untuk meredam terjadinya konflik, dengan terus-menerus memerhatikan berbagai tuntutan dan aksi cenderung tidak konstitusional. *Keempat*, cenderung tidak mengikuti prosedur

¹⁷⁰*Ibid*, hlm. 41

¹⁷¹Abdul Ghafur Muslim, *Survival of The Islamic Ummah*, *Pakistan Journal of History and Culture*, Vol. XXVII/2 (Januari, 2006)

¹⁷²M. Yunan Yusuf, *Tafsir Al-Quran Juz XXVII, Juz Qala Fama Khathbukum, Hikmah al Balighah (Hikmah yang menghujam)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2015), hlm. 42

yang telah ada namun, mengikuti struktur organisasi/kelompok keagamaan –Komunitas Nur— yang telah terbentuk.¹⁷³

Gerakan dakwah *thullāb an-nūr*, Said Nursi sangat menekankan pentingnya aspek peribadatan individu yang dapat berdampak pada keharmonisan hubungan sosial. Pada setiap menit, pada setiap waktu, manusia sangat membutuhkan Allah. Aspek ini – menurut Nursi— sangat relevan dengan temuan Alexis Carrel sebagaimana dikutip Ali Syariati bahwa manakala doa dan tradisi beribadah mulai merosot dan dilupakan dalam suatu masyarakat, maka bangsa dan masyarakat itu tidak akan dapat bertahan dan akan mengalami keruntuhan.¹⁷⁴ Berdasarkan ini, maka perhatian atas kemaslahatan umat yang terus dikobarkan oleh Said Nursi sepanjang hidupnya tidak lain agar tetap menjaga manusia dari keterpurukan yang terjadi di zaman modern.

Kehadiran dari gerakan *thullabunur* tidak lain dari bagaimana membangun soliditas dan integritas umat di tengah terpaan negatif dari dampak modernitas. Nursi bukan hendak membangun negara bangsa berdasarkan nilai-nilai nasionalisme atau sektarianisme tapi berdasarkan nilai-nilai ummah (ummatic terms). Salah satu usaha Nursi dari gerakan dakwahnya agar dapat mencapai masyarakat ideal yaitu dengan cara menumbuhkan kepribadian

¹⁷³Edi Amin, *Dakwah Komunitarian Ummatic*, hlm. 64

¹⁷⁴*Ibid.*, hlm. 100-101

kolektif. Ketika kepribadian kolektif ini terbangun maka akan muncul sikap dan sifat mementingkan orang lain, bahkan ia dapat meleburkan dirinya pada diri orang lain.

Adapun peran utama gerakan dakwah Komunitas Nur adalah untuk memperbaiki kondisi umat dengan penguatan aspek tauhid iman dan moral. Menurut Said Nursi, penekanan atas bangunan komunitas berdasarkan nilai-nilai Islam menjadi penting untuk memberikan dampak positif untuk terjalinnya komunikasi dengan komunitas lainnya. Dengan kata lain, perdaban yang baik akan terwujud mulai dari komunitas kecil yang terus mengembangkan diri. Itulah mengapa gerakan dakwah komunitas Nur tidak menekankan aspek kuantitas anggotanya, namun lebih kepada aspek kualitas.¹⁷⁵ Menyikapi hal ini Jonathan Wolff mengatakan, dengan menolak akan pentingnya komunitas sama halnya kita berjalan pada garis edar yang akan menuju alienasi individual, dan pada akhirnya hanya dapat melepaskan diri dari masyarakat. Dan tentunya ini sangat berbahaya. Dengan demikian, untuk mengatasi bahaya tersebut kita harus mengakui betapa pentingnya moralitas adat - sebuah ikatan yang mengikat masyarakat secara bersama-sama. Kita harus mengakui bahwa tidak seorang pun yang berharap diberi hak untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak moralitas tersebut. Tentunya, kita tidak perlu melihat moralitas adat sebagai sesuatu

¹⁷⁵*Ibid*, hlm. 130

yang statis tidak berubah-- sebenarnya terdapat banyak perdebatan mengenai hal ini. Namun demikian, ruang bagi reformasi moral tersebut dibatasi oleh adat dan tradisi masyarakat.¹⁷⁶

Selain menekankan akan pentingnya semua aktifitas murid Komunitas Nur harus berdasarkan atas al-Qur'an, Nursi juga tetap dalam kesehariannya memberikan teladan bahwa kepentingan orang lain harus lebih diutamakan. Kepribadian kolektif yang dibangun dan diajarkan dengan penuh keikhlasan ini menjadi salah satu kunci keberhasilan gerakan dakwah Said Nursi.¹⁷⁷

Said Nursi pernah menyatakan bahwa ada enam penyakit yang dapat menghambat masa depan kemajuan umat Islam. *Pertama*, hidup dan bangkitnya rasa putus asa dan tidak berdaya dalam kehidupan sosial. *Kedua*, pupusnya kebenaran dalam kehidupan sosial dan politik. *Ketiga*, senang pada permusuhan. *Keempat*, mengabaikan sejumlah ikatan cahaya yang menyatukan antar orang beriman. *Kelima*, despotisme (penindasan) yang menyebar bagaikan penyakit menular. *Keenam*, perhatian yang hanya tertuju pada kepentingan pribadi.

Enam poin dari penyakit masa depan umat Islam ini, di poin ketiga dan keempat sangat jelas bahwa bagaimana Nursi dengan

¹⁷⁶Jonathan Wolf, *Pengantar Filsafat Politik* (terj), M. Nur Prabowo Setyabudi (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 212. Diterjemahkan dari *An Introduction to Political Philosophy* (New York: Oxford University Press, 2009).

¹⁷⁷Edi Amin, *Dakwah Komunitarian...*, hlm. 132

semangat keikhlasannya mengkritisi kehidupan sosial masyarakat yang telah dipenuhi dengan permusuhan serta mengabaikan ikatan agama. Olehnya, Nursi kemudian merumuskan bahwa obat dari sikap permusuhan adalah cinta. Menurut Nursi bahwa tabiat cinta yang menjadi jaminan kehidupan sosial manusia serta menjadi faktor penting agar terwujudnya kebahagiaan. Berbeda dengan tabiat permusuhan dan kebencian yang menjadi musabab rusaknya kehidupan sosial. Nursi menyatakan bahwa kasih sayang dan kecintaan serta persaudaraan merupakan sebenar-benarnya tabiat dan ikatan yang telah dibangun dalam Islam.

Sikap kekerasan menjadi hal yang paling dihindari Said Nursi. Ia selalu berpesan bahwa kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan. Meski Nursi memiliki murid yang tersebar luas di Turki, tidak pernah sekalipun Nursi memobilisasi masa untuk melawan pemerintah. Bahkan, ketika Said Nursi di penjara, dianiaya, atau dalam persidangan, tidak pernah berupaya unjuk kekuatan -Komunitas Nur-- apalagi menganjurkan kekerasan. Nursi menekankan hidup harmonis dapat terjalin di tengah masyarakat. Saat menghadapi orang-orang ateis, misalnya, atau menyikap permusuhan (orang-orang yang memusuhi Nursi), Said Nursi selalu menyatakan untuk tidak menghadapi mereka dengan keras. Selain dalam teori dan pemikirannya, Nursi selalu mencontohkan semangat perdamaian, dan berusaha menjawab

dengan jelas titik-titik sanggahan. Sebab, mengedepankan ego adalah sesuatu yang dinilai gila, dan menjadi penyebab munculnya pertikaian dan permusuhan di antara sesama umat manusia.¹⁷⁸

Ini menjadi alasan mengapa Nursi menolak ajakan Syekh Said Bairun Naqsabandi untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan rezim Mustafa Kemal Attaturk.¹⁷⁹ Lewat surat yang dituliskannya kepada Syekh Said Bairun, Nursi mengatakan:

“Sesungguhnya pemberontakan itu hanya menimbulkan saling membunuh di antara saudara sesama muslim dan tidak jelas tujuannya. Masyarakat Turki telah menegakkan bendera Islam. Beribu-ribu, bahkan berjuta syuhada telah mengorbankan dirinya demi agama Islam. Oleh karena itu janganlah menghunus pedang untuk melawan pejuang muslim sendiri. Dan saya (Said Nursi) juga tidak akan berbuat demikian.”

Ini pula yang kemudian menjadi acuan gerakan dakwah Komunitas Nur dengan mengedepankan sikap-sikap moderat sebagaimana pesan-pesan yang Nursi tuliskan dalam *Rasāil Nur*. Sebab, dakwah merupakan ajakan, maka sikap keras justru akan kontraproduktif. Dakwah seharusnya mengedepankan sikap empatik dan persuasif. Karena dengan mengedepankan sikap yang penuh dengan kelembutan, maka dakwah Islam akan mudah diterima dan beradaptasi di setiap tempat.¹⁸⁰ Mengedepankan sikap yang penuh

¹⁷⁸*Ibid*, hlm. 142

¹⁷⁹Said Nursi dikenal dengan seorang yang sangat mencintai perdamaian. Ketika Turki Utsmani terlibat dalam Perang Dunia II ia termasuk salah satu penentang keterlibatan tersebut. Namun, ketika perang meletus, Nursi tidak tinggal diam, bersama murid-muridnya ia turut mengangkat senjata dan ikut bertempur di medan perang. (Lihat: Hasbi, *Prinsip-Prinsip Politik Islam menurut Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi*, hlm. 41)

¹⁸⁰Edi Amin, *Dakwah Komunitarian Ummatic*, hlm. 144

dengan kelembutan inilah yang kemudian menjadikan gerakan dakwah Komunitas Nur dapat beradaptasi dalam mengembangkan dakwahnya hingga ke seantero dunia.

Berkaca dari gerakan dakwah komunitas Nur yang dibentuk oleh Nursi yang solid karena unsur persaudaraan dan rasa ikhlas, maka gerakan atau komunitas apapun itu akan mendapatkan kesolidan dan kekuatan yang utuh jika bersandar atas nilai-nilai persaudaraan dan keikhlasan. Karena tidak ada di antara satu dan lainnya yang menganggap dirinya lebih tinggi atau lebih baik dari yang lain. Persaudaran dan keikhlasan ini adalah pondasi yang kokoh, karena tidak akan ditemukan di dalamnya jalan untuk menuju rasa saling iri. Sebab, setiap orang akan hadir sebagai penolong bagi yang lainnya karena ikatan persaudaraan dan juga sebagai teman seperjuangan.

Maka dari itu salah satu ciri khas gerakan dakwah komunitas Nur ialah bergerak berdasarkan upaya dan usaha yang positif serta menghindari terjadinya permusuhan, kerusuhan serta kekerasan. Berbeda dengan banyak kelompok dan orang-orang tertentu yang salah kaprah berjuang demi mencapai cita-cita Islam dengan cara “negatif” murid-murid Nur mengikuti metode “positif”. Oleh karena itulah, pemerintahan Partai Demokrat sebagai penguasa saat itu bersikap lunak terhadap mereka. Maka dengan demikian pemerintahan saat itu mengizinkan penerbitan *Rasāil Nur* secara

terbuka setelah karya tersebut dinyatakan bersih oleh pengadilan Afyon pada tahun 1956 dan tidak menekan gerakan tersebut. Berdasar atas itu pula, Said Nursi memberikan dukungan kepada partai Demokrat, khususnya Perdana Menteri Adnan Menderes, selama sepuluh tahun mereka berkuasa.¹⁸¹

“Bersama kita bisa” yang menjadi semboyan komunitas nur bukan merupakan hal yang mustahil dalam konsep dakwah yang mereka jalankan. Bersama kita bisa bagi komunitas Nur dijadikan sebagai pedoman kegiatan dan ruh dakwah yang dalam ungkapan Said Nursi disebut sebagai kepribadian kolektif (*collective personality/shakhs al ma'nawi*). Konsep kepribadian kolektif ini merupakan upaya untuk mengikis ego pribadi dan melebur dalam kebersamaan (jama'ah). Misteri dari tercapainya kepribadian kolektif terletak pada keikhlasan para murid-murid Nursi dalam menjalankan aktivitas dakwahnya. Kepribadian kolektif ini yang kemudian membangun jamaah berdasar atas nilai-nilai Islam.¹⁸²

Gerakan dakwah Komunitas Nur merupakan organisasi dakwah dan organisasi filantropis. Dari bentuk dakwah Nur, maka bisa dikategorikan sebagai gerakan sosial Islam transnasional yang mendorong perbaikan moral dan spritual serta mengedepankan

¹⁸¹*Ibid*, hlm. 145

¹⁸²*Ibid*, hlm. 155

ukhuwah dan jalan damai.¹⁸³ Berdasarkan perspektif integrasi gerakan sosial ini, maka gerakan dakwah Komunitas Nur menunjukkan beberapa pola, di antaranya: *Pertama*, muncul dari adanya kesempatan ekspansi dakwah dan terbukanya peluang; *Kedua*, gerakan dakwah Komunitas Nur menggunakan pbingkaiian dengan terus mengembangkan sayapnya dengan menggunakan nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan serta gagasan-gagasan yang bisa diterima oleh anggota atau jamaahnya; *Ketiga*, berusaha memanfaatkan kesempatan dan nilai-nilai tersebut untuk memobilisasi sumber daya dan merekrut anggota, serta memperkuat sumber-sumber jejaring organisasinya dalam mendukung keberlangsungan gerakan dakwah tersebut. Dengan demikian bisa dikatakan, dalam gerakan dakwah Komunitas Nur yang terpenting adalah kesolidan jaringan keanggotaan yang dibangun.¹⁸⁴

Berdasarkan Informasi dari Ustadz Hasbi Şen, Pembina Yayasan Nur Semesta (salah satu organisasi representative *Thullabunnur* Indonesia), bahwa hingga saat ini, di Indonesia ada beberapa akademisi yang secara aktif terus mengkaji pemikiran Badi`uzzamān Sa`id Nürsi, antara lain Prof. Dr. Nabila Lubis, Prof. Dr. Aminah Lubis, dan Prof. Dr. Andi Faisal Bakti dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Fauzan Saleh, IAIN Kediri, Dr. Asror Yusuf, IAIN Kediri, Prof. Dr. Muhammad Sirozi, UIN Raden Fatah

¹⁸³*Ibid*, hlm. 179

¹⁸⁴*Ibid*, hlm. 159-160

Palembang, Prof. Dr. Syaripuddin Basyar, IAIN Lampung, dan Dr. Zaprul Khan, IAIN Bangka Belitung.

Selain itu, sudah dibuka Said Nursi Corner di sejumlah perpustakaan di beberapa perguruan tinggi, yaitu di Said Nursi Corner yang sudah dibuka UIN Syarif Hidayatullah, UIN Raden Fatah Palembang UIN Imam Bonjol Padang, UIN Jember, IAIN Bangka Belitung, IAIN Madura, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, UNIDA Gontor, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di samping itu masih ada beberapa perguruan tinggi lain yang masih sedang proses pendirian Said Nursi Corner ini, yaitu di UIN Banjarmasin, UIN Banten, UIN Sumatra Utara, UIN Malang, UIN Tulung Agung, UIN Bandung, dan IAIN Bukittinggi¹⁸⁵

2. Sketsa Biografi Soekarno

a. Latar Belakang Keluarga

Soekarno (1901-1970) adalah seorang peletak dasar negara Republik Indonesia. Bapaknyanya adalah penganut ajaran theosofi Jawa, dan ibunya adalah seorang penganut agama Hindu Bali. Ia mendapat pendidikan Barat sekuler, dan aktif dalam kegiatan politik sejak muda, hingga mencapai puncaknya sebagai proklamator dan sebagai Presiden Republik Indonesia. Di samping banyak menelaah buku politik karya cendekiawan Barat (terutama yang beraliran sosialis), ia juga banyak

¹⁸⁵ Hasil wawancara online dengan Ustadz Hasbi Şen pada tanggal 11 Juni 2021

dipengaruhi oleh pemikir-pemikir Islam, dalam dan luar negeri, terutama melalui bacaan.¹⁸⁶

Soekarno dalam bisang ideology sering disebut dengan manusia sintesa, karena ia merupakan personifikasi dari ketiga aliran ideologi yang berkembang di Indonesia; Nasionalisme, Islam, dan Komunisme.¹⁸⁷ Adapun keyakinan dan pemikiran keagamanya pertama kali ia warisi dari ayahnya, seorang priyai Jawa yang secara formal mengaku sebagai penganut agama Islam, tetapi sebenarnya ia adalah seorang penganut ajaran theosofi Jawa. Sementara ibunya dari keturunan Brahmana Bali, penganut agama Hindu Bali. Baik ayahnya maupun ibunya sering menasehatinya sesuai dengan ajaran yang dianut. Ayahnya selalu berpesan, “Jangan lupa kepada Gusti yang Maha Suci,” sedangkan ibunya berpesan, “Jangan lupa Karno kepada Hyang Widi”¹⁸⁸

b. Pendidikan dan Keilmuan

Pada masa belajar di Surabaya (1883-1934), Soekarno tinggal di rumah HOS Tjokroaminoto dan banyak belajar darinya, terutama tentang pemikiran keagamaan relatif jauh lebih lebih luas dan lebih berpengaruh dari tokoh-tokoh Islam lainnya yang ada pada saat itu. Terlebih lagi dalam pikiran politik Islam dari sudut pandang dan pemikiran raja Jawa tanpa mahkota itu. Saat di Surabaya itu pula, Karno muda rajin membaca

¹⁸⁶Badri Yatim, *Soekarno, Islam, dan Nasionalisme; Rekonstruksi Pemikiran Islam*, (Jakarta; Penerbit Inti Sarana Aksara, 1985), hlm.1

¹⁸⁷*Ibid.*, hlm. 52

¹⁸⁸*Ibid.*, hlm. 52. hlm. 53

dan menelaah buku-buku di perpustakaan yang dikelola oleh kelompok yang tergolong dalam himpunan theosofi. Kegemaran membaca itu merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi jiwanya dan menyambungkan pikirannya dengan pemikiran orang-orang terdahulu sebelumnya.¹⁸⁹

Soekarno sudah terjun dalam organisasi pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa sejak masih berstatus pelajar di Hogere Burger School (HBS), sebuah sekolah lanjutan setingkat SMA di Surabaya. Organisasi yang ia ikut adalah Tri Koro Darmo, yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Ia juga sudah menulis artikel politik melawan kolonialisme Belanda di surat kabar *Oetoesan Hindia* yang diterbitkan oleh H.O.S. Tjokroaminoto.¹⁹⁰

Ketika berada di penjara Sukamiskin, Bandung (1929-1931) kemudian dilanjutkan saat pembuangannya di Ende, Flores (1934-1938), Soekarno secara lebih giat dan tekun mempelajari pengetahuan keislaman dari berbagai bahasa. Pada masa berada di Ende ini, ia melakukan surat menyurat dengan A. Hassan. Surat-surat ini sangat penting arti sejarahnya, sehingga dibukukan dengan judul *Surat-Surat Islam dari Ende*.¹⁹¹ Surat-surat ini memuat kritik dan kupasan mengenai kehidupan umat Islam yang mencakup masalah-masalah sosial,

¹⁸⁹*Ibid.* hlm. 56

¹⁹⁰Ir. Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Cet. V (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005) hlm. vii.

¹⁹¹Badri Yatim, *Soekarno, Islam...* hlm. 60

pendidikan, politik kenegaraan, tinjauan mengenai sebab musabab naik dan turunnya umat Islam sepanjang sejarah.¹⁹²

Ketika dipindahkan dari Ende ke Bengkulu (1938), Bung Karno mendapat tempat penyaluran ide-ide pembaruan dalam Islam, terutama dalam bidang pendidikan Islam. Di Bengkulu, ia tidak saja melanjutkan studinya tentang Islam, tetapi juga secara resmi masuk menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah tahun 1938 itu, bahkan ia diangkat menjadi ketua bagian pengajaran Muhammadiyah Daerah Bengkulu. Ia aktif menyampaikan pidato dan menulis artikel keislaman yang dimuat dalam surat kabar maupun majalah, seperti Pemandangan, Pandji Islam, dan Almanak Muhammadiyah¹⁹³

Bung Karno diangkat presiden pertama tahun 1945, dan bersama Moehammad Hatta, ia memproklamkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahun 1948, Belanda menangkap Bung Karno dan mengasingkannya ke Berastagi. Ia menjadi presiden kurun waktu kurang lebih 21 tahun (1945-1966) dan akhirnya meninggal dunia dalam tahanan di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970 dan dimakamkan di samping pusara ibundanya di Blitar, Jawa Timur.¹⁹⁴

¹⁹²*Ibid.*

¹⁹³*Ibid.*

¹⁹⁴Faisal Ismail, *Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Mei 2017). Cetakan pertama, hlm. 129

Bung Karno dinilai oleh banyak kalangan memiliki kecerdasan yang luar biasa dan semangat yang bergelora yang luar biasa. Ia mendapatkan gelar *Doctor Honoris Causa* dari 26 Universitas di dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, ia mendapatkan anugerah doktor kehormatan antara lain dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjajaran, Universitas Hasanuddin, dan Institut Agama Islam Negeri Jakarta. Sementara dari luar negeri ini mendapatkan gelar kehormatan ini dari Columbia University (Amerika Serikat), Berlin University (Jerman), Lomonosov University (Moscow), Al Azhar University (Mesir), dan berbagai universitas lainnya. Ia memiliki wawasan yang luar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Tidak hanya dalam ilmu teknik, tapi juga dalam ilmu sosial dan politik, ilmu hukum, ilmu sejarah, falsafah, dan ilmu ushuluddin.¹⁹⁵

c. Kondisi Sosial Politik Indonesia Pada Masanya

Secara umum, dinamikan kepemimpinan Soekarno dalam waktu kurang lebih 20 tahun (1945-1965) dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu¹⁹⁶:

1) Periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)

¹⁹⁵ Ir. Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Cet. V (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005) hlm. x

¹⁹⁶Yahya Mulyana Aziz dan Syarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, (Bandung; Pustaka Setia, Cet. 1, 2016). hlm. 194-196. Badri Yatim, *Soekarno, Islam, dan Nasionalisme; Rekonstruksi Pemikiran Islam*, (Jakarta; Penerbit Inti Sarana Aksara, 1985), hlm.49

Pada periode ini, yang menjadi tema pokok dari pemimpin bangsa adalah hal-hal yang lebih banyak bersifat mencari landasan buat perjuangan bersama, seperti Pancasila. Hal ini dikarenakan perjuangan Bangsa Indonesia saat itu fokus melawan musuh yang sama. Sehingga perbedaan-perbedaan yang terdapat di kalangan para pemimpin untuk sementara diendapkan untuk menjaga kebersamaan dalam menghadapi agresi Belanda.

Pada masa ini pemerintah Indonesia belum dapat menjalankan otoritasnya dalam mengatur dan menjalankan sistem pemerintahannya. Hal ini disebabkan bahwa pengakuan kedaulatan secara penuh baru diperoleh melalui Perjanjian Meja Bundar pada tahun 1949, saat pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai bekas jajahan Hindia Belanda.

Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan yang sentralistik untuk memperkuat NKRI. Untuk menjaga kesatuan NKRI dan mengatur pemerintahan daerah dalam bingkai NKRI. Undang-undang yang dibuat pada saat itu setelah UUD 1945 adalah UU No. 1 tahun 1945 yang mengatur pemerintahan daerah. Undang-undang ini menetapkan 3 jenis daerah otonom, yaitu keresidenan, kabupaten, dan kota. Undang-undang kedua adalah UU No. 22 tahun 1948 yang menentukan secara terperinci otoritas yang diberikan pemerintah pusat pada daerah.

Ada kemauan yang sangat kuat dari para pemimpin bangsa untuk membentuk sebuah pemerintahan yang demokratis. Namun kondisi saat itu yang mengharuskan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan, maka pemerintah Indonesia belum dapat mewujudkan sebuah pemerintahan demokratis yang sesuai dengan UUD 1945. Pada masa ini, pemerintah mengeluarkan beberapa maklumat penting:

(1) Maklumat Pemerintah no. X tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP (pembantu presiden)¹⁹⁷ menjadi fungsi parlementer (legislatif);

(2) Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan partai politik (sebelumnya hanya ada satu partai, yaitu PNI);

(3) Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan cabinet presidensial menjadi parlementer¹⁹⁸

2) Periode Demokrasi Liberal (1950-1959)

Dari hasil konferensi Meja Bundar, bentuk negara Indonesia pada masa ini adalah negara serikat dan menganut paham demokrasi

¹⁹⁷KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang beranggotakan 137 orang adalah cikal bakal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diresmikan oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan sebagai Tanggal Dan Hari Lahir DPR RI, dengan ketua pertama: Mr. Kasman Singodimedjo, dikutip dari <https://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr>. pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 08.23 WIB.

¹⁹⁸Yahya Mulyana Aziz dan Syarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, (Bandung; Pustaka Setia, Cet. 1, 2016). hlm. 17

liberal. Pada masa ini sistem memberikan haluan yang besar pada kekuatan politik sehingga turut menentukan kebijakan, dibuka kesempatan kepada berbagai kelompok dari berbagai paham dan ideologis untuk membentuk partai atau kekuatan politik tertentu dan mengikuti pemilu. Sistem yang digunakan adalah sistem parlementer dengan mengakui adanya kelompok oposisi dalam sistem politik dan parlementer.

Pada masa ini pula, pemerintah menerbitkan UU No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang mengatur daerah swantara. Daerah swantara adalah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Ada daerah swantara tingkat I, tingkat II, dan tingkat III. Secara resmi demokrasi liberal mulai berlaku. Konflik-konflik partai yang berlatarbelakang ideologi mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Jalannya pemerintahan tidak stabil yang ditandai dengan sering jatuh-bangunnya kabinet dan tidak berumur panjang sehingga pembangunan tidak berjalan dengan baik. Hal ini terjadi disebabkan dominannya politik aliran dan basis ekonomi sosial yang rendah. Puncaknya adalah lahirnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 saat Konstituante di dalam sidangnya tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai UUD yang baru. Hal ini mengakibatkan munculnya pemberontakan di berbagai daerah, seperti DI/TII, APRA, PRRI/Persemesta, RMS, dan Andi Azis.

Pada periode ini, perdebatan antar elit politik, nasionalis sekuler dan nasionalis muslim, tentang dasar negara sangat gencar. Pemilihan Umum 1955 melahirkan Majelis Konstituante dengan kekuatan politik yang terbagi kepada tiga ideologi besar, yaitu kekuatan politik dengan *ideologi Islam* yang diwakili oleh Masyumi, PSII, PERTI dan NU; *ideologi Nasionalis* diwakili oleh PNI; dan *ideologi Marxis-Sosialis* diwakili oleh Partai Sosialis, PKI, Partai Buruh Indonesia, Persindo, dan partai-partai lainnya. Dalam polarisasi politik seperti ini, Soekarno mendapatkan alasan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tiga hal: membubarkan Konstituante, mencabut berlakunya UUDS 1950 dan memberlakukan UUD 1945, rencana pembentukan MPRS dan DPAS.¹⁹⁹

3) Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada masa ini demokrasi berada di ujung tanduk dan kritis. Hal tersebut dinilai akibat tindakan dan perintah yang diambil oleh Soekarno sebagai presiden dijalankan paksa, seperti Nasakom dan sosialisme Indonesia. Masa ini ditandai dengan keluarnya dekrit presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945 dan menghapus UUDS 1950, dan membentuk MPRS dan DPAS. Dengan kewenangan

¹⁹⁹ Kamsi, *Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Calpulis, 2017) Cet. II, hlm. 94-96

besar yang ia miliki, Presiden Soekarno menetapkan undang-undang operasional pemerintahan menjadi revolusioner dengan berbagai simbol perjuangan. Soekarno juga melakukan konsolidasi internal melalui penyesuaian struktur pemerintahan dari pusat sampai daerah.

Pada masa itu pula diterbitkan dua peraturan yang mengatur pemerintahan yaitu Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960. Dalam era presidensial, Presiden mengontrol semua spektrum politik. Kekuasaan negara terpusat. Legislatif lemah dan eksekutif kuat. Akibatnya terjadi kehilangan kontrol dan terdapat penyimpangan yaitu pengangkatan presiden seumur hidup, pidato presiden MANIPOLUSDEK dijadikan GBHN, ketua MPR dijadikan menteri, DPR hasil pemilu dibubarkan presiden, dan lahirnya penyimpangan ideologis yaitu Nasakom.²⁰⁰

Selama kurun waktu 1959-1965, menurut Prof. Kamsi, Presiden Soekarno dengan sistem Demokrasi Terpimpinnya menjadi seorang pemimpin otoriter. Partai-partai yang bermunculan pada masa demokrasi liberal secara praktis menjadi lemah dan tidak berdaya, kecuali PKI yang dapat memperluas pengaruhnya dengan berlindung di bawah kekuasaan. Seminggu setelah

²⁰⁰Yahya Mulyana Aziz dan Syarif Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. 1, 2016). hlm. 19

Dekrit Presiden, Soekarno mengumumkan kabinet baru, yang bertugas melaksanakan gagasan Soekarno dalam bentuk demokrasi terpimpin. Namun karena fondasinya belum kokoh, sistem ini akhirnya yang mendorong Soekarno terguling dari kekuasaannya²⁰¹

²⁰¹Kamsi, *Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 98.

d. Ide dan Aktifitas Politik

1) Kondisi Sosial Indonesia dan Kelahiran Pancasila

Indonesia adalah salah satu negara terkaya dan paling majemuk dari segi keragaman tradisi, kesenian, kultur, bahasa, serta kelompok etnis yang eksis dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sebagai sebuah negara yang besar dan majemuk, motto nasional “Bhineka Tunggal Ika” menjadi kalimat pengikat kemajuan Indonesia. Kalimat yang berarti “keragaman dalam kesatuan” atau “kesatuan dalam keragaman” ini diadopsi dari kitab Sutasoma, hasil pemikiran cemerlang Empu Tantular, seorang pujangga brilian pada zaman kejayaan Hindu Majapahit (1478-1293).²⁰²

Lebih dari sebuah motto, negara yang baru saja berdiri ini memerlukan sebuah ideologi yang menjadi *falsafah* bangsa Indonesia. Pembahasan tentang Ideologi nasional ini dilakukan dalam sidang-sidang *Dokuritsu Zyunbi Tyoosa-kai*, atau lebih dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Gagasan Soekarno untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ia sampaikan dalam sidang *Dokuritsu Zyunby Tyoosakai*, atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan tanggal 1 Juni 1945 dianggap menjadi titik temu dari perdebatan

²⁰² Faisal Ismail, *Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Mei 2017). Cetakan pertama, hlm. 14.

yang terjadi pada saat itu. Ide tentang Pancasila ini, seperti kata Soekarno, adalah hasil dari penggalian dari karakter bangsa Indonesia dan sebuah ilham pemberian Tuhan, yang kemudian ia persembahkan kembali kepada Bangsa Indonesia.²⁰³

Gagasan ini, kata Soekarno, tidak lahir secara mendadak pada tahun 1945, namun melalui proses yang panjang dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri. Melalui pidatonya di BPUPKI, Soekarno berhasil mengonseptualisasikan dasar negara ke dalam pengertian “dasar falsafah” (*philosophische grondslag*) atau pandangan komprehensif dunia secara sistematis dan koheren.²⁰⁴

Seperti disebutkan dalam Risalah Sidang BPUPKI, Soekarno menawarkan rumusannya tentang 5 prinsip (sila) yang ia nilai sebagai titik persetujuan segenap elemen bangsa. Tentang prinsip kebangsaan, Soekarno menyatakan²⁰⁵

“Baik saudara-saudara yang bernama kaum bangsawan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat... Kita hendak mendirikan suatu negara ‘semua buat semua.’ Bukan buat satu orang, bukan buat satu

²⁰³Ir. Sukarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, (Yogyakarta; Media Pressindo, Cet. IV, 2019) hlm. 320-321

²⁰⁴Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, *Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta; Sekretariat Jenderal MPR RI, Cetakan Ketujuh), hlm. 27

²⁰⁵*Ibid.* hlm. 30-33

golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua “Dasar pertama: yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia ada dasar kebangsaan”

Dalam pidato peringatan lahirnya Pancasila pada tanggal 5 Juli 1958 di Istana Negara, Jakarta, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Pancasila telah terbukti mempersatukan Bangsa Indonesia. Hal itu karena nilai-nilai luhur yang terdapat pada Pancasila itu sendiri sehingga ia mampu mengikat hati dan pikiran rakyat agar benar-benar merasa menjadi satu bangsa.

“Sulit sekali pemersatuan Indonesia itu jikalau tidak didasarkan Pancasila. Alangkah banyak macam agama di sini, alangkah banyak aliran pikiran di sini, alangkah banyak macam suku-suku di sini. Bagaimana mempersatukan aliran, suku-suku, agama-agama, dan lain sebagainya itu, jikalau tidak diberikan satu dasar negara yang mereka bersama-sama berpijak di atasnya. Dan itulah, saudara-saudara, Pancasila”²⁰⁶

Pada peringatan Hari Lahirnya Pancasila XIX tahun 1964 di Jakarta, Soekarno juga menjelaskan bahwa bahwa ia benar-benar merasa mendapatkan ilham yang menyuruhnya untuk menggali dasar negara ini dari Bangsa Indonesia dari bumi Indonesia sendiri. Ilham ini ia dapatkan pada malam hari sebelum giliran jadwalnya berpidato dalam sidang *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*, atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, tanggal 1 Juni 1945.

“Maka malam itu aku menggali, menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaanku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya –

²⁰⁶Ir. Sukarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, (Yogyakarta; Media Pressindo, Cetakan Keempat, 2019) hlm. 81

sebagai hasil dari penggalian itu – dapat dipakainya sebagai dasar daripada Negara Indonesia Merdeka yang akan datang..”²⁰⁷

Soekarno mengusulkan lima sila atau lima dasar yang ia namakan Pancasila. Kelima sila yang diusulkan sebagai dasar negara merdeka itu adalah:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan²⁰⁸

Untuk menindaklanjuti pidato bersejarah Soekarno di sidang BPUPKI itu, maka dibentuklah sebuah panitia kecil yang dikenal dengan nama Tim Sembilan. Anggotanya adalah: Soekarno, Mohammad Hatta, Ahmad Subardjo, A.A. Maramis, dan Muhammad Yamin (kelima tokoh ini mewakili faksi Nasionalis Netral Agama), Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Abikusno Tjokrosujoso, dan Abdul Wahid Hasjim (keempat tokoh ini mewakili faksi Nasionalis Muslim). Setelah melalui perdebatan yang hangat dan panjang, maka tim Sembilan ini menghasilkan kompromi politik bersejarah yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta ini, Pancasila gagasan Soekarno ini dirumuskan kembali sebagai berikut:

²⁰⁷Ir. Sukarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, (Yogyakarta; Media Pressindo, Cetakan Keempat, 2019) hlm. 317

²⁰⁸*Ibid.*, hlm. 33

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam Jakarta ini ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 oleh sembilan pemimpin tersebut sebagai wakil dari faksi Nasionalis Netral Agama dan faksi Nasionalis Muslim.²⁰⁹

Namun menjelang pembukaan sidang resmi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, Hatta mengusulkan perubahan rancangan Pembukaan UUD dan batang tubuhnya karena ia menerima keberatan dan penolakan terhadap 7 kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dari kalangan Kristen di wilayah Indonesia bagian Timur karena menganggap hal itu sebagai diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Mereka mengancam memisahkan diri dari NKRI jika 7 kalimat itu tidak dihapus.

Hatta pun mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Hasan pengarahkan rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah tersebut. Maka dengan

²⁰⁹*Ibid.*, hlm. 59

pertimbangan untuk menjaga keutuhan bangsa, mereka pun mufakat untuk menghapus ketujuh kata itu dan menggantinya dengan ‘Ketuhanan yang Maha Esa.’²¹⁰

2) Hubungan Agama dan Negara

Perdebatan tentang hubungan agama dan negara terjadi antara nasionalis muslim²¹¹ dan nasionalis netral agama.²¹² Perdebatan ilmiah yang tegak di atas dalil, argumentasi, dan kekuatan akal pikiran ini menjadi sebuah panorama sejarah Islam dan politik di Indonesia yang menarik untuk diikuti, hingga akhirnya Pancasila secara permanen dan efektif diterapkan sebagai dasar dan ideologi negara sampai sekarang.²¹³ Dari segi waktu, perdebatan tentang hal ini dapat kita bagi menjadi tiga, yaitu masa pra kemerdekaan, masa awal kemerdekaan, dan masa demokrasi terpimpin dalam kaitan hubungan negara dengan partai-partai Islam.

Perdebatan ini lahir, kata Prof. Kamsi, dari perbedaan paradigma terkait hubungan agama negara, apakah sifatnya

²¹⁰*Ibid.*, hlm. 64

²¹¹Faksi Nasional Muslim adalah faksi pemimpin politik muslim yang terikat dengan keimanan mereka secara mendalam, dan yakin bahwa untuk kebaikan bangsa, Islam harus digunakan sebagai dasar negara. Dalam pandangan mereka tidak ada pemisahan antara urusan duniawi dan urusan ukhawi dalam ajaran agama Islam. Bagi mereka, hubungan antara agama dan negara harus menyatu, tidak boleh terpisah dan dipisahkan. Lihat Faisal Ismail, *Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indonesia*, hlm. 30

²¹²Faksi Nasionalis Netral Agama adalah para pemimpin politik Indonesia yang menolak agama (Islam) untuk dijadikan dasar negara. Meskipun secara personal mereka bukan kaum sekularis dan tidak kurang dalam hal muatan sentimen, tendensi, dan afiliasi keagamaan, namun mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan agama sebagai ideologi bangsa. Lihat Faisal Ismail, *Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indonesia*, hlm. 30

²¹³Faisal Ismail, *Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta; IRCiSoD, 2017), hlm. 122

integralistik, simbiotik, dan sekularistik? Integralistik artinya kedua komponen ini, agama dan negara, menjadi satu. Agama adalah negara, negara adalah agama. Simbiotik artinya agama punya corak dan aturan sendiri, negara punya corak dan aturan sendiri, tetapi satu sama lain punya hubungan yang saling menguntungkan. Sementara sekularistik artinya agama dan negara masing-masing berdiri sendiri dan tidak punya satu sama lain.²¹⁴

Dinamika polemik hubungan agama dan negara ini dapat dibagi ke beberapa masa dan periode:

a) Masa Pra Kemerdekaan

(1) Polemik *Jawi Hisworo* dan Sarekat Islam

Pada tahun 1916, umat Islam dikejutkan dengan tulisan di koran berbahasa Jawa, *Jawi Hisworo*, yang berisi penghinaan kepada Nabi Muhammad Saw. yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang pemabuk dan pematat yang tentu saja kemudian membangkitkan kemarahan umat Islam untuk menjawab penghinaan itu, membela hak Rasulullah disertai adanya gagasan bahwa masyarakat perlu diatur secara Islam. Salah satu kelompok yang gencar menyuarakan ini adalah Sarekat Islam.

Menghadapi reaksi ini, pendukung Jiwa Hisworo membentuk *Panitia Kebangsaan Jawa*. Panitia ini mengecam

²¹⁴Kamsi, *Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Calpulis, 2017) Cet. II, hlm. 87

gerakan Sarekat Islam yang mengaitkan politik dengan negara. Sementara kelompok Sarekat Islam berpandangan bahwa politik punya hubungan erat dengan negara.²¹⁵

(2) Polemik Soekarno dan Natsir

Pandangan Soekarno tentang hubungan agama dan negara banyak bercermin kepada negara Turki saat itu yang dipimpin oleh Kemal Attaturk dan kawan-kawannya dari Turki Muda. Sepanjang tahun 1938-1940, Soekarno banyak menulis tentang tema hubungan agama dan negara dalam majalah Panji Islam, dengan judul antara lain; *Memudakan Pengertian Islam, Apa sebab Turki memisahkan Agama dan Negara, Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal-Udara, Islam Sontoloyo*, dan beberapa tulisan lainnya.²¹⁶ Dalam pandangan Soekarno, ada dua alasan utama sehingga perlu memisahkan negara dan agama, yaitu alasan ekonomi dan alasan politik. Soekarno mengkritik beberapa praktek keagamaan di Turki yang menurutnya menjadi penyebab utama kemunduran ekonomi bangsa Turki, seperti kesalahpahaman terhadap takdir, puasa yang menyebabkan kemalasan, sedekah yang menyebabkan banyak peminta-peminta, percaya kepada takhayul dan sihir, dan larangan riba sehingga menyebabkan perbankan dan roda perekonomian tidak berjalan dengan baik dan benar-benar bangkrut tahun 1875.

²¹⁵*Ibid.* hlm. 88

²¹⁶M. Natsir, *Capita Selecta*, Cet. III, (Jakarta; Penerbit Bulan Bintang, 1973), hlm.29

Singkatnya, alasan-alasan ekonomi para *Kemalis* yang disebutkan oleh Soekarno antara lain bahwa rakyat mempunyai kepercayaan *fatalisme* yang sangat merusak kekuatan ekonomi, guru-guru agama di Turki selalu mempropagandakan anti kaya, para ulama menyusahkan berjalannya peraturan-peraturan kesehatan rakyat, rakyat Turki penuh dengan takhayul dan khurafat, rakyat Turki merasa puas dengan undang-undang Islam mereka, tidak merasa perlu mengambil aturan-aturan orang lain yang baik-baik.²¹⁷

Pada sisi politik, kehidupan Dinasti *Utsmaniah* di masa masa terakhir tidak lagi mempunyai sultan yang kuat, tidak ada lagi tokoh-tokoh seperti Salim I, Sulaiman I, Muhammad II, dan lainnya. Kebijakan-kebijakan para sultan tidak memberi dampak yang baik bagi rakyat, sementara negara tidak berhenti perang sejak tahun 1910.

Apa yang dilakukan Ataturk, kata Soekarno, adalah usaha memerdekakan agama dari ikatan-ikatan yang menghalangi kesuburannya, yakni ikatan-ikatan negara, ikatan-ikatan pemerintah, ikatan-ikatan pemegang kekuasaan yang zalim dan sempit pemikiran.

“Kemerdekaan agama dari ikatan negara itu berarti juga kemerdekaan negara dari ikatan anggapan-anggapan agama yang

²¹⁷ M. Natsir, *Capita Selecta*, Cet. III (Jakarta; Penerbit Bulan Bintang, 1973), hlm. 462

jumud, yakni kemerdekaan negara dari hukum-hukum tradisi dan faham-faham Islam kolot yang sebenarnya bertentangan dengan jiwanya Islam sejati, tetapi nyata selalu menjadi rintangan bagi gerak-geriknya negara ke arah kemajuan dan kemodernan. Islam dipisahkan dari negar agar supaya Islam menjadi merdeka dan negara pun menjadi merdeka. agar supaya Islam berjalan sendiri, agar supaya Islam subur, dan negara subur pula”²¹⁸

Soekarno mengutip perkataan Atatürk yang menyatakan bahwa yang ia lakukan bukan melemparkan agama, ia hanya menyerahkan agama ke tangan rakyat kembali, lepas dari urusan negara, supaya agama dapat menjadi subur. Untuk menguatkan pendapatnya, ia juga mengutip pendapat Menteri Mahmud Essad Bey bahwa apabila agama dipakai buat memerintah, ia selalu dipakai alat penghukum di tangan raja-raja, orang zalim dan orang-orang tangan besi.²¹⁹ Menurut Soekarno, dalam alam demokrasi, rakyat dapat memasukan unsur keagamaan dalam tindakan negara, dalam undang-undang negara, dan juga ke dalam tiap-tiap politik yang dilakukan oleh negara. Asal sebagian besar dari anggota parlemen itu politiknya politik Islam, maka semua keputusan bisa berjalan sesuai ketentuan Islam.²²⁰

Para penulis muslim banyak ikut mengangkat pena untuk menanggapi pendapat Soekarno ini, salah satunya adalah M. Natsir di Majalah Al Manaar yang seringkali menggunakan nama

²¹⁸Ir. Soekarno, “Apa Sebab Turki Memisah Agama Dari Neraka” artikel yang dimuat dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi*, , Cet. V (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005) hlm. 405.

²¹⁹M. Natsir, *Capita Selecta*, Cet. III, (Jakarta; Penerbit Bulan Bintang, 1973), hlm.437

²²⁰*Ibid.*, hlm. 407

pena A. Muchlis ketika menulis majalah Pandji Islam. Dalam rangkaian makalahnya yang terhimpun dalam buku *Capita Selecta*, M. Natsir menyatakan bahwa seorang muslim hidup di atas *falsafah* hidup dan ideologi yang tidak dapat dipisahkan dari hidupnya, sebagai tujuan dasar penciptaannya, yaitu menjadi hamba Allah. Dalam arti yang sepenuhnya untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat, Hal ini seperti termuat dalam QS. *Adz Dzaāriyāt* 56, “*Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-ku.*”

Dalam hal ini, Natsir menyatakan:

“Untuk mentjapai tingkatan jang mulia itu, Tuhan memberi kita bermatjam-matjam aturan. Aturan atau tjara kita harus berlaku berhubung dengan Tuhan jang mendjadikan kita, dan tjara kita harus berhubung dengan sesama manusia. Di antara aturan-aturan jang berhubung dengan muamalah sesama machluk itu, ada diberikan garis-garis bersarnja berupa kaedah jang berkenaan dengan hak dan kewadajiban seseorang terhadap masjarakat, dan hak serta kewadajiban masjarakat terhadap diri seseorang. Jang akhir ini tak lebih tak kurang, ialah jang dinamakan orang sekarang dengan urusan kenegaraan itu.”²²¹

Konsep dan praktik aturan kenegaraan itu telah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabatnya, yang kemudian dilanjutkan oleh para pemerintahan para khalifah yang datang setelahnya. Prinsip dasar dari aturan-aturan tersebut sifatnya tetap dan tidak berubah, misalnya kewajiban menegakkan keadilan, menghapuskan sumber-sumber petaka dan bencana bagi rakyat,

²²¹M. Natsir, *Capita Selecta*, Cet. III, (Jakarta; Penerbit Bulan Bintang, 1973), hlm.436

memerangi kecurangan dan pengkhianatan, menetapkan syarat-syarat kepemimpinan, dan lain sebagainya. Yang berubah itu adalah manusia yang menegakkannya, karena syarat-syaratnya yang tidak dipenuhi, berbagai bentuk godaan dunia dan kepentingan, kekurangan ilmu dan pengetahuan dari seorang pemimpin itu sendiri. Mereka hanya menjadikan Islam sebagai kedok dan penutup kekurangcakapan mereka dalam memimpin, padahal ajaran Islam bukan seperti itu.

Dalam hal ini Natsir juga menyatakan,

“Suatu negeri yang pemerintahannya tidak memperdulikan keperluan rakyatnya, membiarkan rakyat bodoh dan dungu, tidak menjukupkan alat-alat yang perlu untuk kemajuan agar jangan tertjetjer dari negeri-negeri lain dan jangan kepala-kepalanya menindas rakyat dengan memakai “Islam” sebagai kedok atau memakai ibadah-ibadah sebagai kedok, sedang kala kepala-kepala pemerintahan itu sendiri penuh dengan segala matjam maksiat dan membiarkan tahatjul –churafat meradjalela, sebagaimana keadannya pemerintah Turki di zaman sultan-sultan yang achir-achir, maka pemerintah yang sematjam itu bukanlah pemerintahan Islam”²²²

Memisahkan agama dari negara, kata Natsir, bukanlah solusi untuk memajukan negara. Yang harus dipisahkan dari negara itu adalah kejahatan, maksiat, perbudakan, kemusyrikan, kerakusan dan kesombongan yang merajalela, menghancurkan kekuatan umat, membawa pada kemerosotan moral dan budi

²²²*Ibid.*, hlm. 438-439

pekerti, juga menutup pintu bagi kejayaan dunia dan keselamatan akhirat.

Adanya pemerintahan yang bobrok seperti yang terjadi pada beberapa pemerintahan masa Utsmani tidak dapat menjadi dalil perlunya memisahkan agama dengan negara. Sebab adanya praktik yang tidak sesuai dengan semangat Islam telah membuktikan bahwa memang sejak lama agama terpisah dengan negara yang semacam itu. Suatu masyarakat dan pemerintahan yang sudah kosong dari pemahaman agama yang benar maka apalagi yang akan dipisahkan?²²³

Pandangan Natsir, kalau kita mau memperbaiki negara, perlu dimasukkan ke dalamnya dasar-dasar hak dan kewajiban antara yang memerintah dan diperintah. Harus ditegakkan hukum-hukum muamalah antara sesama manusia. Penting juga dimasukkan ke dalamnya pertalian rohani antara manusia dengan ilahi yang berupa ibadah yang tulus sebagai satu-satunya alat yang sempurna untuk menghindarkan semua perbuatan rendah dan mungkar. Perlu ditanamkan juga budi pekerti yang mulia dan satu *falsafah* kehidupan yang luhur dan suci, satu ideologi yang menghidupkan semangat untuk giat berjuang mencapai kejayaan dunia dan kemenangan akhirat. Semua itu terkandung dalam satu

²²³*Ibid.*, hlm. 439-440

susunan, satu stelsel, satu kultur, satu ajaran, satu ideologi bernama Islam.²²⁴

Menanggapi pendapat Ataturk yang dikutip oleh Soekarno bahwa *apa yang ia lakukan bukan melemparkan agama, ia hanya menyerahkan agama ke tangan rakyat kembali, lepas dari urusan negara, supaya agama dapat menjadi subur*, Natsir menganggap hanya kalimat yang enak terdengar sepintas, tetapi tidak sesuai dengan keadaan. Benar dan tidaknya kata-kata tentang motivasi Kemal memisahkan agama dan negara ini akhirnya dapat dilihat dari sejarah kehidupannya. Pada kenyataannya Ataturk sendiri telah bersikap diktator dalam memerintah yang membredel berbagai surat kabar yang berani menyuarakan kritik atas kebijakan pemerintah, anggota-anggota parlemen dipenjara, partai oposisi tidak diperbolehkan hadir ke pentas politik, dan ribuan sekolah-sekolah agama yang ditutup dengan paksa.²²⁵ Juga mengeluarkan peraturan yang menghambat kegiatan keagamaan, seperti mengubah azan ke Bahasa Turki, melarang jilbab, dan mengeluarkan aturan lainnya yang menjadikan umat Islam tidak bebas beragama.

Demikian pula ketika menanggapi perkataan Menteri Mahmud Essad Bey yang dinukil oleh Soekarno bahwa bahwa

²²⁴*Ibid.*, hlm. 440

²²⁵*Ibid.*, hlm. 454

“apabila agama dipakai buat memerintah, ia selalu dipakai alat penghukum di tangan raja-raja, orang zalim dan orang-orang tangan besi.” Kalimat ini, kata Natsir adalah “*perkataan kosong dalam satu tarikan nafas.*” Sebab, baik Soekarno maupun Essad Bey sendiri tidak mampu memberikan bukti atas klaim yang mereka ucapkan. Tidak ada satupun keterangan penguat dalam kalimat ini selain titel kementriannya semata-mata.

Akan tetapi, lanjut Natsir, kalau yang dimaksudkan oleh Essad Bey bahwa orang yang zalim dan jahat seringkali suka memakai agama sebagai kedok, itu memang tidak usah dibantah lagi. Orang yang memang bersifat jahat pasti akan menggunakan apa saja yang mungkin untuk dijadikan kedok menyembunyikan kejahatannya. Tidak hanya agama Islam, yang bisa dijadikan kedok bisa juga agama Kristen, Budha, bisa juga sistem demokrasi, aristokrasi, historis materialisme, dan bisa juga undang-undang Zwitserland itu.²²⁶

(3) Perdebatan Dalam Sidang Konstituante

Perdebatan yang sengit ini juga terjadi ketika membahas tentang dasar dan ideologi negara. Negara yang baru saja berdiri ini memerlukan sebuah ideologi yang menjadi *falsafah* bangsa Indonesia. Pembahasan tentang Ideologi nasional ini dilakukan

²²⁶*Ibid.* hlm. 446

dalam sidang-sidang *Dokuritu Zyunbi Tyoosa-kai*, atau lebih dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Sejarah mencatat bahwa BPUPKI melaksanakan sidangnya dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, sementara tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli-16 Juli 1945.²²⁷

Anggota BPUPKI ini berjumlah 62 orang kemudian ditambah 6 orang sehingga menjadi 68 orang, dengan ketua Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dan satu orang Jepang yang menjabat sebagai ketua junior dan anggota luar biasa, Ichibangase. Sidang-sidang BPUPKI ini membahas berbagai hal terkait negara Indonesia Merdeka, seperti bentuk negara, batas-batas wilayah, konstitusi, dan dasar filosofis atau ideologi negara.

Mengutip penuturan Prawoto Mangkusasmito, Prof. Faisal Ismail menyatakan dalam bukunya, *Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indonesia*, bahwa dari 68 anggota ini terdapat 15 orang (sekitar 20%) yang berasal dari faksi Nasionalis Muslim dan benar-benar menyuarakan aspirasi

²²⁷ Faisal Ismail, *Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Mei 2017). Cetakan pertama, hlm. 29.

kepentingan politik Islam. Sementara, mayoritas anggota (sekitar 80%) berasal dari faksi Nasionalis Netral Agama.²²⁸

“Hal ini menunjukkan tidak berimbangnya kekuatan politik antara faksi Nasionalis Muslim dengan faksi Nasionalis Netral Agama dalam keanggotaan BPUPKI. Wakil-wakil Nasionalis Muslim tercatat, antara lain KH. Mas Mansur, Abdul Kahar Muzakkir, Ki Bagus Hadikusumo, KH. Masjkur, KH. A. Wahid Hasjim, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, Sukirman Wirjosandjojo, KH. A. Sanusi, dan KH. Abdul Halim. Sedangkan tokoh-tokoh faks Nasionalis Netral Agama tercatat, antara lain Radjiman Wedyodiningrat, Soekarno, Mohammad Hatta, Soepomo, Wongsonegoro, Sartono, R.P. Soeroso, Buntaran Martoatmodjo, dan Muhammad Yamin.”²²⁹

Maksud dari Faksi Nasional Netral Agama, masih menurut Prof. Faisal, adalah para pemimpin politik Indonesia yang menolak agama (Islam) untuk dijadikan dasar negara. Meskipun secara personal mereka bukan kaum sekularis dan tidak kurang dalam hal muatan sentimen, tendensi, dan afiliasi keagamaan, namun mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan agama sebagai ideologi bangsa. Sementara faksi Nasional Muslim adalah faksi pemimpin politik muslim yang terikat dengan keimanan mereka secara mendalam, dan yakin bahwa untuk kebaikan bangsa, Islam harus digunakan sebagai

²²⁸ *Ibid.* hlm. 30. Tentang sengitnya perdebatan antara kedua faksi ini, lengkap dengan argumentasi-argumentasi yang kuat dan logis, dapat dibaca dalam buku tersebut. Buku *Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indonesia* adalah terjemahan dari disertasi doctoral Prof. Faisal Ismail yang berjudul *Islam, Ideology, and State in Indonesia: A Study of the Process of Muslim Acceptance of Pancasila* di *Institute of Islamic Studies*, McGill University, Montreal, Kanada, tahun 1995, dan sudah dilengkapi dengan sejumlah kajian update sehingga paparannya sesuai dengan perkembangan setelah disertasi ini dikukuhkan.

²²⁹ *Ibid.*

dasar negara. Dalam pandangan mereka tidak ada pemisahan antara urusan duniawi dan urusan ukhawi dalam ajaran agama Islam. Bagi mereka, hubungan antara agama dan negara harus menyatu, tidak boleh terpisah dan dipisahkan.²³⁰

2). Masa Awal Kemerdekaan

Polemik antara kelompok nasionalis muslim dan nasional netral agama semakin mengemuka ketika ada pencoretan tujuh kata, yang diakui oleh Hatta adalah prakarsanya yang disetujui oleh wakil Islam di PPKI, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim, Tengku M. Hasan, dan Kasman Singodimejo.

Perdebatan antara elit politik nasionalis muslim dan nasionalis netral agama tentang dasar negara bisa dikatakan tidak pernah mencapai kesepakatan. Dalam polarisasi politik seperti inilah Soekarno mendapatkan alasan untuk mengeluarkan Dekrit Presiden. Dekrit ini dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959 berisi tiga hal: membubarkan konstituante, mencabut berlakunya UUDS 1950 dan memberlakukan UUD 1945, rencana pembentukan MPRS dan DPAS.

Menyikapi dekrit ini, ada yang berpendapat bahwa Dekrit Presiden merupakan intervensi yang sangat tidak konstitusional. Sebab menurut UUDS 1950 yang berlaku ketika itu, Presiden tidak berwenang menentukan berlakunya sebuah UUD dan membubarkan konstituante yang merupakan hasil pemilihan umum yang sangat jujur, adil, dan demokratis.

²³⁰*Ibid.* hlm. 13-14.

Alasan keluarnya dekrit bahwa konstituante gagal menjalankan tugas menyusun sebuah konstitusi baru tidak dapat diterima. Sebab ketika dekrit itu dikeluarkan, materi UUD yang baru sebenarnya hampir selesai dan mencapai 90% dari masalah mendasar. Hanya 10% masalah-masalah kecil saja yang belum terselesaikan, dan diyakini akan dapat diselesaikan.

Adapun yang membenarkan adanya dekrit ini menyampaikan bahwa konsideran keluarnya dekrit adalah bahwa negara dalam keadaan bahaya. Jika negara dalam keadaan bahaya, maka Presiden dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan negara. Karena ada ketentuan hukum “*salus populus suprema lex*” keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi”²³¹

Para ahli tata negara melihat bahwa dekrit Presiden 1959 telah menjadi gong penutup bagi kehidupan demokrasi parlementer. Keluarnya Dekrit ini dianggap menjadi pertanda mulainya kehidupan politik di Indonesia di bawah bendera Demokrasi Terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dinilai menjadi sebuah sistem politik hipokrit yang penuh dengan penyimpangan-penyimpangan konstitusional yang disengaja, demi revolusi yang tak kunjung selesai.²³²

3). Masa Demokrasi Terpimpin (Hubungan Negara Dengan Partai Islam)

Menyikapi masa demokrasi terpimpin ini, kata Prof Kamsi, secara garis besar umat Islam terbagi menjadi dua kelompok; Masyumi dan Liga

²³¹ Kamsi, *Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 96

²³² *Ibid.*, hlm. 97

Islam. Kelompok pertama, Masyumi. Dalam pandangan Masyumi, sistem demokrasi terpimpin ini akan membawa bencana bagi bangsa dan negara, dan secara khusus akan memberikan resiko politik yang buruk bagi golongan modernis muslim di Indonesia. Maka tidak ada pilihan kecuali melawan Soekarno dan sistemnya yang otoriter.

Pilihan sikap politik Masyumi mendapatkan reaksi yang keras dari PKI yang membela mati-matian kebijakan Soekarno. Mereka menuduh Masyumi sebagai kekuatan “kepala batu” yang menghalangi penyelesaian revolusi Indonesia. Menurut mereka, golongan modernis, khususnya Masyumi, tidak patut lagi hidup pada era Demokrasi Terpimpin. Di mata Soekarno, pemimpin-pemimpin Masyumi masuk dalam kategori “musuh revolusi” dan karena itu harus disingkirkan. Maka setelah sistem Demokrasi Terpimpin berjalan sekitar sembilan bulan, Soekarno membubarkan hasil Pemilu 1955 pada tanggal 20 Maret 1960, kemudian ia membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Hal yang menarik adalah dalam pembentukan lembaga negara ini, Masyumi tidak diikutkan karena dianggap partai penghalang revolusi dan menjadi dalang pemberontakan PRRI-Permesta, sekalipun anggapa tidak beralasan.

Selain terkait perbedaan pandangan politik, ketidakharmonisan antara Masyumi dan Presiden Soekarno juga karena perbedaan pendapat tentang masalah Irian Barat. Sebagai pemimpin tertinggi dan figur puncak, Soekarno berat menerima kekalahan suara yang terjadi dalam sidang

kabinet. Dalam sidang tersebut, Natsir mendapat 12 suara, sementara Soekarno mendapatkan 5 suara.

Kelompok kedua, Liga Muslim yang terdiri dari NU, PSII, dan PERTI, memilih untuk turut serta dalam Demokrasi Terpimpin. Dalam hal ini, NU berdalil dengan kaedah *Mā lā yudraku kulluhu lā yutraku ba'dhuhu* (apa yang tidak bisa didapatkan semuanya jangan dilepaskan sebagiannya). Dengan dalil ini, secara organisasi NU memutuskan untuk masuk dalam sistem walaupun kecil keuntungan yang bisa didapatkan.

Alasan lainnya adalah mereka mengakui sistem dan menerima DPRGR adalah dalam rangka menegakkan *amar makrūf nahi munkar*. Secara praktis, tujuannya adalah untuk menambah jumlah wakil umat Islam di DPRGR hingga dapat sebanding dengan wakil-wakil dari golongan lainnya. Namun ternyata faktanya tidak demikian. Jumlah kaum muslim tetap lebih sedikit dibandingkan dengan nasionalis sekuler dan komunis, yang mendapatkan kursi masing-masing 97 kursi untuk nasionalis sekuler, 81 kursi komunis, dan 67 kursi golongan Islam.²³³

Pada masa Demokrasi Terpimpin ini, dalam pandangan Syafii Maarif, partai-partai Islam tidak memiliki peran utama. Peran utama dipegang oleh Soekarno, ABRI, dan PKI. Peran golongan Islam hanya untuk meramaikan jargon Nasionalis, Agama, Komunis (Nasakom). Seiring

²³³Kamsi, *Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Calpulis, 2017) Cet. II, hlm. 99-101

dengan meningkatnya pengaruh Soekarno dan peran PKI dalam pemerintahan, Masyumi pun akhirnya dibubarkan.²³⁴

Berdasarkan pemaparan di atas kita dapat melihat jelas, kedua tokoh ini memiliki latar belakang keilmuan yang kuat, rasa cinta mendalam kepada tanah airnya, kepedulian yang sangat tinggi kepada bangsanya, dan memberikan pengorbanan yang sangat besar untuk mewujudkan sebuah bangsa yang tegas di atas prinsip yang nilai mulia.

B. Pembahasan

Ahmad Daud Oglo dalam kajiannya memaparkan tentang perodesasi perkembangan politik di dunia Islam pada Abad 20, lengkap dengan berbagai permasalahan yang dihadapi. Oglo mengambil kesimpulan bahwa Sa'id Nursi adalah ulama yang sangat paham dengan kondisi yang terjadi sehingga mampu memberikan statemen dan pandangan-pandangan yang cemerlang. Walaupun krisis politik, ekonomi, dan pendidikan begitu keras menerpa umat Islam, sesungguhnya dunia Islam saat ini sedang berada di pintu gerbang sebuah peradaban baru, dan Badi'uzzamān Sa'id Nursi sudah memprediksi bahwa Islam adalah suara teragung yang akan bergaung dalam peradaban baru itu²³⁵

Hal yang serupa disampaikan oleh Mehmed Halil Cicek, guru besar Fakultas Ilahiyat Universitas Ben Kol, Turki. Ia menerangkan bahwa secara ilmiah karakter ide pembaharuan Sa'id Nursi dalam menghadapi problematika

²³⁴*Ibid.*, hlm. 104

²³⁵Ahmad Daud Oglo. "Siyasah Al Alam Al Islami fi Al Qarn Al Isyirin fi Nazhar An Nursi" *Jurnal Al Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. III, Bulan Januari, 2011, hlm. 15-48.

modern dengan rasional dan mengusung nilai nilai yang tinggi, mampu menggerakkan jiwa untuk mencintai hukum-hukum dan praktek ibadah dalam Islam, dengan bahasa yang modern dalam penyampaian.²³⁶ Berikut ini penulis memaparkan asas-asas pemikiran politik Badi`uzzamān Sa`id Nūrsi dan perbandingan dengan pemikiran Presiden Soekarno

1. Asas-asas Pemikiran Siyāsah Syar`iyyah Badiuzzaman Sa'id Nursi

Gagasan dan pemikiran *Siyāsah Syar`iyyah*nya dalam *Rasāil An Nūr* tidak tersusun dalam satu pembahasan utuh. Ia terpisah-pisah dalam berbagai pembahasan sesuai dengan topik yang dibahas. Gagasan politik ini ada yang disampaikan dalam pidato pembelaan dalam Mahkamah Militer (*Divan-i Harb-i Orfi*), dalam diskusi dengan para pemuka suku di Anatolia Timur tahun 1911 yang kemudian dibukukan dengan judul *Munzharaat*, dalam khutbah yang ia sampaikan di Masjid Damaskus yang dikenal dengan nama *Al Khutbah Asy-Syamiyah*, dan dalam kitab *Sunuhat*, yang ia tulis ketika ia masih menjadi anggota *Dar Al-Hikmat Al-Islamiyyah*, juga dalam beberapa bagian yang dituliskan dalam biografi hidupnya. Di antara sekian tema yang mengemuka pada masanya, Sa'id Nursi memiliki pandangan khusus tentang konsep negara.

Menurut Andrew Heywood, negara adalah sebuah kesatuan politik yang membentuk wilayah hukum berdaulat dalam batas-batas wilayah

²³⁶ Mehmed Halil Cicek, "Malâmih Tajaddud Khithâb An Nursi fi Muwâjahati Tahaddiyatil Ashri" *Jurnal Al Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. IV, Bulan Juli 2011, hlm. 9-12.

tertentu, dan menyelenggarakan otoritas melalui serangkaian lembaga permanen.²³⁷ Lembaga yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga publik yang bertanggungjawab dalam pengaturan kehidupan dan dibiayai dengan belanja publik yang mencakup lembaga pemerintahan, industri nasional, militer, kepolisian, dan sistem keamanan nasional secara umum, dan lain sebagainya.²³⁸

Pada sudut pandang ini, kita dapat mengidentifikasi 5 ciri negara, yaitu: negara adalah penguasa yang memiliki kekuasaan mutlak, tak terbatas, dan berdiri di atas semua organisasi dan kelompok yang ada di masyarakat; lembaga negara bersifat publik yang bertanggung jawab membuat dan menyelenggarakan keputusan bersama; negara adalah ukuran legitimasi dimana keputusan negara bersifat mengikat anggota masyarakat disebabkan oleh fungsi negara yang dianggap mencerminkan kepentingan permanen masyarakat; negara adalah perangkat dominasi, dimana otoritas negara disokong oleh pemaksaan; negara adalah kesatuan teritorial yang secara geografis mencakup semua yang hidup di dalam batas-batas wilayah negara tersebut, baik mereka itu warga negara atau bukan.²³⁹

Pandangan Sa'id Nursi tentang konsep negara bisa dilihat dari beberapa dimensi yang berbeda dari pandangan sebelumnya. Salah satunya adalah dari dimensi biologis. Nursi melihat negara itu lahir, tumbuh dan

²³⁷Andrew Heywood, *Politict 4th Edition*, alih bahasa Ahmad Lintang Lazuari, *Politik Edisi keempat*, Cet. 1 (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 96

²³⁸*Ibid.*

²³⁹*Ibid.* hlm. 96

berkembang layaknya manusia. Ketika tiba saatnya, ia pun akhirnya bisa mati dan hilang. Dalam kitab *Risâlatul I'jâz*, Nursi menyatakan,

هي ان الدولة شخص معنوي. تشكُّلها تدريجيّ كنمو الطفل، وغلبتها للدولة العتيقة - التي صارت أحكامها كالطبيعة الثابتة لملتها - متمهلة²⁴⁰

Nursi ingin menegaskan bahwa setiap negara akan melalui proses lahir, tumbuh, dan berkembang. Pembangunan fisik harus diperhatikan, sebagaimana perlu memberikan perhatian kepada jiwa bangsa. Waktu memegang peranan penting dalam perjalanan negara ini. Tanpa adanya kemampuan beradaptasi dan menghadapi beragam persoalan yang silih berganti, maka kekuatan suatu bangsa dapat saja merosot, dan akhirnya hilang. Artinya, negara harus terus berjuang untuk tetap hidup, maju, dan berkembang. Seluruh rakyat punya peran dan tanggungjawab besar dalam hal ini, terutama pemegang tampuk kepemimpinan, baik yang ada di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Di bagian yang lain, Nursi memandang negara dari dimensi keluarga. Ia melihat bahwa negara adalah keluarga besar nasional. Maka negara perlu diatur seperti sebuah keluarga di mana setiap anggota keluarga memilih peran yang spesifik untuk kebaikan bersama.²⁴¹ Untuk tegaknya sebuah negara, Nursi memandang ada 7 pilar utama yang menjadi prinsip dasar kehidupan politik, yaitu: Tauhid, Musyawarah, Kebebasan, Keadilan, Persamaan, Persatuan, dan Jihad.

²⁴⁰Badiuzzaman Said Nursi, *Isyâratul I'jâz*, hlm. 169

²⁴¹*Ibid.*, hlm. 170

a. Tauhid

Nursi banyak membahas bahwa alam semesta yang terbentang ini dari partikel terkecil sampai galaksi (*Min Adz Dzarrāt Ila Al Majarāt*) adalah makhluk yang tunduk pada kekuasaan Allah Swt. Maka prinsip tauhid ini harus hadir dalam kehidupan umat, termasuk dalam membangun sebuah negara yang teratur dan sistemik.²⁴² Dalam pandangan Nursi, tauhid terbagi kepada dua bentuk: *tauhid taqlidi* dan *tauhid tahqiqi*.

Menurut Nursi, *Tauhid taqlidi* adalah keyakinan umum dari seorang orang beriman bahwa Allah itu Esa, tidak serikat dan sekutu baginya. Sementara *tauhid tahqiqi* adalah keyakinan yang terpatri dalam hati seseorang dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, stempel kemuliaannya, dan tulisan penanya pada segala sesuatu, yang membuka pintu secara langsung menuju cahaya-Nya. Semakin kuat keyakinan dalam hati orang tersebut bahwa segala sesuatu ada karena kuasanya. Dengan cara ini, ia mencapai tingkatan kesadaran permanen atas keberadaan Sang Pencipta. Inilah yang disebut dengan *Iman Tahqiqi*.

Selanjutnya pada pembahasan (misalnya dalam *Risālah Ath-Thabī'ah*) Nursi menguraikan bukti-bukti dalam alam semesta untuk mencapai iman tahqiqi ini. Menurut Nursi, makrifat kepada Allah

²⁴² Hasbi Sen, *Prinsip Politik Islam Menurut Said Nursi*, (Palembang; UIN Radeh Fatah, 2007), hlm. 71

menjadi landasan setiap ilmu yang haqiqi dan menjadi pondasi sistem politik dalam membangun sebuah masyarakat. Nursi memandang bahwa perasaan beragama setiap manusia akan muncul saat akal pikirannya lemah dan tidak mampu lagi menghadapi berbagai tekanan dan persoalan hidup. Ia butuh sandaran hati dan pikiran yang diharapkan mampu mengarahkan hidupnya ke arah yang benar. Beragam persoalan hidup pribadi maupun sosial memerlukan sandaran ini yang akan menopang hidupnya tetap kuat dan berjalan sebagaimana mestinya. Dari kajiannya, Hakan Yavuz menyatakan,

“Religious faith, for Nursi, is the outcome of man’s intellectual weakness and failure to create permanent harmony in his life and society. He argued that individuals are in a state of constant tension between desire and reason, because humans have infinite appetites but limited resources. The only way to manage this tension is by developing a full connection with God. Nursi criticized positivist epistemology and its desire to control nature and man simultaneously. Since religion is innate to human nature, Nursi sees the lack of religion as the source of many conflicts and wars. He extended this concept of tension to the societal level, where the absence of God in public space is the source of man’s problems”²⁴³

Bagi Nursi, iman kepada Allah adalah sumber kekuatan dan menjadi solusi menjawab beragam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern. Nursi menjadikan tema utama dakwahnya adalah *Inqādzul Imān*, sebab ia yakin bahwa iman menjadi inti dari semua aktifitas umat manusia. Dalam pandangan Nursi adanya perubahan dari *iman taqlidi* ke *iman haqiqi* dapat melawan positivisme modern, yaitu materialisme dan ateisme. Seorang muslim dalam membangun

²⁴³ M. Hakan Yavuz, *Islam Political Identity in Turkey*, (Newyork, Oxford University Press, 2003) hlm. 158

kesadaran hidupnya dari keyakinan imannya. Nursi membuktikan bahwa semua kebajikan, keadilan, perdamaian, kejujuran, persatuan, dan cinta berasal dari iman dan ajaran moral Islam. Sebaliknya anarki, egoisme, penindasan, dan kemelaratan adalah akibat dari ketiadaan iman dan ajaran iman. Oleh karena itu, iman merupakan pondasi komunitas bermoral dan sumber pengetahuan yang terkait dengan fenomena dunia.

Perubahan dari *Iman taqlidi* menuju *iman tahqiqi* dapat melahirkan masyarakat yang peduli dan pemimpin yang adil dalam kebijakan-kebijakannya. Rekonstruksi masyarakat dengan *iman tahqiqi* akan memberi pengaruh pada sektor ekonomi, politik, dan kehidupan sosial. Prinsip tauhid memberikan kesadaran kepada para pemimpin bahwa semua kebijakan yang mereka jalankan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kesadaran ini menjadikan para pemimpin bekerja keras, tidak menindas hak rakyat, dan berhati-hati dalam setiap keputusannya.²⁴⁴

Pada penerapannya seperti diungkapkan oleh Ichwansyah, paling tidak terdapat tiga sudut pandang Islam moderat yang digunakan oleh Said Nursi sebagai upaya aktualisasi ajaran-ajaran Al Qur'an dalam realitas kehidupan sosial-politik agar terciptanya masyarakat Turki yang harmonis. Ketiga sudut pandang pemikiran

²⁴⁴ Hasbi Sen, *Prinsip Politik Islam Menurut Said Nursi*, (Palembang; UIN Radeh Fatah, 2007), hlm. 73

Nursi ini terangkum dalam *Rasail Nur* yang menjadi acuan dasar gerakan dakwah para aktivis Komunitas Nur.

Pertama, reaktualisasi dasar-dasar keimanan yang benar. Menurut Nursi, keimanan yang benar dapat menjadikan kehidupan seseorang itu dinamis. Dengan kata lain, kualitas iman yang benar harus benar-benar teruji, yang artinya tidak gampang terombang-ambing oleh keraguan atau yang dinamakan Nursi dengan nama *Iman Tahqiqi*. Keimanan ini harus berdasarkan dengan ilmu, karena dua hal tersebut (iman dan ilmu) merupakan tugas dan tujuan diutusnya manusia ke dunia. Sebab, ilmu yang berdasarkan keimanan kepada Allah adalah tujuan paling tinggi dan paling penting dari penciptaan. Karena dengan ilmu yang berdasarkan keimanan inilah manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Itulah mengapa dalam hal ini Nursi dengan tegas menolak filsafat dan saintifik dari Barat yang tidak berlandaskan keimanan.²⁴⁵

Kedua, revitalisasi moralitas keagamaan. Permasalahan moralitas menjadi soal penting yang dihadapi oleh Nursi. Karena dalam pembahasan dan pertanyaan etika serta moral yang berkaitan dengan konteks moral, Nursi selalu menyajikan atas apa-apa yang berdasarkan al-Qur'an. Semisal penekanan terhadap prinsip keadilan, kesederhanaan, dan kebersihan. Menurut Nursi hukum alam semesta

²⁴⁵Ichwansyah Tambupolon, *Dakwah dan Modernisme.*, hlm. 8

berkaitan erat dengan moralitas dalam Islam. Di sisi lain, Nursi menggunakan prinsip hukum universal yang di mana berkaitan dengan energi dan menghubungkannya dengan etos kerja guna menghindarkan manusia (umat muslim khususnya) dari sikap malas. Moralitas yang dimaksud Nursi dalam hal ini tentunya berhubungkait antara manusia dengan semua makhluk dalam mengekspresikan eksistensi persaudaraan dan cinta antara manusia dengan segala sesuatu. Di mana pandangan ini tentunya tidak lepas dari kondisi Turki saat itu sebagai masyarakat modern yang telah tersekulerkan yang lebih banyak menonjolkan sikap dan sifat individualistik.²⁴⁶

Ketiga, reformulasi metodologi interpretasi ajaran wahyu. Said Nursi mengembangkan metode interpretasi terhadap al-Qur'an melalui pengamatan dan refleksi atas makhluk serta proses alam semesta dan kemudian dikaitkan dengan sudut pandang al-Qur'an. Oleh karena itu Nursi mengemukakan konsep "*Ma'na Harfi*" yaitu cara pemaknaan terhadap segala sesuatu yang dimulai dari aktivitas mempertimbangkan segala sesuatu, mengekspresikan maknanya, dan memperhitungkan penciptanya. Semua hal tersebut didukung oleh argumentasi deduktif agar dapat menghasilkan pembuktian-pembuktian. Pandangan Nursi ini hadir sebagai bentuk bantahan atas

²⁴⁶*Ibid.*, hlm. 11

kalangan materialistik yang menyatakan bahwa alam tercipta dengan sendirinya adalah sebuah kecacatan logika.²⁴⁷

b. Musyawarah

Bersarkan ayat-ayat al-Quran yang memerintahkan untuk bermusyawarah,²⁴⁸ Nursi yakin bahwa musyawarah merupakan mekanisme untuk mengambil keputusan yang besar dalam berbagai urusan. Melalui proses musyawarah yang benar, berdasar pada hakikat kebenaran, argumentasi, dan berfikir rasional, umat Islam dapat menghadapi dan menjawab tangan peradaban modern ini. Musyawarah adalah jalan untuk menghadirkan banyak pemikiran dan pengalaman, melahirkan kemajuan dan kesejahteraan, sekaligus menghadirkan kebahagiaan, sebab setiap kelompok memiliki kesamaan pandangan dan tujuan.²⁴⁹

c. Kebebasan

Bagi Nursi, kebebasan memiliki arti sangat penting. Ia berkata, “Aku bisa hidup tanpa roti, tapi aku tidak bisa hidup tanpa kebebasan”²⁵⁰ Artinya kebutuhan kepada kebebasan jauh lebih penting dari kebutuhan kepada makanan. Dalam hal, defenisi kebebasan menurut Nursi adalah dengan adanya sebuah iklim kondusif dalam

²⁴⁷*Ibid.*, hlm. 14-15

²⁴⁸ Di antaranya Surat Ali Imrān ayat 159 dan Surat Asy-Syūra ayat 38

²⁴⁹ Badi`uzzamān Sa`id Nūrsi, *Shaiqalul Islām*, hlm. 510-514

²⁵⁰ Badi`uzzamān Sa`id Nūrsi, *Sīrah Dzātiyah*, hlm. 587

sebuah negara yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan kewajiban melaksanakan pelajaran syariat Islam, atau kebebasan yang tunduk kepada aturan-aturan syariat.²⁵¹

Kemerdekaan pribadi adalah hak setiap manusia. Termasuk dalam ini kemerdekaan berfikir, kemerdekaan menentukan pilihan keyakinan hidup, dan kemerdekaan menjalani hidup sesuai dengan keyakinan itu. Kemerdekaan pribadi ini dijamin oleh undang-undang sekaligus diatur agar ia tetap berada dalam bingkai aturan.

Sa'id Nursi menganggap bahwa selama ini kemerdekaan pribadinya telah “dirampas” oleh pemerintah dan menggantinya dengan penindasan. Ia tidak diberikan kesempatan untuk menjalankan kewajiban agamanya dan menyampaikan pemikirannya. Daripada hidup tidak merdeka, Sa'id Nursi memilih untuk mati berkalang tanah. Yang membuat tetap tabah dan bertahan adalah adanya pahala yang besar di jalan keimanan sesuai tingkat penderitaan.

إن حريتي في اداء واجبي هي أهم من كل شيء. فهي أول ركن من دستور حياتي. وأن سلب حريتي بحبائل الأوهام الكاذبة وتقييدها بقيود الاستبداد والطغيان يجعلني أمل الحياة ملاً شديداً حتى أفضل القبر على هذه الحالة فضلاً عن السجن والحبس. إلا ان الذي يشد أزرعي ويدفعني الى التحمل والصبر هو الثواب الذي يجزل بحسب المشقة في سبيل خدمة الايمان.

²⁵¹ Khadijah An Nabrawi, *Daur Rasāil An Nūr fi Yaqzhatil Ummah*, hlm. 295

ان على هؤلاء الذين لا يريدون ظلمي ان يردّوا عليّ حرّيتي ولا يمسوها بسوء. انني اتمكن
 أن أعيش من دون طعام ولكني لا يمكن ان اعيش من دون حرية.²⁵²

Kebebasan tidak berarti merdeka dari aturan, tenggelam dalam kebodohan dan kelezatan yang terlarang, berlebihan dan melampaui batas dalam segala sesuatu. Orang yang melakukan hal-hal ini sesungguhnya telah masuk dalam perbudakan nafsu dan kehilangan kecerdasan dan penguasaan diri. *Al Hurriyah Asy Syar'iyah* atau kemerdekaan berdasarkan syariat yang dimaksudkan Sa'id Nursi adalah kemerdekaan beragama, kemerdekaan berfikir dan menyampaikan pendapat, kemerdekaan berpolitik, dan kemerdekaan sipil. Logikanya, ketika negara memberikan jaminan berfikir kepada orang-orang ateis dan orang-orang bodoh menjalani kehidupan merdeka, maka sudah sepantasnya negara tidak mengganggu orang yang beragama dan bertaqwa dan memberikan mereka kemerdekaan seperti orang lain sebab agama adalah kepentingan mendasar bagi setiap umat.²⁵³

Tulisan Amar Djidel, Guru Besar Universitas Aljazair yang memaparkan tentang hakekat kebebasan dan kemerdekaan dalam pandangan *Rasāil An Nur*, menyatakan bahwa bagi para politisi dan para aktifis di seluruh dunia, kata kebebasan dan kemerdekaan menjadi isu yang selalu menarik untuk diangkat demi mendapatkan dukungan

²⁵²Said Nursi, *Al Malahiq; Mulhaq Amir Dâg*, hlm. 233

²⁵³Said Nursi, *Asy Syu'aat*, hlm. 417

massa. Kebebasan yang diangkat tersandera oleh makna-makna yang dipahami oleh para politisi dan aktivis tersebut dan terikat oleh kepentingan-kepentingannya. Sa'id Nursi mencoba mengembalikan makna kebebasan ini kepada makna yang sejati dengan memperhatikan banyak faktor terkait dengan individu dan sosial.²⁵⁴

Menurut Khadijah An Nabrawi, kebebasan yang diserukan oleh Nursi tegak dalam pilar-pilar berikut: *Pertama*, kebebasan beraqidah.²⁵⁵ *Kedua*, kebebasan berfikir dan berpendapat.²⁵⁶ *Ketiga*, kebebasan politik.²⁵⁷ Keempat, kebebasan sipil. Yang mencakup kebebasan melakukan jual beli, merasa aman dan terlindungi pada diri, harta, dan kehormatannya dari pembunuhan, ancaman, pencurian, terror, dan lainnya. Banyak hadits yang menjelaskan tentang hal ini, menunjukkan adanya sebuah kaedah dalam hal kebebasan jaminan hak-hak manusia dalam Islam.²⁵⁸ Maka berdasarkan prinsip kebebasan itu, Nursi mengkritik kebijakan pemerintah yang melarang orang memakai *qubba'ah* (peci khas Turki), padahal peci seperti ini digunakan oleh para tentara. Mengapa pemerintah menyiksanya seperti saat ini, padahal seorang peminum khamar pada siang hari Ramadhan dan tidak shalat atas nama kebebasan pribadi, tidak pernah

²⁵⁴ Amar Djidel. "Tahrirul Hurriyyah fi Rasāil An Nur" *Jurnal Al Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. VIII, No. XII, Bulan Juli 2015, hlm. 71-98.

²⁵⁵ Seperti yang disebutkan dalam Surat Al Kahfi ayat 39

²⁵⁶ Seperti yang disebutkan dalam Surat Al A'raf ayat 179

²⁵⁷ Seperti yang disebutkan dalam Surat Asy Syura ayat 38

²⁵⁸ Khadijah Nabrawi, *Daur Rasāil An Nūr*, hlm. 300

dipermasalahan.²⁵⁹ Nursi juga mengecam kebijakan para politikus yang mencabut hak-hak sipil dan kemerdekaannya sebagai warga negara, bahkan mencakup haknya untuk hidup. Ia diperlakukan seakan-akan seorang pembunuh ratusan orang. Mengurungnya dalam sel sendiri dan terpisah dari kerumunan orang lain selama 3,5 bulan. Bahkan dilarang bertemu dengan siapapun dan membaca buku-buku. Ia mendapatkan penghinaan yang berulang, hidup sendiri dan terasing. Semua ini menjadikannya muak dengan kemerdekaan yang terikat ini; yaitu kemerdekaan yang dibatasi oleh hukum dengan semangat kezaliman dan penindasan.²⁶⁰

d. Keadilan

Nursi melihat keadilan adalah tonggak kehidupan bermasyarakat. Sebuah peradaban akan tegak selama keadilan masih ditegakkan. Namun bila keadilan tidak lagi diindahkan dan yang berkembang adalah kezaliman, maka peradaban itu akan jatuh, pimpinannya akan tumbang, sementara masyarakatnya akan dipenuhi kesengsaraan.

Maka dalam al-Quran sangat ditekankan soal keadilan ini. Seperti yang disebutkan dalam Surah Al Maidah:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan

²⁵⁹Said Nursi, *Asy Syu'aat*, hlm. 453

²⁶⁰*Ibid.*

janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."²⁶¹

Sa'id Nursi bahkan menyatakan bahwa salah satu di antara 4 Maqashid Al Quran, yaitu: Tauhid, Nubuwwah, Kebangkitan, dan Keadilan.²⁶²

Sa'id Nursi membedakan dua pengertian dari konsep ini pada penerapannya: Pertama, "keadilan absolut" (*Al 'adalah al Mahdah*). Yaitu penerapan keadilan tanpa menghilangkan hak siapa pun, dan tidak peduli betapa kecilnya hak mereka atau betapa tidak penting atau tidak praktisnya hak tersebut; Kedua, "keadilan relatif" (*Al Adalah Al Idhafiyyah*) yang lebih memperhatikan penerapan praktis dari persoalan tersebut, sehingga menghilangkan hak-hak individu yang tidak penting dengan persetujuannya.²⁶³

²⁶¹ QS. Al Maidah: 8

²⁶² Said Nursi, *Al Kalimât*, hlm. 525

²⁶³ Said Nursi, *Al Maktûbât*, hlm. 55-56

e. Persamaan

Di hadapan hukum, semua manusia sama. Tidak ada seorang yang lebih baik dari pada yang lain. Maka sikap merasa lebih dan merasa rendah diri sangat dilarang dalam Islam. Satu-satunya yang melebihi satu orang dari yang lain di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Hal ini sangat jelas disebutkan dalam Surah Al-Hujurat:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”²⁶⁴.

Persamaan adalah dasar keadilan. Sa'id Nursi menyebutkan bahwa ada 4 macam model persamaan manusia. Pertama, persamaan dalam nilai kemanusiaan (*Al Musâwâh fî Al Qîmah Al Insâniyyah Al Musytarakah*). Kedua, persamaan dalam hukum (*Al Musâwâh baina Al Hukkâm wal Al Mahkûmîn*). Ketiga, persamaan dalam tanggungjawab dan balasan (*Al Musâwâh fî Asy Syu'ûn Al Mas'ûliyyah wa Al Jazâ'*). Keempat, persamaan dalam hak-hak sipil (*Al Musâwâh fî Al Huqûq Al Madaniyyah*).

²⁶⁴ QS. Al Hujurat: 13

Berdasarkan asalnya, semua manusia berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam berasal dari tanah. Adanya perbedaan negara dan suku bangsa tujuannya adalah untuk saling kenal mengenal satu sama lain, saling tolong menolong dan saling mencintai. Bukan untuk saling membenci dan bermusuhan.²⁶⁵

Di hadapan hukum, semua manusia itu sama. Termasuk pemerintah, hakim, dan pelaku hukum itu sendiri. Penerapan hukum yang tegas kepada orang lain, tajam ke bawah tumpul ke atas, bertentangan dengan prinsip hukum dan tidak sesuai dengan prinsip persamaan di antara manusia.²⁶⁶

f. Persatuan dan Nasionalisme

Dalam pidato *Huriyete Hitap* (Pidato Untuk Kebebasan),²⁶⁷ Badi`uzzamān Sa`īd Nursi menyebutkan bahwa persatuan adalah satu satu pintu dari lima pintu surga kemajuan dan peradaban. Lima pintu atau lima prinsip yang harus dihayati sebuah bangsa agar surga bisa dicapai. Pintu pertama, persatuan hati. Yaitu dengan mempertahankan kesadaran tentang persatuan dan integritas Utsmani, khususnya dalam kaitannya dengan kaum nasionalis dan adanya gerakan separatis. Pintu kedua, cinta bangsa. Yaitu setiap individu masyarakat harus menyadari kebangsaan mereka dan menjaga cinta antara satu dengan lainnya. Pintu ketiga, pendidikan. Yaitu

²⁶⁵ Said Nursi, *Shaiqal Al Islām*, hlm. 335

²⁶⁶Said Nursi, *Al Lama`at*, hlm. 360

²⁶⁷ *Huriyete Hitap* adalah pidato pembelaan yang disampaikan oleh Badi`uzzamān Sa`īd Nursi di depan Mahkamah Militer setelah kejadian 31 Maret. Pidato ini disampaikan sekitar tahun 1909 M. *Sīrah Dzātiyah*, hlm. 32

dengan meningkatkan pendidikan bangsa sampai kepada titik yang memuaskan. Pintu keempat, daya upaya manusia. Yaitu memberikan jaminan kepada setiap orang untuk mendapat pekerjaan dan menerima gaji yang adil dari pekerjaannya. Pintu kelima, menghentikan pemborosan, yang berarti menghentikan kebiasaan pamer dan berlebihan di tengah masyarakat (sebagaimana kebiasaan para pejabat pada saat itu). Sebab hal itu akan mengakibatkan perpecahan.²⁶⁸

Nursi berpandangan bahwa batasan demarkasi teritorial adalah faktor utama dalam integrasi bangsa setelah agama, bahasa, nasionalisme dan rasa kebangsaan. Rasa nasionalisme ini akan menjadi positif dan merupakan kekuatan bangsa ketika ia muncul dari kebutuhan anggota masyarakat yang melahirkan sikap gotong royong dan rasa solidaritas yang tinggi. Dalam keadaan seperti ini, maka nasionalisme menjadi benteng dan perisai serta menjadi salah satu faktor dinamis untuk memperkuat persaudaraan Islam.²⁶⁹

g. Jihad

Jihad—dalam pengertiannya yang luas—adalah pilar utama dalam politik islami untuk menjaga kemuliaan, negeri, kekayaan, kemuliaan,

²⁶⁸ Şükran Vahide, *Islam in Modern Turkey; An Intellectual Biography of Bediuzzaman Said Nursi*, hlm. 54

²⁶⁹ Badi'uzzamān Sa'īd Nūrsi, *Al Maktūbāt*, (Kairo: Sözlər Publications, 2013), hlm. 334

dan yang paling penting menjaga akidah dan kehidupan umat Islam.²⁷⁰ Jihad dalam Islam memilih kaedah yang terstruktur dengan teliti. Prinsipnya berasal dari keadilan, kasih sayang, dan kemuliaan Islam. Jadi jihad bukan kekuatan yang didorong hawa nafsu, tetapi kekuatan untuk mewujudkan perdamaian dan memberikan kekuatan dan wibawa kepada keputusan-keputusan politik pemerintah.²⁷¹

Nursi melihat bahwa jihad mengangkat senjata adalah kewajiban setiap muslim untuk mewujudkan kemuliaan dan wibawa mereka saat negeri dan hartanya dalam ancaman musuh. Untuk mewujudkan negara yang mulia dan berwibawa seperti ini, perlu adanya semangat perjuangan dan siap berkorban dari setiap individu dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Prinsip-prinsip politik ini ia tuliskan dalam *Kulliyāt Rasā'il An Nūr* dengan rinci, lengkap dengan bentuk negara yang ia cita-citakan. Yaitu negara yang berlandaskan iman kepada Allah, dijalankan dengan dengan sistem musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan dan jihad.

Namun di saat damai seperti ini, bentuk jihad yang dilakukan bukan dengan mengangkat senjata, tapi jihad ilmu yang disertai dengan bukti dan argumentasi untuk menunjukkan keindahan dan kemuliaan Islam. Jihad moral (*Al Jihad Al Maknawi*) adalah salah satu jenis jihad

²⁷⁰Khadijah An Nabrawi, *Daur Kulliyat Rasâil An Nûr*, (Mesir: Sozler Publications 1998), hlm. 302

²⁷¹*Ibid.*

terbesar di era ini dan bukan lahir dari ketakutan atau kepengecutan. Sebab tujuan jihad adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Jihad fisik dengan harta dan jiwa memiliki status yang tinggi dalam Islam saat ada perintah untuk melakukannya. Namun di zaman ilmu pengetahuan dan kebudayaannya yang sudah maju seperti saat ini ini, jihad yang disyariatkan adalah menunjukkan realitas Islam dengan argumentasi yang meyakinkan dan bukti-bukti yang terang, disertai dengan semangat untuk kemajuan yang beradab. Sehingga orang-orang pun paham tentang keindahan, kebaikan, keluhuran akhlak dalam Islam, dan bahwasanya Islam adalah penguasa segala kesempurnaan dan sumber peradaban.

Nursi menyatakan:

و في زمن عجيب كزماننا هذا، لا بد من تطبيق خمسة أسس ثابتة، حتى يمكن إنقاذ البلاد وإنقاذ الحياة الاجتماعية بأبنائها من الفوضى والانقسام. وهذه المبادئ هي: الاحترام المتبادل والشفقة والرحمة والابتعاد عن الحرام والحفاظ على الأمن و نيل الفوضى والغوغائية، والدخول في الطاعة. والدليل على أن رسائل النور في نظرتها إلى الحياة الاجتماعية قد ظلت تثبت وتُحكّم هذه الأسس الخمسة وتحترمها احتراماً جاداً محافظةً بذلك على الحجر الأساس لأمن البلاد، هو أن رسائل النور قد استطاعت في مدى عشرين عاماً أن تجعل أكثر من مائة ألف رجل أعضاء نافعين للبلاد والعباد دون أن يتأذى أو يتضرر بهم أحد من

الناس²⁷²

“Dan dalam masa yang menakjubkan seperti waktu kita saat ini, perlu menerapkan lima fondasi yang kokoh, sehingga dapat menyelamatkan negara dan kehidupan sosial masyarakat dari berbagai kekacauan. Kelima

²⁷² Said Nursi, *Asyu'aat*, (Kairo: Sözler Publications, 2019), hlm. 384

fondasi jihad moral itu adalah: saling menghormati, berkasih sayang dan belas kasihan, menjauhi yang dilarang, menjaga keamanan, menghindari kekacauan dan hasutan, dan selalu berada dalam ketaatan. Kelima prinsip ini berdampak positif bagi tercapainya keamanan tanah air. Dan dengan prinsip-prinsip ini, Risa'il Al-Nur telah mampu, selama dua puluh tahun, untuk membuat banyak siswanya bermanfaat bagi negara dan masyarakat tanpa menyebabkan kerugian bagi negara sedikitpun”

Menurut Prof. Faisal Ismail, bentuk negara Turki yang ada saat ini, adalah perwujudan dari gagasan Nursi tentang jihad moral yang dikemas dalam konsep *Republik Religius* tersebut; yaitu tentang penerapan nilai-nilai Islam dengan kemasan esensialitas²⁷³ secara nasional dan menjadi identitas negara, diikuti pembangunan di segala bidang dan kepedulian pada berbagai isu internasional mengenai Islam dan kaum muslimin. Secara formal konstitusional, Turki adalah negara sekuler. Tetapi secara real, 99% rakyat Turki beragama Islam. Ini berarti sekularisme di Turki hanya merupakan balutan formalitas, sedang Islam merupakan kemasan esensialitas.²⁷⁴

²⁷³ Faisal Ismail, *Studi Islam Kontemporer*, (Yogyakarta; IRCiSoD, 2018), hlm. 123

²⁷⁴ Wawancara dengan Prof Faisal Ismail di kediaman beliau di Yogyakarta, 13 November 2020.

2. Studi Komparatif Pemikiran Siyāsah Syar’iyyah Said Nursi Dengan Pemikiran Politik Presiden Soekarno

Berdasarkan telaah pemikiran Badiuzzaman Sa’id Nursi, penulis mendapatkan relevansi yang sangat kuat antara nilai-nilai Pancasila yang digagas oleh Soekarno dan disempurnakan oleh Tim BPUPKI dan gagasan *Siyāsah Syar’iyyah* yang disampaikan oleh Badiuzzaman Sa’id Nursi dalam karyanya, *Rasāil An Nūr*.

Berikut ini pembahasannya:

a. Prinsip Ketuhanan

Menurut Sa’id Nursi, dalam menyelesaikan permasalahan umat yang paling penting untuk diperbaiki adalah keyakinan dan keimanannya. Itulah akar utama perbaikan. Sebab bila pandangan umat ini sudah terlalu silau ke barat yang sekuler, maka ia akan membela apa yang tampak indah di hadapan matanya, walaupun kenyataan tidak demikian. Maka cara pandang itu yang harus diubah, memperhatikan asma Allah di alam semesta, menghadirkan tuntunan ilahi dalam menjawab tantangan zaman, menghadirkan agama dan keimanan dalam kehidupan. Bagi ini Nursi, tugas paling penting zaman ini adalah *inqādzul Imān*: menyelamatkan keimanan dari berbagai propaganda.²⁷⁵

Berikut ini adalah cara pandang tentang ketuhanan dan alam kehidupan yang disampaikan oleh Sa’id Nursi:

²⁷⁵ Badiuzzaman Said Nursi, *Al Malāhiq*, hlm. 108

(1) Alam Semesta Adalah Milik Allah Swt.

Badi`uzzamān Sa`īd Nursi menjadikan pembahasan tentang Iman dan Tauhid menjadi pembahasan utama dalam kitab Rasail Nur. Pada banyak bagian, Nursi menegaskan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah dan bagian dari kerajaannya. Alam semesta dan jagad raya yang terbentang indah ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Di balik semua yang ada pasti ada yang mencipta dan mengatur urusannya dengan sangat teliti dan sebaik-baiknya. Dialah Allah Swt. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan telah mengatur rangkaian kejadian yang kehidupan berbagai makhluk hidup di alamnya masing-masing dengan pengaturan yang bijaksana dan mengagumkan.

Semua entitas yang ada adalah milik Sang Mahakuasa dan Maha Penyayang itu. Dia yang Esa tidak memerlukan kehadiran siapapun dalam mengelola ciptaanNya ini. Dia berbuat apa pun sekehendakNya, sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaanNya. Dia memberi kesempatan kepada makhlukNya untuk memanfaatkan dan mengelola sedikit sumber daya dari kekuasaanNya untuk kelangsungan hidup mereka. Lebih dari itu, Dialah yang menjamin rezeki seluruh makhluk hidup yang ada, sejak ia mati sampai akhirnya ia kembali berkalang tanah.

Badi`uzzamān Sa`īd Nursi menyatakan,

إن السموات والارض والدنيا والآخرة وكل موجود، من الفرش الى العرش، من الثرى الى الثريا، من الذرات الى السيارات، من الازل الى الابد هو ملكه. فله سبحانه المرتبة العظمى للمالكية التي تتجلى في أعظم مرتبة للتوحيد²⁷⁶

Sesungguhnya langit dan bumi, dunia dan akhirat, seluruh wujud di alam semesta, dari debu sampai arasy, dari kerikil sampai bintang kejora yang tinggi, dari partikel kecil sampai galaksi, dari zaman azali sampai yang abadi, adalah miliknya dan bagian dari kerajaannya. Dia, Allah, memiliki kerajaan yang sangat agung yang mewujud pada tingkatan tauhid yang paling agung.

(2) Alam Semesta Adalah Penerjemahan dari Asmaul Husna

Seluruh ciptaan Allah ini, kata Nursi, menunjukkan *Asmā'ul Husnā*, nama-namanya yang Indah. Dari kitab semesta yang terbentang, kita belajar ayat-ayat penciptaan yang menunjukkan keberadaan Allah dan keesaanNya, juga menunjukkan sifat-sifatNya yang sempurna, indah, dan perkasa, bersih dari segala cela dan kekurangan.²⁷⁷

Ketika kita mengangkat kepala, kita akan dapat menyaksikan bukti keesaan itu dengan jelas dan agung, yang mencakup benda di jagad raya, yang terangkai dalam sebuah laboratorium alam dan pilar dari sebuah istana yang besar.

²⁷⁶Badi'uzzamān Sa'id Nursi, *Al Maktūbāt*, hlm. 285

²⁷⁷Badi'uzzamān Sa'id Nūrsi, *Al Kalīmāt*, hlm. 343

Sebagaimana kehidupan yang sangat teratur ini menjadi perwujudan dari keindahan ilahi yang menegaskan keesaanNya, maka kematian hadir untuk menegaskan keperkasaan-Nya.²⁷⁸

Lingkup kekuasaan dan keperkasaan itu, hadirnya sebab hanya untuk menjadi hijab kehendak ilahi yang agung. Sebab-sebab yang ada di alam semesta ini dengan jumlah yang beragam dan bermacam-macam adalah untuk menjaga keadilan Tuhan dari pandangan teoritis akal pikiran dan keluhan-keluhan yang muncul dari hati yang tidak sabar. Keberadaan makhluk di jagad raya ini adalah perwujudan dari nama-nama dari Zat Pencipta dan Maha Kuasa dan bukti dari pekerjaanNya²⁷⁹

(3) Tauhid Adalah Pondasi Dasar Kehidupan.

Lebih lanjut Nursi menyatakan bahwa bahwa pada segala entitas kehidupan terdapat minimal dua bukti kekuasaan, yaitu: bukti keesaan Sang Pencipta dan bukti ketergantungan entitas itu pada penciptaNya (*Ayat Al Ahādiyyah* dan *Ayat Ash Samadaniyyah*).²⁸⁰ Tanda-tanda kekuasaan Allah ini akan mengantarkan pada keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa atau tauhid.

²⁷⁸*Ibid.*, hlm. 342

²⁷⁹*Ibid.*, hlm. 326

²⁸⁰*Ibid.*, hlm. 333

Nursi membagi tauhid ini menjadi dua, yaitu *tauhid taqlidi* dan *tauhid haqiqi*. *Tauhid taqlidi* adalah keyakinan bahwa Allah itu Esa, tidak ada sekutu bagiNya dan bahwa seluruh alam semesta ini adalah bagian dari kerajaanNya. Sementara *tauhid haqiqi* adalah iman penuh keyakinan dengan keesaanNya, bahwa segala sesuatu terlahir dari tangan kekuasaanNya, tidak ada sekutu baginya dalam *ulūhiyah* dan tidak ada berserikat denganNya dalam *rubūbiah*. Sebuah keyakinan yang memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hati pemiliknya sebab ia mampu melihat ayat kekuasaanNya dan stempel kemahaagunganNya dalam segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu itu terbuka menjadi jendela yang mengantarkan kepada cahayaNya.²⁸¹

(4) Agama Hadir Untuk Mengatur Kehidupan

Pada praktiknya, agama hadir untuk mengatur kehidupan. Sebab, kata Nursi, Zat yang telah menciptakan alam semesta Yang Mahaagung dan Sempurna ini, Dia juga yang menurunkan hukum-hukum kehidupan yang terkandung dalam ajaran-ajaran agama yang baik dan indah.

²⁸¹*Ibid*, hlm. 326

إن ناظم الكائنات بهذا النظام الأتم الأكمل هو ناظم هذا الدين بهذا النظام الأحسن
الأجمل²⁸²

Keyakinan tauhid ini pada akhirnya akan mengubah cara pandang, tidak hanya pada kehidupan, tapi pada kematian. Kematian tidak lagi menjadi sebuah akhir kehidupan, menjadi kesia-siaan, atau perpisahan yang abadi. Kematian menjadi hiburan dari Zat yang Maha Bijaksana dan Maha Penyayang, menjadi saat perpindahan tempat menuju negeri keabadian yang merupakan kampung halaman. Kematian juga menjadi pintu penghubung dengan alam barzakh; sebuah alam yang mengumpulkan 99% para kekasih dan orang-orang tercinta²⁸³

Berkaitan dengan kehidupan bangsa Indonesia, Ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila yang paling mendasar dalam kehidupan bangsa. Hal itu karena salah satu karakter Bangsa Indonesia, kata Ir. Soekarno, adalah selalu hidup di alam pemujaan yang kepadanya mereka menaruh segenap harapan dan kepercayaan. Mereka percaya kepada satu zat yang baik, yaitu Tuhan. Ini adalah *de grootste gemene deler* dan *de kleinste gemene veelvoud*, atau corak umum masyarakat Indonesia. Ketika kita tidak memakai ketuhanan sebagai satu alat pengikat elemen bangsa, kata Bung Karno, maka kita menghilangkan atau

²⁸²*Ibid.*, hlm. 345

²⁸³Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi, *Al Maktūbāt*, hlm. 278

membuang satu elemen yang *bindend*, bahkan masuk betul-betul di dalam jiwanya bangsa Indonesia. Kita akan akan kehilangan *leitstar* kita yang utama menjadi bangsa yang mengejar kebajikan, bangsa yang mengajak kebaikan. Itulah sebabnya di dalam Pancasila, elemen ketuhanan ini dimasukkan dengan nyata dan tegas.²⁸⁴

Keberadaan bangsa dan masyarakatnya merupakan satu jiwa yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu cita-cita maupun semangat dalam menggapai cita-cita, harus dipikirkan dan diterapkan dengan dasar statis atau dasar dinamis bagi suatu bangsa tidak boleh keluar dari hal-hal yang berada di luar jiwa bangsa dan masyarakatnya. Begitu pula dengan keberadaan sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari dulu sampai detik ini perihal ketuhanan adalah bagian dari jiwa bangsa dan masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan.

Kenyataan tersebut menurut Soekarno tidak lepas dari bagaimana karakter bangsa Indonesia dari zaman ke zaman –sejak zaman pra hindu, hindu, hingga Islam— memiliki kultur dan agama kepercayaan. Di zaman hadirnya Islam di Nusantara misalnya, dalam bidang politik kita telah memiliki negara Demak

²⁸⁴Pidato Bung Karno pada kursus Pancasila di depan kader-kader Pancasila pada tanggal 26 Mei 1958 di Istana Negara, Jakarta. Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, (Yogyakarta; Media Pressindo, Cetakan Keempat, 2019) hlm. 90-134

Bintoro, negara Pajang, negara Mataram Islam. Dengan demikian, Sila Pertama dalam Pancasila, yakni Ketuhanan, merupakan salah satu karakter, corak, dan jiwa dari rakyat bangsa Indonesia yang tidak bisa dilepaskan, bahwa bangsa Indonesia selalu hidup di dalam alam pemujaan dalam hal menaruh segala harap dan keyakinannya. Inilah menjadi bukti, secara sosiologis bahwa bangsa Indonesia hidup di dalam alam Ke-Tuhanan. Karena sampai hari ini kita masih menemukan tempat-tempat yang di masa lalu digunakan sebagai permohonan, tempat kepercayaan.²⁸⁵

Jika kita menarik jauh sejarah kepercayaan rakyat Indonesia, menurut Soekarno, maka kita akan menemukan beberapa fase di mana mereka memiliki pemahaman dengan menganggap Tuhan mereka adalah gunung, sungai, petir, dan lain-lain. Kemudian masuk fase kedua di mana kepercayaan atau Tuhan mereka berpindah kepada binatang, pepohonan dan bebatuan. Kemudian fase kepercayaan itu diubah menjadi dewa dan dewi dalam agama hindu, dan Allah dalam agama Islam. Namun, hakikatnya dari semua itu, secara garis besar bahwa masyarakat Indonesia percaya pada adanya satu zat yang baik, yaitu Tuhan. Itulah mengapa Soekarno mengatakan, bahwa rakyat Indonesia adalah satu, memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Maka dari itu pemakaian kata Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu

²⁸⁵Soekarno, *Pantja Sila Dasar Negara* (Jawa Tengah, Sabua Buku, 2020), hlm. 54-61

alasan mendasar pengerat dan dapat diterima oleh masyarakat beragama di Indonesia. Dalam artian, jika sila Ketuhanan ini hilang dari Pancasila, sama artinya kita telah mengeluarkan diri dari karakter dan kepribadian jiwa bangsa Indonesia yang paling utama, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan.²⁸⁶

Berdasarkan penuturan Nursi dan Soekarno ini kita dapat melihat adanya satu keyakinan yang sama tentang pentingnya membentuk sebuah negara yang religious (*religious nation state*) dengan menjadi prinsip ketuhanan menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga memiliki keterikatan yang kuat dengan keyakinan dan kepercayaan yang ia anut dan tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti ketuhanan dan anti keagamaan. Perbedaannya adalah pada tuhan yang dimaksudkan dan agama yang dituju. Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi dengan tegas menyampaikan bahwa keyakinan yang ia maksud adalah kepercayaan kepada Allah Swt. dan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip ajaran Islam. Sementara Soekarno ketika berbicara tentang “Ketuhanan,” ia tidak merujuk secara eksklusif dan eksplisit pada agama tertentu. Sila ketuhanan ini ia maksudkan sebagai

²⁸⁶Soekarno, *Pantja Sila Dasar Negara...*, hlm. 70-74

payung bersama bagi semua agama untuk menegakkan toleransi, kerukunan, dan harmoni antara umat beragama.²⁸⁷

(4) Agama dan Negara Memiliki Hubungan Erat

Berkaitan dengan hubungan agama dan negara, Nursi memandang bahwa semangat Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjiwai seluruh sendi kehidupan, termasuk di dalamnya institusi pemerintah dan aktifitas politik, dan tidak boleh dipisahkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Sa'id Nursi di hadapan anggota parlemen saat ia diundang oleh Ketua Dewan Parlemen Nasional, Mustafa Kemal Atatürk, pada bulan Januari 1923 ke Ankara. Ia menyaksikan sendiri sikap para anggota parlemen yang menyepelkan agama karena taqlid buta kepada barat dan merasa rendah diri dengan *syi'ar* Islam yang merupakan kebanggaan sejarah bagi masyarakat Turki.

Nursi berusaha memberikan penjelasan tertulis kepada anggota parlemen tentang pentingnya berpegang teguh dengan ibadah, terutama shalat. Dalam penjelasannya kepada anggota parlemen ini, Badiuzzaman Sa'id Nursi menyampaikan 10 nasehat penting,²⁸⁸ di antaranya adalah meminta mereka bersyukur atas nikmat ilahi dengan adanya kemenangan pada perang kemerdekaan

²⁸⁷Faisal Ismail, *Studi Islam Kontemporer...* hlm. 42

²⁸⁸Penjelasan ini dibagikan oleh Badiuzzaman Said Nursi pada 19 Januari 1923 kepada anggota parlemen Turki di Ankara. *Sīrah Badi'izzamān* hlm. 179

melawan penjajah para Perang Dunia I. Nikmat ini kalau tidak diterima dengan kesyukuran maka ia akan hilang. Cara mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan menjalankan perintah Allah, terutama shalat yang menjadi kewajiban tertinggi.

Kemuliaan seorang pejabat di mata rakyat, kata Nursi, adalah ketika ia taat agama. Dan itu dibuktikan dengan kesetiaannya menjaga shalat. Di saat seperti itu ia akan mendapatkan kepercayaan dari kalangan rakyat. Merekalah yang selama menjadi pendukung utama, memberikan loyalitas dengan penuh kecintaan, dan menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh pemerintahannya. Sementara kelalaian dalam hal ini, tegas Nursi, akan menjadi pintu masuk bagi penjajah untuk memanfaatkan kelemahan ini. Loyalitas kepada barat dengan peradabannya yang mulai retak dan tumbang, mengekor kepada Prancis dan Eropa yang memutus hubungan dengan agama dan umat Islam, akan menghilangkan kepercayaan rakyat dan membuat mereka memalingkan wajah. Apalagi para musuh terus berusaha dan bekerja menghancurkan syi'ar Islam. Dalam keadaan demikian, maka tugas yang paling utama adalah menghidupkan syi'ar Islam. Kalau tidak, maka hal tersebut dapat menyebabkan kelemahan umat.²⁸⁹

²⁸⁹*Sīrah Badi'izzamān* hlm. 175-181

Penjelasan Sa'id Nursi ini telah menyebabkan sekitar 60 orang anggota parlemen istiqamah melaksanakan shalat ditambah dengan mereka yang sebelumnya sudah rutin melaksanakannya. Jumlah ini terus bertambah sampai mereka membuat satu musholla besar untuk shalat, setelah sebelumnya hanya berupa satu ruang kecil.

Hal ini mengakibatkan kemarahan ketua parlemen, Mustafa Kemal Atatürk. Di hadapan Sa'id Nursi dan anggota parlemen lainnya, ia menyatakan, "*Biz seni buraya çağırđık ki, bize yüksek fikirler beyan edesin. Sen geldin namaza dair şeyler yazdın, içimize ihtilaf verdin*" (Kami telah memanggil Anda ke sini agar Anda dapat mengungkapkan pendapat yang tinggi kepada kami. Anda malah datang menulis tentang shalat, membuat kami tidak setuju).

Nursi menjawab, "*İmandan sonra en yüksek namazdır. Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduddur*" (Sesungguhnya hakikat tertinggi dalam Islam setelah iman adalah shalat. Orang yang tidak shalat adalah pengkhianat, dan penilaian seorang pengkhianat adalah tertolak).²⁹⁰

Perbedaan pendapat tentang persoalan keagamaan ini ternyata tidak berhenti sampai di sini. Mustafa Kemal terus berusaha meletakkan pondasi dasar sekularisme dalam kehidupan

²⁹⁰ *Terihçe-I Hayat*, hlm. 579

Turki modern. Keinginan dan ambisi politik Atatürk yang menerapkan sekularisme (memisahkan urusan agamawi dari urusan duniawi; memisahkan urusan agama dari urusan negara dalam konteks politik dan kenegaraan) telah menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dari sikapnya yang keras menentang ekspresi kebudayaan Islam yang terdapat pada masyarakat Turki. Pemakaian huruf arab dilarang dan negara memaksa rakyat untuk menggunakan abjad latin. Lafazh azan dalam bahasa Arab diganti dengan lafazh azan dalam bahasa Turki. Pakaian tradisional Islam yang telah mengakar di masyarakat dilarang. Sebagai gantinya, ia menerapkan aturan berpakaian meniru dan mencontoh barat²⁹¹

Hal ini terjadi karena Kemal Atatürk sangat mengagumi gebyar kemajuan barat dan mengidentikkan setiap kemajuan dan kemoderenan selalu datang dari barat. Pembangunan dan modernisasi di Turki ini, kata Prof. Faisal Ismail, pada hakikatnya adalah westernisasi yang bercampur dengan sekularisasi. Westernisasi dan sekularisasi adalah kembar siam yang tidak dapat dipisahkan. Dimana ada ada westernisasi, sekularisasi otomatis tumbuh dan berkembang.²⁹²

²⁹¹ Faisal Ismail, *Studi Islam Kontemporer*, (Yogyakarta; IRCiSoD, 2018), hlm. 112

²⁹² *Ibid.* hlm. 110

Sikap ateisme dan menjauhi agama seperti ini, kata Nursi, benar-benar menyebabkan permasalahan di kalangan masyarakat Eropa sendiri dan membolakbalikkan keadannya. Dari situ lahir berbagai organisasi yang membuat kekacauan, menghancurkan dan menyasatkan. Selama tidak kembali ke hakikat syariat agung dan tidak berusaha menghentikan penyimpangan organisasi itu, maka organisasi-orinisasi itu justru akan menghancurkan kota dan peradaban mereka.²⁹³

Pada kenyatannya, modernisasi (pembangunan) tidak sama dengan westernisasi (pembaratan)²⁹⁴ dan sekularisasi (pemisahan antara agama dan dunia). Bahkan sebenarnya, modernisasi tidak memerlukan westernisasi dan sekularisasi. Ini terbukti terjadi di negara-negara yang maju dan berkembang tanpa usaha pembaratan. Misalnya, India tetap bercorak dan beridentitas Hindu, Jepang bercorak dan berjati diri sinto, dan China bertradisi dan berbudaya khas China. Mereka terus maju dan berkembang, tanpa perlu cangkakan westernisasi dan sekularisasi dalam progam

²⁹³ Badiuzzaman Said Nursi, *Shaiqalul Islām*, hlm. 51.

²⁹⁴ Modernisasi tentu beda dengan westernisasi. Sidi Gazalba mengemukakan perbedaan yang sangat fundamental antara sistem nilai budaya Barat dan sistem budaya Islam. Sistem budaya Barat bersendi pada individualisme dalam kehidupan sosial, kapitalisme dan pragmatisme dalam ekonomi, machiavalisme dan imprealisme dalam politik, hedonisme dan *l'art pour l'art* dalam seni, agnotisme dan trinitisme (kadang-kadang ateisme) dalam agama, sekularisme dan materialisme dalam politik (Faisal Ismail, *Studi Islam Kontemporer*, hlm. 90)., Sementara sistem nilai Islam bertumpu pada keseimbangan antara individualise dan kolektivisme dalam kehidupan sosial, keseimbangan antara kapitalisme dan sosialisme dalam ekonomi, *amar makruf* dan *nahi munkar* dalam politik, tauhid dalam agama, dan takwa dalam pandangan hidup (Faisal Ismail, *Studi Islam Kontemporer* hlm. 96)

pembangunan dan modernisasi negara mereka.²⁹⁵ Artinya, usaha modernisasi tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan Islam sangat mendorong dan menggalakkan pembangunan, tetapi bukan pembaratan. Dan tidak perlu ada pemisahan antara hal-hal agama dengan dunia. Sebab dalam Islam semua rangkaian pekerjaan seseorang adalah bagian dari rangkaian ibadah kepada Tuhan.

Sejalan dengan pandangan Nursi tentang pentingnya kehadiran agama dalam negara, Presiden Soekarno memandang bahwa Ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila yang paling mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal itu karena salah satu karakter Bangsa Indonesia, kata Soekarno, adalah selalu hidup di alam pemujaan yang kepadanya mereka menaruh segenap harapan dan kepercayaan. Mereka percaya kepada satu zat yang baik, yaitu Tuhan. Ini adalah *de grootste gemene deler* dan *de kleinste gemene veelvoud*, atau corak umum masyarakat Indonesia. Ketika kita tidak memakai ketuhanan sebagai satu alat pengikat elemen bangsa, kata Bung Karno, maka kita menghilangkan atau membuang satu elemen yang *bindend*, bahkan masuk betul-betul di dalam jiwanya bangsa Indonesia. Kita akan akan kehilangan *leitstar* kita yang utama menjadi bangsa yang mengejar kebajikan, bangsa yang mengajak kebaikan. Itulah sebabnya di dalam

²⁹⁵ *Ibid.* hlm. 98-99

Pancasila, elemen ketuhanan ini dimasukkan dengan nyata dan tegas.²⁹⁶

Keberadaan bangsa dan masyarakatnya merupakan satu jiwa yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu cita-cita maupun semangat dalam menggapai cita-cita, harus dipikirkan dan diterapkan dengan dasar statis atau dasar dinamis bagi suatu bangsa tidak boleh keluar dari hal-hal yang berada di luar jiwa bangsa dan masyarakatnya. Begitu pula dengan keberadaan sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari dulu sampai detik ini perihal ketuhanan adalah bagian dari jiwa bangsa dan masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan.

Kenyataan tersebut menurut Soekarno tidak lepas dari bagaimana karakter bangsa Indonesia dari zaman ke zaman –sejak zaman pra hindu, hindu, hingga Islam— memiliki kultur dan agama kepercayaan. Di zaman hadirnya Islam di nusantara misalnya, dalam bidang politik kita telah memiliki negara Demak Bintoro, negara Pajang, negara Mataram Islam. Dengan demikian, Sila Pertama dalam Pancasila, yakni Ketuhanan, merupakan salah satu karakter, corak, dan jiwa dari rakyat bangsa Indonesia yang tidak bisa dilepaskan, bahwa bangsa Indonesia selalu hidup di dalam alam pemujaan dalam hal menaruh segala harap dan

²⁹⁶Pidato Bung Karno pada kursus Pancasila di depan kader-kader Pancasila pada tanggal 26 Mei 1958 di Istana Negara, Jakarta. Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, (Yogyakarta; Media Pressindo, Cetakan Keempat, 2019) hlm. 90-134

keyakinannya. Inilah menjadi bukti, secara sosiologis bahwa bangsa Indonesia hidup di dalam alam Ketuhanan. Karena sampai hari ini kita masih menemukan tempat-tempat yang di masa lalu digunakan sebagai permohonan, tempat kepercayaan.²⁹⁷

Jika kita menarik jauh sejarah kepercayaan rakyat Indonesia, menurut Soekarno, maka kita akan menemukan beberapa fase di mana mereka memiliki pemahaman dengan menganggap Tuhan mereka adalah gunung, sungai, petir, dan lain-lain. Kemudian masuk fase kedua di mana kepercayaan atau Tuhan mereka berpindah kepada binatang, pepohonan dan bebatuan. Kemudian fase kepercayaan itu diubah menjadi dewa dan dewi dalam agama hindu, dan Allah dalam agama Islam. Namun, hakikatnya dari semua itu, secara garis besar bahwa masyarakat Indonesia percaya pada adanya satu zat yang baik, yaitu Tuhan. Itulah mengapa Soekarno mengatakan, bahwa rakyat Indonesia adalah satu, memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Maka dari itu pemakaian kata Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu alasan mendasar penggerak dan dapat diterima oleh masyarakat beragama di Indonesia. Dalam artian, jika sila Ketuhanan ini hilang dari Pancasila, sama artinya kita telah mengeluarkan diri dari

²⁹⁷Soekarno, *Pantja Sila Dasar Negara...*, hlm. 54-61

karakter dan kepribadian jiwa bangsa Indonesia yang paling utama, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan.²⁹⁸

Dalam konteks keindonesiaan, prinsip dasar ketuhanan ditegaskan kembali dalam pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945, bahwa negara berkewajiban memfasilitasi, melindungi, dan menjamin kemerdekaan warganya untuk memeluk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pelaksanaan ajaran agama ini harus dilaksanakan dengan penuh toleransi dan berkeadaban, disamping peran aktif pemerintah menyelenggarakan dialog antar umat beragama.²⁹⁹ Peraturan ini antara lain tertuang dalam Pasal 28E, yang menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

²⁹⁸Soekarno, *Pantja Sila Dasar Negara...*, hlm. 70-74

²⁹⁹ Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, *Empat Pilar MPR RI* (Jakarta; Sekretariat Jenderal MPR RI, Cetakan Ketujuh, 2017) hlm. 50-51

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 29 dalam kedua ayatnya menegaskan bahwa bahwa negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan memberikan jaminan kepada seluruh warga negara untuk beribadat sesuai kepercayaan masing-masing.

Pasal 29

(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan uraian ini kita dapat melihat adanya satu hubungan yang sangat kuat antara Said Nursi dan Soekarno, yaitu ingin mewujudkan sebuah bentuk negara yang *Republik Religius*. Dalam konteks keindonesiaan, prinsip nilai yang terkandung dalam Sila “Ketuhanan yang Maha Esa” menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan Islam.

b. Prinsip Kemanusiaan

Pada banyak kajiannya, Nursi sangat menjunjung tinggi sisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nursi banyak menegaskan tentang pentingnya memperhatikan nilai-nilai harga diri, harkat dan martabat setiap orang dan membebaskan mereka dari perbudakan, penindasan dan kezaliman. Namun kebebasan dan kemerdekaan itu harus tetap dalam batas-batas adab, bukan kebebasan mutlak yang mengganggu kehidupan orang lain. Kebebasan itu harus berlandaskan pendidikan dan pengetahuan, sehingga setiap orang tau batas-batasnya dalam kehidupan. Agar kebebasan itu dapat terbangun, maka ia harus berdiri di atas kebenaran-kebenaran abadi, yaitu: Persatuan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan keberadaban.³⁰⁰

Nursi menolak praktek despotisme,³⁰¹ sebab despotisme adalah penindasan sebab ia memperlakukan orang lain secara semena-mena. Praktek ini menjadi lahan yang subur untuk terjadi eksploitasi, menjadi landasan tirani, merendahkan martabat manusia, dan menafikan kemanusiaan.³⁰² Lebih lebih hak manusia untuk menjadi manusia yang bebas dan merdeka sudah dijamin dalam al-Quran dengan memberikannya kemuliaan sebagai khalifah di muka bumi dan menundukkan apa yang ada

³⁰⁰Badi`uzzamān Sa`īd Nūrī, *Shaiqal Al Islām*, hlm. 465

³⁰¹ Dalam KBBI disebutkan bahwa despotisme sebuah sistem pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas dan sewenang-wenang. Sumber : <https://kbbi.web.id/despotisme>. Diakses pada 10 April 2021 pk1. 6.57

³⁰²Şükran Vahide, *Islam in Modern Turkey; An Intellectual Biography of Bediuzzaman Said Nursi*, hlm. 85

di langit dan di bumi untuk keperluannya.³⁰³ Islam memberikan jaminan hak asasi manusia yang mencakup hak-hak pribadi dalam pemikiran, politik, undang-undangan, sosial, ekonomi, dan lainnya. Jaminan hak ini diberikan kepada siapapun juga, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, muslim atau non muslim. Adanya penegakan amar makruf nahi munkar, esensinya adalah untuk menjaga hak-hak setiap orang tidak terganggu oleh individu lain. Setiap orang punya haknya, dan dia boleh menuntut haknya sampai ke meja hakim. Tapi ia pun punya kewajiban sosial yang harus ia perhatikan dengan baik. Maka prinsip kemanusiaan dalam Islam benar-benar tegak di atas pondasi nilai-nilai akhlak,³⁰⁴ atau sebuah kemanusiaan yang tegak di atas prinsip keadilan dan keadaban.

Nursi pernah menyatakan,

أمن الممكن للحق سبحانه وهو المعبود الحق أن يخلق هذا الإنسان ليكون أكرمَ عبدٍ لربوبيته المطلقة، وأكثرَ أهمية لربوبيته العامة للعالمين، وأكثرَ المخاطبين إدراكاً وفهماً لأوامره السبحانية، وفي أحسن تقويم حتى أصبح مرآة جامعة لأسمائه الحسنی وتجلي الاسم الأعظم وتجلي المرتبة العظمى لكل اسم من هذه الأسماء الحسنی. وليكون أجملَ معجزات القدرة الإلهية، وأغناها أجهزةً وموازينَ لمعرفة وتقدير ما في خزائن الرحمة الإلهية من كنوز، وأكثر المخلوقات فاقة وحاجة إلى نعمه التي لا تحصى، وأكثرها تألماً من الفناء، وأزیدها شوقاً إلى البقاء، وأشدّها لطافة ورقة وفقراً وحاجة. مع أنه من جهة الحياة الدنيا أكثرها تعاسة، ومن جهة الاستعداد الفطري أسماها صورة.. فهل من الممكن أن يخلق المعبود الحق الإنسان بهذه الماهية

³⁰³ Hal ini seperti yang disebutkan dalam QS. Al Isra ayat 70

³⁰⁴ Yusuf Al Qardhawi, *Ad-Dīn wa As-Siyāsah: Ta'shīl wa Radd Syubuhāt*, (Dublin: t.p., 2007), hlm. 166

ثم لا يبعثه إلى ما هو مؤهل له ومشتاق إليه من دار الخلود؟! فيمحق الحقيقة الإنسانية ويعمل ما هو منافٍ كلياً لأحقّيته سبحانه؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً³⁰⁵..

Lebih lanjut, Nursi juga menyatakan bahwa hak asasi itu tidak boleh lepas dari ikatan sosial dan peradaban. Kemerdekaan dan kebebasan yang indah itu terwujud ketika dihiasi tingkah laku yang baik menurut syariat. Kebebasan untuk bersikap tidak patuh dan berperilaku culas itu tidak bisa disebut kebebasan; itu kebinatangan; itu tirani setan; itu budak yang diperintah oleh roh jahat. Kebebasan umum merupakan hasil dari kebebasan individu. Cirinya adalah ketika kita tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan tegas Nursi menyatakan:

لأن الحرية الحسنة ما هي إلا تلك المتأدبة بأداب الشريعة والتمتزية بفضائلها، وليست تلك التي في السفاهة والردائل. بل تلك حيوانية وبهيمية وتسلط شيطاني، ووقوع في أسر النفس الأمارة بالسوء إن الحرية العامة هي المحصلة الناتجة من حريات الأفراد، ومن شأن الحرية عدم الإضرار سواء بالنفس أو بالآخرين³⁰⁶

Sejalan dengan prinsip ini, sila kedua dalam Pancasila menjadi prinsip utama yang menjadi *falsafah* dasar negara. Melalui sila ini, ada satu perasaan kebersamaan dan toleransi yang ingin ditumbuhkan di hati seluruh bangsa Indonesia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah satu bangsa yang berdiri sendiri, tetapi satu bangsa dalam keluarga yang beragam suku, bahasa, adat istiadat, budaya. Hakikatnya, dalam satu keluarga tidak mungkin hidup tanpa rasa kemanusiaan. Agama

³⁰⁵Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi, *Shaiqal Al Islām*, hlm. 93

³⁰⁶Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi, *Shaiqal Al Islām*, hlm. 367

apapun, semuanya menghendaki rasa perikemanusiaan. Baik agama Hindu, Budha, maupun Islam, semua berdiri kuat di atas dasar kemanusiaan. Ajaran *fardhu kifayah* di dalam Islam tak lain adalah realisasi dari dasar perikemanusiaan.³⁰⁷

Bung Karno menegaskan bahwa semangat nasionalisme harus dilandasi oleh kemanusiaan. Nasionalisme tanpa kemanusiaan akan berkembang menjadi chauvinisme dan rasialisme. Hal ini seperti yang terjadi pada Hitler. Ia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi tapi tidak berperikemanusiaan. Maka nasionalismenya menjadi nasionalisme chauvinis. Dia menganggap bahwa hanya manusia-manusia turunan Arialah manusia sejati. Selain dari mereka bukan manusia sejati, ras yang rendah, bahkan harus dimusnahkan dari muka bumi. Ia benci orang Asia. Ia bahkan membunuh 1,5 juta orang Yahudi karena rasa rasialisme ini.³⁰⁸ Nasionalisme seperti itu, kata Bung Karno, adalah nasionalisme yang jahat, dan kita bangsa Indonesia tidak mau nasionalisme demikian. Bung Karno menyatakan:

“Kita tidak menghendaki supaya nasionalisme kita menjadi nasionalisme yang chauvinis, tapi nasionalisme yang hidup di dalam suasana perikemanusiaan: nasionalisme yang mencari agar segala umat

³⁰⁷Pidato Bung Karno pada kursus Pancasila di depan kader-kader Pancasila pada tanggal 15 Juli 1958 di Istana Negara, Jakarta. Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, (Yogyakarta; Media Pressindo, Cetakan Keempat, 2019) hlm. 135-145

³⁰⁸*Ibid.*, hlm. 211-212

manusia ini akhirnya nanti hidup dalam satu keluarga besar yang sama bahagiannya”³⁰⁹

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menyiratkan makna tentang komitmen bangsa untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan universal. Bangsa ini ikut merasa berkewajiban mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban. Adil berarti patut, tidak memihak atau berpegang pada kebenaran. Sementara adab mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan atau moral. Dengan demikian beradab artinya berdasarkan nilai-nilai kesusilaan yang merupakan dari kebudayaan.³¹⁰ Maka kemanusiaan yang adil dan beradab sesungguhnya adalah kesadaran kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi akal budi dan hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umum, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap lingkungan.

Penerapan nilai kemanusiaan dalam sila kedua pada pasal-pasal UUD 45 ini sesuai dengan prinsip-prinsip nilai *maqāshid syari'ah*, yaitu pemeliharaan dan perlindungan terhadap hal yang berkaitan dengan agama, pemeliharaan dan pengayoman terhadap jiwa lahir dan batin, perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan individu, perlindungan

³⁰⁹*Ibid.*, hlm. 213

³¹⁰Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, *Empat Pilar MPR RI* (Jakarta; Sekretariat Jenderal MPR RI, Cetakan Ketujuh, 2017) hlm. 52

diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat, pemeliharaan akal dari hal-hal yang mencemari dan merusak fungsi akal, dan pemeliharaan terhadap harta dengan memberikan jaminan perlindungan hak milik pribadi.³¹¹ Prinsip kemanusiaan ini dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang menyatakan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”³¹²

Nilai-nilai kemanusiaan ini terdapat juga dalam pasal 27 yang menyatakan tentang kesamaan setiap warga di mata hukum, hak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara.

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

³¹¹*Ibid.*, hlm. 54

³¹² Kutipan pasal-pasal diambil dari buku *Empat Pilar MPR RI*, Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019....., hlm. 55-62

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia, penerapan nilai-nilai kemanusiaan ini ditegaskan dengan adanya jaminan negara terhadap kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, mempertahankan hidup, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap negara punya hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, memajukan diri, memperjuangkan hak, mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, dan memiliki kesempatan yang sama dalam memerintah. Atas dasar kemanusiaan, setiap orang punya bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pekerjaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Rangkaian pasal 28 UUD 1945 ini juga ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan, punya hak hidup sejahtera, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, jaminan sosial, serta pengakuan atas hak milik pribadi.

Setiap warga punya hak hidup, bebas dari perlakuan diskriminatif, dan mendapatkan penghormatan atas identitas budaya tradisional.

Upaya menegakkan hak asasi manusia adalah bagian dari tanggungjawab negara dan setiap warga harus tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam rangka memenuhi tuntunan hukum yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam Pasal UUD 1945 yang mengatur tentang Agama, ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan memberikan jaminan kepada seluruh warga negara untuk beribadat sesuai kepercayaan masing-masing.

Pasal 29

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Persoalan kemanusiaan juga disebutkan pada Pasal 31 bahwa dalam kondisi darurat setiap warga wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Misi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan pula, pada pasal 31 dinyatakan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Pembiayaan pendidikan dasar wajib ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah juga harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Untuk mewujudkan pendidikan yang baik, negara harus memprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah juga berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.

Pasal 31³¹³

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Kesimpulan dari uraian diatas yaitu terdapat kesamaan pandangan antara Badi'uzzamān Sa'id Nursi dengan Presiden

³¹³ [Dikutip dari https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945](https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945) pada hari Sabtu, 13 Maret 2021 jam 12.30

Soekarno memiliki perhatian yang besar tentang kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh moral yang luhur dan beradab. Selain itu, nilai humanitarianisme yang terkandung dalam prinsip kemanusiaan ini menolak semua bentuk despotisme, chauvinistik, dan eksklusivisme sempit yang muncul dari arogansi kesukubangsaan semata.

c. Prinsip Persatuan

Semangat persatuan dan kebangsaan menjadi salah satu hal yang paling banyak dikampanyekan oleh Nursi, baik melalui pidato maupun tulisan-tulisannya. Salah satunya apa yang disampaikan dalam pidatonya *Huriyete Hitap* (Pidato Untuk Kebebasan).³¹⁴ Badi`uzzamān Sa`id Nursi menyebutkan bahwa persatuan adalah satu pintu dari lima pintu surga kemajuan dan peradaban. Lima pintu atau lima prinsip yang harus dihayati sebuah bangsa agar surga bisa dicapai. Pintu pertama, persatuan hati. Yaitu dengan mempertahankan kesadaran tentang persatuan dan integritas Utsmani, khususnya dalam kaitannya dengan kaum nasionalis dan adanya gerakan separatis. Pintu kedua, cinta bangsa. Yaitu setiap individu masyarakat harus menyadari kebangsaan mereka dan menjaga cinta antara satu dengan lainnya. Pintu ketiga, pendidikan. Yaitu dengan meningkatkan pendidikan bangsa sampai kepada titik yang memuaskan. Pintu keempat, daya upaya manusia. Yaitu memberikan jaminan kepada setiap orang untuk

³¹⁴ *Huriyate Hitap* adalah pidato pembelaan yang disampaikan oleh Badi`uzzamān Sa`id Nūrsi di depan Mahkamah Militer setelah kejadian 31 Maret. Pidato ini disampaikan sekitar tahun 1909 M. *Sīrah Dzātiyah*, hlm. 32

mendapat pekerjaan dan menerima gaji yang adil dari pekerjaannya. Pintu kelima, menghentikan pemborosan, yang berarti menghentikan kebiasaan pamer dan berlebihan di tengah masyarakat (sebagaimana kebiasaan para pejabat pada saat itu). Sebab hal itu akan mengakibatkan perpecahan.³¹⁵

Nursi dalam mengungkapkan uraian nilai ini dengan melihat pentingnya sikap nasionalisme dalam mempertahankan negara. Bahkan ia rela mengorbankan dirinya untuk tanah airnya³¹⁶ Nursi menyatakan bahwa kesediaan diri untuk mengorbankan nyawa demi bangsa adalah bagian dari moralitas Islam yang luhur. Ia pernah menyatakan bahwa “meskipun aku mati, Umat Islam harus hidup kekal abadi. Asal bangsaku kuat dan sehat, maka pahala akhirat sudah cukup. Hidup yang kusumbangkan kepada bangsaku itu akan membuatku hidup, akan membuatku bahagia di kehidupan nanti”

نقول، بروحنا وجسدنا ووجداننا وفكرنا وبكل قوانا: "إن متنا، فأمتنا الإسلامية حية، وهي باقية خالدة فلتحي أمّتي ولتسلم، وحسبي الثواب الأخرى، فإن حياتي المعنوية التي في حياة الأمة تحييني وتعيشني، وتجعلني في نشوة ولذة في العالم العلوي،³¹⁷

Nasionalisme dan perasaan memiliki bangsa seperti ini sangat penting untuk menjaga keutuhan sebuah bangsa sesuai batasan teritorial yang telah ditentukan. Nursi berpandangan bahwa batasan demarkasi

³¹⁵ Şükran Vahide, *Islam in Modern Turkey; An Intellectual Biography of Bediuzzaman Said Nursi*, hlm. 54

³¹⁶Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi , *Shaiqal Al Islām*, hlm. 132-133. *Terihce'I Hayati*, hlm. 449-450

³¹⁷*Ibid.* hlm.389

teritorial adalah faktor utama dalam integrasi bangsa setelah agama, bahasa, rasa kebangsaan. Rasa nasionalisme ini akan menjadi positif dan merupakan kekuatan bangsa ketika ia muncul dari kebutuhan anggota masyarakat yang melahirkan sikap gotong royong dan rasa solidaritas yang tinggi. Dalam keadaan seperti ini, maka nasionalisme menjadi benteng dan perisai serta menjadi salah satu faktor dinamis untuk memperkuat persaudaraan Islam.³¹⁸

Manakala nasionalisme ini bersifat negatif, maka ia akan menjadi ideologi jahat dan berbahaya. Jenis ideologi ini dapat tumbuh subur dengan bertahan dalam permusuhan kepada pihak lain. Nasionalisme negatif menjadi penyebab antipati, kebodohan dan permusuhan terhadap orang lain, serta menjadi pemicu timbulnya rasis di kalangan masyarakat.³¹⁹

Menurut Nursi, perasaan nasionalisme ini akan menjadi sangat kuat bila ditopang oleh identitas keagamaan, yaitu Islam. Nursi menentang setiap usaha yang mempertentangkan antara agama dan negara. Ia memandang bahwa identitas nasionalisme akan lebih baik dengan identitas keislaman. Dalam ukhuwawah Islamiyyah terdapat ribuan bentuk ukhuwah dan jenis persaudaran lainnya. Tetapi mengganti ukhuwah islamiyah dengan bentuk lainnya, seperti mengganti orang yang membuang berlian lalu menggantinya dengan batu.

هذا الفكر الإيجابي القومي، ينبغي أن يكون خادماً للإسلام، وأن يكون قلعة حصينة له، وسوراً منيعاً حوله، لا أن يحل محل الإسلام، ولا بديلاً عنه، لأن الأخوة التي يمنحها الإسلام تتضمن ألوف أنواع الاخوة. وإنما تبقى خالدة في عالم البقاء وعالم البرزخ. ولهذا فلا تكون الأخوة القومية مهما كانت قوية إلا ستاراً من أستار الاخوة الإسلامية. وبخلافه، أي

³¹⁸Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi, *Al Maktūbāt*, hlm. 334

³¹⁹*Ibid.*

إقامة القومية بديلاً عن الإسلام جنائياً خرقاء أشبه ما يكون بوضع أحجار القلعة في خزينة
ألماس فيها وطرح الألماسات خارج القلعة³²⁰.

Relevan dengan pandangan Nursi, Soekarno juga melihat bahwa persatuan dan perasaan cinta tanah air adalah kunci tegaknya sebuah bangsa. Dalam beberapa pidatonya, Soekarno bahkan menyebutkan Sila Persatuan Indonesia dengan nama Sila Kebangsaan.

“Saja tadi berkata bahwa negara djikalau didasarkan antara lain atas rasa kebangsaan, negara demikian itulah kuat. Maka oleh karena itu kita dengan sengadja memasukkan sila Kebangsaan didalam Pantja Sila kita, meskipun dari sudut agama orang memungkiri hal kebangsaan; meskipun daripada golongan Marxis jang dangkal memungkiri hal kebangsaan. Tetapi djelas untuk negara jang kuat kita mesti mendasarkan negara itu atas kebangsaan. Memang garis sedjarah menudju kesitu.” Demikian kata Soekarno.³²¹

Berbeda dengan pemahaman Marxis yang menentang paham kebangsaan dengan alasan bahwa paham kebangsaan adalah suatu pemahaman yang salah dan hanya dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat manusia dan menyebabkan pertentangan-pertentangan (perang) di antara manusia yang satu dan yang lainnya. Makanya, namun menurut Soekarno karena berbicara kesatuan negara, maka paham kebangsaan dalam bernegara menjadi dasar kekuatan negara.³²²

³²⁰Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi, *Al Maktūbāt*, hlm. 304

³²¹Soekarno, *Pantja Sila Dasar Negara...*, hlm. 75 (Menurut Soekarno, peletakan urutan sila dalam Pancasila dia lebih senang mengedepankan sila Kebangsaan atau Persatuan Indonesia di urutan kedua setelah Ketuhanan Yang Maha Esa, lalu kemudian Sila Kemanusiaan (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) di urutan ketiga. Ini bukan jadi suatu masalah, hanya karena kebiasaan Soekarno. Lebih lanjut lihat di *Soekarno, Pantja Sila Dasar Negara* terbitan Sabua Buku.

³²²Soekarno, *Pantja Sila Dasar Negara...*, hlm. 78

Kenyataan yang ada di Indonesia khususnya, adalah bermacam-macam suku, adat istiadat, bahasa, terpisah oleh pulau-pulau, ada yang golongan kulit sawo matang, kulit putih, kulit hitam. Jadi, Sila Kebangsaan ini mempersatu Indonesia dalam konsep negara dan tidak bertentangan dengan cita-cita agama tentang persaudaraan seluruh manusia, tetapi ini dalam lingkup Indonesia sebagai negara. Oleh karena itu, sebagai negara yang baru saja berdiri dan bercita-cita menuju sempurna tidak boleh tidak harus menggunakan kebangsaan sebagai pemersatu untuk menjadi salah satu dari dasar negara. Terutama bagi kita rakyat Indonesia, segolongan manusia yang berabad-abad lamanya mengalami persamaan penderitaan dan pengalaman, maka bagi kita rasa kebangsaan bukan lagi cita-cita melainkan satu fakta yang objektif. Dan hebatnya kita orang Indonesia meskipun hidup dengan beragam bahasa tetapi bangsa kita memiliki bahasa satu sebagai pemersatu, yaitu bahasa Indonesia.³²³

“Djikalau kita menghendaki negara kita ini kuat, dan sudah barang tentu kita menghendaki negara kita ini kuat, oleh karena kita memerlukan negara ini sebagai suatu alat perjuangannya untuk merealisasikan satu masyarakat adil dan makmur, kita harus dasarkan negara ini antara lain diatas paham kebangsaan”³²⁴

Ketika ada beberapa kelompok yang menolak paham kebangsaan ini, Soekarno memberikan jawaban bahwa satu kenyataan yang tidak bisa

³²³*Ibid.*, hlm. 80 (Meskipun bahasa bukan merupakan syarat mutlak terbentuknya satu negara, namun jika kita berkaca ke India dengan ragam suku dan bahasanya, itu tidak memiliki bahasa Persatuan. Shri Jawaharlal Nehru pernah mengatakan bahwa bahasa persatuan India adalah bahasa Hindustani, tetapi banyak sekali daerah-daerah yang tidak paham bahasa Hindustani. Ada juga yang mengatakan untuk mengangkat bahasa Urdu menjadi bahasa persatuan, tetapi kenyataannya tidak semua orang India bisa berbahasa Urdu. Malah yang terjadi, Raja Gopalachari menyatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa pemersatu rakyat India).

³²⁴*Ibid.*, hlm. 97

dibantah bahwa dalam kehidupan manusia terdiri dari banyak golongan dan suku. Mereka hidup dalam beberapa macam bangsa. Negara sendiri adalah satu *machtsorganisatie*, atau satu organisasi kekuasaan, yang memiliki batas teritorial dengan kelompok-kelompok manusia yang tinggal di tempat itu. Untuk mengatur manusia yang ada dalam batas teritorial itu harus ada pemerintah. Inilah tiga syarat mutlak dari sebuah negara. Ditambah syarat keempat dari Muhammad Yamin, bahwa sebuah negara modern harus punya tujuan. Di negara Indonesia, syarat keempat ini kita namakan Pancasila.³²⁵

Dalam pidatonya juga, Soekarno pernah mengutip ucapan Ernest Renan, Guru Besar di Universitas Sorbonne, Prancis, bahwa bangsa itu artinya satu jiwa. *Une nation es un ame*. Di tempat lain Renan berkata, “*uni nation es un grand solidarite*,” bahwa satu bangsa adalah satu *solidariteit*.

Masyarakat bangsa Indonesia, telah mengalami penderitaan-penderitaan bersama, pengalaman-pengalaman bersama, sehingga mempunyai jiwa yang sama. Jiwa yang sama itu merupakan rasa kebangsaan. Menurut teori Renan ini, kebangsaan tidak tergantung dari persamaan bahasa. Hal yang mengikat mereka manusia menjadi satu jiwa adalah kehendak untuk bersama. Jadi, kata Bung Karno, gerombolan manusia meskipun agamanya berwarna macam-macam, meskipun bahasanya bermacam-macam, meskipun asal turunannya bermacam-macam,

³²⁵Pidato Bung Karno pada kursus Pancasila di depan kader-kader Pancasila pada tanggal 16 Juni 1958 di Istana Negara, Jakarta. Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, (Yogyakarta; Media Pressindo, Cetakan Keempat, 2019) hlm. 135-138

asal gerombolan manusia itu mempunyai kehendak untuk hidup bersama; itu adalah bangsa.³²⁶

Bung Karno menolak nasionalisme *burjuis*, sebuah perasaan kagum kepada negeri-negeri besar seperti Jepang dan Inggris, ingin jadi seperti mereka, tetapi tidak sadar bahwa barang-barang yang ada pada negara itu adalah hasil kapitalisme, alat-alat kapitalisme, dan para rakyatnya dalam keadaan tertindas. Rasa nasionalisme mereka, kata Bung Karno, bukan nasionalisme kemanusiaan. Nasionalisme mereka hanya ingin Indonesia Merdeka, tanpa mau mengubah susunan masyarakat sesudah Indonesia Merdeka. *Burgerlijke democratie* ini, menurut Bung Karno, adalah bentuk penipuan kepada rakyat, hanya menguntungkan kaum *burjuis*. Saat ia telah menjadi raja di parlemen, rakyat kecil diusir dan dilemparkan ke atas jalan rayanya pengangguran.³²⁷ Bung Karno juga menolak nasionalisme keningratan. Yaitu adat dan kebiasaan di kalangan ningrat, yang masih hidup dalam adat feodalisme. Keinginan yang hanya ingin menjadi kepala-kepala rakyat, cenderung setia kepada pertuanan dan bos yang ada di atasnya. Ketika Indonesia merdeka, mereka yang harus jadi kepala, merekalah yang tetap harus memerintah.³²⁸

³²⁶Pidato Bung Karno pada kursus Pancasila di depan kader-kader Pancasila pada tanggal 16 Juni 1958 di Istana Negara, Jakarta. Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, (Yogyakarta; Media Pressindo, Cetakan Keempat, 2019) hlm. 135-145

³²⁷ Soekarno, "Mencapai Indonesia Merdeka" artikel yang dimuat dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi*, (Jakarta: Yayasan Bung Karno, Cetakan Kelima, 2005) hlm. 318-321

³²⁸ *Ibid.* hlm. 321-322

Penafsiran tentang nasionalisme, Bung Karno juga mengambil pendapat Otto Bauer dalam bukunya *die Nationalitäten frage und die soziale demokratie*, bahwa yang dinamakan bangsa itu adalah satu persamaan, satu persatuan karakter, watak, yang persatuan karakter atau watak ini tumbuh, lahir, terjadi karena persatuan pengalaman atau persatuan nasib.³²⁹ Jadi, dalam persatuan sebuah bangsa, persatuan bahasa, agama, warna kulit, maupun keturunan itu menjadi sesuatu yang mutlak. Kesamaan nasib yang dialami bersama selama bertahun-tahun, berpuluh dan beratus-ratus tahun, itulah yang akan menumbuhkan persatuan watak, dan persatuan watak inilah yang akan menentukan sifat bangsa. Itulah yang menyebabkan mengapa setiap individu dari sebuah bangsa memiliki karakter sendiri, yang berbeda dengan dengan bangsa lainnya.³³⁰

Namun, kata Bung Karno, kedua teori ini –teori Renan dan teori Otto Bauer— kurang lengkap. Di Indonesia banyak kelompok manusia yang punya rasa ingin bersatu, ingin bersama, tetapi bukan bangsa, seperti suku Minangkabau, suku Bugis, dan suku Minahasa. Banyak juga kelompok yang memiliki kesamaan watak yang lahir karena persamaan nasib, tetapi bukan bangsa. Yang menjadikan semua kelompok ini menjadi sebuah bangsa karena mereka berdiam di atas satu wilayah geopolitik yang nyata.³³¹

Rakyat Indonesia paham bahwa kepulauan Indonesia yang terletak antara dua benua dan dua samudera adalah satu kesatuan. Rakyat Indonesia

³²⁹Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila...* hlm. 149

³³⁰*Ibid.*

³³¹*Ibid.* hlm. 153

menggabungkan dirinya dalam satu negara nasional Indonesia, sebagai rakyat negara lain seperti Mesir, Jepang, RRT, Filipina, dan lainnya melakukan hal yang demikian. Menurut Soekarno membuat batas-batas wilayah adalah sebuah keharusan yang berdiri di atas fakta-fakta obyektif. Persatuan ini menjadi penting, bukan hanya karena ideologi kebangsaan, tetapi juga karena kepentingan ekonomi. Negara sendiri adalah alat perjuangan untuk merealisasikan satu masyarakat yang kuat, adil dan makmur.

Berbeda dengan agama, maka negara harus mempunyai wilayah. Agama itu hanya berhubungan dengan manusia. Maka, menurut Bung Karno, syarat mutlak negara adanya territorial yang terbatas. Supaya negara kuat, maka wilayahnya harus menjadi satu kesatuan. Dan bangsa yang hidup dalam satu kesatuan ini akan menjadi bangsa yang kuat, ketika ia mempunyai rasa kebangsaan yang tidak dibuat-buat, tapi timbul dari *objective verhoudingen* (rasio objektif).³³²

“Persatuan Indonesia dalam Sila Ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan ideologi yang mendiami wilayah Indonesia, bersepakat menyatakan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa”³³³

Untuk mewujudkan nilai yang terkandung dalam Sila Ketiga ini, semua peraturan perundang-undangan harus menjamin integrasi, keutuhan

³³²*Ibid.*, hlm. 160-162

³³³Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, *Empat Pilar MPR RI* (Jakarta; Sekretariat Jenderal MPR RI, Cetakan Ketujuh, 2017) hlm. 64

ideologi, dan teritori negara dan bangsa Indonesia, dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.³³⁴ Penjabaran Sila Kebangsaan ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”

Penjelasan tentang hakikat nilai Sila Ketiga ini terdapat pada Pasal 1³³⁵ tentang bentuk dan kedaulatan Negara Republik Indonesia, bahwa:

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Hal ini dijelaskan juga dalam pasal ke 18 tentang bentuk pemerintahan daerah di Indonesia yang dibagi kepada pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18³³⁶

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap

³³⁴*Ibid.* hlm. 65

³³⁵ Dikutip dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> pada hari Sabtu, 13 Maret 2021 jam 14.16

³³⁶ Dikutip dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> pada hari Sabtu, 13 Maret 2021 jam 13.30

provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang

Dalam rangka mengokohkan semangat kebangsaan, negara berusaha memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan berusaha memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya.

d. Prinsip Permusyawaratan

Badi`uzzamān Sa`īd Nursi memandang bahwa musyawarah adalah jalan untuk menghadirkan banyak pemikiran dan pengalaman, melahirkan kemajuan dan kesejahteraan, sekaligus menghadirkan kebahagiaan, sebab setiap kelompok memiliki kesamaan pandangan dan tujuan. Nursi yakin bahwa musyawarah merupakan mekanisme untuk mengambil keputusan yang besar dalam berbagai urusan. Melalui proses musyawarah yang benar, berdasar pada hakikat kebenaran, argumentasi, dan berfikir rasional, umat Islam dapat menghadapi dan menjawab tantangan peradaban modern ini.³³⁷

Pada masa sistem parlementer atau *masyrūthiyyah*,³³⁸ Badiuzzaman sangat mendukung adanya kebebasan berpendapat, aktifitas demokrasi, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Menurut Nursi, system *masyrūthiyyah* adalah pengamalan dari dua ayat al-Qur'an tentang musyawarah, yaitu Q.S. al-Imrān ayat 158, dan Q.S. asy-Syūrā ayat 38. Ruh dari musyawarah adalah kebenaran, bukan pemaksaan, intinya adalah pengetahuan, lisannya adalah cinta, akal pikirannya adalah undang-undang bukan pemikiran individu. *Masyrūthiyyah* sesungguhnya adalah kepemimpinan umat.³³⁹

³³⁷ Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi, *Shaiqalul Islām*, hlm. 510-514

³³⁸ *Masyrūthiyyah* atau Meşrutiyet adalah pemberlakuan system parlemen di Kesultanan Utsmani oleh Sultan Abdul Hamid sebanyak dua kali. Yang pertama (*Birinci Meşrutiyet Devri*) pada 19 Maret 1877 M. Sistem ini dibekukan setelah Daulah Utsmaniyah kalah perang dengan Rusia dan kenyataan yang terjadi bahwa para musuh memanfaatkan parlemen menggiring Daulah Utsmaniah pada kehancuran. Sistem ini diberlakukan kembali setelah 30 tahun, system *Meşrutiyet* kedua (*İkinci Meşrutiyet Devri*) ditetapkan pada 23 Juli 1908 sampai tanggal 30 Oktober 1918. *Al Munāzharāt, Shaiqal Al Islām*, hlm. 355

³³⁹ Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi, *Sīrah Dzātiyyahī*, hlm. 75

Ketika muncul pertanyaan, apakah *masyrūthiyyah* atau sistem parlementer sesuai dengan ajaran Islam ataukah bertentangan? Ia menjawab bahwa semangat *masyrūthiyyah* ini sudah sejalan dengan syarait. Hanya saja ada beberapa rincian dari sistem ini tidak sesuai. Apakah ada yang bisa seperti itu? Yang sesuai dengan syariah di semua detail hidupnya? Atau adakah orang yang mampu melaksanaka syariah secara penuh dalam hidupnya? Sesungguhnya pemerintah bisa saja salah. Namun dengan adanya proses demokrasi ini, *masyrūthiyyah* mampu membuka pintu harapan, di saat penjajahan membuka pintu penderitaan.

Selain itu, dalam perjalanan sebuah bangsa, musyawarah menempati peran yang sangat penting dalam bermasyarakat, di antaranya:

(1) Musyawarah Kunci Kepemimpinan Umat

Nursi menyatakan bahwa kebebasan syariat dan musyawarah yang disyariatkan telah menunjukkan kepemimpinan umat yang sejati.³⁴⁰

(2) Musyawarah Kunci Kebahagiaan Sosial

Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi bahwa sesungguhnya kunci kebahagiaan kaum muslimin dalam kehidupan sosial mereka adalah musyawarah. Ayat Al Quran yang mulia telah memerintahkan untuk menjadikan musyawarah dalam semua urusan

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

³⁴⁰Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi, *S'aiqal Al Islām*, hlm. 510

“...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...”³⁴¹

Sebagaimana pertautan pemikiran antara manusia terjadi melalui musyawarah sepanjang sejarah umat manusia, sehingga kehidupan mereka semakin meningkat dan pondasi keilmuan semakin kokoh, demikian pula penyebab terkebelakangnya Benua Asia yang besar dalam memimpin peradaban adalah karena ia tidak menegakkan prinsip musyawarah yang sejati.³⁴²

Sesungguhnya, kata Sa`id Nursi, kunci masa depan yang cerah bagi Benua Asia ini ada pada musyawarah. Hal ini itu terjadi apabila ada musyawarah antara individu, kelompok, dan suku-suku. Nursi melihat bahwa cara untuk memutus belenggu yang mengikat 300 sampai 400 juta muslim dan membebaskan mereka dari penjajahan adalah dengan menegakkan prinsip musyawarah dan kebebasan syariat.³⁴³

(3) Sistem Republik Bertumpu Pada Musyawrah

Republik adalah perwujudan dari keadilan, kekuatan, dan penegakan kekuatan undang-undang. Tanpa adanya kekuatan undang-undang, maka yang terjadi adalah menyebarnya penjajahan.³⁴⁴ Menurut

³⁴¹QS. Asy Syūrā: 38

³⁴²Badi`uzzamān Sa`id Nūrī, *Saiqal Al Islām*, hlm. 514

³⁴³*Ibid.*

³⁴⁴Badi`uzzamān Sa`id Nūrī, *Saiqal Al Islām*, hlm. 527

Nursi, di zaman modern yang kompleks ini, negara hanya bisa ditegakkan, dijalankan, dan dibimbing melalui sebuah majelis perwakilan, musyawarah, dan kebebasan berfikir.³⁴⁵

Relevan dengan pendapat Nursi, Soekarno juga menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan negara, musyawarah adalah cara pengambilan keputusan bersama dengan mengikutkan rakyat dalam kehidupan bernegara. Kalimat Kerakyatan dalam sila ini, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menunjukkan posisi rakyat yang sangat kuat dalam ikatan kenegaraan. Negara sangat menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalimat “Permusyawaratan” menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang selalu memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat untuk mencapai suatu keputusan yang berdasarkan mufakat. Kalimat “Perwakilan” menunjukkan suatu sistem yang mengikutsertakan rakyat dalam bagian kehidupan bernegara yang dilakukan melalui badan-badan perwakilan. Sementara kalimat “hikmat-kebijaksanaan” merefleksikan orientasi etis negara berkedaulatan rakyat yang berdasar pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan.³⁴⁶

³⁴⁵Sukran Vahide, *Islam in Modern Turkey*, hlm. 55

³⁴⁶Soekarno, “Mencapai Indonesia Merdeka” hlm. 69

Maka kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia, kata Mohammad Hatta, bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Karena itu, demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya.³⁴⁷

Kedaulatan rakyat merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama dalam bernegara. Memang tidak semua negara menggunakan demokrasi sebagai alat, tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia –dengan melihat kultur dan sejarahnya— bahwa kedaulatan merupakan salah satu alat yang paling cocok dalam sistem bernegara. Sebab kita selalu –dan seharusnya— berdiri di atas kekeluargaan, di atas dasar musyawarah, di atas dasar demokrasi, di atas dasar yang kita namakan Kedaulatan Rakyat. Maka di dalam masyarakat atau urusan negara kita mempunyai keyakinan bahwa setiap sesuatu yang mengenai kehidupan harus berdasarkan atas dasar kekeluargaan, demokrasi, Kedaulatan Rakyat.³⁴⁸

Masyarakat kita memiliki kepercayaan bahwa hidup secara kekeluargaan tidak mungkin dapat berjalan dengan sempurna bila tidak adanya musyawarah. Sebagaimana halnya dalam keluarga, tidak mungkin setiap urusan-urusan keluarga dijalankan atau ditentukan secara diktator, melainkan harus berjalan dengan apa yang kita kenal dengan yang

³⁴⁷*Ibid.* hlm. 70

³⁴⁸Soekarno, *Pantja Sila Dasar Negara...*, hlm. 141

namanya musyawarah keluarga. Pemahaman ini sangat relevan dengan pendapat Nursi yang menyatakan bahwa pertautan pemikiran antara manusia terjadi melalui musyawarah, sehingga kehidupan mereka semakin meningkat dan pondasi keilmuan semakin kokoh. Penyebab terkebelakangnya Benua Asia yang besar dalam memimpin peradaban adalah karena ia tidak menegakkan prinsip musyawarah yang sejati.³⁴⁹

Bagi kita bangsa Indonesia, demokrasi atau Kedaulatan Rakyat memiliki corak nasional, corak kepribadian kita, satu corak yang tidak perlu sama dengan corak demokrasi yang digunakan oleh negara-negara lain. Artinya, demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia, demokrasi yang disebutkan sebagai sila ke-4 adalah sebenar-benarnya demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Tidak perlu harus sama atau identik dengan demokrasi yang diterapkan di negara-negara lain. Maka dengan itu, jika saat ini kita menemukan ada segelintir orang yang menolak demokrasi kita, berarti pikiran dan akalinya belum berdiri di atas kepribadian bangsa Indonesia sendiri, atau tidak sepenuhnya mengembalikan segala sesuatu kepada kepribadian bangsa Indonesia. Orang-orang yang seperti ini –yang menolak demokrasi Indonesia— adalah orang yang tidak dapat menangkap esensi dari demokrasi Indonesia. Intinya, dalam menyusun dan menjalankan demokrasi Indonesia harus menaruhkan setiap sesuatu di atas kepribadian bangsa Indonesia. Sebab hal tersebut salah satu cara menyelenggarakan

³⁴⁹Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi, *Sʿaiqal Al Islām*, hlm. 514

serta mewujudkan cita-cita seluruh masyarakat Indonesia yang berdaulat – yang menyatu dalam satu perasaan dan penderitaan— yang adil dan makmur.³⁵⁰

Berdasarkan kepribadian Bangsa Indonesia, demokrasi adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan negara dalam membentuk sebuah masyarakat yang dicita-citakan. Ada juga alat yang lain bernama nasionalis-sosialisme dan diktator proletariat. Namun bagi Bangsa Indonesia, demokrasi dan kedaulatan rakyat bukan sekedar alat, tapi menjadi satu kepercayaan dalam usaha mencapai bentuk masyarakat yang kita cita-citakan.³⁵¹

Demokrasi Indonesia, menurut Soekarno, adalah sebuah corak kepribadian yang tidak sama seperti dijalankan oleh bangsa-bangsa lain. Bagi masyarakat Indonesia, demokrasi telah menjadi sebuah psikologis nasional yang tegak di atas dasar kekeluargaan dan musyawarah. Indonesia tidak perlu menjiplak demokrasi ala barat, seperti sistem *parlementaire democratie* atau demokrasi parlemen, seperti juga tidak boleh menganut sistem fasisme, sebab kedua ideologi politik ini hanya untuk melayani kepentingan kapitalisme. Ketika kapitalisme sedang naik daun dan banyak pendukung, maka ideologi yang digunakan adalah

³⁵⁰Soekarno, *Pantja Sila Dasar Negara...*, hlm. 142

³⁵¹Penjelasan tentang hal ini disarikan dari Pidato Bung Karno pada kursus Pancasila di depan kader-kader Pancasila pada tanggal 22 Juli 1958 di Istana Negara, Jakarta. Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, (Yogyakarta; Media Pressindo, Cetakan Keempat, 2019) hlm. 216-247

demokrasi parlemen, sementara ketika kapitalisme sedang turun, mati, atau gugur, maka usaha untuk menyelamatkannya adalah dengan fasisme.³⁵²

Sloganya memiliki arti demokrasi parlemen menyatakan bahwa semua rakyat punya hak untuk memilih dan dipilih. Namun pada kenyataannya, yang mendapatkan hak ini hanyalah para pengusaha dan orang-orang berduit. Bung Karno memberikan contoh pada Revolusi Prancis yang berusaha menggeser pengaruh raja, bangsawan, dan gereja dalam kehidupan ekonomi masyarakat, terutama dalam bidang kebijakan ekonomi. Para pengusaha atau *national bourgeois* ingin merebut kekuasaan dari tangan raja, kaum feodal, dan gereja. Namun mereka tidak mampu sebab kekuasaan yang sudah berjalan ini terlalu kuat. Maka mereka pun menggunakan tenaga rakyat jelata atau *vierde stand*, dengan cara membakar hati mereka dengan semboyan-semboyan revolusi yang termasyhur: “*Liberte! Egalite! Fraternite*” Kemerdekaan! Persamaan! Persaudaraan.

Rakyat yang terbakar ini menjadi kuda dari pengusaha untuk merebut kekuasaan dari tangan raja dan gereja. Setelah kekuasaan didapatkan, maka diangkatlah slogan bahwa semua orang boleh masuk parlemen. Semua orang punya hak memilih dan dipilih. Namun dalam hal ini rakyat jelata tidak mungkin masuk menjadi anggota parlemen, sebab yang memegang media, mengeluarkan majalah, menerbitkan surat-surat kabar, dan alat-alat propaganda lainnya adalah para pengusaha. Dalam

³⁵²*Ibid.*, hlm. 220-224

praktiknya, kehadiran parlemen pada saat itu semakin menguatkan dan menubumbuhsurkan kapitalisme di Eropa. Para pengusaha dan pemilik modal yang menentukan siapa yang akan masuk dalam parlemen dengan dukungan dan propaganda yang mereka lakukan.

Di negeri-negeri yang menganut paham *politieke democratie*, kata Bung Karno dalam buku “Di Bawah Bendera Revolusi” seperti Prancis, Inggris, Amerika, Belgia, Nederland, Swedia, Norwegia, dan lainnya, maka disitulah tumbuh subur kapitalisme. Demokrasi politik itu belum mencukupi, demokrasi politik itu masih perlu dikompletkan lagi dengan demokrasi ekonomi.³⁵³

Namun ketika pengaruh kaum buruh menguat dan mampu menguasai parlemen, maka demokrasi parlemen tidak dijalankan. Kapitalisme menggunakan alat fasisme. Tidak diberikan kesempatan kepada semua orang untuk menjalankan demokrasi, tidak diberi kesempatan kepada kaum buruh untuk mengirimkan wakilnya ke parlemen, kekuasanya ada di tangan diktator. Entah diktator itu namanya Hitler, Mussolini, Franco, atau yang lainnya. Ketika kita telah melihat cacat produk kapitalisme, melihat cacat demokrasi parlemen, kata Bung Karno, maka kita memikul kewajiban untuk menyelenggarakan satu masyarakat yang adil dan makmur, bukan masyarakat kapitalisme. Bung Karno mengajak rakyat untuk meninggalkan alam demokrasi liberal dan

³⁵³ Ir. Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi I*, (Jakarta; Yayasan Bung Karno. Cetakan Kelima, Juni 2005) hlm. 583

demokrasi parlemen. Sudah seharusnya rakyat Indonesia menyusun demokrasi di atas kepribadian bangsa Indonesia sendiri.

“Demokrasi yang harus kita jalankan adalah demokrasi Indonesia, membawa kepribadian Indonesia sendiri. Demokrasi bagi kita sebenarnya bukan sekadar satu alat teknis, tapi satu alam jiwa pemikiran dan perasaan kita. Tetapi harus bisa meletakkan alam jiwa dan pemikiran kita itu di atas kepribadian kita sendiri, di atas penyelenggaraan cita-cita satu masyarakat yang adil dan makmur”³⁵⁴

Demokrasi yang dimaksudkan oleh Bung Karno adalah demokrasi politik dan ekonomi yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Demokrasi politik dan ekonomi, kata Bung Karno, adalah satu-satunya demokrasi yang boleh dituliskan di atas bendera partai, ditulis dalam aksara-aksara api, dan dapat ditegakkan di seluruh negeri. Dengan demokrasi politik dan ekonomi rakyat Indonesia dapat tegak berdiri dan mandiri yang semua urusannya diatur oleh rakyat, dengan rakyat, dan untuk rakyat. Urusan ditangani oleh rakyat, baik politik, diplomasi, kerja, seni, kultur, dan berbagai urusan lainnya, terutama ekonomi benar-benar ditangani oleh rakyat, dan tidak dimonopoli oleh satu perusahaan atau kelompok tertentu yang secara kapitalistis menguntungkan beberapa orang tertentu saja.

“Demokrasi kita haruslah demokrasi baru, demokrasi sejati, demokrasi yang sebenar-benarnya pemerintahan rakyat. Bukan “demokrasi” *ala* Eropa dan Amerika yang hanya suatu “portret dari pantatnya” demokrasi politik sahaja, bukan pun demokrasi yang memberi kekuasaan 100% pada rakyat di dalam urusan politik sahaja, tetapi suatu demokrasi politik dan ekonomi

³⁵⁴Pidato Bung Karno pada kursus Pancasila di depan kader-kader Pancasila pada tanggal 22 Juli 1958 di Istana Negara, Jakarta. Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, (Yogyakarta; Media Pressindo, Cetakan Keempat, 2019) hlm. 247

yang memberi 100% kecakrawartian pada rakyat jelata di dalam urusan politik dan urusan ekonomi”³⁵⁵

Model demokrasi seperti ini, menurut Soekarno, hanya bisa timbul dari rasa nasionalisme kerakyatan yang kuat dan penuh dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, dan mampu menolak berbagai macam bentuk kapitalisme, imprealisme, sifat *keburjuisan* dan keningratan . Bung Karno menamakan nasionalisme kerakyatan dengan nama sosio-nasionalisme, dan menurutnya, hanya sosio-nasionalisme saja yang dapat melahirkan sosio-demokrasi.

“Inilah demokrasi sejati yang kita cita-citakan, dan yang saya sebutkan dengan nama baru sosio-demokrasi. Inilah demokrasi tulen yang hanya bisa timbul dari nasionalisme Marhaen, dari nasionalisme yang di dalam batinnya sudah mengandung kerakyatan tulen, yang anti tiap-tiap macam kapitalisme dan imprealisme walupun dari bangsa sendiri, yang penuh rasa keadilan dan rasa kemanusiaan yang menolak tiap-tiap sifat *keburjuisan* dan keningratan. Nasionalisme kerakyatan yang saya sebutkan pula dengan nama baru sosio-nasionalisme. Hanya sosionalisme bisa melahirkan sosio-demokrasi, nasionalisme lain tidak bisa dan tidak akan melahirkan sosio-demokrasi”³⁵⁶

Penjabaran lebih lanjut tentang Sila Keempat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pada pembukaan UUD 1945 bahwa, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”

Sila keempat ini menjadi asas tata pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Atas dasar tersebut maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Lebih lanjut pada pasal

³⁵⁵Soekarno, “Mencapai Indonesia Merdeka” *hlm.* 320.

³⁵⁶*Ibid.*, *hlm.* 321

1ayat 2 UUD 1945 ditegaskan bahwa demokrasi Indonesia menganut dua prinsip sekaligus, yaitu demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum); bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara itu, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.³⁵⁷

Sistem permusyawaratan dan keterwakilan rakyat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang sebagai berikut.³⁵⁸

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

³⁵⁷Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, *Empat Pilar MPR RI* (Jakarta; Sekretariat Jenderal MPR RI, Cetakan Ketujuh, 2017) hlm. 72

³⁵⁸ Dikutip dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> pada hari Sabtu, 13 Maret 2021 jam 17.40 WIB.

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-undang Dasar.

Hak dan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam merancang, membahas, dan mengesahkan Undang-Undang baru diatur dalam UUD 1945 Pasal 20³⁵⁹, yang menyatakan

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

³⁵⁹ [Dikutip dari https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945](https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945) pada hari Sabtu, 13 Maret 2021 jam 16.20

- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR memungkinkan untuk diubah selama memenuhi syarat, yaitu apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPR, dan disetujui oleh 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 31³⁶⁰ UUD 1945.

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-

³⁶⁰ [Dikutip dari https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945](https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945) pada hari Sabtu, 13 Maret 2021 jam 16.10

kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Semua rangkaian pasal ini menunjukkan tentang sebuah sistem berdemokrasi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang telah diatur secara rinci dan sistematis. Rakyat menjadi kekuatan utama, berdasarkan asas perwakilan dan musyawarah, dijalankan dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan.

e. Prinsip Keadilan

Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi melihat bahwa Keadilan adalah tonggak kehidupan bermasyarakat. Sebuah peradaban akan tegak selama keadilan masih ditegakkan. Namun bila keadilan tidak lagi diindahkan dan yang berkembang adalah kezaliman, maka peradaban itu akan jatuh, pimpinannya akan tumbang, sementara masyarakatnya akan dipenuhi kesengsaraan. Sa`īd Nursi juga menyatakan bahwa keadilan adalah salah

satu di antara empat *maqashid* al-Quran, yaitu: Tauhid, Nubuwwah, Kebangkitan, dan Keadilan.³⁶¹

Maka dalam al-Quran sangat banyak ditekankan soal keadilan ini. Seperti yang disebutkan dalam surah al Maidah:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*³⁶²

Nursi menegaskan bahwa keadilan adalah pilar utama mewujudkan sebuah negara madani yang modern. Prinsipnya ada lima, yaitu: sandaran negara adalah kebenaran, bukan kekuatan. Karakter utamanya: keadilan dan keseimbangan yang menumbuhkan kedamaian dan menghilangkan permusuhan. Tujuannya adalah keutamaan, bukan kepentingan. Keutamaan akan melahirkan cinta dan kedekatan, lalu dari sini akan muncul kebahagiaan dan hilangnya kebencian. Peraturannya dalam kehidupannya adalah tolong menolong dan saling mendukung. Pelayanannya kepada masyarakat adalah membawa petunjuk, berusaha

³⁶¹ Said Nursi, *Al Kalimât*, hlm. 525

³⁶² QS. Al Maidah: 8

meningkatkan kemakmuran yang dipimpin, disamping usaha untuk menjadikan hati bercahaya dengan amalan seharusnya ia lakukan.³⁶³

Nursi menyorot keburukan politik bebas nilai, yang dihiasi oleh ketidakadilan dan rela mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan pribadi dan kelompok, bahkan lebih mendahulukan kepentingan segelintir orang-orang zalim daripada mayoritas masyarakat.³⁶⁴ Nursi menegaskan kembali tentang peringatan al-Quran yang melarang praktek ketidakadilan dalam bentuk apapun. Al-Quran mengingatkan bahwa tidak boleh mengorbankan hidup satu orang untuk kepentingan segelintir orang, bahkan untuk kepentingan satu dunia ini sekalipun. al-Quran banyak menyatakan siapa yang membunuh satu orang maka seperti membunuh orang satu dunia.

Pada prinsip keadilan ini, Said Nursi dan Soekarno secara umum sepakat bahwa keadilan adalah tonggak utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara secara khusus, kajian Said Nursi tentang keadilan lebih menekankan kepada kesetaraan di dalam hukum, sementara Soekarno lebih menguatkan kesetaraan di dalam ekonomi. Dalam pandangan Soekarno, sila kelima dalam Pancasila ini pada prinsipnya menegaskan bahwa seharusnya tidak ada kemiskinan di negara Indonesia. Negara ini tidak hanya memiliki demokrasi politik, tapi juga demokrasi ekonomi. Indonesia harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur bagi

³⁶³ Said Nursi, *Al Kalimât*, hlm. 841

³⁶⁴ Said Nursi, *Al Kalimât*, hlm. 834

seluruh rakyat Indonesia. Menurut Soekarno, keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila ini menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi, atau apa yang disebut Soekarno sebagai prinsip *rechtvaardigheid*. Yakni, bahwa persamaan, emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki bangsa ini bukan hanya di bidang politik, melainkan juga di bidang perekonomian”³⁶⁵

Di dalam penyelenggaraan masyarakat adil dan makmur sudah seharusnya semuanya memberikan tenaganya. Insinyur-insinyur memberi tenaganya, dokter memberi tenaganya, tukang gerobak, ahli ekonomi, ahli dagang, ahli pertahanan, semuanya memberi tenaganya. Beragam memang macamnya, tetapi semuanya harus berubah harmoni, menyusun masyarakat adil dan makmur dengan dasar Pancasila.³⁶⁶ Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Tidak ada *exploitation de l'homme par l'homme* (Eksplorasi manusia oleh manusia). Semuanya berbahagia, cukup sandang, cukup pangan.³⁶⁷

Hal senada disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya, bahwa keadilan sosial ialah sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada

³⁶⁵Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, *Empat Pilar MPR RI* (Jakarta; Sekretariat Jenderal MPR RI, Cetakan Ketujuh, 2017) hlm. 79

³⁶⁶Soekarno, *Pantja Sila Dasar Negara...*, hlm. 171

³⁶⁷*Ibid.*, hlm. 172

penghisapan. Semuanya berbahagia, cukup sandang, cukup pangan, “*gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja*”³⁶⁸

Keadilan sosial adalah tujuan perwujudan utama dari keempat sila sebelumnya. Dalam pembukaan UUD 1945, sila kelima ini diungkapkan dengan kalimat “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Prinsip keadilan sosial diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan demikian, prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat.³⁶⁹

Mengantarkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan cita-cita dan amanah dari UUD 1945. Pada alinea pembukaan UUD disebutkan, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

³⁶⁸Pidato Bung Karno pada kursus Pancasila di depan kader-kader Pancasila pada tanggal 3 September 1958 di Istana Negara, Jakarta. Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, (Yogyakarta; Media Pressindo, Cetakan Keempat, 2019) hlm. 253

³⁶⁹Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, *Empat Pilar MPR RI* (Jakarta; Sekretariat Jenderal MPR RI, Cetakan Ketujuh, 2017) hlm. 81

Penjabaran lebih lanjut Sila Kelima dalam UUD 1945 tentang keadilan di ekonomi, agama, hukum, dan perhatian dari negara diatur dalam beberapa pasal dalam UUD 1945 sebagai berikut. Dalam hal ekonomi, disebutkan dalam pasal-pasal berikut, bahwa:

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang

Pasal 23 E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Keadilan sosial juga terwujud pada kesamaan setiap warga di hadapan hukum. Keadilan ini terwujud pada kewajiban setiap warga untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak dan ikut serta dalam upaya bela negara.

Hal ini seperti terwujud pada Pasal 27, bahwasanya

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang terkait dengan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat diatur dalam UUD 1945 Pasal 28, bahwasanya:

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Negara juga memberikan jaminan keadilan kepada setiap warga untuk mempertahankan hidup, mendapat pendidikan yang baik, dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Di hadapan hukum semua warga adalah sama. Demikian pula kesempatan masuk dalam pemerintahan dan mendapatkan upah yang layak atas pekerjaannya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Dalam hal beribadah, setiap warga punya hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Punya hak memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kepercayaan, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Seperti tertuang dalam pasal berikut:

Pasal 28E

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Setiap warga negara juga mendapatkan jaminan keadilan dalam berkomunikasi, memperoleh informasi dan mengolahnya untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam hal beragama, negara juga memberikan kemerdekaan kepada setiap orang untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai agama masing-masing. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 29, bahwa:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Penjelasan ringkas perbandingan pemikiran Badi'uzzamān Sa'īd

Nūrsi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2 Perbandingan Pemikiran Said Nursi Dengan Pemikiran Soekarno

No.	Prinsip Pemikiran	Perbandingan Pemikiran Badi'uzzamān Sa'īd Nūrsi dan Presiden Soekarno	Fokus Pemikiran
1.	Prinsip Ketuhanan	Agama dan Negara memiliki hubungan erat. Setiap warga negara harus beragama	<p>Secara khusus, agama yang dimaksudkan Badi'uzzamān Sa'īd Nūrsi adalah Islam, sementara yang dimaksudkan adalah semua agama dan bentuk pemujaan.</p> <p>Dasar pemikiran Nursi adalah kewajiban bertauhid dan keyakinan kepada Allah Swt yang telah menciptakan dan mengatur alam semesta.</p> <p>Sementara dasar pemikiran Soekarno tentang pentingnya beragama adalah naluri dan budaya pemujaan yang ada dalam kehidupan rakyat Indonesia</p>
2.	Prinsip Kemanusiaan	Rasa kemanusiaan yang terwujud pada usaha menjunjung tinggi nilai-nilai harga diri, harkat dan martabat setiap individu masyarakat, dan membebaskan rakyat dari perbudakan, penindasan dan kezaliman, saling menghormati antara sesama, menjadi landasar dari nasionalisme dan tegaknya sebuah negara.	<p>Menurut Nursi, rasa kemanusiaan adalah usaha memperhatikan hak asasi dan kebebasan hidup setiap manusia, yang berlandaskan pendidikan dan pengetahuan, sehingga setiap orang tau batas-batasnya dalam kehidupan. Ia harus berdiri di atas pondasi kebenaran abadi, yaitu: persatuan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan keberadaban</p> <p>Soekarno berpandangan bahwa rasa kemanusiaan menjadi sebab tumbuhnya kebersamaan dan toleransi di hati seluruh bangsa Indonesia. Sebagai sebuah keluarga tidak mungkin hidup tanpa rasa kemanusiaan. Rasa</p>

			<p>nasionalisme tanpa kemanusiaan akan melahirkan chauvinisme. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab juga menyiratkan makna tentang komitmen bangsa untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan universal.</p>
3.	Prinsip Persatuan	<p>Persatuan antara seluruh elemen adalah pilar tegaknya sebuah bangsa, dan akan menjadi kuat bila didukung oleh rasa nasionalisme dan paham kebangsaan yang kuat.</p> <p>Prinsip kebangsaan sebagai pemersatu dalam konsep negara tidak bertentangan dengan cita-cita agama tentang persaudaraan seluruh manusia,</p>	<p>Menurut Nursi Nasionalisme dan perasaan memiliki bangsa seperti ini sangat penting untuk menjaga keutuhan sebuah bangsa sesuai batasan teritorial yang telah ditentukan. Nasionalisme menjadi benteng dan perisai untuk memperkuat persaudaraan Islam. Nursi menentang setiap usaha yang mempertentangkan antara agama dan negara. Ia memandang bahwa identitas nasionalisme akan lebih baik dengan identitas keislaman.</p> <p>Adapun menurut Soekarno Persatuan Indonesia ialah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan ideologi yang mendiami wilayah Indonesia, bersepakat menyatakan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa</p>
4.	Prinsip Permusyawaratan	<p>Musyawahar adalah cara untuk mempertautkan pemikiran antara manusia dan upaya mengikutkan rakyat dalam kehidupan bernegara.</p>	<p>Menurut Nursi, Musyawarah adalah kunci kepemimpinan umat dan kebahagiaan sosial. Melalui proses musyawarah yang benar, berdasar pada hakikat kebenaran, argumentasi, dan berfikir rasional, umat Islam dapat menghadapi dan menjawab tantangan peradaban modern</p>

			Menurut Soekarno, kedaulatan rakyat merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama dalam bernegara. Sebagai masyarakat Indonesia – dengan melihat kultur dan sejarahnya— kedaulatan merupakan salah satu alat yang paling cocok dalam sistem bernegara.
5.	Prinsip Keadilan	Said Nursi dan Soekarno secara umum sepakat bahwa keadilan adalah tonggak utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara secara khusus, kajian Said Nursi tentang keadilan lebih menekankan kepada kesetaraan di dalam hukum, sementara Soekarno lebih menguatkan kesetaraan di dalam ekonomi.	Menurut Nursi, keadilan adalah pilar pokok dalam beragama dan bernegara. Ia menyatakan bahwa keadilan adalah salah satu di antara empat Maqashid Al Quran, yaitu: Tauhid, Nubuwwah, Kebangkitan, dan Keadilan Sementara menurut Soekarno keadilan sosial dalam sila kelima ini menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Yakni, bahwa persamaan, emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki bangsa ini bukan hanya di bidang politik, melainkan juga di bidang perekonomian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badi`uzzamān Sa`īd Nursi (1293– 1379 H/1877 – 1960 M) adalah salah satu di antara ulama kontemporer dan pendidik umat yang memiliki pengaruh besar bagi Turki dan negara-negara Islam lainnya melalui kitab *Rasāil An-Nūr* dan dakwah yang dibawa oleh para Thullabunnūr. Ia lahir dari keluarga berilmu di Anatolia Timur, memiliki latar belakang keilmuan yang mumpuni sehingga digelar “Badiuzzaman” atau keajaiban zaman oleh para ulama pada zamannya.
2. Pemikiran Nursi dapat dipetakan ke dalam tiga periode yaitu: Said Qadim (Old Said, tahun 1876-1913), Said Jadid (New Said, tahun 1926-1950), dan Said Ats-Tsalits (Third Said, 1950-1960). Pemetaan ini dilakukan oleh Said Nursi yang sendiri yang ia jelaskan dalam berbagai bagian dalam *Rasāil An-Nūr*. Pemetaan pemikiran ini dilihat dari metode pendekatan yang digunakan dalam menyikapi permasalahan umat sesuai dengan kondisi sosial politik yang ada saat itu.

Sa`id Nursi hidup di saat Dinasti Turki Utsmani semakin melemah dan tua, karena sebab-sebab internal dan eksternal di bawah pimpinan Sultan Abdul Hamid dan beberapa sultan setelahnya. Corak gagasan

pemikiran revolusionis para tokoh intelektual Turki yang berkembang saat itu dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu Westernis, Islamis, Turkis, Utsmanis. Kelompok Westernis berpandangan bahwa untuk menuju kemajuan Turki harus mentransformasi nilai-nilai moral dan budaya Barat. Kelompok Islamis menggaungkan gagasan tentang kembali kepada *shari'ah* sebagai dasar dari konstitusi negara. Kelompok Utsmanis mengedepankan gagasan bahwa semua warga negara, tak peduli apa pun agama dan bahasanya, akan menjadi warga negara yang baik dengan hak-hak yang sama dalam negara konstitusional yang baru. Sementara pemikiran Turkis menggulirkan ide nasionalisme Turki yang terinspirasi oleh gerakan Pan Turkism Rusia. Pada masa Said Qadim, Nursi sempat terlibat dalam gerakan ini dan menjadi anggota organisasi *Ittihad Muhammadi* yang bercorak Islamis. Namun pada periode selanjutnya ia menarik diri dan lebih memfokuskan pada usaha merawat dan menjaga iman anak bangsa melalui tulisan-tulisannya dalam *Rasail Nur*

3. Dalam pandangan Nursi, *Siyāsah Syar'iyyah* meliputi 7 asas utama, yaitu: Tauhid, Musyawarah, Kebebasan, Keadilan, Persamaan, Nasionalisme dan Jihad. Dalam kaitannya dengan prinsip dasar Pancasila, Nursi menegaskan tentang pentingnya menghadirkan iman *tahqiqi* dalam kehidupan, menunjang tinggi kebebasan yang diikat oleh hukum syariat, menguatkan rasa nasionalisme di hati setiap individu, mengedepankan musyawarah dalam setiap keputusan dan

menjauhi sikap diktator, serta berusaha menegakkan keadilan di tengah masyarakat baik dalam ekonomi, politik, maupun sosial di bawah naungan negara republik yang menjunjung tinggi nilai keagamaan.

Dalam hal isu-isu dan agenda kemanusiaan, Badi'uzzamān Sa'id Nursi dengan Presiden Soekarno memiliki perhatian yang sama besar tentang kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh moral yang luhur dan beradab, menolak semua bentuk *despotisme*, *chaunivistik*, dan *ekslusivisme* sempit yang muncul dari arogansi kesukubangsaan semata.

Dalam hal visi dan ide persatuan, kedua tokoh ini sama-sama mengkaji tentang pentingnya persatuan dan rasa cinta tanah air dan bangsa. Nasionalisme dan perasaan memiliki bangsa seperti ini sangat penting untuk menjaga keutuhan sebuah bangsa sesuai batasan teritorial yang telah ditentukan. menggunakan kebangsaan sebagai pemersatu untuk menjadi salah satu dari dasar negara

Nursi yakin bahwa musyawarah merupakan mekanisme untuk mengambil keputusan yang besar dalam berbagai urusan. Melalui proses musyawarah yang benar, berdasar pada hakikat kebenaran, argumentasi, dan berfikir rasional, umat Islam dapat menghadapi dan menjawab tantangan peradaban modern ini. Bagi masyarakat Indonesia, demokrasi telah menjadi sebuah fondasi kebangsaan yang tegak di atas dasar kekeluargaan dan permusyawaratan.

Dalam prinsip keadilan ini, Said Nursi dan Soekarno secara umum sepakat bahwa keadilan adalah tonggak utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara secara khusus, kajian Said Nursi tentang keadilan lebih menekankan kepada kesetaraan di dalam hukum, sementara Soekarno lebih menguatkan kesetaraan di dalam ekonomi.

B. Saran

1. Mengadakan kajian pemikiran Badi`uzzamān Sa`īd Nursi secara massif dalam bentuk seminar, symposium, dan forum-forum ilmiah, untuk menggali nilai-nilai pemikiran keislaman dalam *Kulliyāt Rasā'il An-Nūr* yang telah memberikan pengaruh besar bagi masyarakat Turki dan bagi bangsa-bangsa muslim pada umumnya.
2. Mendalami kajian siyāsah syar'iyyah dan penerapannya dalam pembentukan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat, khususnya terkait dengan tatanan sosial-politik dan pemerintahan
3. Memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip siyāsah syar'iyyah dan nilai-nilai keislaman dalam membuat kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim Ahmad Abdul Azhim, “*Daur Al Akhlaq fi Taghyir Al Waqi Al Mu'ashir min Khilal Fikr Al Imam An Nursi*”, Makalah disampaikan dalam Simposium Internasional Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi dan Pengaruhnya Dalam Persatuan Umat Islam, diselenggarakan oleh The Istanbul Foundation for Science and Culture tanggal 26-28 September 2004 di Istanbul, Turki.
- Adardwr, Mustafa, 2017, “Mahathaat Baarizah min At Tarikh Al Mu'ashir wa Atsaruhu fi Hayat An Nursi wa Madrasatuhu Al Fikriyyah” *Journal Al-Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. XI, Januari 2017, Istanbul: The Istanbul Foundation for Science and Culture.
- Ajmal, Mohammad, 2014, “Globalization and The Thought of Unity In Diversity of Badi'uzzamān Sa'īd Nursi In The Light of His Magnum Opus Risala-i Nur.” *Indonesia Journal of Islam and Muslim Societies*. Vol. IV, Juni 2014, Salatiga: IAIN Salatiga.
- Akgündüz, Ahmet, 2013, “*Beduazzaman Said Nursi ve Ilmi Şahsiyeti*. Istanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı.
- Ali, Orkhan Muhammad., 2016, *Sa'id Nursi Rajulul Qadri*, Terjemah Ihsan Qasim As Shalihi, Kairo: SozlerPublications.
- Amin, Edi., 2017, *Dakwah Komunitarian Ummatic: Studi Konsepsi Dakwah Said Nursi dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Transwacana Press.
- Aziz, Yahya Mulyana dan Syarief Hidayat, 2016, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. 1.
- Bungin, Burhan., 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Buselhem, Al Arabi, 2012, “Min Al Usus Al Fikriyyah wa Al Hadhariyyah fi Kitabah An Nursi”. *Journal Al-Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. V, Januari 2012, Istanbul: The Istanbul Foundation for Science and Culture
- Cengel, Yunus., 2019, *Hukm Az Zamân*, Kairo: Sözlcr Publications.
- Cicek, Mehmed Halil, 2011, “Malāmih Tajaddud Khithāb An Nursi fi Muwājahati Tahaddiyatil Ashri” *Journal Al-Nur Academic Studies on Thought and*

- Civilization*. Vol. VI, Juli 2011, Istanbul: The Istanbul Foundation for Science and Culture.
- Dahlawi, Waliyullah, Ad., 2005, *Hujjatullah Al Balighah 1&2*, Beirut: Darul Jiil.
- Djidel, Amar, 2017, “Ghiyāb Al ‘Amal Al Ijābi au Taghyiibuhu fi Hayāti Al Muslimīna Al Mu’ashirah – Al Asbāb wa Al ‘Ilāj; Dirasah di Rasāil An Nūr li Badī’izzaman Sa’id An Nursi”. *Journal Al-Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. XVI, Juli 2017, Istanbul: The Istanbul Foundation for Science and Culture
- Erdogan, Recep Thayyib, 2011, “Sa’id An Nursi Khizanatun Tantazhirul Iktisyaf”, *Journal Al-Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. VI, Juli 2011, Istanbul: The Istanbul Foundation for Science and Culture.
- Fadel, Kamil. Tatari, 2016, “Political Anlysis Of Bediuzzaman Sa’id Nursi’s Damascus Sermon”. *Jurnal Humanities And Social Sciences Review*, Desember 2016. CD-ROM. ISSN: 2165-6258. <https://www.researchgate.net/publication/312016279>.
- Faiz, Muhammad, 2017. “Risalah Nur dan Gerakan Tarekat di Turki; Peran Sa’id Nursi Pada Awal Pemerintahan Republik.” *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*. Vol. XIV, No. 1 Januari 2017.
- Furchan, Arief dan Agus Maimun., 2005, *Study Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali, Abu Hamid Al., *Ihya Ulumiddin*, Beirut: t.p, t.t
- Hamid, Muhsin Abdul, 2012, “Min Ma'alim At Tajdid 'Inda An Nursi” *Journal Al-Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. V, Januari, Istanbul: The Istanbul Foundation for Science and Culture.
- Hamid, Zubair, 2014, “Muslim Response to The West; A Comparative Study of Muhammad Abduh and Sa’id Nursi.” *Journal of Islamic Thought and Civilization*, Vol. IV. Spring 2014.
- Hamzah Ustadi., “*Paradigma Hubungan Antara Agama Dalam Islam; Studi Pluralitas Agama dalam Risale-i Nur Karya Badiuzzaman Said Nursi*” (Disertasi Doktor) Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Harahap, Syahrin., 2011, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasbi, 2007, *Prinsip Politik Islm Menurut Said Nursi*, Palembang: UIN Radeh Fatah.
- Heywood, Andrew., 2014, *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hijazi, As Saih, 2005, *Qadhaya Mu'ashirah fi Fikri Badi'izzaman Sa'id Nursi*, Terjemah Ihsan Qasim As Shalihi, Kairo: Sozler Publications.
- Hilali, Ridha, 1999, *As Saifu wa Al Hilaal; Turkiya min Ataaturk ila Erbakaan*, Kairo: Dar Asy Syuruq.
- Horkuc, Hasan., 2004 “*Said Nursi's Ideal for Human Society: Moral and Social Reform In The Risale-i Nur*”. (Disertasi Doktor) Inggris: Durham University 2004. <http://etheses.dur.ac.uk/1754/>
- Ibnu ‘Asyur, Ath Thahir Muhammad, 2016, *Maqaashid Asy Syarii’ah*, Kairo: Daar As Salaam.
- Ismail, Faisal, 2017, *Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ismail, Faisal., 2018, *Studi Islam Kontemporer; Pendekatan dan Kajian Interdisipliner*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim, Al, 1973, *I’lamul Muwaqqi’in an Rabb Al ‘Alamiin*, Beirut: Dārul Jil.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim, Al., 2013, *Ath Thuruq Al Hukmiyyah fi As Siyaasah Asy Syar’iyyah*, Kairo: Dar Ibnul Jauzi.
- Juwaini, Abul Ma’ali Abdul Malik, Al., 1401 H, *Ghiyatsul Umam fi At Tayyaatsi Az Zhulam*, tk, Al Maktabaat Al Kubraa.
- Kamsi, 2017, *Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Calpulis, Cet. II.
- Kontowijoyo, 2003, *Metodologi Sejarah, II*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lamin, Mubarak, 2015, “Al-Wahdatu wa Tadbîrul Khilāf ‘Inda Badi’izzaman Sa’id An Nursi” *Journal Al-Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. XII, Juli 2015, Istanbul: The Istanbul Foundation for Science and Culture.
- Minhaji, Akh., 2013, *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Muhammad Asy Sarbaini, “*Al Imâm Badi’uzaman Sa'id Nursi Ats Tsâ'ir wa As Siyâsi*”, makalah disampaikan dalam Simposium Internasional Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi dan Pengaruhnya Dalam Persatuan Umat Islam, diselenggarakan oleh Universitas Al Azhar Mesir dan The Istanbul Foundation for Science and Culture tanggal 26-27 Februari 2013 di Kairo, Mesir.
- Muhammad Sa’ad Abdul Majid Qasim, “*Ilâj Ahammil Musykilât Asy Siyâsiyyah wa Al Iqtishâdiyyah fi Al ‘Alam Al Islâmi min Khilal Fikr Al Imâm An*

Nursi wa Atsaruhu fi Wahdatil Ummah”, makalah disampaikan dalam Simposium Internasional Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi dan Pengaruhnya Dalam Persatuan Umat Islam, diselenggarakan oleh Universitas Al Azhar Mesir dan The Istanbul Foundation for Science and Culture tanggal 26-27 Februari 2013 di Kairo, Mesir.

- Murtala Bala Umar, dkk. “*Risalah Nur dan Gerakan Tarekat di Turki; Peran Said Nursi Pada Awal Pemerintahan Republik.*” Disampaikan dalam International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century di Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia. Tanggal 6-7 September 2015.
- Muslim, Abdul Ghafur., 2006, Survival of The Islamic Ummah, *Pakistan Journal of History and Culture*, Vol. XXVII/2. Januari.
- Nabraawi, Khadijah, An., 1998, *Daur Kulliyat Rasaail An Nuur fi Yaqzhatil Ummah*, Terjemah Ihsan Qasim As Shalihi, Kairo: Sozler Publications.
- Natsir, M., 1973, *Capita Selecta*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, Cet III.
- Nursi, Badi’uzzaman Sa’id, 2013, *Al Kalimaat*, Terjemah Ihsan Qasim As Shalihi, Terjemah Ihsan Qasim As Shalihi, Kairo: Sozler Publications.
- Nursi, Badi’uzzaman Sa’id, 2013, *Al Lama’at*, Terjemah Ihsan Qasim As Shalihi, Kairo: Sozler Publications.
- Nursi, Badi’uzzaman Sa’id, 2013, *Al Maktubaat*, Terjemah Ihsan Qasim As Shalihi, Kairo: Sozler Publications.
- Nursi, Badi’uzzaman Sa’id, 2013, *Al Malahiqa*, Terjemah Ihsan Qasim As Shalihi, Kairo: Sozler Publications.
- Nursi, Badi’uzzaman Sa’id, 2013, *Al Matsnawi Al Arabi*, Terjemah Ihsan Qasim As Shalihi, Kairo: Sozler Publications.
- Nursi, Badi’uzzaman Sa’id, 2013, *Asy Syu’aat*, Terjemah Ihsan Qasim As Shalihi, Kairo: Sozler Publications.
- Nursi, Badi’uzzaman Sa’id, 2013, *Rasail Al I’jaz*, Terjemah Ihsan Qasim As Shalihi, Kairo: Sozler Publications.
- Nursi, Badi’uzzaman Sa’id, 2013, *Shaiqalul Islam*, Terjemah Ihsan Qasim As Shalihi, Kairo: Sozler Publications.
- Nursi, Badi’uzzaman Sa’id, 2013, *Sirah Dzatiyah*, Terjemah Ihsan Qasim As Shalihi, Kairo: Sozler Publications.
- Oglo, Ahmad Daud, 2011, “Siyāsah Al ‘Alam Al Islami fi Al Qarn Al Isyirin fi Nazhar An Nursi”, *Journal Al-Nur Academic Studies on Thought and*

- Civilization*. Vol. III, Januari 2011, Istanbul: The Istanbul Foundation for Science and Culture.
- Qaradawi, Yusuf, Al, 2009, *Mūjibaat Taghyiir Al Fatwaa fi ‘Ashrinaa*, Kairo: Dar Asy Syuruq.
- Qaradawi, Yusuf, Al, 2010 *As Siyāsah Asy Syar’iyyah fi Dhau Nushûs Asy Syari’ah wa Maqāshidiha*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Qaradawi, Yusuf, Al., 2008, *Dirasah fi Maqashid Asy Syari’ah*, Kairo: Dar Asy Syuruq.
- Rafii, M. Sya’roni., 2019, *Islam di Langit Turki*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Rozak, Abdul., 2015. *Pemikiran Politik dan Gerakan Sosiokultural Kewarganegaan Kaum Intelektuan Muslim Neo Modernis Dalam Penguatan Demokrasi Dan Civil Society di Indonesia; Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (Civic Virtue)*. Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu.
- Sairi, Faridah binti Mohd., 2012 “*Metode Dakwah Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi dan Pengaruhnya di Turki*”, (Disertasi Doktor) Malaysia: Universiti Malaya.
- Salim, Ihsan Qasim, 1996., Sa’id Nursi; Pemikir & Sufi Besar Abad 20, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sano, Qutb Mustafa, 2012, “Al Alam Al Islami wa Al Gharb: Al Hiwar wa Al Fahm Al Mutabadil” *Journal Al-Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. V, Januari 2012, Istanbul: The Istanbul Foundation for Science and Culture.
- Sejarah DPR “Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia” dikutip dari <https://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr>. pada hari Senin, 15 Maret 2021 pukul 14.00.
- Siyufanof, Esteftan, 2011, “Mabādi’ Al Insaniyah wa tahaddiyat Al Ashr fi Nazhariyyat Sa’id Nursi” *Journal Al-Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. VI, Juli 2011, Istanbul: The Istanbul Foundation for Science and Culture.
- Sjadzali, Munawir., 2013, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.
- Soekarno, 2005, “Apa Sebab Turki Memisah Agama Dari Neraka” artikel yang dimuat dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Yayasan Bung Karno, Cet V.
- Soekarno, 2019, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Yogyakarta: Media Pressindo, Cet IV.

- Soekarno, 2020, *Pantja Sila Dasar Negara*, Jawa Tengah: Sabua Buku.
- Tampubolon, Ichwansyah, 2015. “Dakwah dan Modernisme Studi Terhadap Pemikiran dan Aktifitas Dakwah Bediuzzaman Sa'id Nursi.” *Jurnal Hikmah*, Vol. II No. 01 Januari.
- Tasdemir, Mikail., 1999, *Political Thought of Bediuzzaman Said Nursi*, Kuala Lumpur: The International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- Tim Riset dan Studi Islam Mesir, 2013, *Ensiklopedi Sejarah Islam Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, “Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)” dikutip dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> pada hari Sabtu, 13 Maret 2021 pukul 13.00.
- Utsman, Husain., dkk, 2017, *Sīrah Badi`uzzamān Sa`īd Nūrsi*, Makkah: Dār Lawāmi' Al Anwār.
- Uwais, Abdul Halim., 2003., *Rajul Al Iman wa At Tajdid fi Wajh Al Almaniyyah wa At Taqlid*, Kairo: Sozler Publications.
- Vahide, Sukran -, 2007, *Biografi Intelektual Badi`uzzamān Sa`īd Nursi*, Indonesia: Anatolia Prenada Media Group.
- Vahide, Sukran, 1980, *Islam In Modern Turkey*, America, State University of New York Press.
- Vahide, Sukran, 2005, *Islam in Modern Turkey; An Intellectual Biography of Bediuzzaman Said Nursi*, Albany: State University of New York Press.
- Wolf, Jonathan., 2009, *An Introduction to Political Philosoph*, New York: Oxford University Press.
- Yatim, Badri., 1985, *Soekarno, Islam, dan Nasionalisme; Rekonstruksi Pemikiran Islam*, Jakarta: Penerbit Inti Sarana Aksara.
- Yavuz, M. Hakan., 2003, *Islam Political Identity in Turkey*, New York: Oxford University Press.
- Yusuf, M. Yunan., 2015, *Tafsir Al-Quran Juz XXVII, Juz Qala Fama Khathbukum, Hikmah al Balighah (Hikmah yang menghujam)*, Jakarta: Lentera Hati.
- Za'im, Shabahuddin, 2012, “Ar Ru'yah Al Hadhariyyah min Khilal Risalah Al Iqtishad”, *Journal Al-Nur Academic Studies on Thought and Civilization*. Vol. V, Januari 2012, Istanbul: The Istanbul Foundation for Science and Culture.

Zurcher, Erik., 2003, *Sejarah Modern Turki*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Umarulfaruq Abubakar
 TTL : Tilamuta, 30 Juni 1985
 Alamat : PPTQ Ibnu Abbas Klaten. Jln Klaten Solo Km 04 Belangwetan Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah. 57436
 Twitter : @kakmuma
 FB : @kakmuma
 IG : umarulfaruq.abubakar
 YouTube : Umarulfaruq Abubakar
 Email : duakhalifah.com@gmail.com
 Website : duakhalifah.com

Riwayat pendidikan :

- S3 Universitas Islam Indonesia (2015-2021)
- S2 Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014)
- S1 Universitas Al Azhar, Kairo Mesir(2007)
- Pondok Pesantren Alkhairaat Tilamuta, Gorontalo (1997-2002)
- Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Alkhairaat Tilamuta (2002)
- Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Alkhairaat Tilamuta (2000)
- SDN I Pentadu Timur Kec. Tilamuta (1997)

Pengalaman Organisasi

- Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Orsat Kairo (2009-2011)
- Majelis Penelitian dan Pengembangan Perpustakaan Mahasiswa Indonesia Kairo (2008-2011)
- Divisi Kajian Dunia Islam Studi Informasi Alam Islami (2006-2011)
- Ketua Himpunan Keluarga dan Mahasiswa Alkhairaat Mesir (2005-2006)
- Penerjemah Resmi di Pusat Studi Sejarah, Mesir (2006-2010)
- Penerjemah Resmi di Pusat Kajian Tafsir Al-Quran, Mesir (2006-2010)

Aktifitas :

- Pengasuh PPTQ Ibnu Abbas Klaten
- Ketua Forum Maahid Qur'an Indonesia

Kompetensi Tahfiz:

- Sanad Qira'at Ashim (Riwayat Hafsh dan Syu'bah)
- Sanad Qira'at Ibnu Katsir (Riwayat Al Bazzi dan Qunbul)
- Sanad Abu Ja'far (Riwayat Ibnu Wardan dan Ibnu Jammaaz)
- Sanad Nafi (Riwayat Qalun)

Pengalaman Kegiatan Ilmiah:

- Pembicara Simposium Internasional Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi. UII, Istanbul, Turki (2021)
- Pembicara Seminar Internasional Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi. UII, Yogyakarta Indonesia (2021)
- Pembicara International Conference on Humanity Law and Sharia, IAIN Batusangkar Sumatera Barat, 2021
- Pembicara Seminar Internasional Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi. UIN Jakarta Indonesia (2019)
- Pembicara Seminar Internasional Akademisi Muda di Istanbul Turki (2017)
- Peserta Simposium Internasional Badiuzzaman Said Nursi di Istanbul Turki (2017)

Karya Terbit :

Buku:

1. Sepenggal Cerita Dari Kairo ke Istanbul
2. Jurus Dahsyat Anak Hafal Al Quran
3. Sepuluh Jurus Dahsyat Hafal Al Qur'an
4. Nikmatnya Shalat Khusus
5. 40 Kisah Mengharukan Dalam Kehidupan Rasulullah
6. Biografi Utsman bin Affan
7. Inilah Rasul Sang Penyayang

8. Dahsyatnya Ikhlas, Sabar, dan Qanaah
9. Dahsyatnya 7 Kalimat Thayyibah
10. 50 Kultum Pelembut Hati
11. Amerika di Balik Konspirasi Global
12. Ibadah Hati

Tulisan di Jurnal Ilmiah

1. Jurnal Ilmiah Pesantren / Vol 6 No 1 (2020) Peran Fikih Legal Maxim Dalam Politik Islam. (Penerapan Kaidah Maslahat Dalam Siyāsah syar'iyah)
2. Jurnal Ilmiah Pesantren Vol 3 No 1 Januari (2017): The Role Of Islam In Solving The Social Crimes